

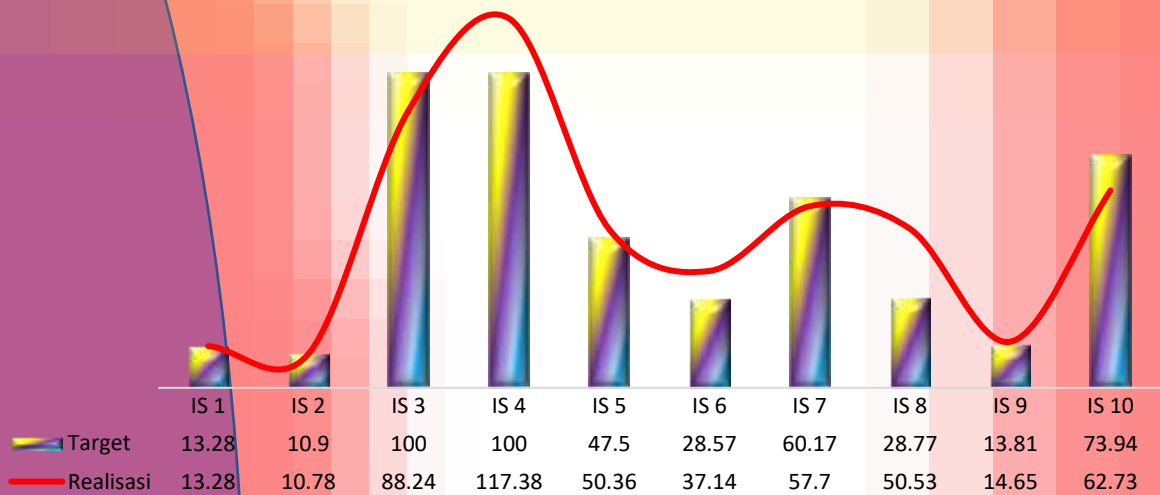


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

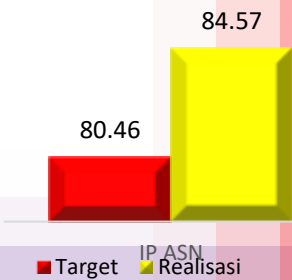


**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN
2026**

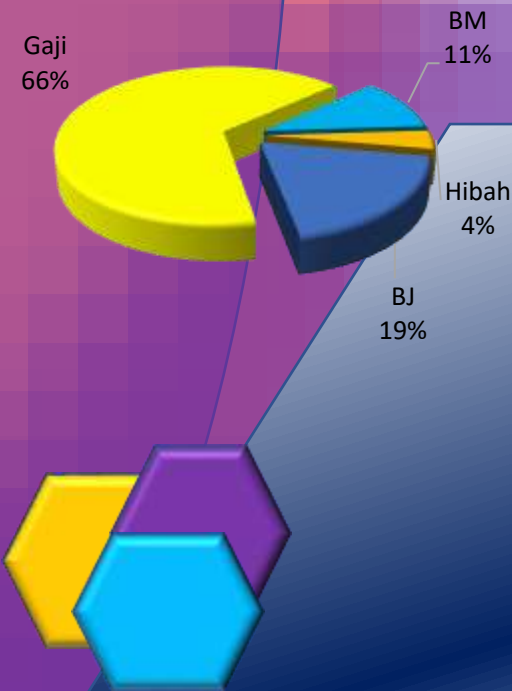
REALISASI KINERJA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025



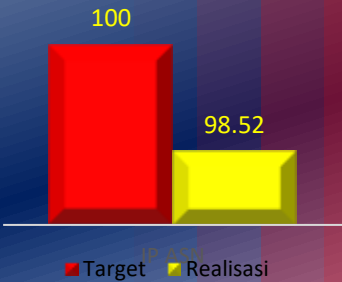
Kinerja
Indeks Profesional ASN



Struktur Belanja
Dinas Pendidikan Tahun 2025



Kinerja Keuangan
Tahun 2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, dengan izin Allah SWT Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disajikan dalam bentuk Tabel, Grafik beserta penjelasannya.

Laporan Kinerja tahun 2025 merupakan laporan kinerja transisi yang menyajikan gambaran objektif tentang tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Laporan ini mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Kinerja transisi 2025-2029. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang transparan serta bertanggung jawab dan dapat diakses oleh publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berisi capaian kinerja yang dicapai dari tahun sebelumnya dibandingkan dengan pencapaian tahun 2024 dan diseleraskan dengan perbandingan kemajuan capaian akhir Resntra serta menghitung pencapaian antara indikator kinerja dan keuangan serta pencapaian perbandingan antara efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Laporan kinerja ini juga memuat hasil analisis pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja instansi.

Dalam Laporan Kinerja ini, kami berupaya menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan agar lebih relevan, efektif, efisien, berdampak, dan berkelanjutan. Kami juga

mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan serta penyempurnaan perencanaan program dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang pendidikan di tahun mendatang.

Semoga laporan ini memberikan manfaat untuk para pihak demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.

Tanjungpinang, Maret 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. ANDI AGUNG, SE., MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196908231993031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan yang memuat informasi pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah mengenai hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran dalam satu periode tertentu. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada public sebagai bagian dari transparansi public dalam mengukur kinerja organisasi, evaluasi dan dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah Meningkatnya Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan dengan 8 indicator kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja sbb **1)** Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (APS) realisasi kinerja 88,24% dengan predikat kinerja baik **2)** Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) realisasi kinerja 117,38% dengan predikat kinerja sangat baik **3)** Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) realisasi kinerja 106,02% dengan predikat kinerja sangat baik **4)** Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) realisasi kinerja 130% dengan predikat kinerja sangat baik **5)** Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) realisasi kinerja 97,56% dengan predikat kinerja baik **6)** Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) realisasi kinerja 176,06% dengan predikat kinerja sangat baik **7)** Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi realisasi kinerja 106,08 dengan predikat kinerja ssangat baik dan **8)** Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%) dengan kinerja 84.84% dengan predikat kinerja baik.

Kata kunci : Indikator Kinerja, Realisasi Kinerja dan Predikat Kinerja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Landasan Hukum	4
1.4. Sistematika Penulisan	7
1.5. Gambaran Umum Organisasi	9
1.6. Sumber Daya Dinas Pendidikan	12
1.6.1. Sumber Daya Manusia.....	12
1.6.2. Satuan Pendidikan	16
1.6.3. Guru dan Tenaga Kependidikan	21
1.6.4. Sertifikasi Pendidik	31
1.6.5. Akreditasi Sekolah.....	34
1.6.6. Peserta Didik.....	36
1.6.7. Kelompok Umur Peserta Didik.....	42
1.6.8. Rombongan Belajar	45
1.6.9. Ruang Kelas Belajar	49
1.6.10. Ruang Perpustakaan	54
1.6.11. Laboratorium	55
1.6.12. Angka Putus Sekolah	57
1.6.13. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	58
1.6.14. Rasio Pendidik Terhadap Peserta Didik Sekolah Menengah	59
1.7. Numerasi dan Literasi	61
1.8. Iklim Inklusivitas	63
1.9. Iklim Keamanan	64
1.10. Iklim Kebhinekaan	65
1.11. Tingkat Kepuasan DUDI Terhadap Budaya Kerja SMK	66
1.12. Sumber Daya Aset	67
1.13. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	68
1.14. Kependudukan	69
1.15. Indeks Profesional ASN	75
1.16. Indeks Kepuasan Masyarakat	77
1.17. Penilaian Kepatuhan	78
1.18. Isu Strategis	81
 BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	83
2.1. Telaah Visi dan Misi	83
2.1.1. Visi Misi 2021-2026	83
2.1.2. Visi Misi 2025-2029.....	87
2.2. Rencana Kerja.....	93
2.2.1. Rencana Kerja 2025 Triwulan I, II dan III	93
2.2.2. Rencana Kerja 2025 Triwulan IV	97
2.3. Perjanjian Kinerja	100

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	108
	3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	108
	3.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD 2021-2026	110
	3.3. Pengukuran dan Analisa Indikator Kinerja Utama	114
	3.3.1. Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD 2021-2026	114
	3.3.2. Capaian Kinerja Indikator Utama Perangkat daerah	140
	3.4. Capaian Kinerja Daerah RPJMD 2025-2029	217
	3.5. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja utama	220
	3.5.1 Capaian Kinerja Indikator Daerah 2025-2029	220
	3.5.2. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	238
	3.5.3. Akuntabilitas Kinerja	319
	3.5.3.1. Kinerja IKU Dinas Pendidikan	319
	3.5.3.2. Capaian efesiensi dan Efektivitas Program/kegiatan	322
	3.6. Kinerja Anggaran	323
BAB IV	PENUTUP	325
Lampiran	Realisasi Kinerja Rencana Aksi Tahun 2026	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	17
Tabel 1.2	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Kepegawaian Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa (SMA/SMK/SLB) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	24
Tabel 1.3	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Kepegawaian Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	25
Tabel 1.4	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	26
Tabel 1.5	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Khusus Negeri (SLBN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	27
Tabel 1.6	Jumlah Guru Bersertifikasi Pendidik Pada SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	32
Tabel 1.7	Jumlah Guru Bersertifikasi Pendidik Pada SMAS/SMKS/SLBS di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	33
Tabel 1.8	Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	37
Tabel 1.9	Hasil Penilaian IP PNS Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	76
Tabel 1.10	Hasil Penilaian IP PPPK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	76
Tabel 1.11	Hasil Penilaian IP ASN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	77
Tabel 1.12	Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sd 2025.....	78
Tabel 1.13	Hasil Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	80
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Urusan Bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026.....	86
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Urusan Bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029.....	92
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	94

Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	97
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Renstra 2021-2026).....	103
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Transisi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Rentra 2025-2029).....	106
Tabel 2.7	Program dan Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	107
Tabel 3.1	Predikat nilai capaian kinerja.....	109
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	110
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Daerah Urusan pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (RPJMD 2021-2026).....	111
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	112
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	113
Tabel 3.6	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025	115
Tabel 3.7	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Rata Rata lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	122
Tabel 3.8	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025	125
Tabel 3.9	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	130
Tabel 3.10	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025	133
Tabel 3.11	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	139
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Kinerja SMA/MA/SMK Negeri Yang Terakreditasi Minimal B Tahun 2025.....	141
Tabel 3.13	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	143
Tabel 3.14	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	148

Tabel 3.15	Analisa Capaian Kinerja SMKN yang Terevitalisasi Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	150
Tabel 3.16	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja SMK Negeri Terevitalisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	151
Tabel 3.17	Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja SMKN Terevitalisasi Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	154
Tabel 3.18	Jumlah Lulusan Siswa SMAN Pada PTN di Provinsi Kepulauan Riau.....	156
Tabel 3.19	Analisa Pencapaian Kinerja Lulusan SMA Yang Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi/Kedinasan Tahun 2025.....	156
Tabel 3.20	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Lulusan SMA ke PTN/Sekolah Kedinasan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	161
Tabel 3.21	Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Lulusan SMA Yg Melanjutkan Ke PTN/Sekolah Kedinasan Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	163
Tabel 3.22	Analisa Pencapaian Kinerja Penyerapan Lulusan SMK yang Bekerja di IDUKA Tahun 2025.....	165
Tabel 3.23	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Lulusan SMK Yang Bekerja di IDUKA Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024.....	170
Tabel 3.24	Analisa Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Capaian Kinerja Lulusan SMK Yang Bekerja di IDUKA Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	172
Tabel 3.25	Analisa Pencapaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan yg Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025.....	174
Tabel 3.26	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mengikuti Diklat Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025.....	178
Tabel 3.27	Analisa Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Capaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	179
Tabel 3.28	Analisa Pencapaian Kinerja Meningkatnya Akses Pendidikan Tahun 2025.....	180
Tabel 3.29	Analisa Capaian Kinerja Indikator Sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	181
Tabel 3.30	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	189
Tabel 3.31	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja APK SMA/MA/SMK Di Provinsi Kepulauan Riau	

	Tahun 2025.....	190
Tabel 3.32	Analisa Pencapaian Kinerja Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	191
Tabel 3.33	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	192
Tabel 3.34	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025.....	199
Tabel 3.35	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja APM SMA/MA/SMK Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	200
Tabel 3.36	Analisa Pencapaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar SLB (APK SLB) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	201
Tabel 3.37	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar SLB (APK) SLB Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	202
Tabel 3.38	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025.....	206
Tabel 3.39	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja APK SLB Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025....	207
Tabel 3.40	Jumlah Siswa dan Ruang Kelas Belajar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	209
Tabel 3.41	Analisa Capaian Kinerja Rasio Siswa Perkelas Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	209
Tabel 3.42	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Siswa Perkelas SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025.....	215
Tabel 3.43	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Rasio Siswa Perkelas SMA/SMK Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	216
Tabel 3.44	Capaian Kinerja Daerah Urusan pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (RPJMD 2025-2029).....	217
Tabel 3.45	Perjanjian Kinerja Transisi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Rentra 2025-2029).....	218
Tabel 3.46	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	221
Tabel 3.47	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025 (RPJMD 2025-2029).....	223
Tabel 3.48	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	228

Tabel 3.49	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025 (RPJMD 2025-2029).....	231
Tabel 3.50	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Rata Rata lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (RPJMD 2025-2029).....	237
Tabel 3.51	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025 (Renstra Disdik Kepri 2025-2029).....	241
Tabel 3.52	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Renstra Disdik Prov Kepri 2025-2029).....	247
Tabel 3.53	Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas (4-18 Tahun) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	248
Tabel 3.54	Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (4-18 Tahun) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	248
Tabel 3.55	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025 (Renstra Disdik Kepri 2025-2029).....	250
Tabel 3.56	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Angka Partisipasi Sekolah SLB (APS SLB) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Renstra Disdik Prov Kepri 2025-2029).....	256
Tabel 3.57	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025	265
Tabel 3.58	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	267
Tabel 3.59	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	276
Tabel 3.60	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	279
Tabel 3.61	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	287

Tabel 3.62	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	289
Tabel 3.63	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025..	299
Tabel 3.64	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	301
Tabel 3.65	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	307
Tabel 3.66	Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Sasaran Kinerja Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkwalifikasi Tinggi Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	309
Tabel 3.67	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Dan Tinggi Yang Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	316
Tabel 3.68	Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Sasaran Kinerja Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkwalifikasi Tinggi Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	318
Tabel 3.69	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau s/d Triwulan III Tahun 2025.....	320
Tabel 3.70	Perjanjian Kinerja Transisi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Rentra 2025-2029).....	321
Tabel 3.71	Analisa Tingkat Efisiensi Sumber Daya dan Efektivitas Program Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	323
Tabel 3.72	Program dan Dukungan Anggaran Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.....	324
Tabel 4.1.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	326

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	11
Gambar 1.2.	Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Status Tahun 2025.....	12
Gambar 1.3.	Prosentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025.....	12
Gambar 1.4.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	13
Gambar 1.5.	Prosentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	13
Gambar 1.6.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	13
Gambar 1.7.	Prosentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	14
Gambar 1.8.	Jumah PNS Berdasarkan Golongan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025...	14
Gambar 1.9.	Persentase PNS Berdasarkan Golongan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	14
Gambar 1.10.	Struktur PNS Berdasarkan Jabatan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025...	15
Gambar 1.11.	Persentase PNS Berdasarkan Golongan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	16
Gambar 1.12.	Prosentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	16
Gambar 1.13.	Prosentase Pegawai Perjanjian Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	15
Gambar 1.14.	Sebaran Satuan Pendidikan Berdasarkan Status di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	17
Gambar 1.15.	Persentase Jenis Satuan Berdasarkan Status Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	18
Gambar 1.16.	Persentase Sebaran Satuan Pendidikan Berdasarkan Kab/kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	18
Gambar 1.17.	Sebaran Satuan Pendidikan Menengah Atas dan	

	Pendidikan Vokasi Negeri Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kota Batam Tahun 2025.....	19
Gambar 1.18.	Sebaran Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Vokasi Negeri Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2025.....	19
Gambar 1.19.	Sebaran Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Vokasi Negeri Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Karimun Tahun 2025.....	20
Gambar 1.20.	Sebaran Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Vokasi Negeri Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Bintan Tahun 2025.....	20
Gambar 1.21.	Sebaran Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Vokasi Negeri Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.....	20
Gambar 1.22.	Sebaran Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Vokasi Negeri Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Lingga Tahun 2025.....	20
Gambar 1.23.	Sebaran Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Vokasi Negeri Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Natuna Tahun 2025.....	21
Gambar 1.24.	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Menengah dan Kejuruan (SMA/SMK) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	22
Gambar 1.25.	Persentase Sebaran Guru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	22
Gambar 1.26.	Persentase Sebaran Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	22
Gambar 1.27.	Sebaran Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	23
Gambar 1.28.	Persentase Sebaran Guru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	23
Gambar 1.29.	Persentase Sebaran Guru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	24
Gambar 1.30.	Persentase Sebaran Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Atasi (SMAN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	24
Gambar 1.31.	Persentase Sebaran Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	24
Gambar 1.32.	Persentase Guru dan Tenaga	

	Kependidikan Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa (SMA/SMK/SLB) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	25
Gambar 1.33.	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Kepegawaian Pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	26
Gambar 1.34.	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan SMKN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	27
Gambar 1.35.	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Khusus Negeri (SLBN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026.....	28
Gambar 1.36.	Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada SMA/SMK dan SLB) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	29
Gambar 1.37.	Persentase Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada SMA/SMK dan SLB Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	29
Gambar 1.38.	Sebaran Persentase Guru Berdasarkan Tempat Tugas di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	30
Gambar 1.39.	Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada SMAN/SMKN/SLBN Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	31
Gambar 1.40.	Sebaran Persentase Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada SMAN, SMKN dan SLBN Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	31
Gambar 1.41.	Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada SMAS/SMKS/SLBS Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	31
Gambar 1.42.	Jumlah Guru Bersertifikasi Pendidik Pada SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	32
Gambar 1.43.	Persentase Guru Bersertifikasi Pendidik Pada SMA/SMK dan SLB Tahun 2025.....	33
Gambar 1.44.	Persentase Guru Bersertifikasi Pendidik Pada SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	33
Gambar 1.45.	Persentase Guru Bersertifikasi Pendidik Pada Satuan Pendidikan SMAS/SMKS/SLBS di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	34
Gambar 1.46.	Akreditasi Satuan Pendidikan SMK/SMA/SLB Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	35
Gambar 1.47.	Persentase Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	35
Gambar 1.48.	Akreditasi Satuan Pendidikan SMKN/SMAN/SLBN	

	Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	36
Gambar 1.49.	Persentase Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	36
Gambar 1.50.	Persentase Sebaran Jumlah Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	37
Gambar 1.51.	Persentase Sebaran Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	38
Gambar 1.52.	Persentase Sebaran Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	39
Gambar 1.53.	Jumlah Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLB Negeri Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026.....	39
Gambar 1.54.	Jumlah Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Swasta Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	40
Gambar 1.55.	Persentase Sebaran Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	41
Gambar 1.56.	Sebaran Peserta Didik Berdasarkan Kelompok Umur Pada SMA,SMK dan MA Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	41
Gambar 1.57.	Persentase Sebaran Peserta Didik Berdasarkan Kelompok Umur Pada SMA dan SMK Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	42
Gambar 1.58.	Sebaran Peserta Didik pada SMAN Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	42
Gambar 1.59.	Sebaran Peserta Didik Pada SMKN Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	43
Gambar 1.60.	Sebaran Persentase Peserta Didik pada SMAN dan SMKN Berdasarkan Umur Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	44
Gambar 1.61.	Sebaran Peserta Didik pada SMAS dan SMKS Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	44
Gambar 1.62.	Sebaran Peserta Didik pada SMAS Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	44
Gambar 1.63.	Sebaran Peserta Didik Pada SMKS Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	45
Gambar 1.64.	Sebaran Persentase Peserta Didik pada SMAS dan	

	SMKS Berdasarkan Umur Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026.....	45
Gambar 1.65.	Sebaran Peserta Didik Pada Madrasah Aliyah Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	46
Gambar 1.66.	Jumlah Rombongan Belajar Pada SMA/SMK dan SLB Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	46
Gambar 1.67.	Persentase Sebaran Rombongan Belajar Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026.....	47
Gambar 1.68.	Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	47
Gambar 1.69.	Persentase Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	48
Gambar 1.70.	Persentase Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	48
Gambar 1.71.	Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan SMAS/SMKS/SLBS Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	48
Gambar 1.72.	Jumlah Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	49
Gambar 1.73.	Persentase Ruang Kelas Belajar (RKB) Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	50
Gambar 1.74.	Jumlah Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	50
Gambar 1.75.	Sebaran Persentase RKB Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	51
Gambar 1.76.	Kondisi Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	51
Gambar 1.77.	Kondisi Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMAN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	52
Gambar 1.78.	Kondisi Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMKN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	52
Gambar 1.79.	Kondisi Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	53
Gambar 1.80.	Jumlah Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMAS/SMKS/SLBS di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	53
Gambar 1.81.	Persentase Ruang Kelas Belajar (RKB) Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan	

	Riau Tahun 2025.....	54
Gambar 1.82.	Jumlah Ruang Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	55
Gambar 1.83.	Jumlah laboratorium Komputer Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	55
Gambar 1.84.	Jumlah laboratorium Bahasa Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	56
5Gambar 1.85.	Jumlah laboratorium IPA Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	56
Gambar 1.86.	Jumlah laboratorium Fisika Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	57
Gambar 1.87.	Jumlah laboratorium Biologi Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	57
Gambar 1.88.	Angka Putus Sekolah Di Provinsi Kepulauan Riau Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2025.....	58
Gambar 1.89.	Rasio Ketersedian Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 – 2025.....	58
Gambar 1.90.	Rasio Ketersedian Sekolah Terhadap Penduduk Usia SekolahDi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2025.....	59
Gambar 1.91.	Rasio Pendidik Terhadap Peserta Didik Pendidikan Menengah (SMA/SMK Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	60
Gambar 1.92.	Rasio Pendidik Tehadap Peserta Didik Pada SMAN Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	50
Gambar 1.93.	Rasio Pendidik Tehadap Peserta Didik Pada SMKN Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	61
Gambar 1.94.	Capaian Nilai Literasi Di Provinsi Kepulauan Riau Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Khusus Neger Tahun 2025.....	62
Gambar 1.95.	Capaian Nilai Numerasi Di Provisni Kepulauan Riau Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri Tahun 2025.....	63
Gambar 1.96.	Capaian Nilai Inklusivitas Di Provisni Kepulauan Riau Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri Tahun 2025.....	63
Gambar 1.97.	Capaian Nilai Keamanan Di Provisni Kepulauan Riau Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri Tahun 2025.....	65
Gambar 1.98.	Capaian Nilai Kebhinekaan di Provisni Kepulauan Riau Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan	

	Pendidikan Khusus Negeri Tahun 2025.....	66
Gambar 1.99.	Capaian Nilai Tingkat Kepuasan DUDOI Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	67
Gambar 1.100.	Prosentase Kondisi Aset Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	67
Gambar 1.101.	Capaian Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2025.....	69
Gambar 1.102.	Penyebaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	69
Gambar 1.103.	Prosentase Sebaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	70
Gambar 1.904.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sd 2025.....	71
Gambar 1.105.	Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Angkatan Kerja Tahun 2025.....	71
Gambar 1.106.	Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	72
Gambar 1.107.	Prosentase Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	73
Gambar 1.108.	Penduduk Berdasarkan Umur (16-18 Thn) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	73
Gambar 1.109.	Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (16-18 Tahun) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	74
Gambar 1.110.	Penduduk Disabilitas (4-18 Tahun) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	74
Gambar 1.111.	Sebaran Penduduk Disabilitas Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025...	77
Gambar 2.1.	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	101
Gambar 2.2.	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	104
Gambar 3.1.	Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	113
Gambar 3.2.	Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025.....	115
Gambar 3.3.	Realisasi Kinerja Rata Rata Lama Sekolah (RLS) Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	115
Gambar 3.4.	Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Secara Nasional Tahun 2025.....	117
Gambar 3.5.	Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Di Provinsi Kepri Tahun 2025.....	118
Gambar 3.6.	Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025.....	123
Gambar 3.7.	Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	124

Gambar 3.8.	Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Secara Nasional Tahun 2025.....	126
Gambar 3.9.	Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Di Provinsi Kepri Tahun 2025.....	127
Gambar 3.10.	Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025.....	131
Gambar 3.11.	Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025.....	132
Gambar 3.12.	Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun Secara Nasional Tahun 2025.....	134
Gambar 3.13.	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Provinsi Kepri Tahun 2025.....	135
Gambar 3.14.	Capaian Kinerja Akreditasi Minimal B Pada Sekolah Negeri Di Provinsi Kepri Tahun 2025.....	141
Gambar 3.15.	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025.....	142
Gambar 3.16.	Penyebaran SMK Negeri Terevitalisasi Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025.....	149
Gambar 3.17.	Capaian Kinerja SMKN Terevitalisasi Di Provinsi Kepri Tahun 2025 Capaian Kinerja SMKN Terevitalisasi Di Provinsi Kepri Tahun 2025.....	150
Gambar 3.18.	Jumlah Lulusan Peserta Didik SMAN dan Lulusan Peserta Didik Lulus di PT/Sekolah Kedinasan Tahun 2025.....	155
Gambar 3.19.	Sumber Lulusan Siswa SMAN Pada PTN /Sekolah Kedinasan Tahun 2025.....	156
Gambar 3.20.	Capaian Kinerja Lulusan SMA yang Melanjutkan ke PTN/Sekolah kedinasan Di Provinsi Kepri Tahun 2025.....	157
Gambar 3.21.	Persentase Status Siswa SMK Setelah Lulus Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025....	165
Gambar 3.22.	Capaian Kinerja Tingkat Penyerapan Lulusan SMK yang bekerja di IDUKA Tahun 2025.....	166
Gambar 3.23.	Capaian Kinerja TPK yg Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025.....	174
Gambar 3.24.	Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025.....	181
Gambar 3.25.	Realisasi Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2025.....	182
Gambar 3.26.	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	183

Gambar 3.27.	Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Secara Nasional Tahun 2025.....	187
Gambar 3.28.	Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsii Kepulauan Riau Tahun 2021-2025.....	192
Gambar 3.29.	Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025.....	193
Gambar 3.30.	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Di Provinsi Keulauan Riau Tahun 2025.....	193
Gambar 3.31.	Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Secara Nasional Tahun 2025.....	194
Gambar 3.32.	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 – 2025.....	202
Gambar 3.33.	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 – 2024.....	202
Gambar 3.34.	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar SLB Di Provinsi Keulauan Riau Tahun 2025.....	203
Gambar 3.35.	Capaian Kinerja Rasio Siswa SMA/SMK Perkelas Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 – 2025.....	210
Gambar 3.36.	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Di Provinsi Keulauan Riau Tahun 2025.....	210
Gambar 3.37.	Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	219
Gambar 3.38.	Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025.....	221
Gambar 3.39.	Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	221
Gambar 3.40.	Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Secara Nasional Tahun 2025.....	223
Gambar 3.41.	Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Di Provinsi KepriTahun 2025 (RPJMD 2025-2029).....	224
Gambar 3.42.	Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 (RPJMD 2025-2029).....	229
Gambar 3.43.	Realisasi Kinerja Rata Rata Lama Sekolah (RLS) Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	230
Gambar 3.44.	Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Secara Nasional Tahun 2025.....	232
Gambar 3.45.	Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Di Provinsi Kepri Tahun 2025 (RPJMD 2025-2029).....	233

Gambar 3.46.	Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 (RPJMD 2025-2029).....	239
Gambar 3.47.	Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025.....	239
Gambar 3.48.	Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun Secara Nasional Tahun 2025.....	242
Gambar 3.49.	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Renstra Disdik Kepri 2025-2029).....	243
Gambar 3.50.	Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (RPJMD 2025-2029).....	249
Gambar 3.51.	Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025.....	249
Gambar 3.52	Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 TahunnSecara Nasional Tahun 2025.....	251
Gambar 3.53	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Renstra Disdik Kepri 2025-2029).....	252
Gambar 3.54	Realisasi Kinerja Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	259
Gambar 3.55	Realisasi Kinerja Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	260
Gambar 3.56	Capaian Kinerja Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	260
Gambar 3.57	Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	270
Gambar 3.58	Capaian Kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) Di Provinsi Kepulauan Riau 2025.....	271
Gambar 3.59	Persentase Satuan Pendidikan yg Memcapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2025.....	281
Gambar 3.60	Capaian Kinerja Persentase Satuan Pendidikan yg Memcapai Standar Kompetensi Minimum Pada	

	Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	282
Gambar 3.61	Realisasi Kinerja Persentase Kompetensi Minimum Capaian Kinerja Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2025.....	292
Gambar 3.62	Capaian Kinerja Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	293
Gambar 3.63	Realisasi Kinerja Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	302
Gambar 3.64	Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	303
Gambar 3.65	Realisasi Kinerja Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	311
Gambar 3.66	Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	312

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja, laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran pemerintah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, sakip merupakan sinergitas antara proses perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun oleh Instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik diharapkan mampu mendorong terwujudnya sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berweibawa. Manfaat dari penyusunan Laporan kinerja agar instansi

pemerintah mampu mendorong meyelenggarakan tugas dan fungsi secara baaik dan benar (good governance), mendorong tumbuhnya pemerintahan yang akuntabel, efesien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Dalam LKj, disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
2. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Menjadi bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menjadikan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai instansi pemerintah yang akuntabel dan transparan sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

5. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
6. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
7. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di dalam melaksanakan program/kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, yaitu:

1. Sebagai instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta mengacu pada rencana strategis yang telah ditetapkan.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai,
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan akuntabilitas public.
4. Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan disampaikan secara sistematis untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
5. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan dan perbaikan terhadap kinerja yang belum tercapai dalam rangka melakukan serta menentukan berbagai analisis strategi, kebijakan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pencapaian kinerja organisasi serta menentukan Langkah-langkah perbaikan

secara berkesinambungan. Dalam rangka mendorong peningkatan kerja organisasi

6. Sebagai dasar bagi organisasi dalam pengambilan keputusan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program dan anggaran berikutnya.
7. Mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), LAKIP merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan SAKIP secara konsisten dan berkelanjutan

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3).
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor

10);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1011).
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017).
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan melalui beberapa tahapan, tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, sampai tersusunnya laporan LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai

data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan sebagian outcome. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya capaian kinerja (performance results) kegiatan-kegiatan tahun 2025 diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi . Uraian singkat dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan berbagai capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Informasi/Analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah.
2. Informasi/Analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya
3. Informasi/Analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra.
4. Informasi/Analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun yang dinilai dengan standar

nasional (jika ada).

5. Informasi/Analisis tentang factor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Informasi/Analisis upaya perbaikan kinerja ke depan
7. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
8. Informasi/analisis atas efesiensi penggunaan suber daya dan efektivitas program.

Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau merupakan OPD dengan tipologi A. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat,Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat,

Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Pendidikan mempunyai rincian tugas:

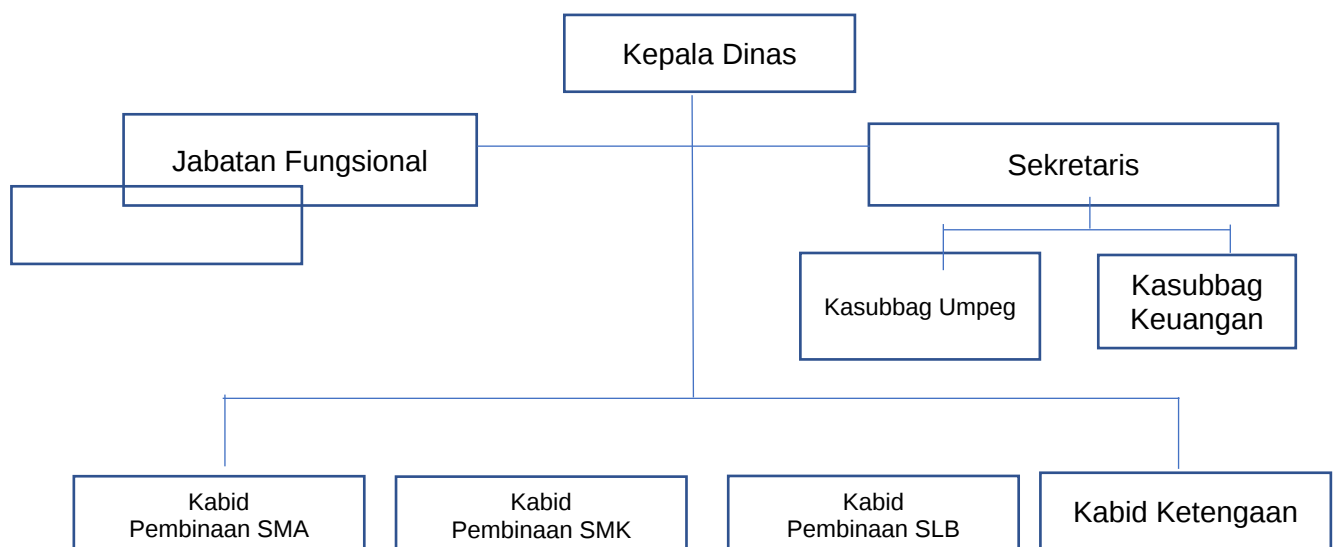
- a. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pendidikan berdasarkan rencana strategis Dinas Pendidikan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan;
- e. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- f. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- g. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- h. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
- i. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pembinaan Ketenagaan;
- j. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah.
- k. melaksanakan pemantauan dan pembinaan tugas Dinas Pendidikan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas

- Pendidikan; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- f. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- h. Cabang Dinas;
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau

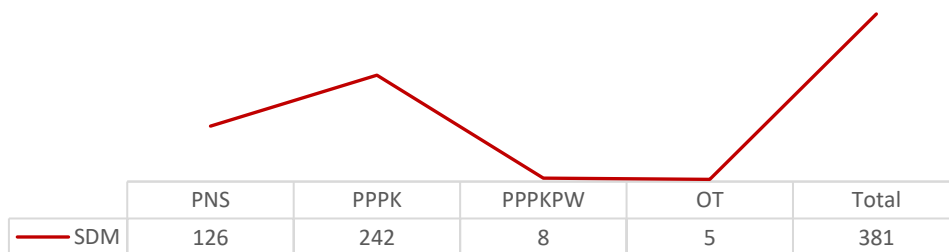


1.6. Sumber Daya Dinas Pendidikan

1.6.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 tercatat sebanyak 381 orang, terdiri atas PNS 126, PPPK 242, PPPKPW 8 dan Outsourcing 5 orang. Secara lengkap distribusi, status pendidikan dan dukungan datanya lainnya diuraikan sbb:

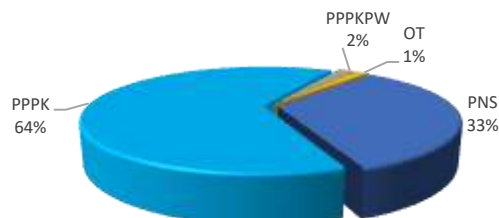
Gambar 1.2
Jumlah Sumber Daya Manusia
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Status
Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2025

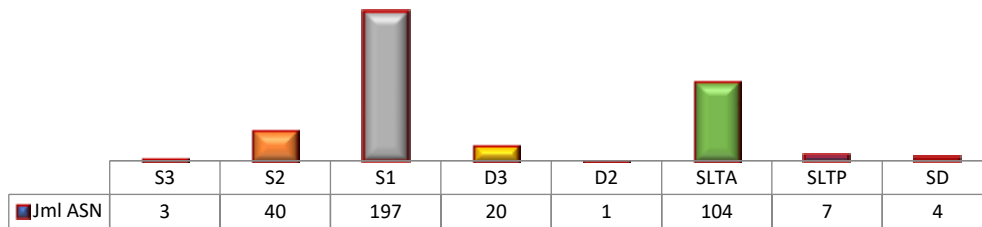
Sebanyak 64% Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK), 33 % berstatus PNS dan sisanya terdiri atas paruh waktu dan outsourcing sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.3 dibawah ini :

Gambar 1.3
Prosentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025



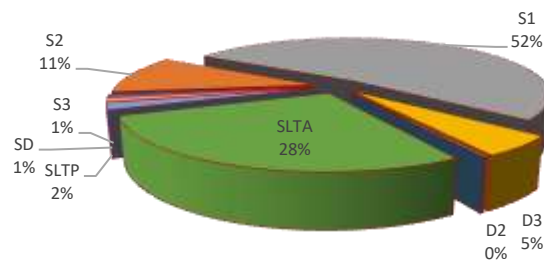
Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2025

Gambar 1.4
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2025

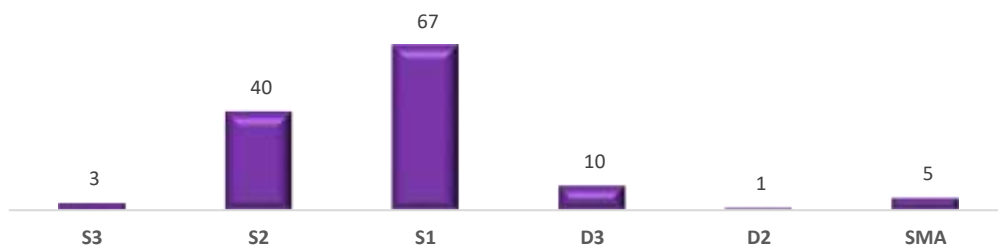
Gambar 1.5
Prosentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2025

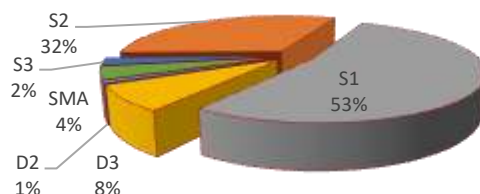
Pada Gambar 1.5 sebanyak 52% ASN di lingkungan Dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Riau atau setara dengan 197 ASN berpendidikan S1, 28% atau setara dengan 104 ASN berpendidikan SLTA dan sisanya tersebar dari pendidikan S2 sebesar 11% dan berpendidikan SD berjumlah 4 orang atau sekitar 1%.

Gambar 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2025

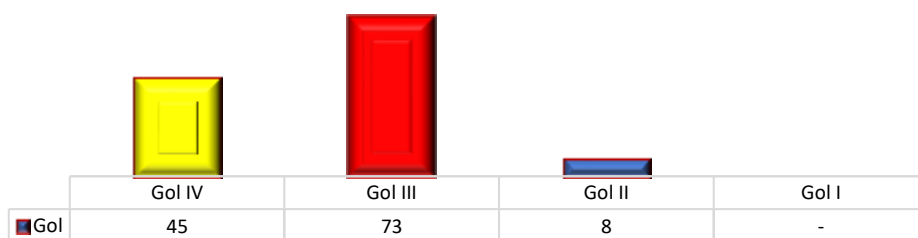
Grafik 1.7
 Prosentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
 Berdasarkan Jenjang Pendidikan
 Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2025

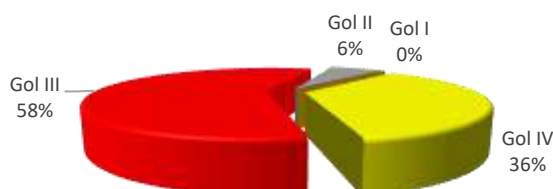
Pada Gambar 1.6 sebanyak 67 PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berpendidikan S1, 40 PNS berpendidikan S2, dan 10 orang PNS berpendidikan D3. PNS golongan 4 terdapat 45 PNS atau setara dengan 36% PNS, 73 golongan III terbanyak dengan 73 PNS atau setara dengan 58 sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.7 sbb :

Gambar 1.8
 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2025

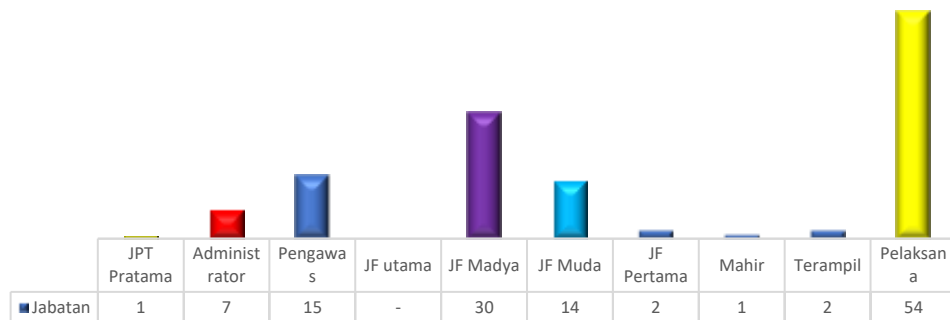
Gambar 1.9
 Persentase PNS Berdasarkan Golongan
 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2025

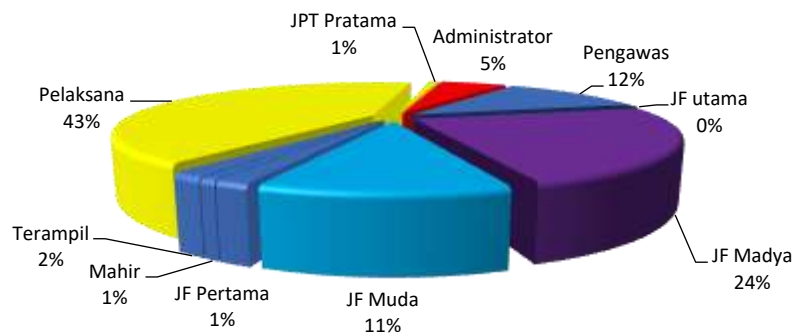
Pada Gambar 1.9 menjelaskan bahwa sebanyak 36% atau setara dengan 45 PNS memiliki Golongan IV, 58% PNS memiliki golongan III dan sebanyak 6% PNS memiliki golongan II.

Gambar 1.10
Struktur PNS Berdasarkan Jabatan
Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2025

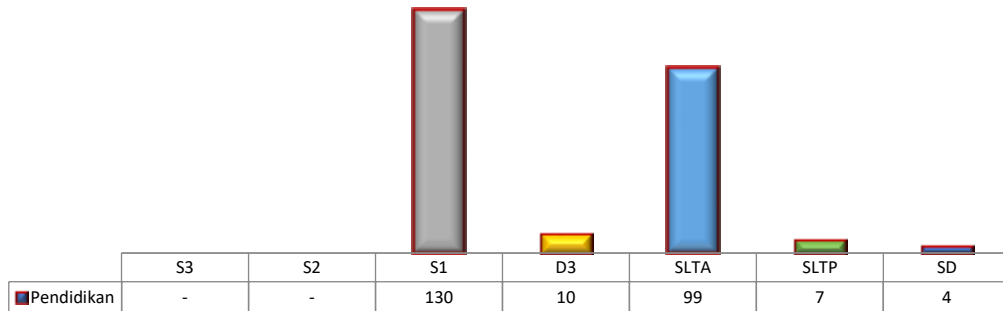
Gambar 1.11
Persentase PNS Berdasarkan Golongan
Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2025

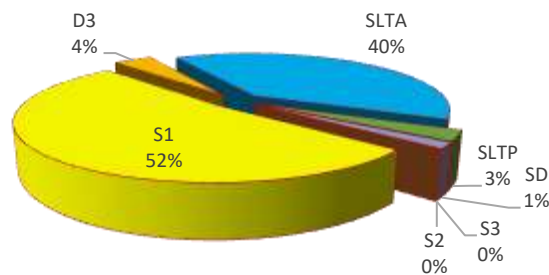
Pada Gambar 1.11 menjelaskan bahwa jabatan fungsional merupakan jabatan terbesar yang ada di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 39% atau 49 PNS berstatus sebagai pejabat fungsional, sebanyak 17% atau setara dengan 23 PNS memiliki jabatan structural dan sisanya sebanyak 43% merupakan PNS yang berstatus sebagai pelaksana.

Grafik 1.12
 Prosentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
 Berdasarkan Jenjang Pendidikan
 Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2025

Grafik 1.13
 Prosentase Pegawai Perjanjian Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
 Berdasarkan Jenjang Pendidikan
 Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2025

1.6.2. Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Satuan pendidikan dapat berupa sekolah, lembaga, madrasah, atau kampus. Berdasarkan jenjangnya, satuan pendidikan terbagi menjadi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

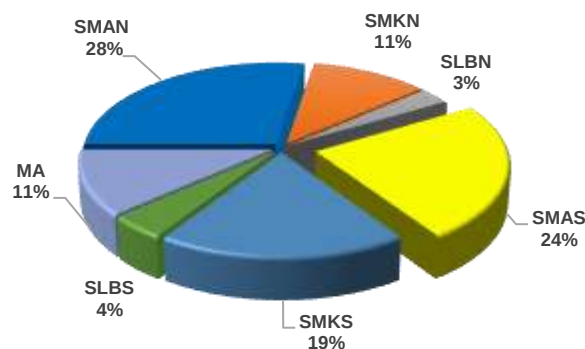
Jumlah penduduk di suatu wilayah berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, luas wilayah menjadi faktor pendukung dalam memprediksi kebutuhan sarana pendidikan dimasa yang akan datang. Berikut jumlah satuan pendidikan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Tabel 1.1
Jumlah Satuan Pendidikan
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumlah Satuan Pendidikan							Jumlah
		SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	SLBN	SLBS	MA	
1	Batam	29	60	12	54	1	8	15	179
2	Tanjungpinang	6	7	5	4	2	2	2	28
3	Bintan	10	7	4	4	2	2	4	33
4	Karimun	16	5	5	4	2	3	6	41
5	Natuna	15	1	5	0	1	0	4	26
6	Lingga	15	3	4	0	1	0	4	27
7	Anambas	6	1	4	0	1	0	5	17
	Kepulauan Riau	97	84	39	66	10	15	40	351

Sumber : Dapodik 2025

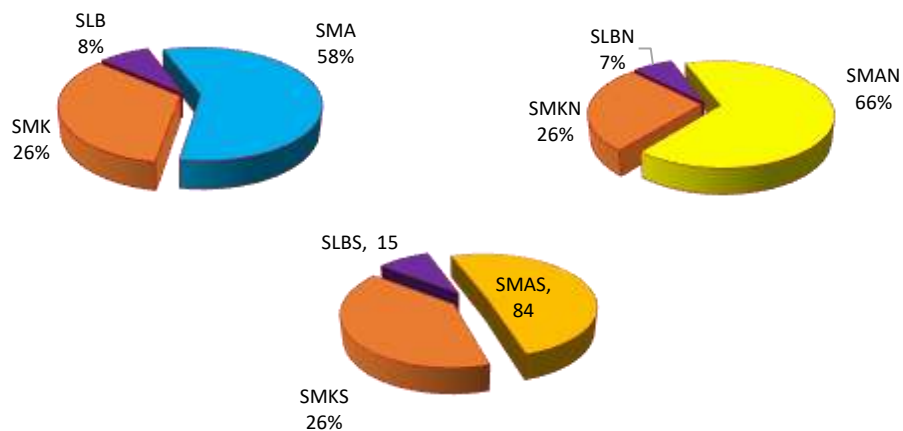
Gambar 1.14
Sebaran Satuan Pendidikan Berdasarkan Status
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

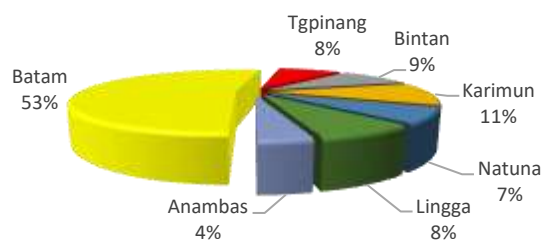
Tabel 1.1 menjelaskan sebanyak 146 satuan pendidikan atau setara dengan 41,60% merupakan satuan pendidikan yang dimiliki pemerintah sedangkan sisanya 205 satuan pendidikan merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Data menunjukkan bahwa sebanyak 28% satuan pendidikan berstatus sebagai sekolah menengah atas negeri, 24% berstatus sebagai sekolah menengah kejuruan negeri sisanya 3% merupakan sekolah pendidikan khusus negeri.

Gambar 1.15
Persentase Jenis Satuan Berdasarkan Status Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Gambar 1.15 menjelaskan bahwa persentase sekolah menengah umum (SMA) lebih besar dari sekolah menengah kejuruan (SMK), 58% atau setara dengan 181 satuan pendidikan merupakan pendidikan menengah umum (SMA), 26% atau setara 105 satuan pendidikan merupakan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sebanyak 8% atau 25 satuan pendidikan merupakan satuan pendidikan khusus (SLB).

Gambar 1.16
Persentase Sebaran Satuan Pendidikan Berdasarkan Kab/kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



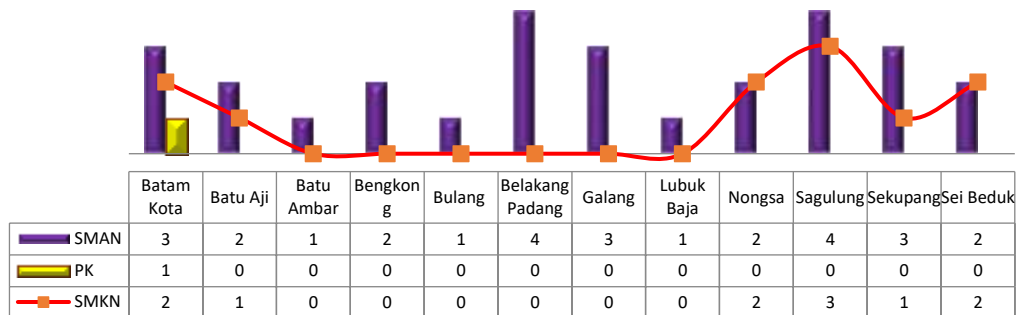
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.16 menjelaskan bahwa sebanyak 53% satuan pendidikan yang terdiri atas satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan vokasi dan pendidikan khusus berada di Kota Batam dan sisnya tersebar secara merata di berbagai kab/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Sebaran satuan pendidikan mulai dari Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Pendidikan Vokasi (SMKN) dan Pendidikan Khusus (SLBN) tersebar merata pada setiap kecamatan yang ada di Provinsi

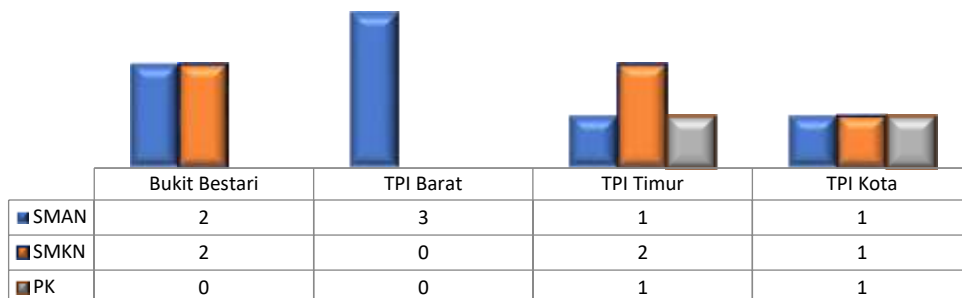
Kepulauan Riau, berikut sebaran satuan pendidikan pada kecamatan pada tahun 2025.

Grafik 1.17
Sebaran Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Vokasi Negeri
Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kota Batam
Tahun 2025



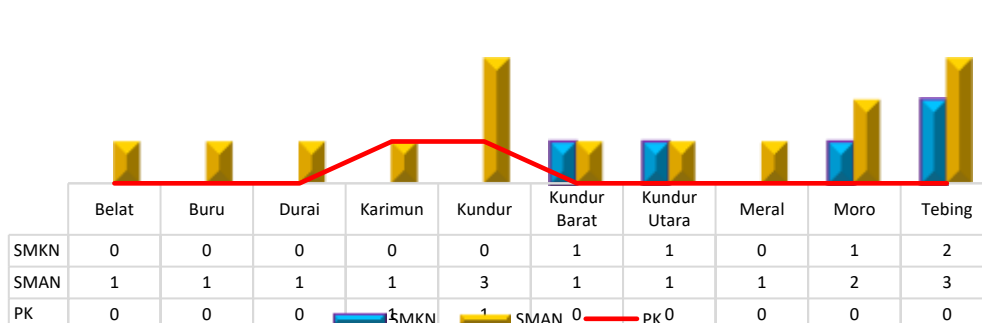
Sumber : Dapodik 2025

Grafik 1.18
Sebaran Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Vokasi Negeri
Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kota Tanjungpinang
Tahun 2025



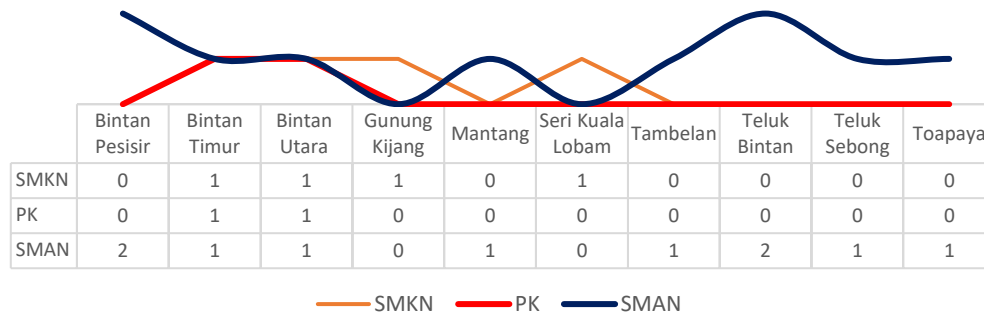
Sumber : Dapodik 2025

Grafik 1.19
Sebaran Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Vokasi Negeri
Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Karimun
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

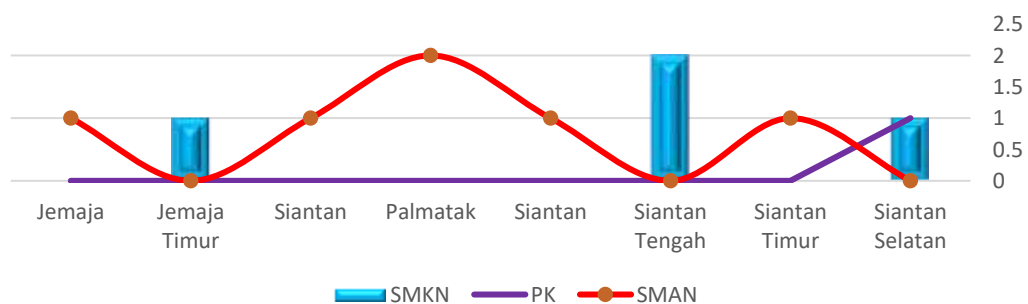
Grafik 1.20
Sebaran Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Vokasi Negeri
Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Bintan
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

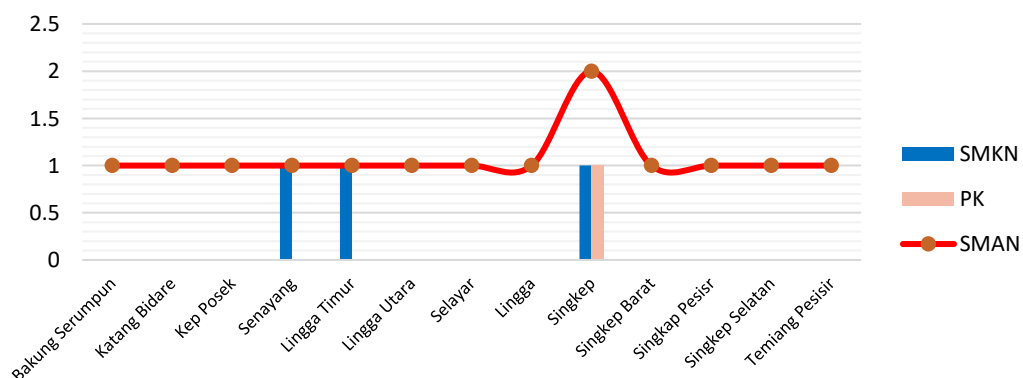
Pada Gambar 1.20 Sebaran satuan pendidikan di Kabupaten Bintan merata di setiap kecamatan, setiap kecamatan yang ada telah memiliki satu SMAN/SMKN/SLBN.

Grafik 1.21
Sebaran Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Vokasi Negeri
Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Grafik 1.22
Sebaran Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Vokasi Negeri
Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Lingga
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Grafik 1.23
Sebaran Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Vokasi Negeri
Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Natuna
Tahun 2025



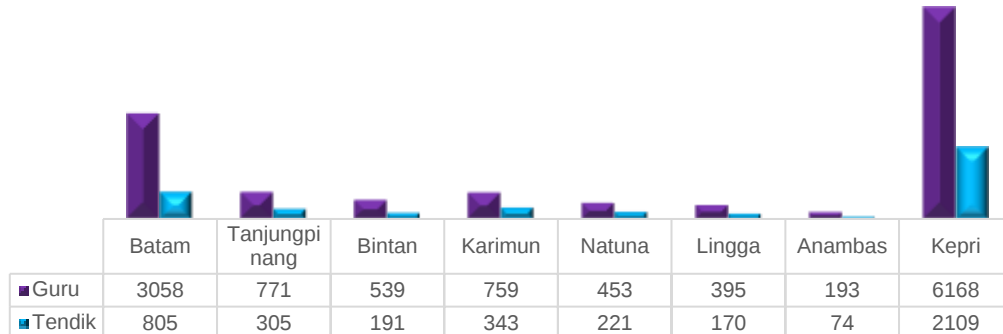
Sumber : Dapodik 2025

1.6.3. Guru dan Tenaga Kependidikan

Definisi guru menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yakni pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada, baik dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Guru harus mampu menjunjung tinggi etika, mengembangkan, dan menerapkan keutamaan yang menyangkut kebudayaan dan keilmuan

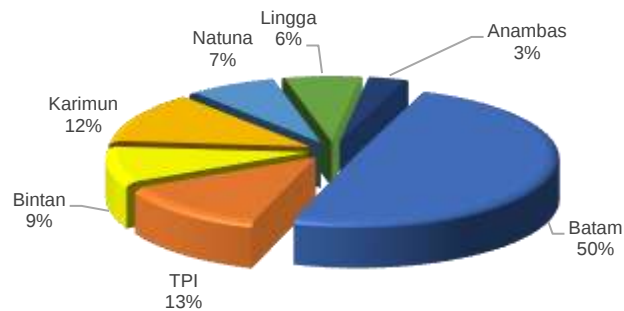
Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, **berbeda dengan pendidik (guru/dosen)**, tendik fokus pada manajemen, administrasi, teknis, dan pengelolaan di lembaga pendidikan, seperti kepala sekolah, TU, bendahara, laboran, teknisi, pustakawan, serta pengawas pendidikan, yang semua tugasnya mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, pendidikan harus dapat mengembangkan sikap dan karakter seseorang agar dapat menjadi warga yang bertanggung jawab untuk masa depan.

Gambar 1.24
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan Menengah dan Kejuruan (SMA/SMK) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



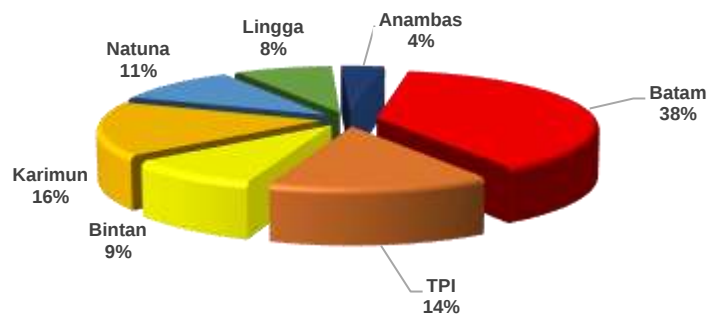
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.25
Persentase Sebaran Guru
Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



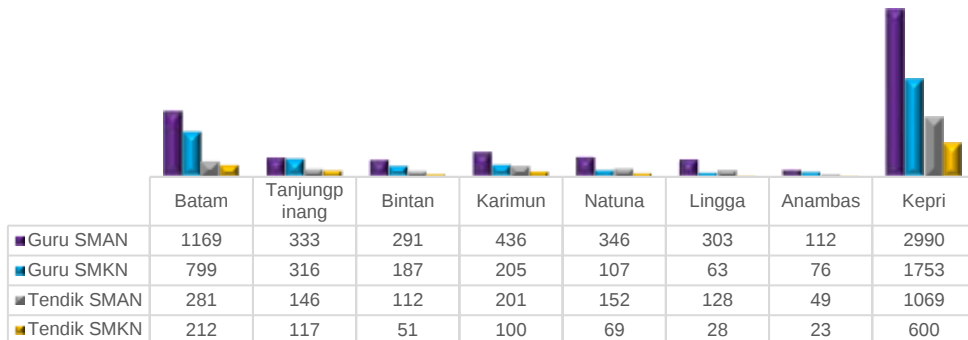
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.26
Persentase Sebaran Tenaga Kependidikan
Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



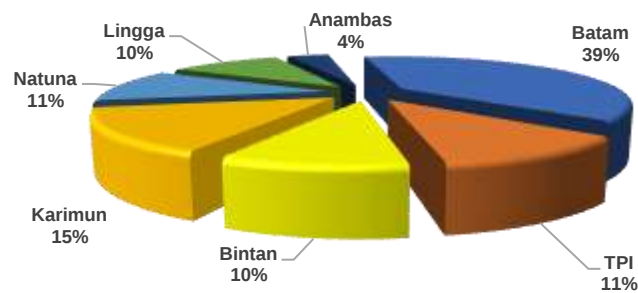
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.27
Sebaran Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



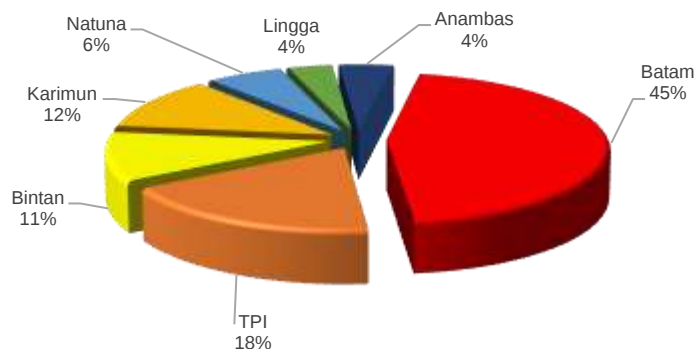
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.28
Persentase Sebaran Guru
Pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



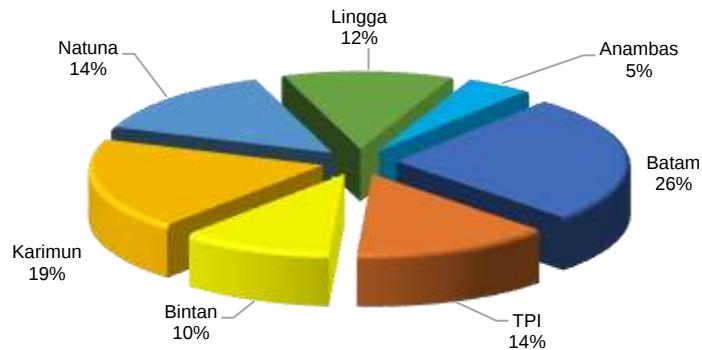
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.29
Persentase Sebaran Guru
Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



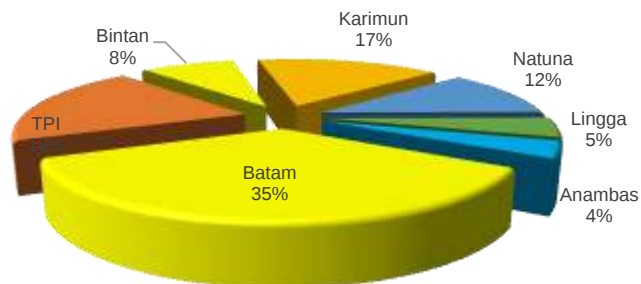
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.30
Persentase Sebaran Tenaga Kependidikan
Pada Sekolah Menengah Atasi (SMAN) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.31
Persentase Sebaran Tenaga Kependidikan
Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



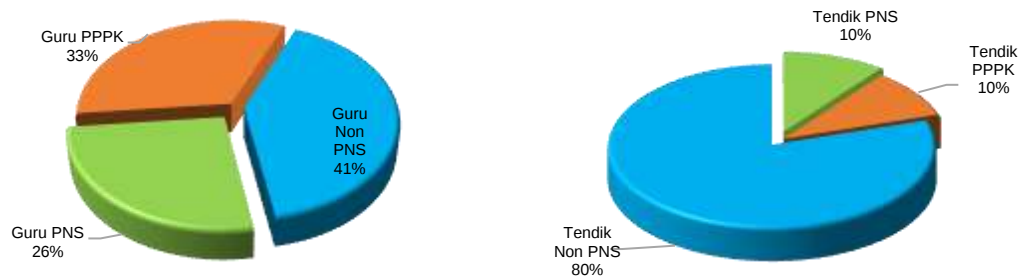
Sumber : Dapodik 2025

Tabel 1.2
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Kepegawaian
Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa (SMA/SMK/SLB)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumah Guru				Jumah Tenaga Kependidikan			
		PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah	PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Batam	546	973	1,624	3,143	14	50	773	837
2	Tanjungpinang	281	293	266	840	21	25	291	337
3	Bintan	202	198	168	568	14	27	162	203
4	Karimun	264	267	292	823	38	43	287	369
5	Natuna	181	161	120	462	36	36	158	230
6	Lingga	158	149	102	409	9	34	132	175
7	Anambas	55	76	67	198	11	11	58	80
Kepulauan Riau		1687	2117	2639	6443	243	226	1861	2231
Total		8,674							

Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.32
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa (SMA/SMK/SLB)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Berdasarkan pada Gambar 1.32 menjelaskan bahwa persentase guru Non PNS merupakan jumlah guru dengan proporsi terbesar yaitu 41%, guru dengan status kepegawaian PPPK sebanyak 33% atau setara dengan 211t guru dan terkecil merupakan guru dengan status kepegawaian PNS sebesar 26% atau setara dengan jumlah guru 1687.

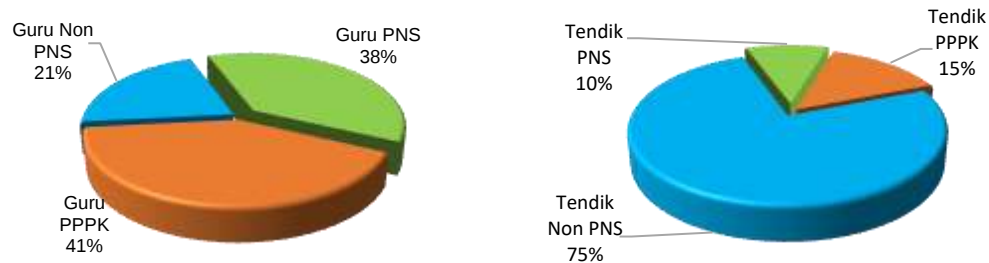
Untuk tenaga kependidikan sebanyak 80% merupakan tenaga kependidikan non ASN, kemudian tenaga kependidikan berdasarkan status kepegawaian PPK sebanyak 10% dan menyusul tenaga kependidikan berstatus PNS sebanyak 10% atau setara dengan 243 tenaga kependidikan.

Tabel 1.3
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Kepegawaian
Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumah Guru				Jumah Tenaga Kependidikan			
		PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah	PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Batam	360	551	258	1,169	10	37	234	281
2	Tanjungpinang	136	136	61	333	14	12	120	146
3	Bintan	141	90	60	291	13	19	80	112
4	Karimun	187	165	84	436	26	29	146	201
5	Natuna	136	124	86	346	27	25	100	152
6	Lingga	128	119	56	303	9	25	94	128
7	Anambas	36	51	25	112	10	7	32	49
Kepulauan Riau		1124	1236	630	2990	109	154	806	1069
Total		4059							

Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.33
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan
Berdasarkan Status Kepegawaian Pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Berdasarkan pada Gambar 1.33 menjelaskan bahwa persentase guru pada Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri di Provinsi Kepulauan Riau, komposisi guru yang berstatus PNS sebanyak 38%, guru berstatus non PNS 21% dan guru dengan status PPPK sebanyak 41%

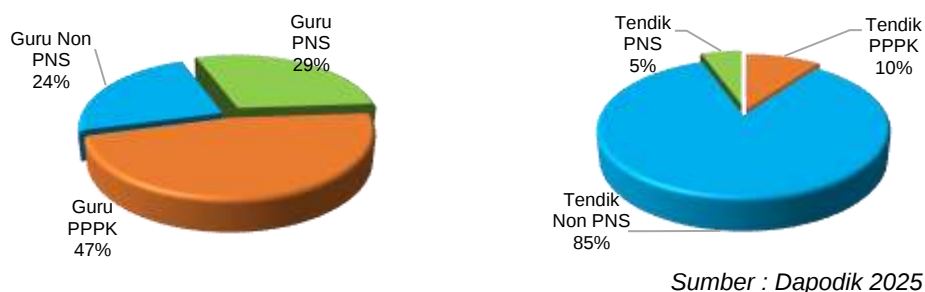
Untuk tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah atas (SMAN) di Provinsi Kepulauan Riau yang berstatus PNS sebanyak 10%, berstatus PPPK sebanyak 15% dan proporsi terbesar tenaga kependidikan yang berstatus Non ASN sebanyak 75% atau setara dengan 806 tenaga kependidikan. Selanjutnya tabel 1.4 menguraikan jumlah guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan vokasi negeri (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sbb :

Tabel 1.4
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumah Guru				Jumah Tenaga Kependidikan			
		PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah	PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Batam	176	414	209	799	4	11	197	212
2	Tanjungpinang	131	139	46	316	7	9	101	117
3	Bintan	55	101	31	187	1	8	42	51
4	Karimun	67	82	56	205	11	10	79	100
5	Natuna	42	36	29	107	9	10	50	69
6	Lingga	26	26	11	63	0	8	20	28
7	Anambas	19	25	32	76	1	4	18	23
Kepulauan Riau		516	823	414	1735	33	60	507	600
Total		2353							

Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.34
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan SMKN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Berdasarkan pada Gambar 1.34 menjelaskan bahwa persentase guru PPPK pada Satuan Pendidikan Vokasi Negeri (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau merupakan komposisi terbesar dengan kontribusi sebesar 47%, kemudian guru yang berstatus PNS sebanyak 29% dan guru berstatus Non ASN 24% atau setara dengan jumlah guru sebanyak 414 guru.

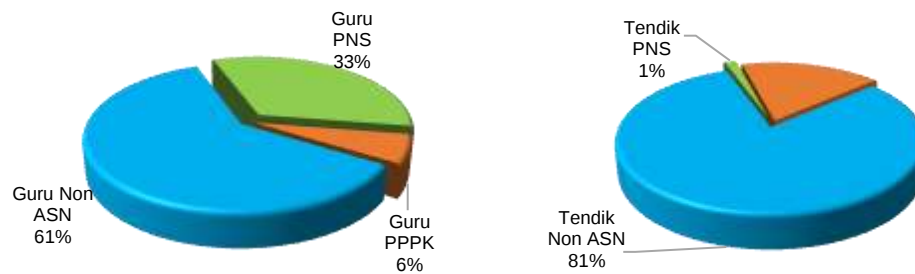
Selanjutnya Gambar 1.34 juga menjelaskan bahwa tenaga kependidikan pada satuan pendidikan vokasi negeri (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau, komposisi tenaga kependidikan terbesar merupakan tenaga kependidikan Non ASN sebesar 85% atau setara dengan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 507, selanjutnya tenaga kependidikan berstatus PNS sebanyak 5% dan tenaga kependidikan berstatus PPPK sebanyak 10%.

Tabel 1.5
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan Khusus Negeri (SLBN) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026

No	Kab/Kota	Jumlah Guru				Jumlah Tenaga Kependidikan			
		PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah	PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Batam	7	8	9	27	0	2	21	5
2	Tanjungpinang	10	18	26	58	0	4	6	25
3	Bintan	6	7	9	22	0	0	7	6
4	Karimun	7	20	8	38	1	4	8	12
5	Natuna	3	1	5	9	0	1	4	9
6	Lingga	4	4	6	14	0	1	6	5
7	Anambas	0	0	5	5	0	0	21	6
Kepulauan Riau		37	7	68	173	1	12	55	68
Total		241							

Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.35
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan Khusus Negeri (SLBN) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



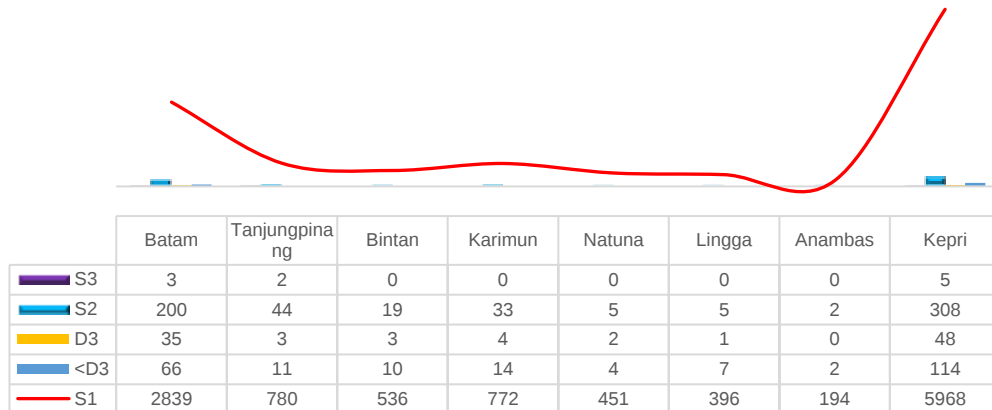
Sumber : Dapodik 2025

Berdasarkan Gambar 1.35 menjelaskan bahwa persentase guru Non ASN pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri (SLBN) di Provinsi Kepulauan Riau merupakan komposisi terbesar dengan kontribusi sebesar 61%, kemudian guru yang berstatus PNS sebanyak 33% dan guru berstatus PPPK 6% atau setara dengan jumlah guru sebanyak 7 guru.

Selanjutnya Gambar 1.35 juga menjelaskan bahwa tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus negeri (SLBN) di Provinsi Kepulauan Riau, komposisi tenaga kependidikan terbesar merupakan tenaga kependidikan Non PNS sebesar 81% atau setara dengan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 55, selanjutnya tenaga kependidikan berstatus PNS sebanyak 1% dan tenaga kependidikan berstatus PPPK sebanyak 44%.

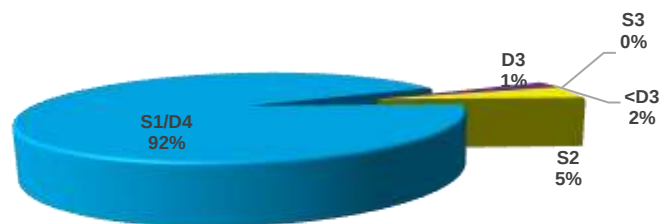
Guru memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan maksimal dan menjadi inspirator bagi peserta didik dalam memahami setiap pembelajaran yang dilakukan. Seorang guru akan mengajar lebih baik apabila di dukung dengan kemampuan dasar yang baik pula, guru dikategorikan berdasarkan pendidikannya yang mencakup jenjang pendidikan formal dari Strata 3 (S3), Strata 2 (S2), Strata Satu/Diploma IV (S1/D4) serta Diploma III , secara keseluruhan jumlah guru berpendidikan S3 sebanyak 5 guru, S2 Sebanyak 308 guru , S1 sebanyak 5968 guru, Diploma III sebanyak 48 guru dan sisanya Diploma III kebawah sebanyak 114 guru. Berikut jumlah guru berdasarkan pendidikan sbb :

Gambar 1.36
Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Pada SMA/SMK dan SLB) Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.37
Persentase Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Pada SMA/SMK dan SLB Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



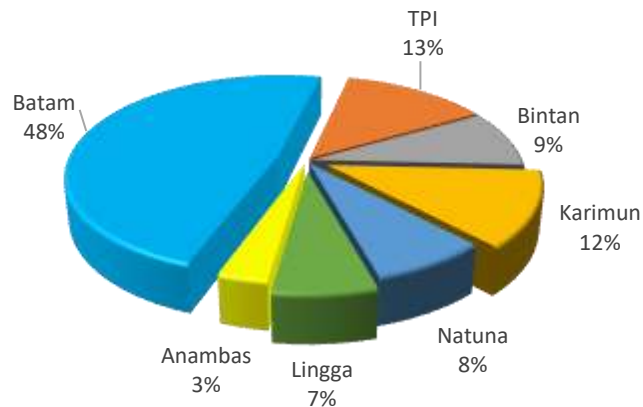
Sumber : Dapodik 2025

Sebanyak 92% guru di Provinsi Kepulauan Riau berpendidikan Sarjana (S1), hal tersebut diuraikan pada Gambar 1.37, guru dengan spesifikasi pendidikan Doktor (S3) berjumlah 0,001% atau sebanyak 5 guru, berpendidikan Magister (S2) sebanyak 5% atau setara dengan jumlah guru 308 dan guru berpendidikan diploma sebanyak 2% dari total guru yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Gambar 1.38 dibawa ini diketahui jumlah guru terbesar mengajar di Kota Batam sebanyak 2.839 atau setara dengan 48% dari jumlah guru yang mengajar, hal ini mengingat bahwa Kota Batam memiliki satuan pendidik terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, diurutkan kedua berada di Kota Tanjungpinang sebanyak 780 guru atau setara dengan 13%

dan yang terendah berada di Kabupaten Anambas sebanyak 194 atau setara dengan 3% dari total seluruh guru.

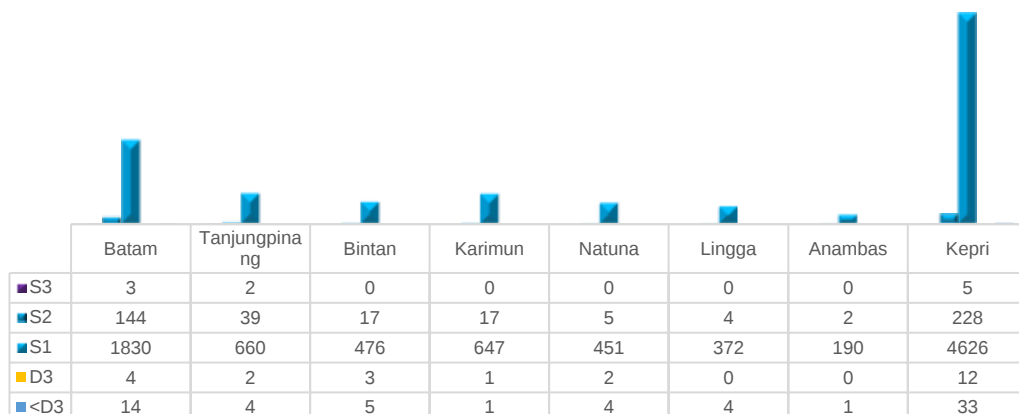
Gambar 1.38
Sebaran Persentase Guru Berdasarkan Tempat Tugas
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

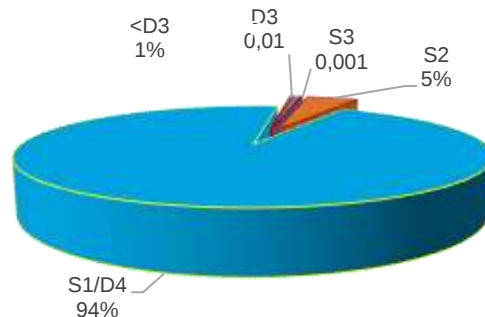
Pada satuan pendidikan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar guru berpendidikan sarjana (S1) dengan komposisi 94%. Hal ini tergambar jelas pada Gambar 1.39 dan Gambar 1.40 dibawah ini.

Gambar 1.39
Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada SMAN/SMKN/SLBN
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.40
Sebaran Persentase Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Pada SMAN, SMKN dan SLBN Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.41
Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada SMAS/SMKS/SLBS
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

	Batam	Tanjungpinang	Bintan	Karimun	Natuna	Lingga	Anambas	Kepri
S3	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	56	5	2	3	0	1	0	67
S1	1009	120	60	125	0	24	4	1342
D3	31	1	0	3	0	1	0	36
<D3	52	7	6	13	0	3	1	82

Sumber : Dapodik 2025

1.6.4. Sertifikasi Pendidik

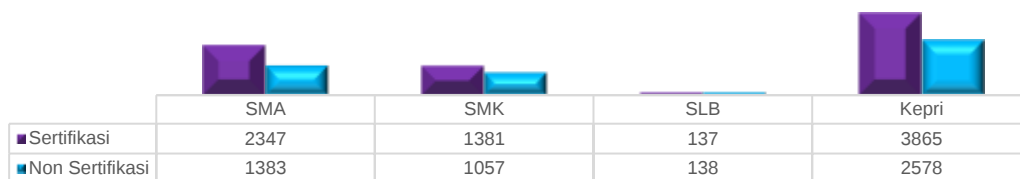
Sertifikasi guru adalah proses formal untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik (Serdik) sebagai bukti pengakuan atas profesionalitas guru yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu, tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, martabat guru, dan kesejahteraan guru.

Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara, sertifikasi diberikan apabila seorang guru telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

nasional. Tujuan utama sertifikasi adalah :

1. Menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran.
2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan nasional.
3. Meningkatkan martabat dan profesionalisme guru.
4. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas.
5. Meningkatkan kesejahteraan guru (Tunjangan Profesi Guru/TPG).
6. Pengakuan resmi sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan.
7. Peningkatan karier dan penghasilan melalui tunjangan profesi.
8. Meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi mengajar.

Gambar 1.42
Jumlah Guru Bersertifikasi Pendidik
Pada SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

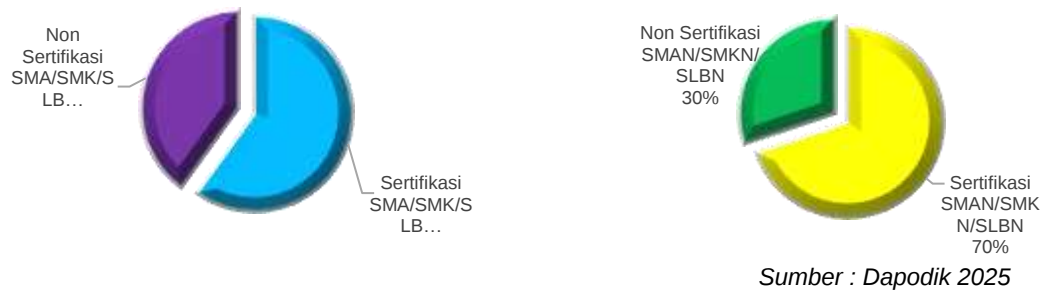
Gambar 1.42 menjelaskan bahwa belum semua guru memiliki sertifikasi pendidik, satuan pendidikan sekolah menengah atas telah tersedia guru bersertifikasi sebanyak 2.347 dan SMK 1.381.

Tabel 1.6
Jumlah Guru Bersertifikasi Pendidik
Pada SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

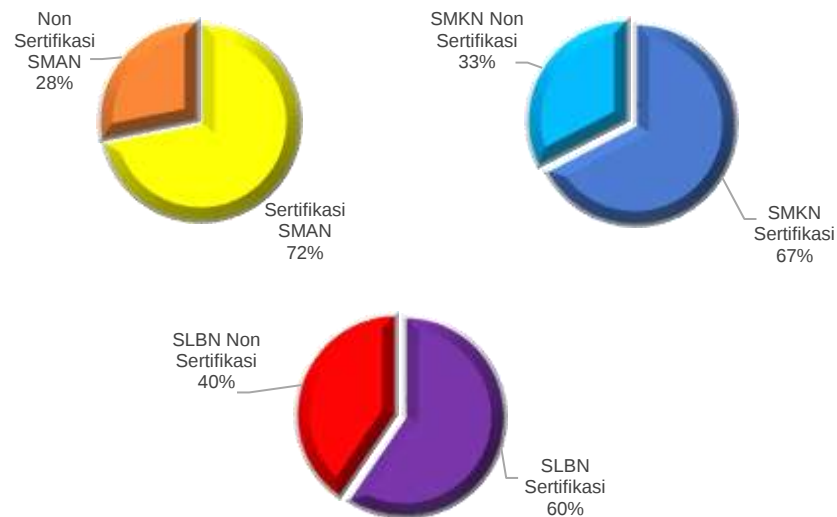
No	Kab/Kota	Satuan Pendidikan					
		SMAN		SMKN		SLB	
		Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Batam	781	338	497	303	16	11
2	Tanjungpinang	252	81	233	82	33	25
3	Bintan	236	55	144	43	13	9
4	Karimun	350	86	152	53	29	9
5	Natuna	230	116	65	42	5	4
6	Lingga	228	75	48	15	7	7
7	Anambas	71	41	42	34	0	5
	Kep.Riau	2148	842	1181	572	103	70

Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.43
Persentase Guru Bersertifikasi Pendidik Pada SMA/SMK dan SLB Tahun 2025



Gambar 1.44
Persentase Guru Bersertifikasi Pendidik Pada SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Selanjutnya Tabel 1.7 dibawah ini menjelaskan guru bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan yang dikelola olh masyarakat (SMAS/SMKS/SLBS) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.

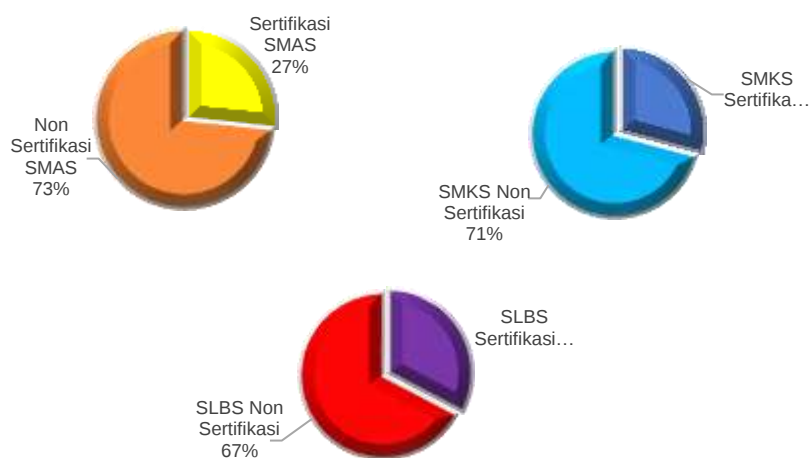
Tebel 1.7
Jumlah Guru Bersertifikasi Pendidik Pada SMAS/SMKS/SLBS di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Kab/Kota	Satuan Pendidikan					
		SMAS		SMKS		SLBS	
		Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Batam	154	380	159	397	25	33
2	Tanjungpinang	15	63	17	27	0	11
3	Bintan	5	35	5	16	1	6
4	Karimun	23	42	17	36	8	18

No	Kab/Kota	Satuan Pendidikan					
		SMAS		SMKS		SLBS	
		Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi
5	Natuna	0	0	0	0	0	0
6	Lingga	2	16	2	9	0	0
7	Anambas	0	5	0	0	0	0
	Kep.Riau	199	547	200	485	34	68

Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.45
Persentase Guru Bersertifikasi Pendidik
Pada Satuan Pendidikan SMAS/SMKS/SLBS
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

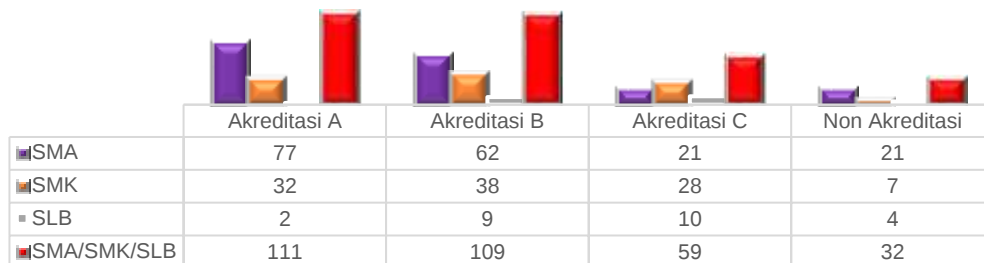


Sumber : Dapodik 2025

1.6.5. Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (*assesmen*) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi sekolah bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan juga bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah. Berikut akreditasi SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

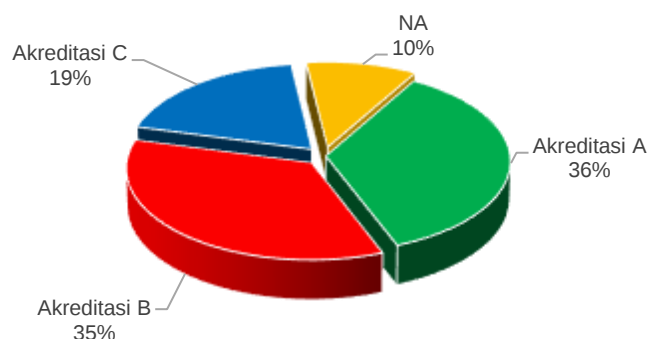
Gambar 1.46
Akreditasi Satuan Pendidikan SMK/SMA/SLB
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



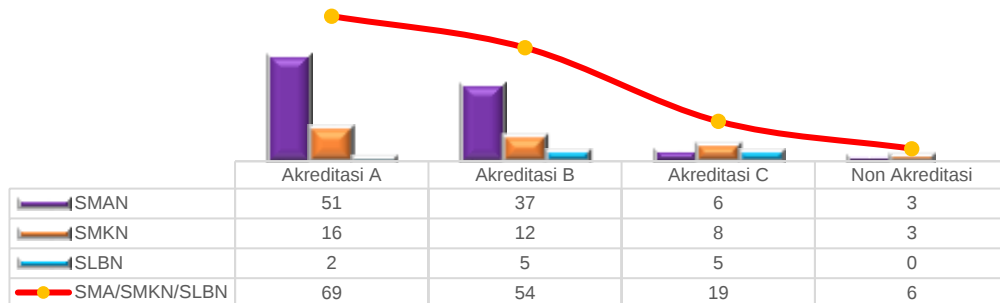
Sumber : Dapodik 2025

Di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025, akreditasi sekolah sudah mencapai 90% yang terdiri dari akreditasi, A, B dan C serta 10% sekolah yg belum terakreditasi. Gambar 1.46 bahwa sebanyak 111 sekolah telah terkareditasi A atau setara dengan 36% dari seluruh sekolah menengah, pendidikan vokasi dan pendidikan khusus, selanjutnya satuan pendikan yang berakreditasi B sebanyak 109 sekolah atau setara dengan 35%, Berkareditasi C sebanyak 59 satuan pendidikan atau setara dengan 19% dan satuan pendidikan non akreditasi sebanyak 32 satuan pendidikan atau setara dengan 10%. Berikut Gambar 1.47 menggambarkan sebaran satuan pendidikan berdasarkan akreditasi sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.

Gambar 1.47
Persentase Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Negeri
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



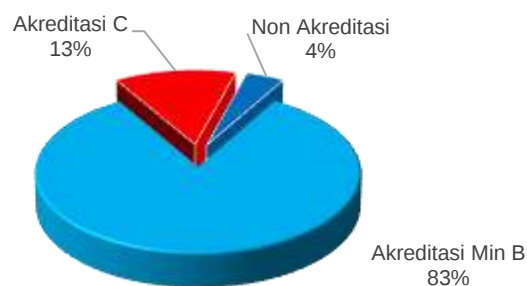
Gambar 1.48
Akreditasi Satuan Pendidikan SMKN/SMAN/SLBN Negeri
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Untuk satuan pendidikan menengah atas, pendidikan vokasi dan pendidikan khusus milik pemerintah, secara umum cukup baik dimana dijelaskan pada Gambar 1.48 sebanyak 47% terkreditasi A, 36% terkreditasi B dan 13% berkreditasi C dan 4% satuan pendidikan Non akreditasi. Dengan demikian akreditasi SMAN/SMKN/SLBN berkreditasi minimum B 83% sebagaimana pada Gambar 1.49 dibawah ini

Gambar 1.49
Persentase Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Negeri
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

1.6.6. Peserta Didik

Hubungan peserta didik dengan sekolah bersifat **simbiotik dan fundamental**, di mana sekolah menyediakan lingkungan, guru, dan metode untuk pengembangan holistik peserta didik (akademik, sosial, emosional), sementara peserta didik adalah subjek utama yang belajar, berinteraksi, dan berkembang, sehingga menciptakan suasana positif, motivasi belajar,

dan pencapaian tujuan pendidikan yang efektif melalui interaksi erat, komunikasi terbuka, dan dukungan timbal balik antara guru, staf, dan sesama siswa.

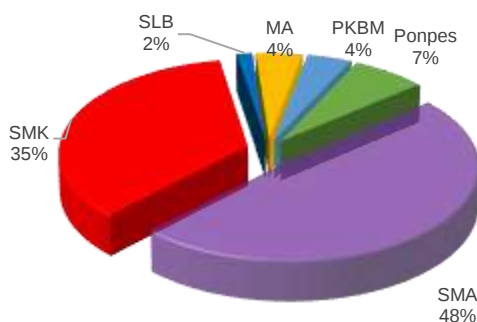
Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Berikut peserta didik yang tersebar pada satuan Pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sbb :

Tabel 1.8
Jumlah Peserta Didik
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumlah Siswa SMA	Jumlah Siswa SMK	Jumlah Siswa SLB	Jumlah Siswa MA	Jumlah Siswa Ponpes	Jumlah Siswa PKBM	Jumlah Siswa	Jumlah Penduduk (16-18 Thn)
1.	Batam	31818	29655	668	2821	6312	2999	74273	67357
2.	Tanjungpinang	6475	5612	411	471	417	488	13874	12994
3.	Bintan	4295	3197	152	593	924	457	9618	9913
4.	Karimun	8143	3256	374	535	355	519	13182	13917
5.	Natuna	3288	397	75	103	241	165	4269	4914
6.	Lingga	3564	464	50	130	30	200	4438	6267
7.	Anambas	1677	365	14	529	54	131	2770	2863
	Kepulauan Riau	59260	42946	1744	5182	8333	4959	122424	117225

Sumber : Dapodik 2025 dan Kemenag Kepri 2025

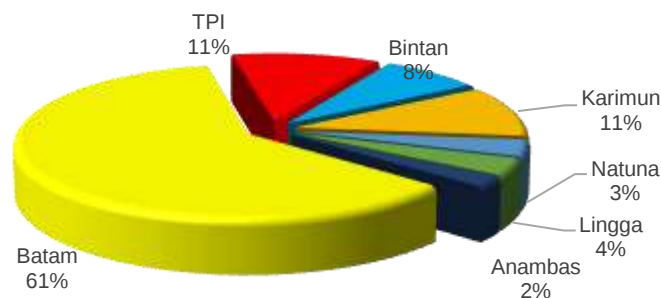
Gambar 1.50
Persentase Sebaran Jumlah Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Gambar 1.50 menjelaskan bahwa sebanyak 48% atau setara dengan 59.260 peserta didik berasal dari satuan pendidikan menengah atas (SMA), sebanyak 42.946 atau setara dengan 35% merupakan peserta didik yang berasal dari pendidikan vokasi (SMK), sebanyak 5.182 peserta didik atau setara dengan 4% berasal dari peserta didik Madrasah Aliyah (MA), sebanyak 8.333 peserta didik atau setara dengan 7% berasal dari Pondok Pesantren, sebanyak 1.744 atau setara dengan 2% berasal dari Pendidikan Khusus (SLB) dan sisanya berasal dari Pendidikan Berbasis Masyarakat (PKBM).

Secara keseluruhan jumlah peserta didik terbesar ada di Kota Batam sebanyak 61%, disusul Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun 11%, disusul Kabupaten Bintan 8% dan terendah ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sekitar 2%.

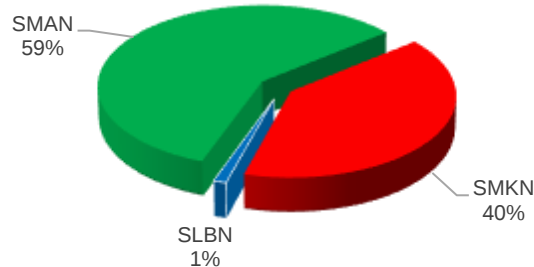
Gambar 1.51
Persentase Sebaran Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Kab/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.51 di jelaskan bahwa jumlah peserta didik terbesar berada di Kota Batam sebanyak 61% atau setara dengan 74.273 peserta didik, selanjutnya untuk posisi kedua terbesar jumlah peserta didik berada di Kota Tanjungpinang sebanyak 11% atau setara dengan 13.874 peserta didik. Kabupaten Karimun berada di urutan selanjutnya yang memiliki peserta didik sebanyak 13.182 jiwa atau setara dengan 11% dari total peserta didik serta Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah terkecil yang memiliki peserta didik yaitu sebanyak 2770 peserta didik atau setara dengan 2% dari total peserta didik yang ada di Kepulauan Riau.

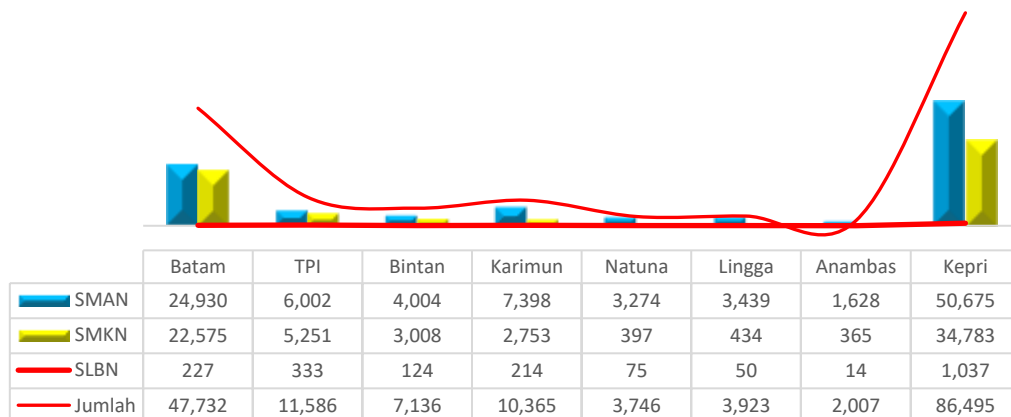
Grafik 1.52
Persentase Sebaran Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Negeri
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Pada Gambar 1.52 dan Gambar 1.53 menjelaskan sebaran peserta didik yang bersekolah pada satuan pendidikan negeri (SMAN/SMKN/SLBN) tercatat sebanyak 86.495 yang terdiri atas jumlah peserta didik pada satuan pendidikan menengah (SMAN) sebanyak 50.675 atau setara dengan 59% dari seluruh peserta didik yang ada pada satuan pendidikan negeri, sebanyak 34.783 peserta didik atau setara dengan 40% berada pada satuan pendidikan vokasi (SMKN) dan sisanya 1.037 peserta didik berada pada satuan pendidikan khusus (SLBN). Secara lengkap sebaran peserta didik pada satuan pendidikan negeri di kabupaten/kota pada Provinsi Kepulauan Riau dijelaskan pada Gambar 1.46 di bawah ini.

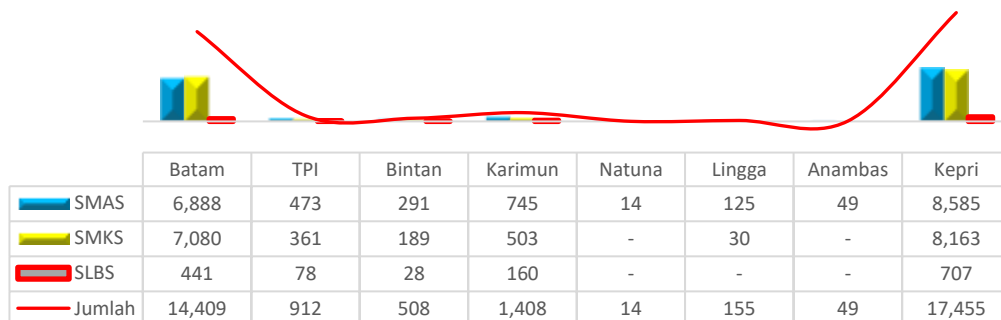
Gambar 1.53
Jumlah Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLB Negeri
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

Peran masyarakat dalam dunia pendidikan sangat penting karena pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah, tetapi juga keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial secara luas. Peranan masyarakat tersebut diwujudkan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan yang modern dan telah banyak menghasilkan peserta didik yang berhasil. Pada tahun 2025 jumlah satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 185 satuan pendidikan, yang terdiri dari satuan pendidikan menengah umum sebanyak 84 satuan pendidikan, 66 satuan pendidikan vokasi dan 15 satuan pendidikan khusus. Berikut sebaran peserta didik pada satuan pendidikan swasta di Provinsi Kepulauan Riau sbb :

Gambar 1.54
Jumlah Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Swasta
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

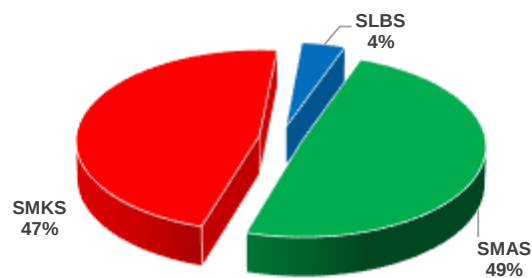


Sumber : Dapodik 2025

Pada Gambar 1.54 menjelaskan sebaran peserta didik yang bersekolah pada satuan pendidikan menengah yang dikelola masyarakat tercatat sebanyak 17.455 peserta didik, dari data tersebut sebanyak 49% atau setara dengan 8.585 peserta didik bersekolah pada satuan pendidikan menengah atas dan sebanyak 8.163 atau setara dengan 47% bersekolah pada satuan pendidikan vokasi dan sisanya sekitar 4% atau sebanyak 707 peserta didik berada di satuan pendidikan khusus.

Secara lengkap sebaran peserta didik berdasarkan pada jenis satuan pendidikan negeri di kabupaten/kota pada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dijelaskan pada Gambar 1.55 di bawah ini.

Gambar 1.55
Persentase Sebaran Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



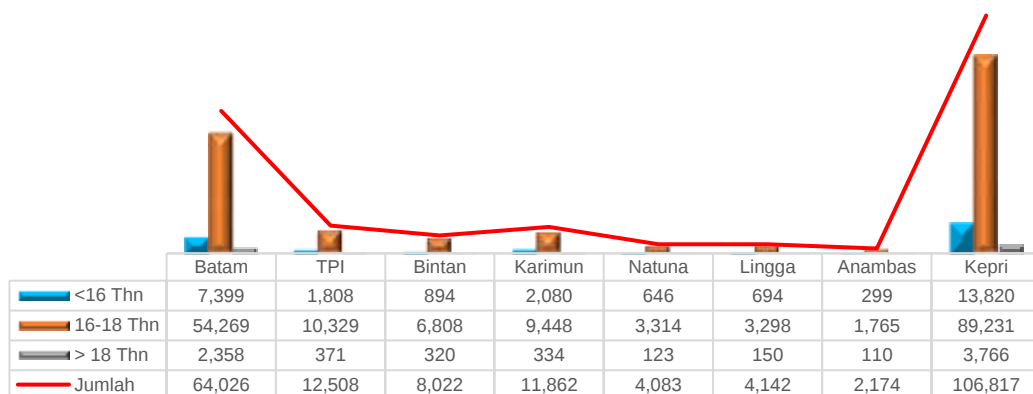
Sumber : Dapodik 2025

1.6.7. Kelompok Umur Peserta Didik

Kewenangan pendidikan pada satuan pendidikan menengah atas, pendidikan vokasi dan pendidikan khusus merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi, sesuai UU No. 23 Tahun 2014, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta manajemen pendidik, tenaga kependidikan (guru, mutasi, gaji, pangkat), kurikulum, akreditasi, dan infrastruktur, dengan tujuan pemerataan pendidikan, meskipun ada wacana pengembalian ke Kabupaten/Kota untuk efektivitas lokal.

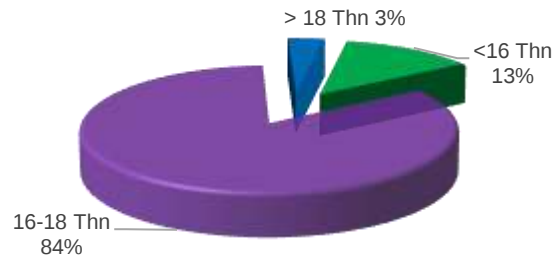
Kelompok umur sasaran pada pendidikan menengah atas dan kejuruan meliputi kelompok umur 16-18 tahun dan kelompok umur pada pendidikan khusus 4-17 tahun. Berikut jumlah peserta didik berdasarkan kelompok umur sbb :

Gambar 1.56
Sebaran Peserta Didik Berdasarkan Kelompok Umur Pada SMA, SMK dan MA
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

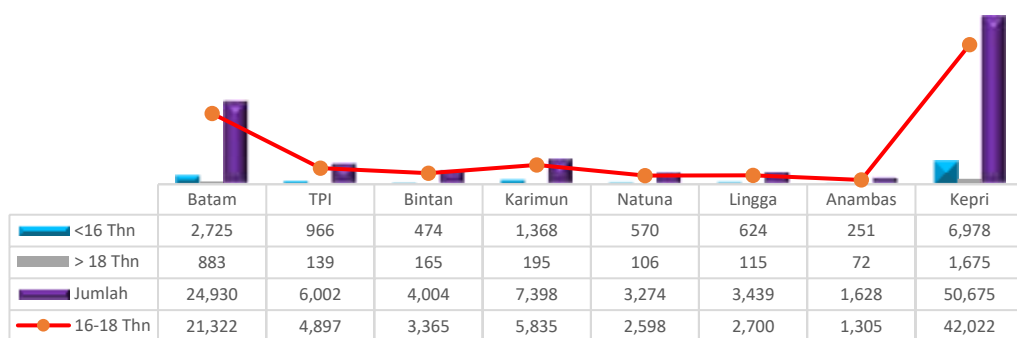
Gambar 1.57
Persentase Sebaran Peserta Didik Berdasarkan Kelompok Umur
Pada SMA dan SMK Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Berdasarkan pada Gambar 1.56 masih terdapat peserta didik dibawah kelompok umur 16 tahun dengan jumlah sebanyak 13.820 peserta didik atau setara dengan 13% dan peserta didik yang berusia diatas 18 tahun tercatat sebanyak 3.765 atau setara dengan 3% dari seluruh peserta didik yang terdaftar. Selanjutnya akan ditampilkan jumlah peserta didik berdasarkan umur berdasarkan jenis satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb :

Gambar 1.58
Sebaran Peserta Didik pada SMAN Berdasarkan Kelompok Umur
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

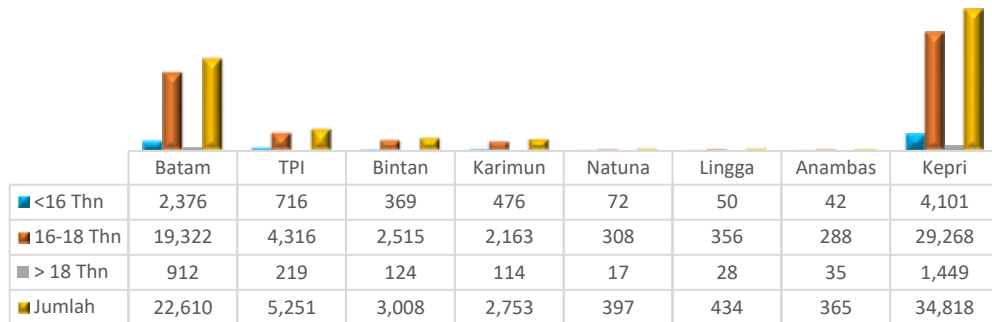


Sumber : Dapodik 2025

Berdasarkan pada Gambar 1.58 sebagian besar peserta didik berdasarkan umur berada diantara umur 16-18 tahun sebanyak 42.022 atau setara dengan 83%, kelompok umur dibawah 16 tahun tercatat peserta didik berjumlah 6.978 atau setara dengan 18% dan peserta didik yang

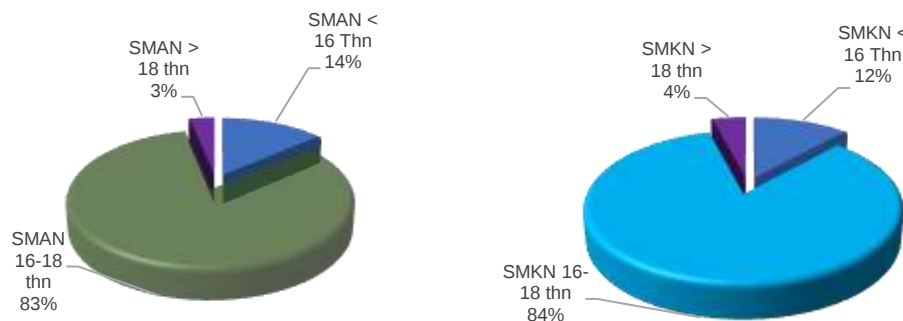
berusia diatas 18 tahun tercatat sebanyak 11.675 atau setara dengan 3% dari seluruh peserta didik yang terdaftar.

Gambar 1.59
Sebaran Peserta Didik Pada SMKN Berdasarkan Kelompok Umur
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 202

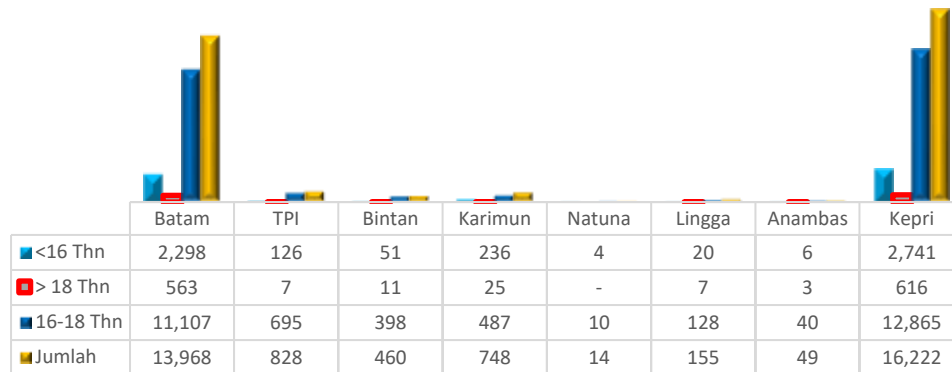
Gambar 1.60
Sebaran Persentase Peserta Didik pada SMAN dan SMKN
Berdasarkan Umur Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

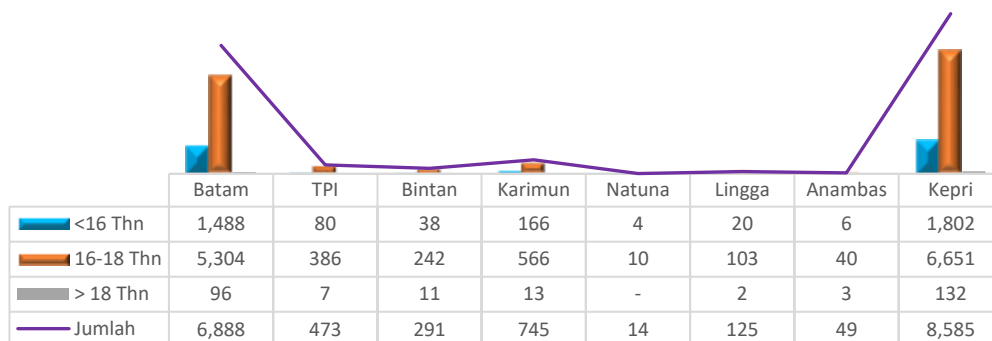
Distribusi peserta didik pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, sebaran peserta didik berdasarkan kelompok umur mengalami kemiripan yang terjadi pada satuan pendidikan milik pemerintah. Dari Gambar di bawah ini menjelaskan bahwa jumlah peserta didik pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat lebih banyak pada satuan pendidikan vokasi (SMKS). Secara garis besar peserta didik pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat diuraikan pada gambar sbb :

Gambar 1.61
Sebaran Peserta Didik pada SMAS dan SMKS Berdasarkan Kelompok Umur
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



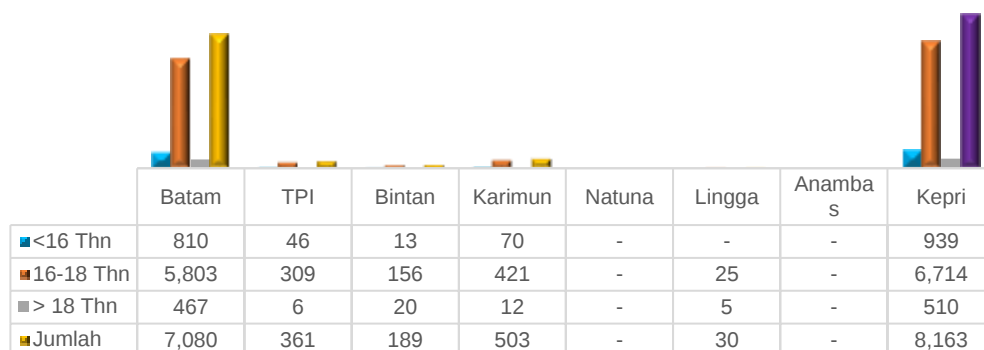
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.62
Sebaran Peserta Didik pada SMAS Berdasarkan Kelompok Umur
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



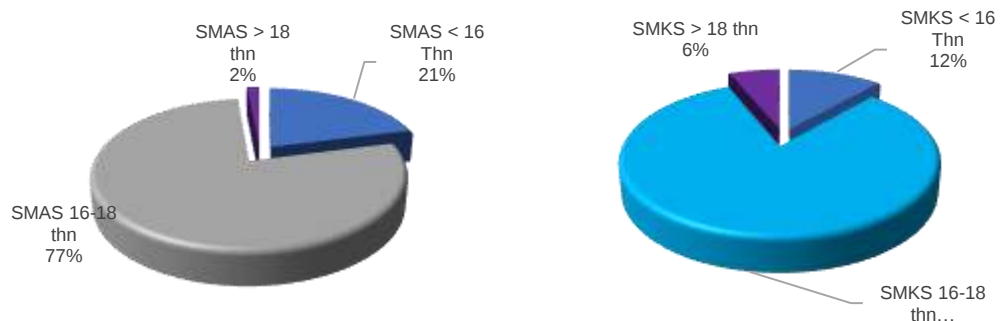
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.63
Sebaran Peserta Didik Pada SMKS Berdasarkan Kelompok Umur
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

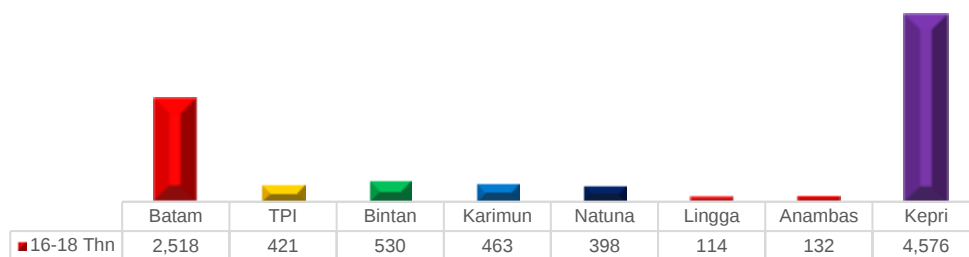
Gambar 1.64
Sebaran Persentase Peserta Didik pada SMAS dan SMKS
Berdasarkan Umur Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

Distribusi peserta didik pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) yang dikelola oleh Kementerian Agama diuraikan pada Gambar 1.65 dibawah ini :

Gambar 1.65
Sebaran Peserta Didik Pada Madrasah Aliyah Berdasarkan Kelompok Umur
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

1.7. Rombongan Belajar

Rombongan Belajar (Rombel) adalah sekelompok peserta didik atau siswa yang terdaftar dan dikelompokkan dalam satu kelas pada suatu satuan pendidikan. Definisi ini mengacu pada jumlah siswa dalam satu rombongan, yang diatur dalam peraturan seperti Permendikbud. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

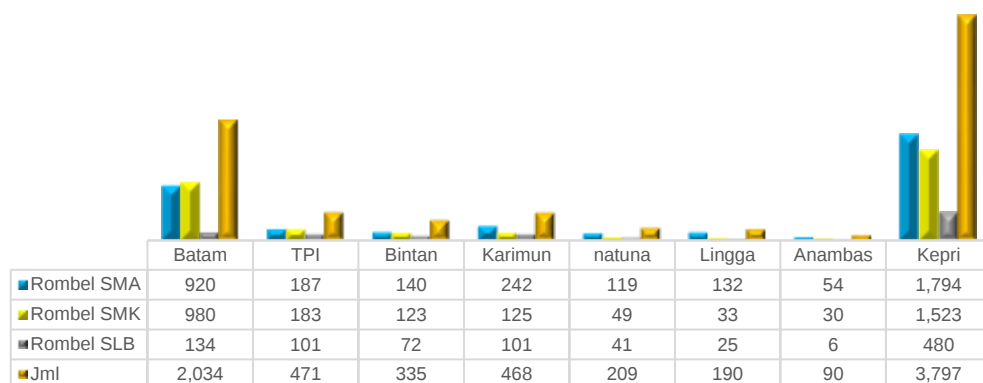
Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023 Tentang **Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan**, termasuk ketentuan maksimal jumlah peserta didik per rombongan belajar (rombel) untuk berbagai jenjang pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, Paket A/B/C, SLB) serta batasan

rombel di satuan pendidikan, dengan tujuan memastikan kualitas pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien, namun tetap fleksibel untuk kondisi khusus seperti daerah khusus atau sekolah baru.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 Tentang **Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan**, bahwa jumlah peserta didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan bahwa paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik untuk sekolah menengah atas/madrasah Aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah Aliyah kejuruan, 5 (lima) Peserta Didik untuk sekolah dasar luar biasa, 8 (delapan) Peserta Didik untuk sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 Tentang **Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan diatur juga jumlah maksimal rombel pada satuan pendidikan dengan ketentuan sbb, bahwa** sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar. Berikut jumlah rombel yang ada pada satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb :

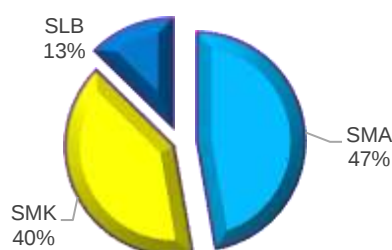
Gambar 1.66
Jumlah Rombongan Belajar Pada SMA/SMK dan SLB
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

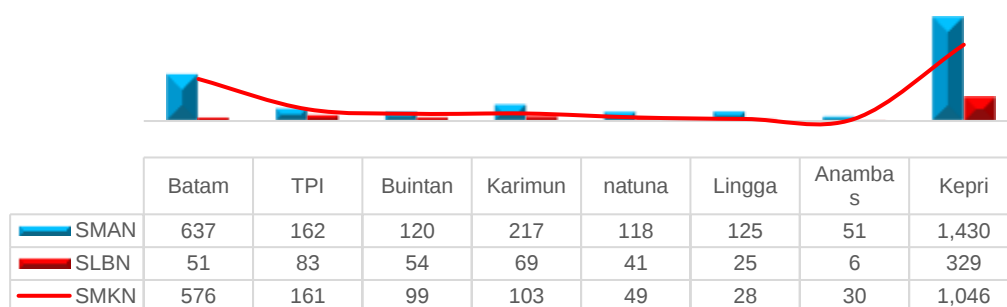
Berdasarkan pada Gambar 1.66 jumlah Rombongan Belajar (Rombel) pada satuan pendidikan menengah, vokasi dan pendidikan khusus di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 3.797 rombel, jumlah rombel terbesar ada pada satuan pendidikan sekolah menengah atas sebanyak 1.794 atau setara dengan 47% dan rombel pada satuan pendidikan vokasi sebanyak 1.523 atau setara dengan 40% dan sisanya rombel yang ada pada satuan pendidikan khusus.

Gambar 1,67
Persentase Sebaran Rombongan Belajar Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

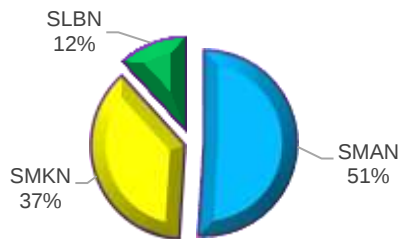
Gambar 1.68
Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

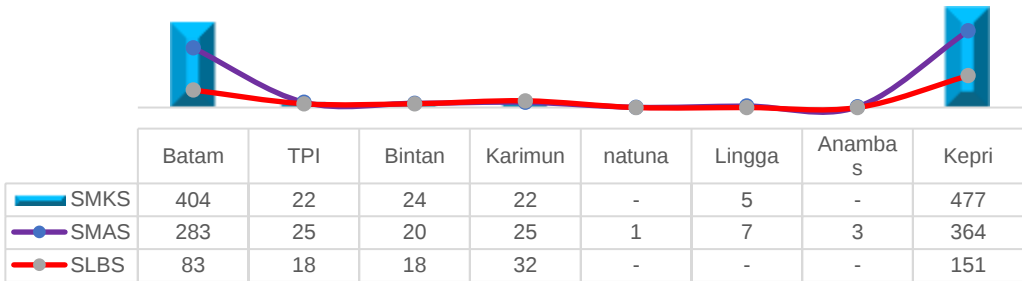
Gambar 1.68 menjelaskan jumlah rombel di Provinsi Kepulauan Riau pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1.430 rombel atau setara dengan 47%, pada pendidikan vokasi/SMKN sebanyak 1.046 atau setara dengan 37% dan rombel pada pendidikan khusus tercatat sebanyak 329 atau setara dengan 12% dari seluruh rombel yang ada sebagaimana yang dijelaskan pada Gambar 1.69

Gambar 1.69
 Persentase Rombongan Belajar
 Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2025



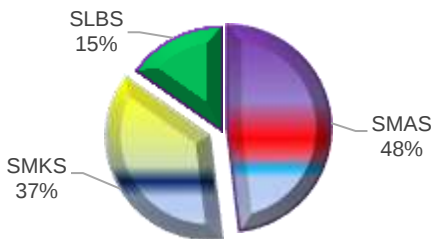
Distribusi rombongan belajar pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat (Swasta), memiliki perbedaan dengan satuan pendidikan yang dimiliki pemerintah (Saatuan pendidikan negeri), pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat jumlah rombel pada satuan pendidikan vokasi/kejuruan lebih banyak disbanding dengan rombel yang ada pada satuan pendidikan menengah atas. Hal tersebut tergambar pada Gambar 1.70 dibawah ini :

Gambar 1.70
 Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan SMAS/SMKS/SLBS
 Di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.71
 Persentase Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan SMAS/SMKS/SLBS
 Di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2025



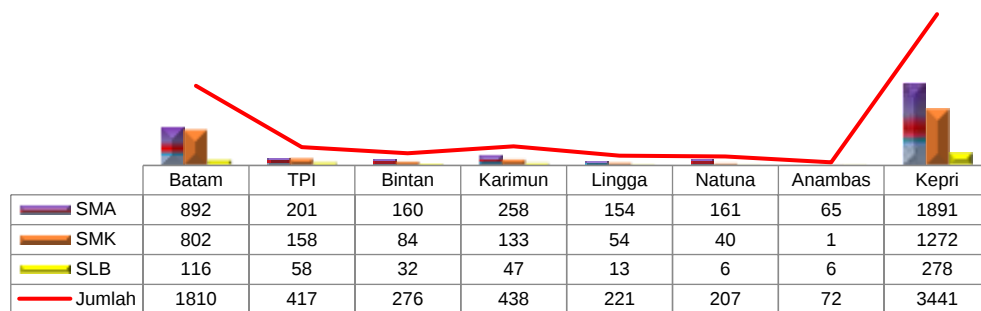
Sumber : Dapodik 2025

1.8. Ruang Kelas Belajar (RKB)

Ruang Kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) . Dalam ruang kelas terdiri dari meubeler seperti meja siswa, kursi siswa, meja guru, lemari kelas, papan tulis, serta aksesoris ruangan lainnya yang sesuai. Konfigurasi fisik ruang kelas yang baik dan pengaturan barang yang baik lebih dari sekadar pilihan gaya, pengaturan tempat duduk di ruang kelas tatap muka mempengaruhi pembelajaran, motivasi dan partisipasi siswa.

Selain memiliki fungsi utama sebagai tempat proses belajar mengajar, ruang kelas juga sebagai tempat interaksi edukatif, mendukung konsentrasi dan kenyamanan belajar, media pengembangan potensi peserta didik , sarana evaluasi belajar serta tempat pembiasaan karakter peserta didik. Pada Gambar 1.72 Berikut jumlah ruang kelas berdasarkan kab/kota tahun 2025 sbb :

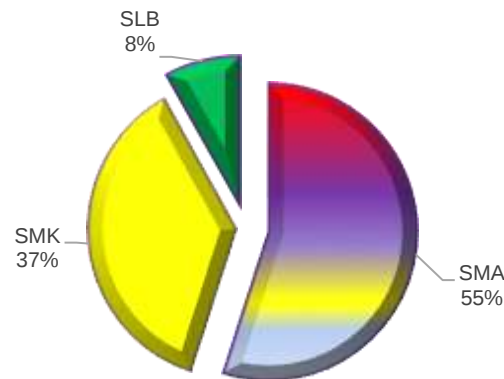
Gambar 1.72
Jumlah Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

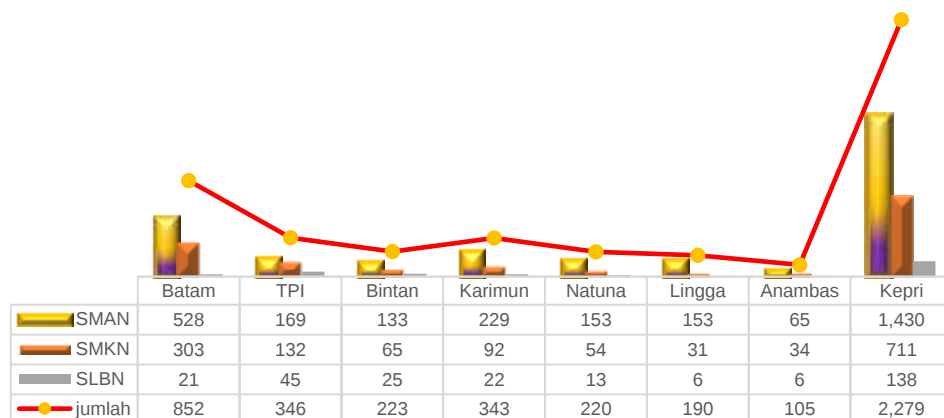
Pada Gambar 1.73 di bawah ini menjelaskan bahwa jumlah ruang kelas belajar pada satuan pendidikan menengah atas, menengah vokasi dan pendidikan khusus di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 3.441. Dari data tersebut sebanyak 1.891 merupakan RKB pada satuan pendidikan SMA, 1.272 RKB pada satuan pendidikan menengah vokasi dan sebanyak 278 merupakan RKB pada satuan pendidikan khusus. Berikut persentase RKB pada satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Gambar 1.73
 Persentase Ruang Kelas Belajar (RKB)
 Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2025



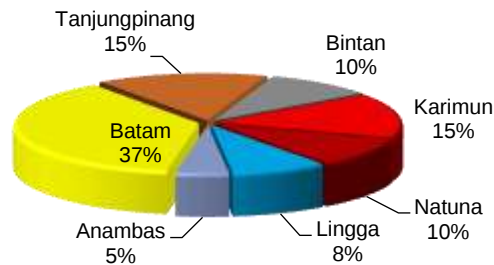
Selanjutnya Pada Gambar 1.74 di bawah ini menjelaskan bahwa jumlah ruang kelas belajar pada satuan pendidikan menengah atas, pendidikan vokasi menengah dan pendidikan khusus milik pemerintah (SMAN, SMKN, SLBN). Jumlah RKB yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 berjumlah 2.279 RKB dengan rincian terbesar ada di Kota Batam sebanyak 852 RKB, Kota Tanjungpinang 346 RKB, Kabupaten Karimun 343 RKB, Kabupaten Bintan 223 RKB, Kabupaten Natuna 220 RKB, Kabupaten Lingga sebanyak 190 RKB dan Kabupaten terkecil jumlah RKB adalah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan jumlah RKB sebanyak 105.

Gambar 1.74
 Jumlah Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN
 di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.75
Sebaran Persentase RKB Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

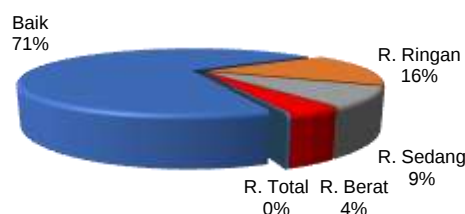


Sumber : Dapodik 2025

Pada Gambar 1.75 menjelaskan bahwa sebaran jumlah RKB terbesar ada di Kota Batam berkontribusi sebanyak 37%, selanjutnya kontribusi sebaran RKB pada Kota Tanjungpinang dan Kabupaten karimun berkontribusi masing-masing 15%, Kabupaten Bintan dan Natuna menyumbangkan kontribusi masing-masing 10% RKB, Kabupaten Lingga menyerap RKB 8% dan yang terkecil ada di Kabupaten Kepulauan anambas berkontribusi sebesar 5% dari keseluruhan RKB yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi RKB yang baik dan dilengkapi sarana pendukung menjadi pendukung dalam menentukan keberhasilan dan pencapaian tingkat pendidikan yang baik. Pada Gambar 1.76 menjelaskan kondis RKB di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

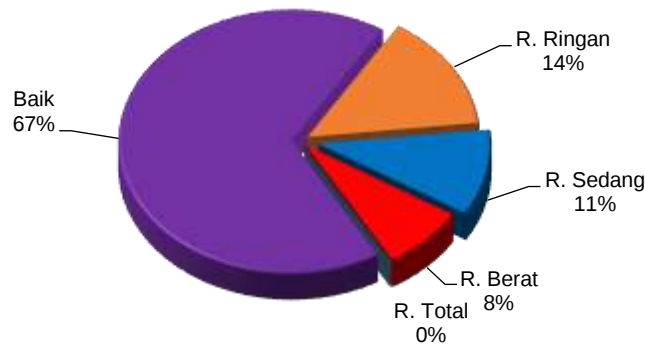
Gambar 1.76
Kondisi Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Kondisi RKB berdasarkan satuan pendidikan menengah atas, menengah kejuruan dan pendidikan khusus di di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 diuraikan pada Gambar 1.77, 1.178 dan 1.79 dibawah ini :

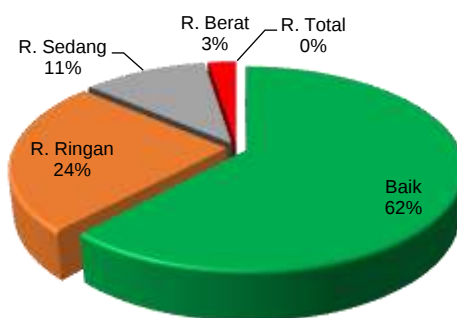
Gambar 1.77
Kondisi Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMAN
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Berdasarkan data yang diuraikan pada Gambar 1.77 menjelaskan bahwa kondisi RKB pendidikan menengah atas negeri (SMAN) di Provinsi Kepulauan Riau dalam kondisi baik 67%, rusak ringan 14%, rusak sedang 11% dan rusak berat 8%. Selanjutnya dijelaskan kondisi RKB pada SMKN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagaimana diuraikan dalam Gambar 1.178

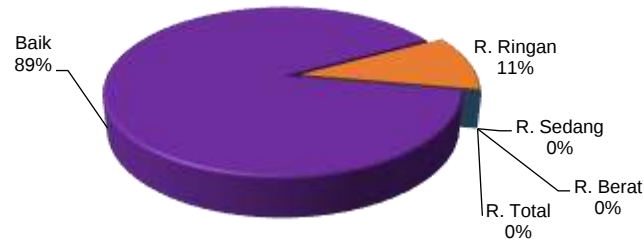
Gambar 1.78
Kondisi Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMKN
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Berdasarkan data yang diuraikan pada Gambar 1.78 menjelaskan bahwa kondisi RKB pada satuan pendidikan menengah vokasi (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau dalam kondisi baik 62%, rusak ringan 24%, rusak sedang 11% dan rusak berat 3%.

Gambar 1.79
Kondisi Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SLBN
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

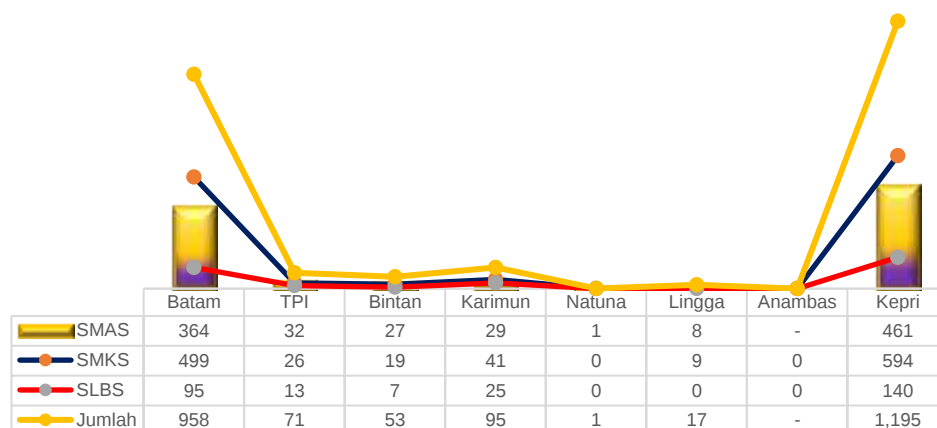


Sumber : Dapodik 2025

Berdasarkan data yang diuraikan pada Gambar 1.79 menjelaskan bahwa kondisi RKB pada satuan pendidikan khusus (SLBN) di Provinsi Kepulauan Riau dalam kondisi baik 89%, rusak ringan 11%, rusak sedang 0% dan rusak berat 0%.

Pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, kondisi berbeda terjadi dimana RKB pada satuan pendidikan menengah vokasi lebih banyak dari pada satuan pendidikan menengah atas maupun pada satuan pendidikan khusus. Berikut jumlah RKB pada satuan pendidikan swasta di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

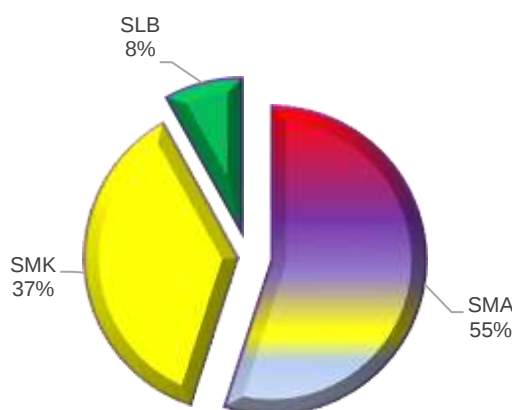
Gambar 1.80
Jumlah Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMAS/SMKS/SLBS
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.80 diatas menjelaskan bahwa RKB pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat/swasta di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 1.195. Kota Batam memiliki 958 RKB dan merupakan terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya Kabupaten Karimun memiliki 95 RKB dan diikuti Kota Tanjungpinang sebanyak 71 RKB dan Tanjungpinang memiliki 71 RKB sedangkan Kabupaten Anambas tidak memiliki satuan pendidikan swasta. Selanjutnya Gambar 1.80 persentase RKB pada satuan pendidikan swasta di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.

Gambar 1.81
Persentase Ruang Kelas Belajar (RKB)
Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

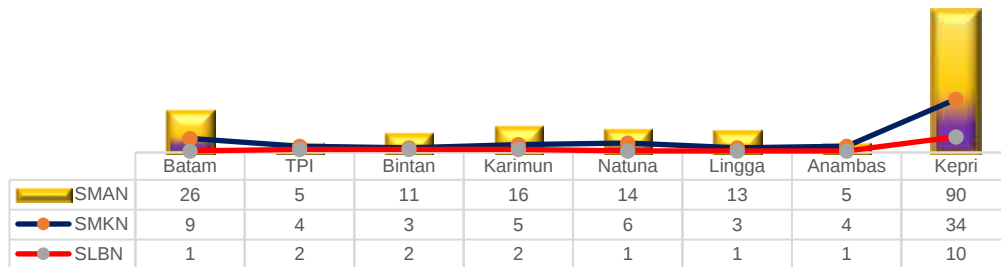


Sumber : Dapodik 2025

1.9. Ruang Perpustakaan

Perpustakaan adalah lembaga atau tempat untuk mengelola dan menyimpan buku, koleksi karya tulis, cetak, dan rekam secara profesional untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi masyarakat. Fungsi utamanya adalah menyediakan akses terhadap pengetahuan dan informasi melalui berbagai jenis layanan dan fasilitas yang beragam. Jumlah perpustakaan pada satuan negeri di Provinsi Kepulauan Riau tergolong cukup dimana terdapat 90 perpustakaan yang ada pada sekolah milik pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau. Berikut sebaran perpustakaan yang ada sbb :

Gambar 1.82
Jumlah Ruang Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



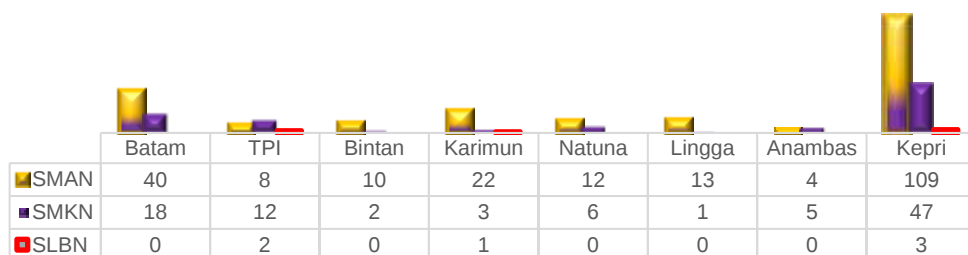
Sumber : Dapodik 2025

1.10. Laboratorium

Laboratorium sekolah adalah fasilitas yang dilengkapi peralatan khusus di lingkungan sekolah untuk kegiatan praktikum, eksperimen, dan penelitian siswa, yang berfungsi mempraktikkan teori, mengembangkan keterampilan ilmiah, serta menumbuhkan sikap ilmiah, dan menjadi sarana penting dalam mendukung pembelajaran sains seperti fisika, kimia, dan biologi. Tujuan laboratorium adalah menyediakan tempat dan peralatan untuk penelitian, eksperimen, dan pengukuran ilmiah guna menguji teori, memecahkan masalah, dan mengembangkan pengetahuan

Beberapa fasilitas pendidikan berupa laboratorium yang tersedia diantaranya Laboratorium computer, laboratorium bahasa, Laboratorium IPA, Laboratorium Fisika, dan Laboratorium Biologi. Laboratorium modern memiliki furnitur yang fleksibel dan kegiatan di dalamnya terintegrasi langsung dengan pelajaran. Berikut jumlah laboratorium pada satuan pendidikan menengah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.

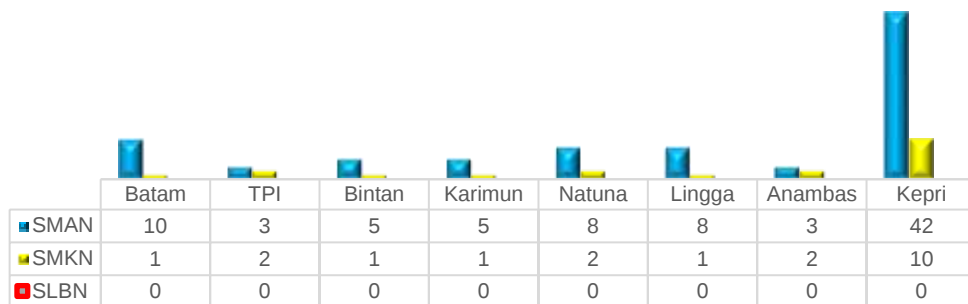
Gambar 1.83
Jumlah laboratorium Komputer Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Pada Gambar 1.83 Menjelaskan bahwa belum semua satuan pendidikan yang memiliki laboratorium computer, hal disebabkan karena belum tersedianya ruangan laborotorium yang disebabkan oleh beberapa factor diantaranya keterbatasan anggaran, keterbatasan lahan dan beberapa sekolah baru beroperasi.

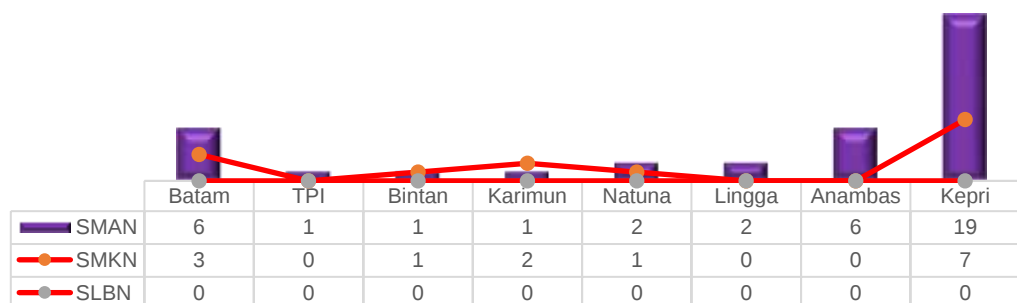
Gambar 1.84
Jumlah laboratorium Bahasa Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Pada Gambar 1.85 dibawah ini menggambarkan realisasi laboratorium IPA pada satuan pendidikan (SMAN/SMKN/SLBN) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, dari data tersebut belum seluruhnya satuan pendidikan memiliki laboratorium IPA hai ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan aggaran yang tersedia dan ketersediaan lahan yang ada.

Gambar 1.85
Jumlah laboratorium IPA Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

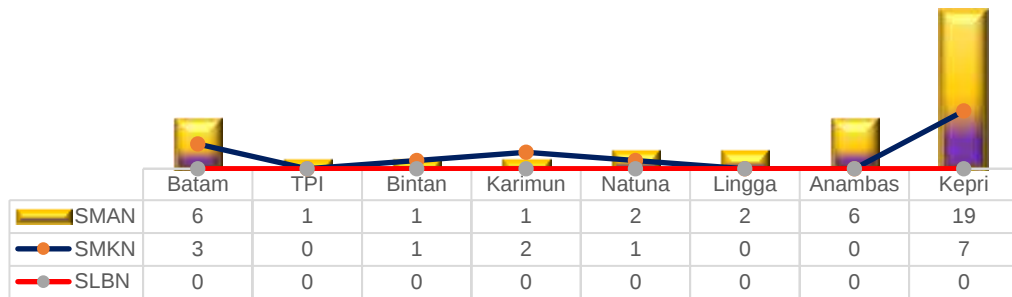


Sumber : Dapodik 2025

Pada Gambar 1.85 menggambarkan realisasi laboratorium IPA pada satuan pendidikan (SMAN/SMKN/SLBN) di Provinsi Kepulauan Riau tahun

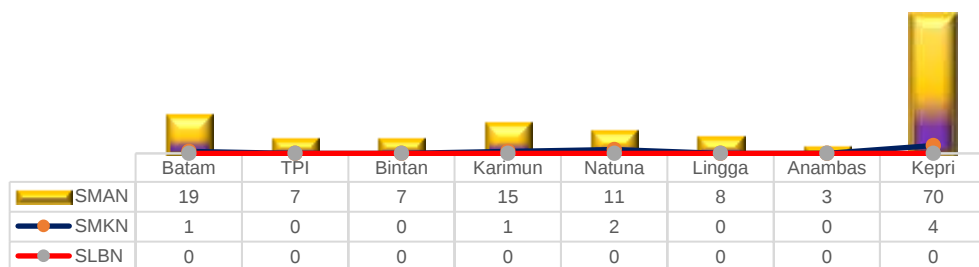
2025, dari data tersebut belum seluruhnya satuan pendidikan memiliki laboratorium IPA ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia dan ketersediaan lahan yang ada.

Gambar 1.86
Jumlah laboratorium Fisika Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 1.87
Jumlah laboratorium Biologi Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

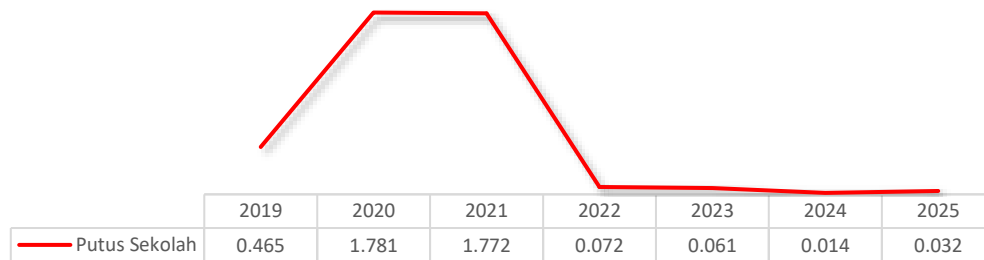
1.10.1. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah persentase atau jumlah siswa yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu (misalnya SD, SMP, atau SMA) pada periode waktu tertentu, meskipun sebelumnya mereka terdaftar sebagai siswa. Penyebab utama angka putus sekolah umumnya disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga, kurangnya motivasi belajar, masalah keluarga atau lingkungan, akses sekolah yang sulit dan kondisi yang mengharuskan anak bekerja untuk membantu keluarga

Dengan membaiknya fasilitas, distribusi PTK, penyebaran dan didukung oleh berbagai program seperti beasiswa, bantuan operasional

sekolah, bantuan operasional siswa dan berbagai program kemudahan lainnya, secara umum angka putus sekolah dari tahun cenderung mengalami penurunan, berikut data angka putus sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 sd 2025 sbb :

Grafik 1.88
Angka Putus Sekolah Di Provinsi Kepulauan Riau
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019-2025

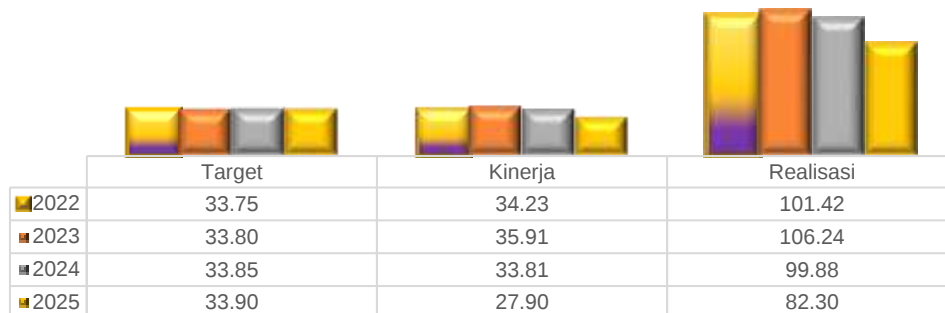


Sumber : Didik Prov Kepri 2025 (Data diolah)

1.10.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap usia sekolah adalah perbandingan jumlah sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk. Rasio ini menunjukkan kemampuan sekolah untuk menampung seluruh penduduk usia sekolah. Semakin tinggi nilai rasio, maka kesempatan belajar dan sekolah bagi penduduk usia sekolah akan semakin baik

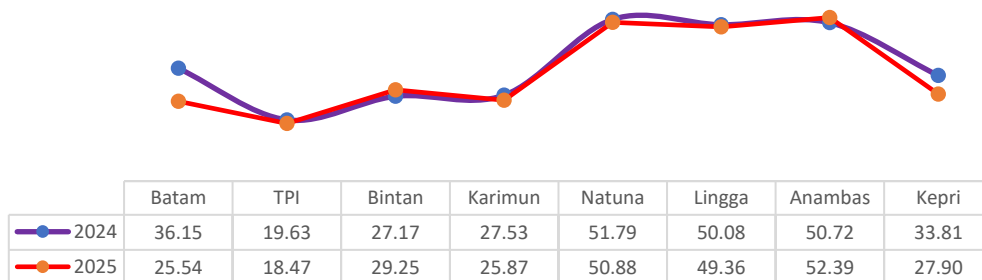
Grafik 1.89
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022 – 2025



Sumber : Didik Prov Kepri 2025 (Data diolah)

Pada Gambar 1.89 menjelaskan bahwa pada setiap 10.000 penduduk usia sekolah terdapat 27.90 satuan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) yang tersedia, Grafik 1.88 menggambarkan realisasi rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 belum dapat memenuhi sesuai dengan target kinerja.

Grafik 1.90
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024-2025



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri 2025

1.10.3. Rasio Pendidik Terhadap Peserta Didik Sekolah Menengah

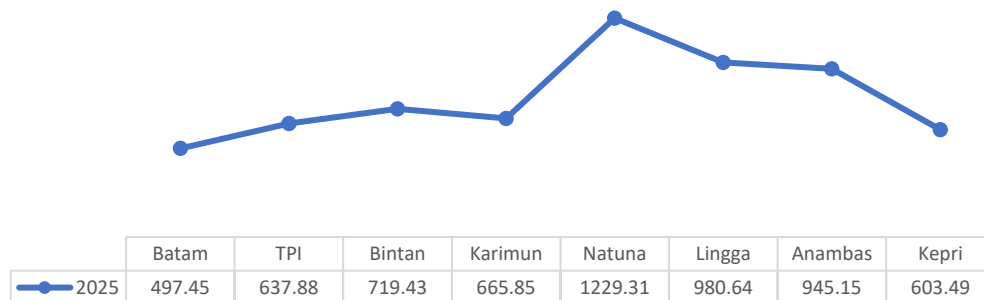
Rasio guru dan peserta didik adalah perbandingan jumlah guru dengan jumlah siswa dalam suatu lingkungan pembelajaran. Rasio ini penting karena memengaruhi kualitas pembelajaran, seperti interaksi guru dan siswa, pemberian perhatian individual, dan ketersediaan sumber daya pembelajaran.

Rasio guru dan peserta didik dapat dihitung dengan membagi jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan yang sama. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran kelas yang kecil dan rasio siswa-guru yang lebih rendah memberikan manfaat bagi prestasi siswa. Namun, rasio guru dan peserta didik bukan faktor penentu keberhasilan proses belajar mengajar. Keterampilan dan pengalaman pendidik juga perlu dipertimbangkan

Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah rasio antara peserta didik dengan guru. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat

pengawasan dan perhatian guru terhadap peserta didik sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Rasio guru terhadap peserta didik pada pendidikan menengah yang ideal adalah 1:20 untuk pendidikan menengah atas dan 1:15 untuk pendidikan kejuruan.

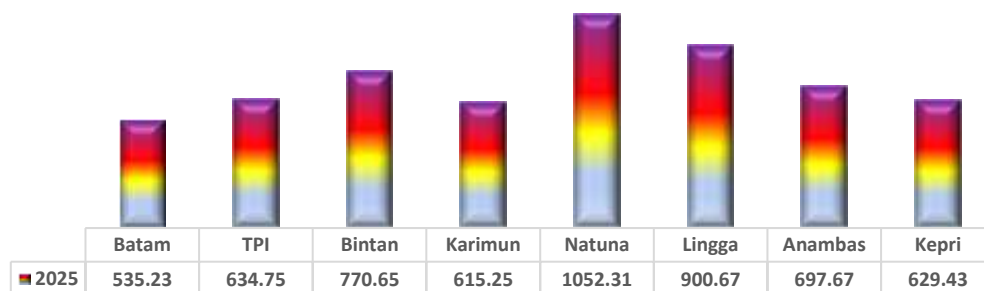
Grafik 1.91
Rasio Pendidik Terhadap Peserta Didik Pendidikan Menengah (SMA/SMK)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Disdik Prov Kepri 2024

Pada Gambar 1.91 menggambarkan realisasi rasio pendidik terhadap peserta didik pada pendidikan menengah (SMA/SMK) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 mengalami penurunan, penurunan ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk usia 16-18 tahun mengalami peningkatan sebesar 12,3%, pertumbuhan ini belum berbanding lurus dengan peningkatan tenaga pendidik yang pada akhirnya rasio guru terhadap peserta didik semakin melebar.

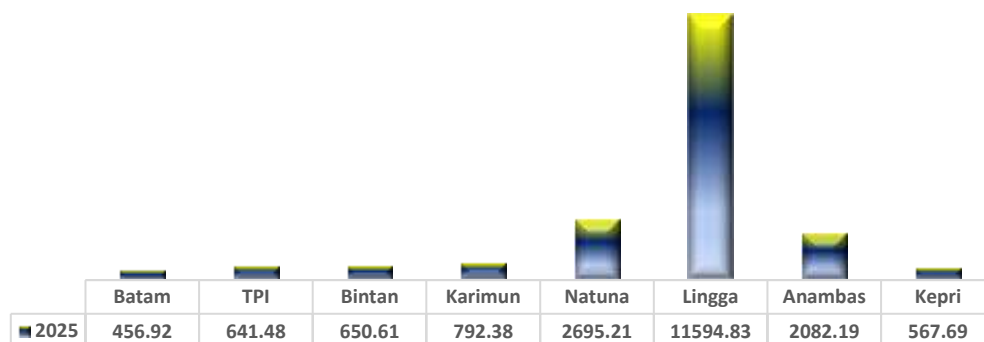
Grafik 1.92
Rasio Pendidik Terhadap Peserta Didik Pada SMAN
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Disdik Prov Kepri 2024

Pada Gambar 1.92 menjelaskan realisasi rasio pendidik terhadap peserta didik pada pendidikan menengah atas (SMAN) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 di tingkat provinsi mencapai 1:629.43/10.000 penduduk yang artinya setiap 10.000 penduduk terdapat 629.43 guru.

Grafik 1.93
Rasio Pendidik Terhadap Peserta Didik Pada SMKN
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Disdik Prov Kepri 2024

Pada Gambar 1.93 menggambarkan realisasi rasio pendidik terhadap peserta didik pada pendidikan menengah vokasi (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 berada pada 1: 567.69/10.000 penduduk yang artinya setiap 10.000 penduduk terdapat 567.69 guru pada pendidikan vokasi.

1.11. Numerasi dan Literasi

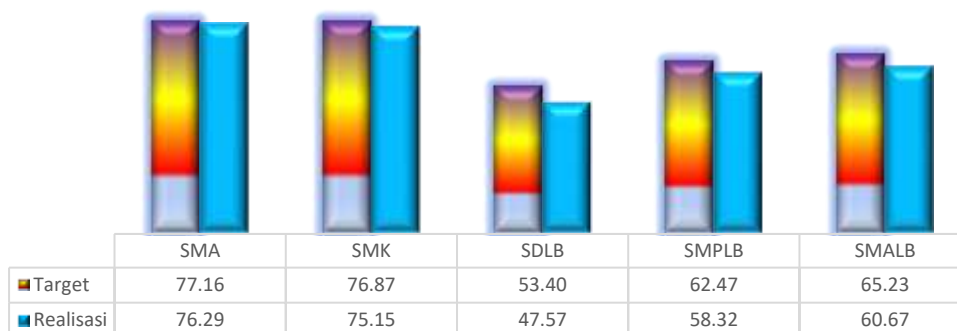
Literasi Kemampuan membaca dan memahami teks, memperkaya perbendaharaan kosakata, meningkatkan keterampilan interpersonal dan intrapersonal, menulis, dan mengolah informasi. Literasi juga bisa diartikan sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam bidang tertentu. Literasi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan masyarakat. Literasi yang baik dapat membantu seseorang untuk berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, dan berkomunikasi dengan efektif.

Beberapa jenis literasi, antara lain literasi baca dan tulis, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya, literasi media, literasi

teknologi, literasi perpustakaan, literasi visual. Beberapa manfaat literasi, antara lain meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mengembangkan nilai budi pekerti, memperkuat nilai kepribadian, meningkatkan peluang kerja dan partisipasi demokrasi

Numerasi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan angka serta simbol matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari. numerasi juga melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi kuantitatif yang ada di sekitar kita. Numerasi penting bagi setiap individu, terutama anak-anak yang masih bersekolah. numerasi dapat membantu kita dalam memahami dan menggunakan informasi kuantitatif dalam kehidupan. Komponen numerasi meliputi keterampilan memahami dan menggunakan konsep matematika dasar, keterampilan membaca, menafsirkan data dalam berbagai bentuk, keterampilan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan keterampilan berkomunikasi tentang matematika secara efektif. Contoh kegiatan numerasi: Menghitung, Menganalisis data, Melakukan eksperimen sederhana yang melibatkan perhitungan, Membuat tabel dan grafik untuk menyajikan hasil percobaan. Berikut capaian nilai literasi dan Numerasi pada Pendidikan menengah dan khusus di Provinsi Kepulauan Riau sbb :

Gambar 1.94
Capaian Nilai Literasi Di Provinsi Kepulauan Riau
Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri
Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri 2026

Gambar 1.95
Capaian Nilai Numerasi Di Provisni Kepulauan Riau
Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri
Tahun 2025

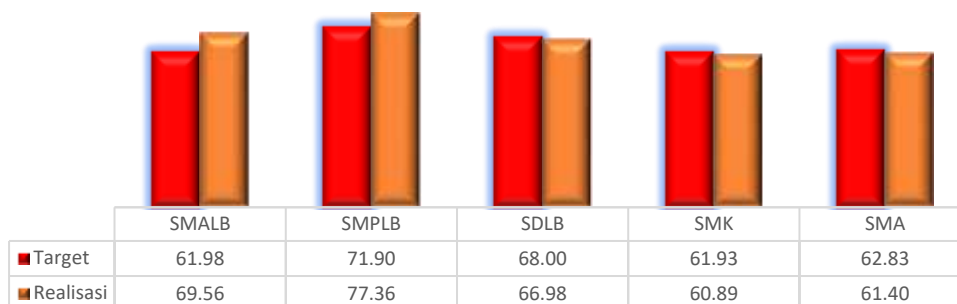


Sumber : Kemendidasmen 2026

1.8. Iklim Inklusivitas

Iklim inklusivitas adalah lingkungan pendidikan pasa satuan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan mengakomodasi keberagaman, memastikan semua individu—termasuk penyandang disabilitas, kebutuhan khusus, dan latar belakang berbeda—diterima, didukung, dan diperlakukan adil. Ini mencakup pelayanan, fasilitas, dan sikap positif yang menghapus diskriminasi untuk kesetaraan partisipasi. Berikut capaian kinerja Iklim Inklusivitas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.

Gambar 1.96
Capaian Nilai Inklusivitas Di Provisni Kepulauan Riau
Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri
Tahun 2025



Sumber : Kemendidasmen 2026

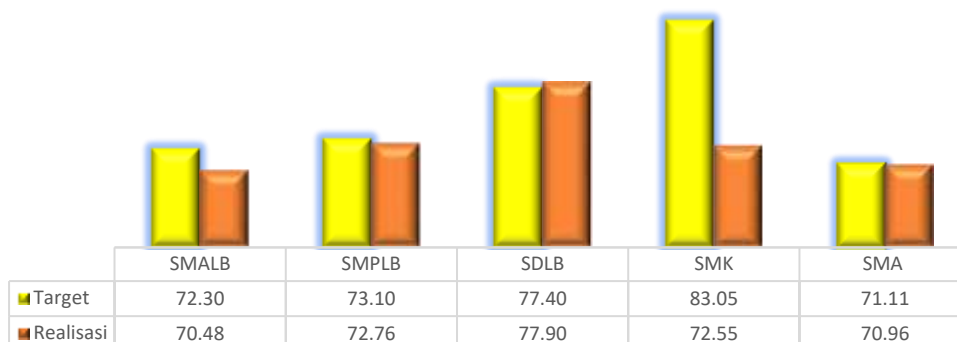
1.9 Iklim Keamanan

Iklim keamanan satuan pendidikan adalah kondisi lingkungan sekolah yang aman secara fisik dan psikologis, bebas dari perundungan, kekerasan seksual, hukuman fisik, serta penyalahgunaan narkoba. Ini diukur melalui survei lingkungan belajar untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, inklusif, dan suportif bagi seluruh warga sekolah, yang mencakup kebijakan proaktif dan pengawasan. Komponen utama dan upaya penguatan iklim keamanan di sekolah:

- a. Aspek Keamanan Fisik:, terdiri atas :
 1. Tersedianya sarana prasarana yang aman dan ramah disabilitas.
 2. Pengamanan lokasi sekolah dari potensi ancaman.
 3. Adanya prosedur operasional standar (POS) penanganan kekerasan.
- b. Aspek Keamanan Sosioemosional:
 1. Terciptanya hubungan positif antarwarga sekolah (guru, siswa, tenaga kependidikan).
 2. Lingkungan yang bebas dari perundungan (*bullying*) dan diskriminasi.
 3. Adanya kebebasan dari rasa takut akan kekerasan seksual.
- c. Upaya Penguatan:
 1. Pencegahan: Sosialisasi bahaya narkoba dan rokok, kampanye anti-bullying, dan peningkatan toleransi.
 2. Intervensi: Pembinaan, konseling, dan mediasi yang melibatkan guru BK dan orang tua.
 3. Monitoring: Penggunaan data dari Survei Lingkungan Belajar (Rapor Pendidikan) untuk tindak lanjut perbaikan.

Iklim keamanan yang baik berdampak pada peningkatan kualitas *well-being* siswa dan guru, yang pada akhirnya mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Berikut capaian kinerja Iklim keamanan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.

Gambar 1.97
Capaian Nilai Keamanan Di Provisni Kepulauan Riau
Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri
Tahun 2025



Sumber : Kemendidasmen 2026

1.10. Iklim Kebhinekaan

Iklim kebhinekaan satuan pendidikan adalah lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, di mana seluruh warga sekolah menghargai perbedaan budaya, agama, suku, dan kemampuan (inklusi). Ini mencakup toleransi, kesetaraan gender, serta pencegahan perundungan, memastikan keadilan bagi semua tanpa diskriminasi.. Komponen Utama Iklim Kebhinekaan:

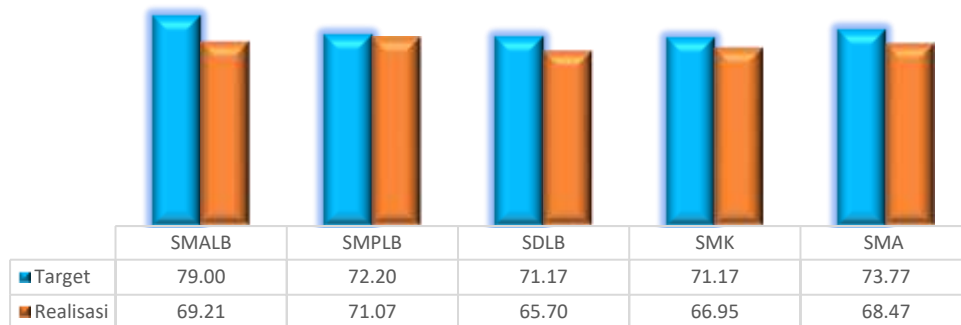
- a. Menghargai Keberagaman: Sikap menerima perbedaan sebagai kekayaan, bukan perpecahan.
- b. Inklusivitas: Pelayanan pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus.
- c. Kesetaraan Gender: Lingkungan yang adil bagi laki-laki dan perempuan dalam peran publik sekolah.
- d. Toleransi Beragama dan Budaya: Memfasilitasi kebutuhan ibadah dan perayaan hari besar berbagai agama

Strategi Penguatan iklim keamanan pada satuan pendidikan, hendaknya memperhatikan hal sbb :

- a. Peran Guru Penggerak: Menjadi penggerak lingkungan sekolah yang aman dan toleran.
- b. Integrasi Kurikulum: Memasukkan nilai-nilai multikultural dalam kegiatan pembelajaran.

- c. Program Sekolah: Kegiatan bersama untuk merajut kebersamaan, seperti diskusi antar kelompok atau program "Germabar" (Gerakan Makan Bareng).

Gambar 1.98
Capaian Nilai Kebhinekaan di Provisni Kepulauan Riau
Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri
Tahun 2025



Sumber : Kemendidasmen 2026

1.11. Tingkat Kepuasan DUDI Terhadap Budaya Kerja SMK

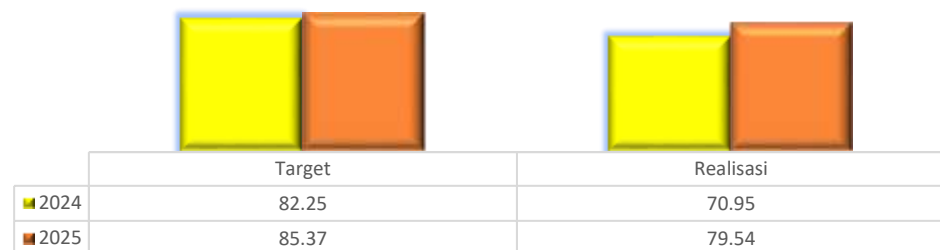
Tingkat kepuasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) terhadap lulusan SMK secara umum cukup tinggi, dengan laporan mencatat hingga 91% DUDI puas terhadap budaya kerja siswa. Kepuasan ini didukung oleh kesesuaian kompetensi teknis dan kemampuan prosedur kerja (K3) yang mencapai sekitar 80%, serta keterlibatan industri dalam uji kompetensi. Berikut adalah rincian mengenai tingkat kepuasan DUDI terhadap lulusan SMK:

- a. Tingkat Kepuasan Tinggi (Budaya Kerja): Studi menunjukkan sebagian besar industri puas dengan sikap, karakter, dan budaya kerja siswa SMK, terutama yang sudah melalui program praktik kerja langsung.
- b. Kompetensi Teknis: Kepuasan terhadap kemampuan menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta teknis spesifik berada pada kategori "Puas".
- c. Faktor yang Diapresiasi: DUDI menghargai siswa SMK yang memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi baik, dan mampu berkolaborasi dalam tim.

- d. Tantangan *Link and Match*: Meskipun puas, terdapat catatan bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK masih cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan (*gap*) kompetensi antara keahlian yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan riil industri yang terus berubah.
- e. Solusi Peningkatan: Untuk meningkatkan kepuasan, perlu penguatan kurikulum berbasis DUDI, peningkatan pengalaman kerja, serta kemampuan adaptasi teknologi baru.

Keterlibatan aktif DUDI dalam menyusun standar kompetensi di SMK (uji kompetensi) terbukti meningkatkan tingkat kepuasan mereka terhadap kualitas *output* (lulusan) yang dihasilkan. Berikut capaian kinerja tingkat kepuasan DUDI terhadap budaya kerja lulusan SMK tahun 2025.

Gambar 1.99
Capaian Nilai Tingkat Kepuasan DUDOI Terhadap Budaya Kerja Lulusan
SMK Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

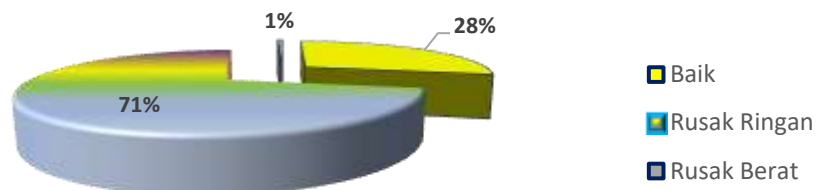


Sumber : Kemendidasmn 2026

1.12. Sumber Daya Aset

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat sebagian aset yang dalam kondisi rusak berat, sehingga memerlukan perbaikan dalam pemeliharannya sehingga dapat dioptimalkan penggunaannya. Dari 16.455 Aset yang ada, sebanyak 5.009 aset dalam keadaan baik dan sisanya 12.427 rusak ringan dan 102 aset rusak berat. Berikut persentase asset yang baik, rusak ringan dan rusak berat.

Gambar 1.100
Prosentase Kondisi Aset Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Sumber : Disdik Prov Kepri 2025

1.13. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja dapat diwujudkan melalui pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dijabarkan dalam kegiatan LAKIP dan Kinerja Indikator Utama, kedua alat ukur tersebut mencerminkan pencapaian secara umum hasil kinerja yang diuraikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik diharapkan mampu mendorong terwujudnya sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berweibawa. Manfaat dari penyusunan Laporan kinerja agar instansi pemerintah mampu mendorong meyelenggarakan tugas dan fungsi secara baaik dan benar (good governance), mendorong tumbuhnya pemerintahan yang akuntabel, efesien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.

Pencapaian nilai SAKIP dari tahun ke tahun menunjukkan nilai yang semakin meningkat, ini menggambarkan adanya peningkatan kinerja secakra keseluruhan mulai dari proses perencanaan hingga pencapaian

target kinerja. Berikut pencapaian nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sbb :

Gambar 1.101
Capaian Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021 - 2024



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri 2024

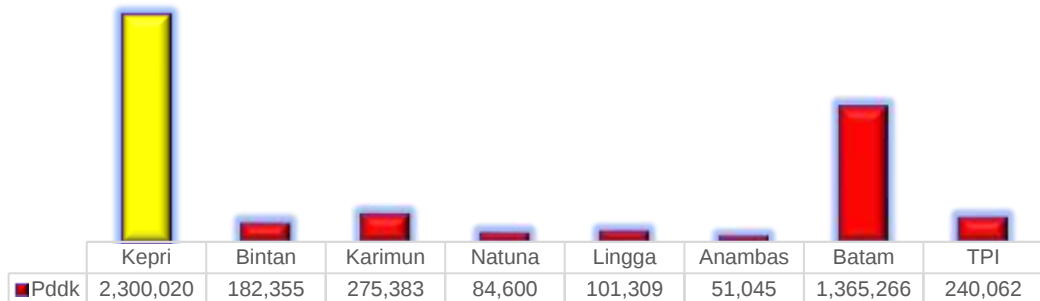
1.14. Kependudukan

Pendidikan sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pendidikan individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Demografi berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan karena jumlah dan distribusi penduduk mempengaruhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan.

Faktor sosial dan ekonomi masyarakat juga berpengaruh, seperti tingkat pendapatan yang memengaruhi akses terhadap pendidikan. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Karena itu aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan.

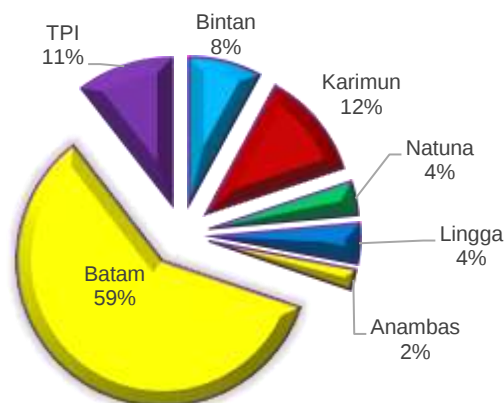
Aspek kependudukan sangat mempengaruhi kebijakan pendidikan. Berikut jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kab/kota Tahun 2025.

Gambar 1.101
Penyebaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

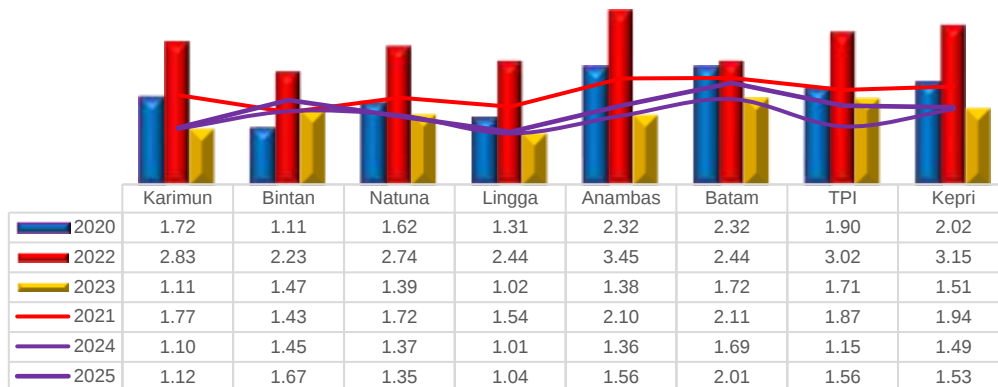
Gambar 1.102
Prosentase Sebaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

Gambar 1.103 Laju pertumbuhan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020- 2025 fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 sebesar 1,49%, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1,51%. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terendah adalah Kabupaten Lingga dan tertinggi Kota Batam. Gambaran Laju Pertumbuhan Penduduk selama 5 tahun terlihat pada grafik berikut ini.

Gambar 1.103
Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020 sd 2025

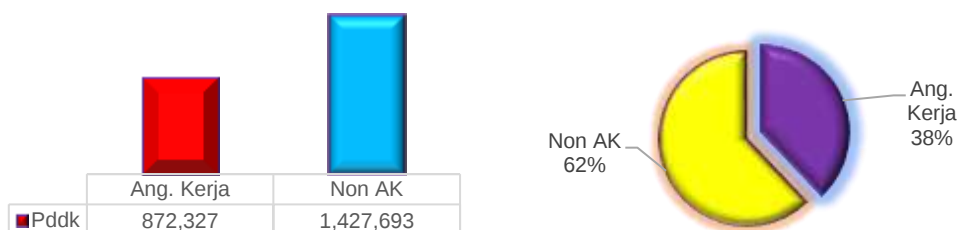


Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif (umumnya 15 tahun ke atas di Indonesia) yang bekerja, punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja (cuti, sakit), atau sedang mencari pekerjaan (pengangguran), dan dianggap aktif secara ekonomi, berbeda dari 'bukan angkatan kerja' seperti pelajar, ibu rumah tangga penuh waktu, atau pensiunan yang tidak mencari kerja. Konsep ini penting untuk mengukur tingkat partisipasi dan pengangguran guna memahami kondisi ketenagakerjaan suatu negara.

Gambar 1.104 menjelaskan bahwa angkatan kerja aktif sebesar 38% dari penduduk dengan usia kerja yang sedang aktif bekerja atau sedang mencari kerja. Jika membahas tentang angkatan kerja maka bisa dikatakan mereka adalah penduduk usia produktif, baik yang bekerja ataupun pengangguran.

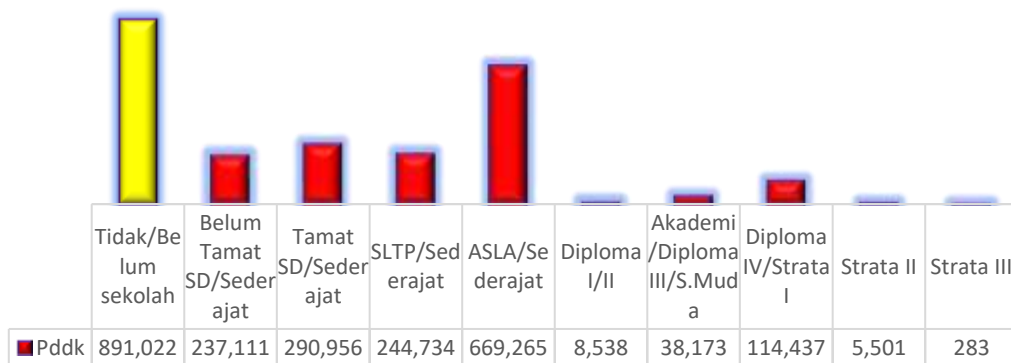
Gambar 1.104
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Angkatan Kerja
Tahun 2025



Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

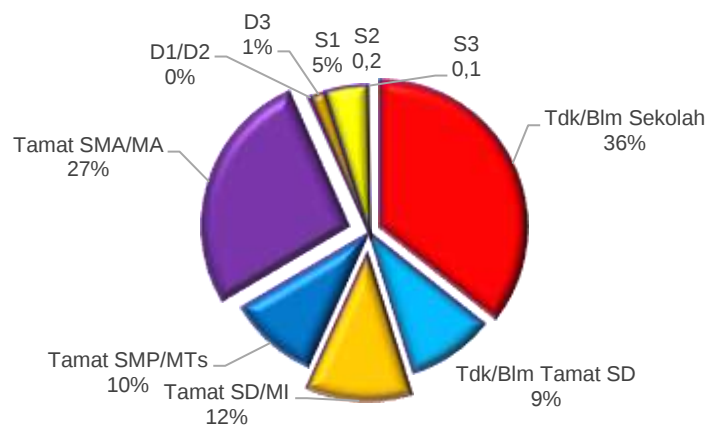
Hubungan antara penduduk dan tingkat pendidikan sangat erat dan saling memengaruhi, pendidikan meningkatkan kualitas SDM, pendapatan, kesehatan, dan kesejahteraan penduduk, sementara kepadatan penduduk memengaruhi akses fasilitas pendidikan dan kualitasnya (risiko *overcrowding*). Tingkat pendidikan tinggi memungkinkan penduduk mendapat pekerjaan lebih baik, penghasilan lebih tinggi, dan kesadaran kesehatan, yang pada akhirnya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, meskipun faktor ekonomi keluarga juga berperan penting dalam menentukan akses pendidikan tinggi.

Gambar 1.105
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025



Sumber : RPJMD Prov Kepri 2025-2029

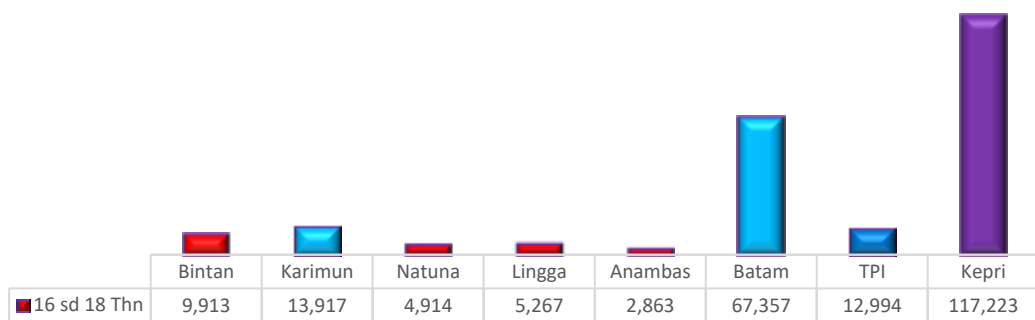
Gambar 1.106
Prosentase Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025



Sumber : RPJMD Prov Kepri 2025-2029

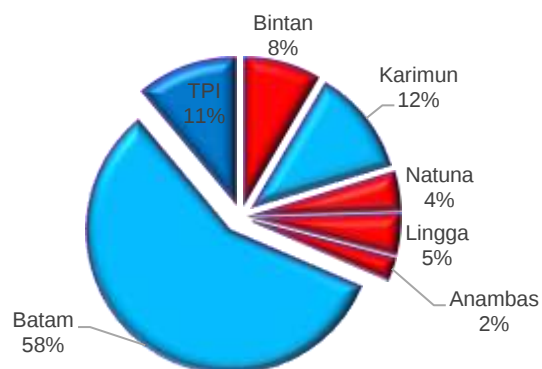
Gambar 1.106 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 27% merupakan tamatan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA), sebanyak 36% penduduk yang belum/tidak sekolah, 10% tamatan SMP/MTS, 5% berpendidikan sarjana, 02% berpendidikan Paskasarjana dan 0,1 penduduk berpendidikan doktoral. Proporsi terbesar penduduk Provinsi Kepulauan Riau masih/belum sekolah dengan provorsi sebesar 36%atau setara dengan 891.022 jiwa.

Gambar 1.107
Penduduk Berdasarkan Umur (16-18 Thn) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

Gambar 1.108
Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (16-18 Tahun) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

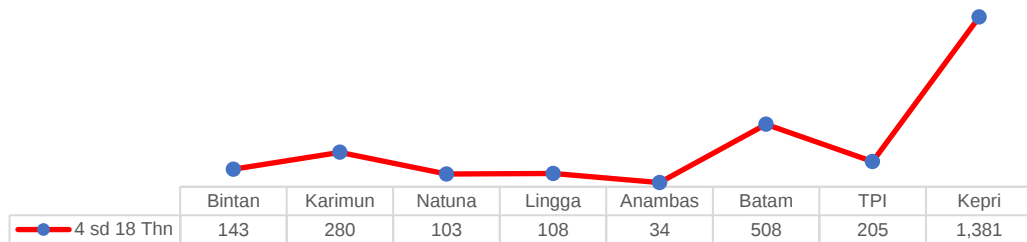


Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

Gambar 1.108 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan umur 16-18 tahun pada tahun 2025 sebanyak 117.233 jiwa. Penduduk berumur 16-18 tahun terbanyak berada di Kota

Batam tercatat sebanyak 67.357 jiwa atau setara dengan 58% dari total penduduk berusia 16-18 tahun yang berada di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025.

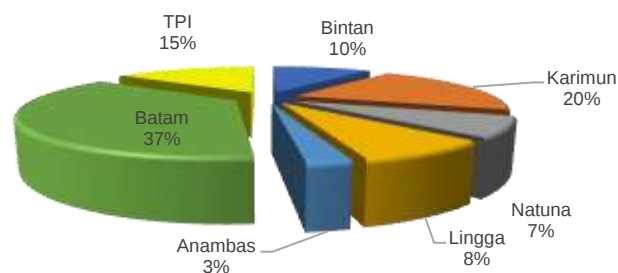
Gambar 1.109
Penduduk Disabilitas (4-18 Tahun) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

Gambar 1.110 di bawah ini menjelaskan bahwa persentase penduduk disabilitas Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 37% berada di Kota Batam, selanjutnya penduduk disabilitas 20% di Kabupaten Karimun, 15 berada di kota Tanjungpinang, 10% di Kabupaten Bintan, 8% di Kabupaten Lingga dan yang terkecil berada di Kabupaten Kepulauan anambas sebanyak 3%. Berikut secara lengkap distribusi penduduk disabilitas di Provinsi Kepulauan riau tahun 2025.

Gambar 1.110
Sebaran Penduduk Disabilitas Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

Penduduk pada usia tertentu (16-18 Tahun) merupakan sasaran dari indicator layanan Pendidikan khususnya layanan Pendidikan menengah (SMA/SMK) dan penduduk usia 4-18 yang memiliki layanan khusus merupakan sasaran layanan pendidikan khusus. Berikut jumlah penduduk tahun 2024.

1.15. Indeks Profesional ASN

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah instrumen statistik yang untuk mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara secara objektif, Penilaian IP ASN berdasarkan 4 dimensi utama: kualifikasi (25%), kompetensi (40%), kinerja (30%), dan disiplin (5%). Pengukuran ini bertujuan untuk menjamin profesionalitas pegawai, dan pemetaan kompetensi. Kategori Tingkat Profesionalitas Sangat Tinggi 91-100, Tinggi 81-90, Sedang 71-80, Rendah: 61-70 dan Sangat Rendah Kurang dari 60. Pengukuran ini diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, yang mewajibkan instansi melakukan pengukuran setiap tahun untuk memantau kualitas SDM Aparatur. Tujuan dilakukan penilaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

1. Mengukur tingkat profesionalitas ASN secara objektif.
2. Menjadi dasar perumusan kebijakan pengembangan SDM Aparatur.
3. Mendorong ASN untuk terus meningkatkan kualitas diri.

Empat dimensi utama dalam pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin, yang secara sistematis mengukur kualitas Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya sesuai standar profesionalitas, dengan bobot penilaian berbeda untuk tiap dimensi, terutama untuk memastikan meritokrasi dan peningkatan mutu layanan publik. Penjelasan dari dimensi dimaksud sbb :

a. Kualifikasi

Mengukur tingkat pendidikan formal ASN, mulai dari jenjang terendah hingga tertinggi, dengan bobot tertentu untuk setiap jenjang pendidikan (misalnya S3 memiliki bobot lebih tinggi daripada S1).

b. Kompetensi

Menilai gabungan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta program pengembangan kompetensi yang diikuti (diklat, seminar, workshop, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan.

c. Kinerja

Mengukur capaian penilaian kinerja individu (SKP) dan perilaku kerja,

termasuk target, hasil, dan manfaat yang dicapai dalam melaksanakan tugas.

d. Disiplin

Mengukur data kepegawaian terkait riwayat hukuman disiplin yang pernah diterima oleh ASN, sebagai indikator kepatuhan terhadap aturan.

Pengukuran IP ASN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 tercatat 84.57 atau setara dengan 105,11% dari target.. penilaian dilakukan terhadap 126 PNS dan 251 PPPK dengan hasil sbb

Tabel 1.9
Hasil Penilaian IP PNS Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Kategori	Jumlah	Kinerja (%)
1	Sangat Tinggi	44	34,92
2	Tinggi	51	40,48
3	sedang	31	24,60
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	0	0
	Jumlah	126	100

Sumber : Dinas Pendidikan 2025

Tabel 1.10
Hasil Penilaian IP PPPK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Kategori	Jumlah	Kinerja (%)
1	Sangat Tinggi	0	0
2	Tinggi	13	5,18
3	sedang	227	90,08
4	Rendah	11	4,28
5	Sangat Rendah	0	0
	Jumlah	251	100

Sumber : Dinas Pendidikan 2025

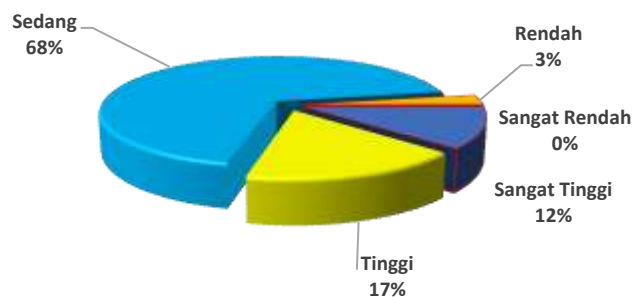
Berdasarkan pengukuran yang dilakukan pemisahan pada dua tabel diatas, maka secara keseluruhan Pengukuran IP ASN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan nilai sbb :

Tabel 1.11
Hasil Penilaian IP ASN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Kategori	Jumlah	Kinerja (%)
1	Sangat Tinggi	44	11,67
2	Tinggi	64	16,98
3	sedang	258	68.44
4	Rendah	11	2.92
5	Sangat Rendah	0	0
	Jumlah	377	100

Sumber : Dinas Pendidikan 2025

Gambar 1.111
Hasil Penilaian IP PNS Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



1.16. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik, yang digunakan sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur. IKM membandingkan harapan masyarakat dengan kinerja pelayanan, yang mencakup unsur seperti kecepatan, prosedur, dan kompetensi petugas. unsur-unsur yang dinilai dalam ikm adalah persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana & prasarana dan penanganan pengaduan Tujuan penilaian IKM diantara :

- a. Mengukur kualitas pelayanan public
- b. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan layanan
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi instansi
- d. Dasar pemberian reward & punishment

Tabel 1.12
Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021 sd 2025

No	Tahun	Nilai IKM	Kinerja (%)
1	2021	80,1	Baik
2	2022	83,5	Sangat Baik
3	2023	83,6	Sangat Baik
4	2024	85,0	Sangat Baik
5	2025	86,8	Sangat Baik

1.17. Penilaian Kepatuhan

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2028 tentang Ombudsman RI menyebutkan bahwa fungsi Ombudsman dibentuk sebagai penguatan fungsi, tugas dan peran serta mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik demi terwujudnya *good governance* and *clear governance*.

Penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas, sesuai standar prosedur, tidak semena-mena, berdedikasi tanpa ada konflik kepentingan, kesamaan kedudukan setiap masyarakat tanpa diskriminasi serta dengan diiringi peran aktif masyarakat maka setiap sektor pelayanan di negeri ini akan berjalan sebagaimana harapan dan cita-cita.

Ombudsman memiliki dua tugas pokok, yaitu mencegah maladministrasi dan memeriksa laporan dugaan maladministrasi yang berasal dari laporan atau investigasi atas prakarsa sendiri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ombudsman berpegang pada prinsip maupun nilai ke-Ombudsman-an. Khususnya terkait pemeriksaan, tentu itu menjadi pembeda Ombudsman dengan lembaga penegak hukum lain.

Secara umum Ombudsman dimaknai bukan sebagai lembaga pemberi sanksi namun dengan pendekatan ala Ombudsman maka mampu memberi pengaruh terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan, pengambilan kebijakan/keputusan pejabat negara dan memberi efek moral terhadap institusi sehingga diikuti walau tidak mengikat. Terkhusus dalam pelaksanaan pemeriksaan, Ombudsman memiliki karakteristik yang tidak dimiliki lembaga pengawas lain.

Ombudsman memiliki kewenangan meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dan memeriksa keputusan/surat-menyurat atau dokumen lain dari Pelapor, Terlapor maupun Pihak Terkait (Pasal 8 UU 37/2008). Terhadap kewenangan tersebut tentu tidak boleh dilakukan tanpa didasari dengan prinsip dan nilai ke-Ombudsman-an. Berikut prinsip yang menjadi pedoman dalam penanganan laporan.

Dalam pemeriksaan, Ombudsman memiliki 6 prinsip, yaitu pertama, independen yang artinya Ombudsman tidak terikat dengan kekuasaan apapun, bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara maupun instansi pemerintah lainnya. Ini berarti dalam melaksanakan tugas pemeriksaan Ombudsman tidak bisa diintervensi dengan kelompok atau individu dan bebas dari campur tangan kekuasaan tertentu.

Kedua, non-diskriminasi yang artinya bahwa dalam melakukan pemeriksaan Ombudsman memandang setiap pihak sama kedudukannya, tidak membedakan secara subjektif (*equality before the law*) namun tetap objektif bersikap kepada Pelapor maupun Terlapor.

Ketiga, tidak memihak artinya Ombudsman tidak serta merta "menghakimi" Terlapor dan bukan juga bertindak sebagai "pengacara" Pelapor. Dalam memutuskan temuan maladministrasi didasarkan pada aturan yang berlaku dan tidak berdasar pada kepentingan pihak tertentu.

Keempat, tidak memungut biaya dalam setiap tahapan pemeriksaan. Ini berarti tidak ada biaya apapun yang dipungut kepada Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait. Semua tahapan gratis, mulai dari awal pelaporan hingga sampai hasil akhir pemeriksaan.

Prinsip kelima, Ombudsman wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak. Artinya dalam memeriksa Terlapor, Pelapor dan Pihak Terkait harus mendengar klarifikasi maupun penjelasannya tanpa langsung menghakimi, berempati atas masalah yang diadukan namun tidak boleh berpihak pada Pelapor. Dan prinsip terakhir, mempermudah Pelapor dalam memberi penjelasan. Artinya

memberikan kemudahan kepada Pelapor sebagai pengguna layanan, tidak mempersulit dan berbelit-belit.

Istilah penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI) telah mengalami transformasi. Mulai tahun 2025, istilah yang digunakan adalah Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sebelumnya, istilah yang digunakan sejak tahun 2013 adalah Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berikut adalah rincian mengenai penilaian Ombudsman: Hasil Penilaian (Opini): Hasil dari penilaian ini dituangkan dalam bentuk Opini Ombudsman RI, yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagai tolok ukur kualitas pelayanan. Indikator Penilaian: Penilaian meliputi kompetensi penyelenggara, sarana prasarana, kepatuhan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan persepsi masyarakat. Zona Penilaian: Hasil penilaian dikategorikan ke dalam tiga zona:

- a. Zona Hijau: Predikat Kepatuhan Tinggi (Kualitas Tertinggi).
- b. Zona Kuning: Predikat Kepatuhan Sedang.
- c. Zona Merah: Predikat Kepatuhan Rendah.

Nilai kepatuhan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan yang positif. Hasil penilaian Ombudsman Perwakilan Riau yang dilakukan pada tahun 2025, terhadap beberapa perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan nilai kepatuhan tertinggi dan berada pada ZONA HIJAU dengan Nilai 92,39 dengan nilai kepatuhan SANGAT TINGGI.

Tabel 1.13
Hasil Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Tahun	Nilai	Zona	Opini
1	2021	na	na	na
2	2022	na	na	na
3	2023	88.04	Hijau	Tinggi
4	2024	92.39	Hijau	Sangat Tinggi
5	2025			

Sumber : Ombudsman Kepri 2025

1.18. Isu Strategis

Beberapa isu strategis pendidikan dalam rangka pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 diantaranya terdapat Kesenjangan kualitas, sarana dan prasarana, distribusi tenaga pendidik dan kependidikan antar wilayah, kemampuan literasi dan numerasi masih rendah, transformasi pendidikan berbasis teknologi belum merata antar satuan pendidikan maupun antar wilayah, jumlah guru produktif yang terbatas serta belum maksimalnya penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis potensi local.

Permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan diantaranya peningkatan kemampuan tenaga pendidik dengan pemerataan kemampuan ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang berbasis sertifikasi dan kompetensi, pemerataan distribusi tenaga pendidik dan guru produktif antar wilayah, pemanfaatan teknologi informasi dan optimalisasi potensi pendidikan vokasi yang perlu terus didorong agar lulusan sekolah kejuruan menghasilkan SDM yang berdaya saing dan mampu terserap di dunia industri dan dunia usaha serta dapat bersaing di dalam ekosistem industri serta inventarisasi aset dan pola pengelolaan keuangan SMK yang berbasis PPK-BLUD

isu-isu strategis pembangunan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan menggunakan scoring dan diskusi dengan seluruh bidang di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil diskusi dirumuskan isu-isu strategis yang akan ditangani Dinas Pendidikan dalam jangka waktu lima tahun kedepan meliputi:

1. Ketimpangan Akses dan Mutu Pendidikan antar wilayah dan antar satuan Pendidikan Ketimpangan akses pendidikan dapat dilihat dari partisipasi Pendidikan (APK, APM, APS), rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang belum merata di seluruh kabupaten/kota. Ketimpangan mutu Pendidikan dapat dilihat dari angka literasi dan numerasi, akreditasi sekolah dan sertifikasi guru yang belum merata di seluruh Kabupaten/Kota. kesenjangan layanan Pendidikan antar wilayah baik dari sisi mutu dan akses pendidikan pada satuan

pendidikan menengah dan Pendidikan khusus, kondisi ini sangat dipengaruhi kondisi geografis wilayah dan pendanaan Pendidikan yang terbatas.

2. Belum seluruh fasilitas pendidikan dapat dipenuhi pada satuan Pendidikan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
3. Distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang belum merata, terutama pada daerah terluar dan perbatasan.
4. Transformasi digitalisasi Pendidikan yang belum optimal.
5. Masih rendahnya profesionalitas tenaga pendidik, hal ini dicerminkan masih rendahnya kepemilikan sertifikasi guru di satuan Pendidikan.
6. Kurangnya pemenuhan standar lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri (IDUKI) yang dipengaruhi oleh kurangnya peralatan penunjang praktek siswa dalam pemenuhan kebutuhan industri, belum optimalnya pembelajaran SMK yang berbasis kelas industri, belum optimalnya kerjasama antara SMK dengan dunia usaha dan industri, serta pola pengelolaan keuangan yang belum menerapkan PPKBLUD.
7. Belum optimalnya peningkatan mutu Pendidikan SLB untuk menyiapkan penyandang disabilitas dapat diterima di lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta.
8. Kurangnya guru produktif (guru kompetensi) dan kurangnya kuantitas, pemerataan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
9. Pengelolaan manajemen asset pada satuan Pendidikan (Tanah/Gedung) yang sebagian belum berkekuatan hukum (belum bersertifikat).
10. Terbatasnya penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran berbasis konten.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Telaah Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi dan misi kepala daerah pada tahun 2025 merupakan masa transisi, Visi dan Misi masa transisi adalah rencana strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengatasi tantangan saat terjadi perubahan kepemimpinan atau fase baru, dengan fokus pada stabilitas ekonomi, pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan penyelarasan dengan kebijakan nasional (seperti visi jangka panjang negara), memastikan program berjalan efektif hingga pemerintahan baru siap mengambil alih, contohnya menjaga fiskal, mengoptimalkan layanan dasar, hingga hilirisasi ekonomi.

2.1.1. Visi dan Misi 2021–2025.

Visi kepala daerah periode 2021-2025 yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”** Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut bermakna sebagai berikut:

Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.

Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2025, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

3. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempersatukan hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi dan Misi, terutama pada Misi ke-3 yaitu **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa”**.

Tujuan dari strategis misi ke-3 yaitu Pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter. Dengan Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Mutu dan Akses Pendidikan, Tujuan dan sasaran strategis misi ke – 3 selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan di capai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

- e. Tujuan: Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan
- f. Sasaran terdiri dari :
 - 1. Meningkatkan mutu Pendidikan
 - 2. Meningkatkan Akses Pendidikan
 - 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan

Untuk mendukung pencapaian tujuan pada Visi dan misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan provinsi Kepulauan Riau didukung dengan program tahun 2021-2026 sbb :

- 1. Program Pengelola Pendidikan
- 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 3. Program Pengendalian Perizinan
- 4. Program Pengembangan Kurikulum

5. Program penguinjang urusan pemerintah daerah provinsi

Tujuan dan Sasaran kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 beserta target kinerja di tuangkan dalam table dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Urusan Bidang Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pembangu nan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya Akses Dan mutu Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	10,12	10,14	10,15	10,62	10,75	10,88
		Harapan Lama Sekolah	12,87	12,90	12,93	13,09	13,14	13,19
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	84,62	100	100	100	100	100

2.1.2. Visi Misi 2025-2029

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2021-2024; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang terpilih untuk masa jabatan tahun 2025-2030; berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2025- 2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024; memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dalam RPJMN; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 adalah:

“ KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA “

Penetapan visi tersebut dilandasi oleh ketentuan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang

berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. makna dari visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat di jelaskan sebagai berikut :

MAJU

Menceriminkan kondisi capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang lebih baik dan berkualitas dengan menjadikan potensi wilayah maritim sebagai modalitas utama pembangunan. Maju ditandai dengan menguatnya arah pembangunan human capital mengarah pada kondisi penduduk Kepulauan Riau yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang unggul sebagai faktor produksi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara konkret Kepulauan Riau yang maju ditunjukkan oleh penguasaan masyarakat Kepulauan Riau dalam sektor-sektor strategis pembangunan daerah mencakup sektor kelautan, industri pengolahan, pertambangan, energi baru dan terbarukan (EBT), ekonomi sirkular, dan sebagainya

Kepulauan Riau yang maju merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang produktif sehingga dapat memberikan hasil atau manfaat ekonomi maupun sosial bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara umum. Tujuan Kepulauan Riau untuk menjadi daerah maju berbasis maritim dapat dicapai jika pemenuhan sumber daya bagi masyarakat sudah tercukupi, kemudian pemanfaatan sumber daya yang ada diarahkan pada aktivitas dalam rangka peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan nilai, penciptaan produk dan pemasaran, serta akses terhadap perdagangan yang lebih luas.

Terwujudnya Kepulauan Riau yang Maju juga didukung oleh peningkatan daya saing daerah yang ditandai dengan adanya nilai tambah atau keunggulan khusus yang dapat dikomparasikan dengan daerah lainnya, sebagai identitas yang khas dari Kepulauan Riau. Kondisi Kepulauan Riau yang berdaya saing digambarkan dengan peningkatan kemampuan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan standar hidup bagi warga penduduk Kepulauan Riau. Lebih jauh berdaya saing

ditandai dengan menguatnya peran dan pengaruh Kepulauan Riau dalam ekosistem maritim nasional maupun global

MAKMUR

Narasi Makmur dimaknai dengan kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera, serba kecukupan atau tidak kekurangan. Untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kestabilan ekonomi dan pelayanan kesehatan serta sarana prasarana yang membantu kemudahan masyarakat.

Masyarakat makmur berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam masyarakat makmur, kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan terpenuhi secara memadai. Selain itu, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan memiliki akses yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi. Dalam mencapai masyarakat yang makmur, diperlukan kerjasama dan peran aktif dari semua komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga individu.

MERATA

Kata Merata dimaknai Masyarakat Kepulauan Riau dapat menikmati hasil pembangunan melalui pembangunan yang merata, berkualitas dan berkelanjutan yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara. Pemerataan pembangunan adalah proses pemerataan pembangunan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil. Pemerataan pembangunan bertujuan agar pembangunan dan peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, namun juga daerah lainnya yang tertinggal. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan infrastruktur pendidikan, sumber air, jalan, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perumahan, kesehatan, ketenagalistrikan, dan infrastruktur lainnya dibangun secara merata di seluruh wilayah. Sehingga semua lapisan masyarakat dan wilayah dapat merasakan hasil pembangunan yang sama

tanpa perlu melakukan urbanisasi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah Kepulauan Riau yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, di antaranya melalui peningkatan keterampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan ketahanan pangan dan semakin fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta meningkatkan pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif.

2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah

Membangun infrastruktur dan transportasi publik dalam menguatkan konektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; air baku; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; pembangunan dan atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi, serta peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih.

3. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter.

Misi ketiga ini mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Kepulauan Riau, agar semakin sehat dan pintar. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Kepulauan Riau dapat dijadikan

sebagai peluang sekaligus tantangan, untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Kepulauan Riau yang semakin sejahtera.

4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dilakukan melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang semakin dinamis berbasis teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Tata kelola pemerintahan yang bersih juga ditunjukkan oleh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan demokratis dan terbuka ditandai dengan meningkatnya Indeks Demokrasi Provinsi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan dan pemajuan budaya melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pemanfaatan dan pengembangan budaya melayu dan nasional. Dalam kaitan ini juga dilakukan penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Disamping itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pembangunan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi dan budaya serta ekologi. Misi ini akan mendorong pembangunan yang mampu menyelaraskan antara aspek perlindungan lingkungan hidup, dengan kepedulian terhadap ruang, kearifan lokal dan identitas serta subyek budaya sehingga proses

pembangunan yang dilakukan dapat merekatkan kesatuan antar warga masyarakat dengan ekologi. Pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan hidup yang pada akhirnya meningkatkan resiliensi terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi dan Misi, terutama pada Misi ke-3 yaitu **“Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter”**.

Tujuan dari strategis misi ke-3 yaitu Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, dengan Sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pendidikan, sasaran urusan pendidikan terdiri atas Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk diatas 15 Tahun dan Harapan Lama Sekolah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pada Visi dan misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan provinsi Kepulauan Riau didukung dengan program tahun 2025-2029 sbb :

1. Program Pengelola Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengendalian Perizinan
4. Program Pengembangan Murikulum
5. Program penguinjang urusan pemerintah daerah provinsi

Tujuan dan Sasaran kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 beserta target kinerja di tuangkan dalam table dibawah ini :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Urusan Bidang Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk diatas 15 Tahun	10.90	11.05	11.19	11.34	11.48	11.63
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.28	13.32	13.38	13.44	13.50	13.56

2.2. Rencana Kinerja

2.2.1. Rencana Kerja 2025 Triwulan I, II dan III

Rencana Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari pelaksanaan rencana strategis lima tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Pada tahun 2025 merupakan masa transisi dari rencana kerja perangkat daerah, masa transisi dibagi dalam dua tahap yaitu masa transisi yang berakhir pada triwulan III tahun 2025, pada tahapan ini dokumen kinerja yang digunakan adalah target kinerja pada RPJMD 2021-2026 dan tahap kedua yang dimulai dengan rencana kerja tahun 2025 sesuai dengan RPJMD 2025-2029.

Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana kerja organisasi merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta sumber pendanaan yang

dijadikan dasar dari pelaksanaan kegiatan untuk mendukung dan mencapai tujuan organisasi. Rencana kerja organisasi perangkat daerah merupakan alat ukur untuk menilai pencapaian target kinerja perangkat daerah serta menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja organisasi. Berikut tujuan dan targeti kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Formula	Tahun Dasar	Target						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
1.	Meningkatnya Akses Pendidikan	AngkaPartisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	Jml penduduk usia 16-18 Thn yg masih bersekolah dan yg sdh tamat dibagi dengan jml penduduk usia 16-18 thn dikali 100%	84,62	86,42	100	100	100	100	100	100
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Jumlah lama sekolah penduduk usia 25 Thn ke atas dibagi jumlah penduduk usia 25 thn	10,12	10,12	10,14	10,15	10,62	10,75	10,88	10,88
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	12,87	12,88	12,90	12,93	13,09	13,14	13,19	13,19
2	Meningkatnya mutu pendidikan	SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi min B	%	Jumlah SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimum B dibagi Jumlah SMA/SMK/SLB Negeri di kali 100	71,53	80	81	82	83	84	85	85
		Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	%	Jumlah SMK Negeri yang terevitalisasi dibagi jumlah SMK Negeri di kali 100	17,00	21,25	24,32	27,03	97,22	97,30	97,37	97,37
		Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/kedinasan	%	Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PT/kedinasan di bagi dengan jumlah lulusan SMA di kali 100	na	na	na	na	33	34	35	35
		Tingkat penyerapan lulusan SMK yang bekerja di Dunia	%	Jumlah lulusan SMK yg bekerja di IDUKA dibagi lulusan SMK Neger	na	61	63	65	35	40	45	45

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Formula	Tahun Dasar	Target						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
		Usaha dan Dunia Kerjas (IDUKA)										
		Persentgase PTK mengikuti Diklat untuk peningkatan kompetensi	%	Jumlah PTK yg mengikuti diklat dinagi dengan jumlah PTK	na	na	na	na	12,58	12,60	12,63	12,63
4	Meningkatnya Akses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	Jumlah siswa SMA/SMK/MA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 Thn	82,49	97,5	98	98,5	99	99,50	100	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	%	Jumlah siswa usis 16-18 thn di jenjang SMA/MA/SMK dibagi penduduk usia 16-18 thn di kali 100	77,20	97	78	79	80	81	82	82
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	Jumlah siswa di jenjang SLB dibagi jumlah penduduk usia 4-18 Thn dikali 100	73,5	83	84	85	87,00	88,00	90	90,00
		Rasio Siswa Perkelas SMA/MA/SMK/MAK	Rasio	Jumlah siswa SMA/MA/SMK/MAK dibagi jumlah ruang kelas	na	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36
4	Meningkatmya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Persentase Capaian IKU Dinas Pendidikan	%	Junlah Capaian kinerja di bagi jumlah target kinerja di kali 100	na	na	na	Na	91,5	92,5	93,5	93,5

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Prov Kepri 2024

2.2.2. Rencana Kerja 2025 Triwulan IV

Rencana Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Triwulan IV mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029.

Indicator kinerja perangkat daerah pada triwulan IV mengalami beberapa perubahan, dimana terdapat beberapa indicator baru sbb :

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (APS)
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS-SLB)
3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca)
4. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)
5. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) (%)
6. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)
7. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))
8. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ((%))

Selengkapnya Tujuan dan rencana strategis Dinas Pendidikan 2025-2029 yang dimulai pada triwulan IV tahun 2025 diuraikan pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target						Kondisi Akhir Renstra
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Tahun	13.27	13.28	13.32	13.38	13.44	13.50	13.56	13.56
		Rata-Rata Lama Sekolah >15 Tahun	$\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i	Tahun	10.50	10.90	11.05	11.19	11.34	11.48	11.63	11.63
	Meningkatnya Pemerataan akses dan Kualitas layanan pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (APS)	$APS_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 1.000$ dimana: h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun $E_{h,a}^t$ = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t $P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a	%	85.56	100	100	100	100	100	100	100

		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	$APS_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 1.000$ dimana: h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun $E_{h,a}^t$ = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t $P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a	%	82.18	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca)	$\%kabkot \min. SKM = \frac{\sum_{i=1}^n kabkot \min. SKM}{n}$ Keterangan: kabkot min. SKM = Kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah kabupaten/kota	Angka	46.78	47.50	48.21	48.92	49.64	50.35	51.07	51.07
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)	$\%kabkot \min. SKM = \frac{\sum_{i=1}^n kabkot \min. SKM}{n}$ Keterangan: kabkot min. SKM = Kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah kabupaten/kota	Angka	27.85	28.57	29.28	30.00	30.71	31.41	32.14	32.14
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada			59.20	60.17	61.09	62.01	62.93	63.84	64.76	64.76

	asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) (%)	$\%satdik\ min.\ SKM = \frac{\sum_{i=1}^n\ satdik\ min.\ SKM}{n}$ Keterangan: <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan										
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)	$\%satdik\ min.\ SKM = \frac{\sum_{i=1}^n\ satdik\ min.\ SKM}{n}$ Keterangan: <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan	Angka	26.79	28.77	30.76	32.74	34.73	36.71	38.69	38.69	
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%)	$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: <i>FK</i> = Faktor koreksi pesantren <i>E_i^t</i> = Jumlah penduduk usia <i>i</i> yang berkolah pada tahun <i>t</i> <i>P_i^t</i> = Jumlah penduduk usia <i>i</i> pada tahun <i>t</i> <i>i</i> = Usia {7, 8, ..., n}	Angka	Na	13.81	13.92	14.03	14.14	14.25	14.36	14.36	
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ((%)	$\frac{Proporsi\ penduduk\ berusia\ 15\ Tahun\ ke\ atas\ yang\ berkualifikasi\ pendidikan\ tinggi}{Jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas,\ yang\ lulus/berjazak\ pendidikan\ tinggi\ di\ Provinsi\ X} \times 100\%$		Na	73.94	74.24	74.54	74.84	75.14	75.44	75.44	

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan alat untuk mengukur kemampuan pimpinan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia dan keuangan dalam mencapai tujuan organisasi, perjanjian kinerja berisi target yang wajib dipenuhi dalam rangka perwujudan mensejahterakan masyarakat.

Pada Tahun 2025 merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dan 2025-2029 sehingga berdampak terhadap perubahan perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan Gubernur Kepulauan Riau pada awal tahun anggaran 2025 yang terdiri dari 5 program yang pendanaan bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2025. Kriteria keberhasilan Perjanjian Kinerja ini ditunjukkan dengan selisih positif capaian hasil indikator *outcome* terhadap target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025.

Dalam perkembangannya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dengan RPJMD provinsi

Kepulauan Riau sebelumnya, keberlanjutan ini dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan yang terukur dan kejelasan target dan diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional. Berikut perjanjian kinerja 2021-2026 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sbb :

Gambar 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026

 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: Dr. Andi Agung, S.E., M.M.
Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama	: H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.
Jabatan	: Gubernur Kepulauan Riau
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Tanjungpinang, 6 Januari 2025	
Pihak Kedua, Gubernur Kepulauan Riau	Pihak Pertama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
 H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.	 Dr. Andi Agung, S.E., M.M. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 196908231993031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya mutu pendidikan	SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimum B	84
		Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	97,30
		Tingkat Lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Kedinasan	34
		Tingkat Penyerapan Lulusan yang Bekerja di Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA)	40
		Presentase PTK mengikuti Diklat untuk Peningkatan Kompetensi	12,60
2.	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	99,50
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	81,00
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	88,00
		Rasio Siswa Per Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK	1: 36
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKU Dinas Pendidikan	92,5

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 356,161,930,344,-	APBD
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 163,814,000,-	APBD
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 80.000.000,-	APBD
4. Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 200.000.000,-	APBD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 661,513,360,249,-	APBD

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau



H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Andi Agung, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196908231993031006

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
(Renstra 2021-2026)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
I	1. Meningkatnya mutu pendidikan	1. SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B	%	84
		2. Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	%	97,30
		3. Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/kedinasan	%	34
		4. Tingkat penyerapan lulusan SMK yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Kerjas (IDUKA)	%	40
		5. Persentase PTK mengikuti Diklat untuk peningkatan kompetensi	%	12,60
	2. Meningkatnya Akses pendidikan	6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	99,50
		7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	%	81,00
		8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	88,00
		9. Rasio Siswa Perkelas SMA/MA/SMK/MAK	Rasio	1:36
	3. Meningkatnya kualitas dan efektivitas kinerja pelayanan perangkat daerah	10. Persentase capaian IKU Dinas Pendidikan	%	92,5

Masa RPJMD transisi adalah periode krusial saat RPJMD lama berakhir dan RPJMD baru belum sepenuhnya berjalan, di mana **Rencana Pembangunan** Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada masa tahun terakhirnya serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi pedoman utama untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama pemerintahan baru, untuk memastikan kesinambungan program pembangunan sambil menunggu RPJMD baru (periode 2025-2029) selesai disusun dalam 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Berikut Perjanjian kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada masa transisi yang dimulai pelaksanaannya pada triwulan IV tahun anggaran 2025 sbb :

Gambar 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. Andi Agung, S.E., M.M.**
Jabatan : **Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau**
selanjutnya disebut **pihak pertama**

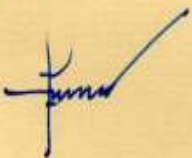
Nama : **H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.**
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

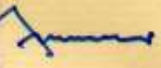
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau


H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Andi Agung, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196908231993031006

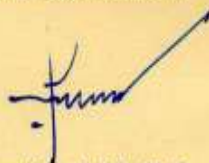
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemerataan akses dan Kualitas layanan pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (%)	100
		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (%)	100
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) (%)	47,5
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)	28,57
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) (%)	60,17
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)	28,77
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,81
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	73,94

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 362,964,656,620,-	APBD-P
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 187,656,000,-	APBD-P
3.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 42,439,000,-	APBD-P
4.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 114,475,500,-	APBD-P
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 668,684,534,000,-	APBD-P

Tanjungpinang, 10 Oktober 2025

**Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau**



H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

**Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau**



**Dr. Andi Agung, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP 196908231993031006**

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Transisi Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
(Rentra 2025-2029)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
I	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Harapan lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,28
		2. Rata-Rata Lama Sekolah >15 Tahun	Tahun	10.90
	Meningkatnya Pemerataan akses dan Kualitas layanan pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (APS)	%	100
		2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	100
		3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca)	%	47.50
		4. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)	%	28.57
		5. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) (%)	%	60.17
		6. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)	%	28.77
		7. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))		13.81
		8. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	%	73,94

Hubungan antara anggaran dan program merupakan kaitan yang terintegrasi dalam manajemen organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Secara mendasar, anggaran adalah rencana keuangan yang diterjemahkan dari program kerja yang ingin dicapai dalam satu periode tertentu.

Program kerja menetapkan "apa" yang akan dilakukan, sementara

anggaran merincikan "berapa biaya" yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Tanpa anggaran, program hanyalah rencana tanpa daya eksekusi; sebaliknya, anggaran tanpa program hanyalah kumpulan angka tanpa tujuan yang jelas. Berikut dukungan anggaran yang dialokasikan pada APBD 2025 pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.7
Program dan Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Persentas Pagu Anggaran
1	Pengelolaan Pendidikan	362.964.656.620	35,171
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	187.656.000	0,018
3	Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000	0,004
4	Pengembangan Kurikulum	114.475.500	0,011
5	Penunjang Urusan Pemerindah Daerah	668.684.534.000	64,795
	Jumlah	1.031.993.761.120	100

Dari Tabel 2.7 menjelaskan sebanyak Rp. 668.684.534.120 atau setara dengan 64.795% merupakan anggaran yang memiliki porsi terbesar yang diperuntukan untuk Program Penunjang urusan pemerintah daerah, terdiri atas gaji dan tunjangan dan keperluan rutinitas kantor. Selanjutnya Program pengelola pendidikan mendapatkan porsi anggaran 35,171% atau setara dengan Rp. 362.964.656.620, Sebagian anggaran tersebut untuk pelaksanaan kegiatan pada bidang pembinaan SMA, pembinaan SMK, pembinaan pendidikan khusus dan ketanagaan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat nilai capaian kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ SesuaiTarget	
> 100%	Melebihi Target	

Dalam Melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian tersebut maka digunakan skala pengukuran yang terdiri dari empat kategori, yakni kategori “**sangat baik**” apabila capaian kinerjanya lebih dari $75 \geq 100\%$, kategori “baik” apabila capaian kinerjanya $55\% \geq 75\%$, kategori “**cukup**” apabila capaian kinerjanya $\geq 55\%$, kategori “**kurang**”. Berikut skala penilaian peringkat kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
4	$\geq 100\%$	Sangat Baik
3	$75\% \geq 100\%$	Baik
2	$55\% \geq 75\%$	Cukup
1	$< 55\%$	kurang

3.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD 2021-2026

Penilaian capaian kinerja merupakan evaluasi bertujuan untuk diketahui pencapaian realisasi dari target kinerja, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis permasalahan dan alternative solusi dari berbagai capaian kinerja yang belum terealisasi.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realiasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
4. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di

bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

5. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran yang terdiri 3 sasaran dan sebanyak 10 Indikator serta membandingkan dengan capaian tahun lalu, capaian renstra dan target secara nasional.

Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2025. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 10 indikator kinerja.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Daerah Urusan pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
(RPJMD 2021-2026)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	10,75 (Tahun)	10,78	100,28	Sangat Baik
		Harapan Lama Sekolah	13,28 (Tahun)	13,28	100,00	Sangat Baik
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 (%)	84,24	88,24	Baik

Berdasarkan data dari Tabel 3.3 disimpulkan bahwa capaian kinerja daerah untuk urusan pendidikan pada tahun **2025** secara umum memiliki peringkat kinerja **baik**. Capaian kinerja untuk Rata rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 100,28% dari target, selanjutnya capaian kinerja untuk Harapan lama Sekolah (HLS) di tahun 2025 mencapai 100.00% dan realisasi capaian kinerja untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 Tahun telah mencapai 88,24%.

Berikut capaian kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Renstra 2021-2026 sbb :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
s/d Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
I	Meningkatnya mutu pendidikan	SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi min B	84	84,25	100,30	Sangat Baik
		Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	97,40	97,43	100,03	Sangat Baik
		Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/kedinasan	34	48,07	141,38	Sangat Baik
		Tingkat penyerapan lulusan SMK yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Kerjas (IDUKA)	40	83.42	208,55	Sangat Baik
		Persentase PTK mengikuti Diklat untuk peningkatan kompetensi	12,60	28.55	226,58	Sangat Baik
	Meningkatnya Akses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	99.50	91,01	92,47	Baik
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ma	81.00	76,12	93.98	Baik
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	88.00	126,29	145.35	Sangat Baik
		Rasio Siswa Perkelas SMA/MA/SMK/MAK	1:36	32	112,5	Sangat Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Persentase capaian IKU Dinas Pendidikan	92,5		123.52	Sangat Baik

Berdasarkan penjelasan dari Tabel 3.4 disimpulkan bahwa capaian kinerja indicator utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun

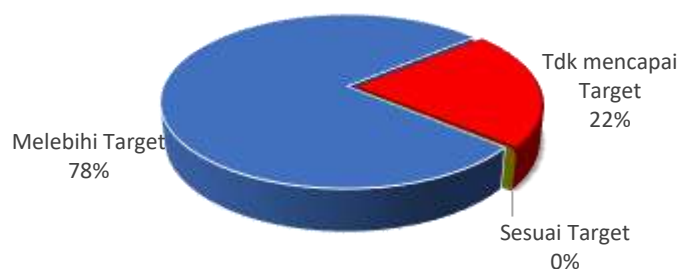
2025 yang melampaui target sebanyak 9 indikator. Indikator dimaksud terdiri atas Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi dengan capaian kinerja 100,03%, Tingkat penyerapan lulusan SMK di dunia usaha dan Dunia industry (IDUKA) dengan capaian kinerja 208.55%, Angka partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK dengan capaian kinerja 92.07%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA.MA.SMK dengan capaian kinerja 93.98%, Angka Partisipasi Kasar SLB dengan capaian kinerja 146.92% dan Rasio siswa perkelas SMA/MA/SMK/MAK dengan capaian kinerja 112.50%.

Beberapa indikator kinerja utama yang masih perlu ditingkatkan adalah Tingkat Lulusan SMA yang melanjutkan ke PTN dengan capaian kinerja 92,88%, sma/smk/slb dengan akreditasi minimal B capaian kinerja 97,89%. Berdasarkan pengukuran kinerja yang merujuk pada Tabel 3.5 dapat diperoleh informasi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Jumlah	Capaian
1	Melebihi/Melampaui Target	8	78
2	Sesuai Target	0	0
3	Tidak Mencapai Target	2	22

Gambar 3.1
Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja transisi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 terdiri 1 (Satu) sasaran dan 9 Indikator. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada masa transisi di triwulan IV tahun 2025.

3.3. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

3.3.1 Capaian Kinerja Indikator Daerah RPJMD 2021-2026

Indikator kinerja kinerja Kepala Provinsi Kepulauan Riau terkait Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 beserta target kinerja meliputi :

1. Rata- Rata Lama Sekolah (RLS)
2. 1141Harapan Lama Sekolah (HLS)
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

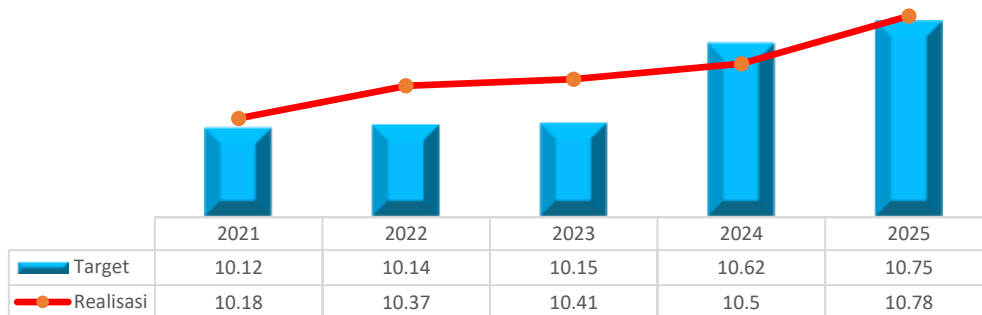
Berikut capaian kinerja kepala daerah, berdasarkan tujuan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada Rencana pembangunan Jangka Panjang 2021-2026 sbb :

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. RLS dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut proses pendidikan sudah selesai. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk di wilayah tersebut. RLS merupakan salah satu unsur dalam menghitung Indeks Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Capaian kinerja Rata-Rata Lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tahun **2025** ditargetkan pada angka **10,75** dan realisasi kinerja pada tahun 2025 tercatat pada angka **10,78** atau setara dengan **100,28%** dengan predikat kinerja **Sangat Baik**. Berikut capaian RLS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 sbb

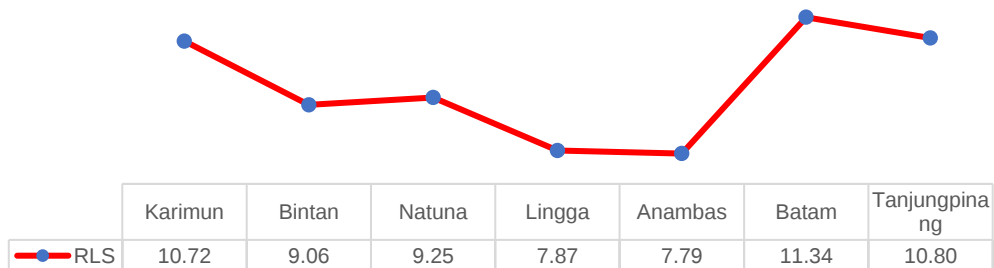
Gambar 3.2
Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2025



Sumber : BPS RI 2025

Realisasi kinerja Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari pada pencapaian tahun 2024, hal ini diuraikan dalam Gambar 3.2 bahwa di tahun 2025 terdapat peningkatan realisasi kinerja menjadi 10,78 atau setara dengan 100,28% berbanding 10,50 atau setara dengan 98.78% di tahun 2024

Gambar 3.3.
Realisasi Kinerja Rata Rata Lama Sekolah (RLS)
Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : BPS RI 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan penduduk semakin lama mengenyam pendidikan; angkanya bergerak dari sekitar 7,95 tahun pada 2016 (setara kelas II SMP) menjadi 9,22 tahun pada 2024 (setara lulus SMP), menunjukkan peningkatan signifikan seiring program Wajib Belajar 9 Tahun, dengan tren positif ini diharapkan berlanjut lebih tinggi ke jenjang SMA dan Perguruan Tinggi, mencerminkan peningkatan kualitas SDM Indonesia secara keseluruhan. Berikut capaian kinerja RLS 2022 sd 2025 dan secara nasional diuraikan pada grafik di bawah ini :

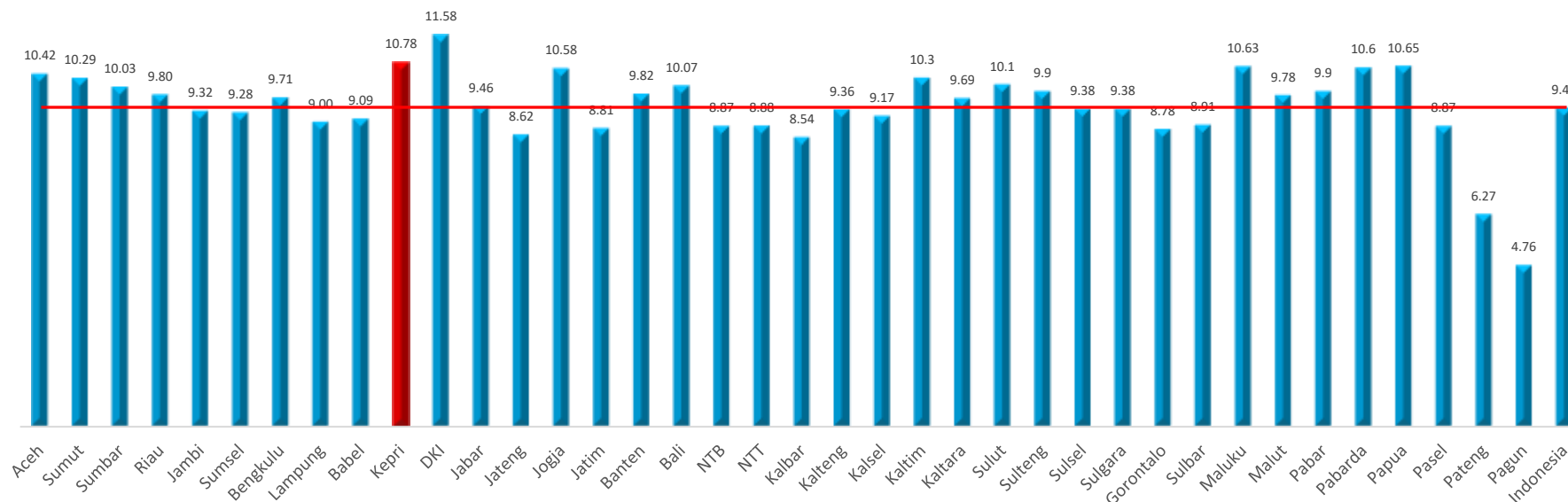
Tabel 3.6
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)			Target Nasional		
	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)
Rata-Rata Lama Sekolah	10,14	10,18	100,39	10,15	10,41	100,56	10,62	10,50	98,87	10,75	10,78	100,28	10,88	10,78	99,08	na	na	na

Pertumbuhan capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2022 s/d 2025 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2022 realisasi kinerja mencapai 100,39% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan pencapaian kinerja 98,87%. Pada tahun 2025 realisasi pencapaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Kembali meningkat menjadi 100,28%.

Capaian Rata-Rata Lama Sekolah terhadap target akhir RENSTRA 2021-2026 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau belum tercapai, dimana pada target Rata-rata lama Sekolah pada akhir RENSTRA 2021-2026 ditetapkan target 10,88 Tahun, realisasi pada akhir tahun 2025 baru tercapai 10,78 tahun atau capaian kinerja 99,08%.

Gambar 3.4
Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Secara Nasional Tahun 2025

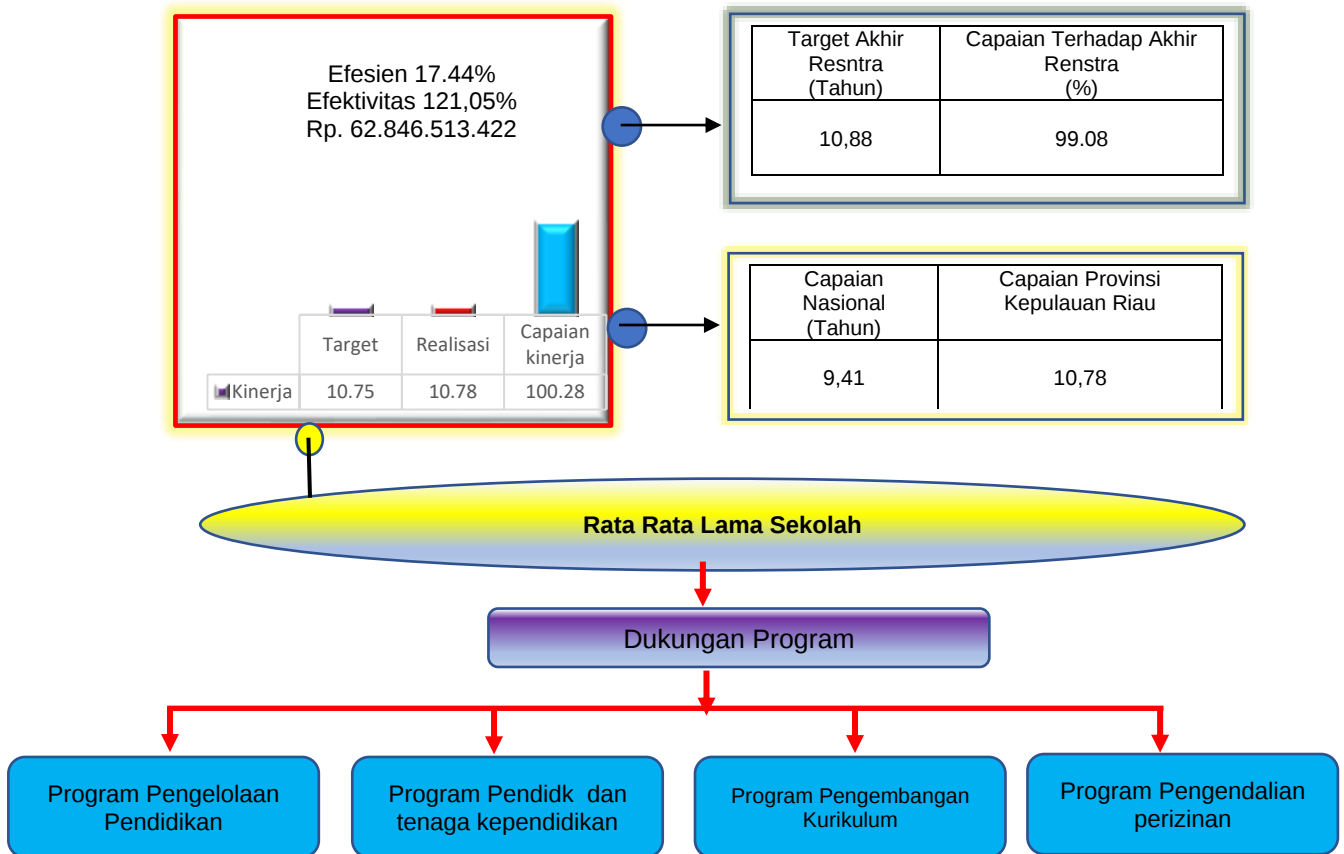


Sumber : BPS RI 2025

Secara Nasional Rata Rata Lama Sekolah tercatat pada angka 9,41 Tahun, Provinsi dengan angka tertinggi pencapaian rata-rata lama sekolah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan realisasi 11.58 Tahun. **Provinsi Kepulauan Riau** menempati urutan **kedua nasional** dengan pencapai angka rata-rata lama sekolah tercatat pada **10,78** Tahun.

Selanjutnya di urutan ketiga Provinsi Papua dengan pencapaian rata-rata lama sekolah pada angka 10,64 Tahun, Provinsi Maluku berada di urutan ketiga dengan pencapaian rata-rata lama sekolah pada angka 10,63 Tahun, Provinsi DIY dengan pencapaian 10,58 Tahun sedangkan pencapaian rata-rata lama sekolah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan pencapaian 4.76 Tahun.

Grafik 3.5
Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Di Provinsi Kepri
Tahun 2025



Keberhasilan pencapaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan beberapa factor sbb :

- Membaiknya regulasi dan dukungan program pemerintah yang semakin meningkat diantaranya melalui program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun, penguatan dan perluasan bantuan pendidikan seperti BOS/PIP/KIP/Beasiswa, pengurangan biaya pendidikan melalui program sekolah gratis dan pembiayaan pengeluaran lainnya sehingga berdampak pada penurunan hambatan biaya dan dukungan program kegiatan belajar mengajar melalui program paket A, B dan C.
- Peningkatan akses, kualitas, kurikulum dan Ketersediaan Sekolah, hal ini ditandainya semakin masifnya pembangunan dan pemerataan akses pendidikan serta di dukung dengan peningkatan jumlah dan

kualitas serta distribusi guru yang lebih merata. Peningkatan akses ini memudahkan peserta didik untuk menjangkau sekolah.

- c. Membaiknya kondisi social ekonomi masyarakat, hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan rata-rata masyarakat serta membaiknya nilai Indek Pembangunan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Meningkatnya kesadaran dan perubahan budaya masyarakat, dimana setiap keluarga akan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya.
- e. Kualitas dan relevansi pendidikan terutama adanya kesesuaian pendidikan terutama pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan DUDI, sehingga memicu peserta didik untuk terus meningkatnya pendidikannya
- f. Dengan Pemerintah Daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta penguatan pendidikan inklusi dan Kerjasama dengan para pihak serta dukungan orang tua/masyarakat yang semakin peduli.

Upaya lain yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja Rata-Rata lama sekolah diantaranya :

- a. Peningkatan kesejahteraan PTK melalui skema berbagai insentif dan perbaikan karir PTK.
- b. Penguatan pencegahan putus sekolah, melalui pendataan anak berisiko putus sekolah dan pendampingan intensif
- c. Optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP/KIP) agar tepat sasaran dan berkelanjutan
- d. Perluasan pendidikan nonformal dan kesetaraan (Paket A, B, C) bagi anak putus sekolah dan usia dewasa
- e. Peningkatan layanan pendidikan inklusif, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan
- f. Kerja sama lintas sektor (pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, desa) dalam penanganan anak tidak sekolah

- g. Penyediaan sekolah terbuka dan kelas jauh, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan
- h. Pemanfaatan teknologi pembelajaran (kelas daring, blended learning) untuk fleksibilitas belajar
- i. Penguatan peran pemerintah daerah, termasuk beasiswa daerah dan kebijakan afirmatif
- j. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat, melalui kampanye kesadaran pentingnya pendidikan
- k. Penurunan angka perkawinan anak, melalui edukasi dan regulasi perlindungan anak
- l. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, agar peserta didik termotivasi menyelesaikan jenjang sekolah
- m. Penguatan sistem data pendidikan, untuk pemantauan partisipasi sekolah secara akurat dan berkelanjutan.
- n. Pengembangan dan adaptasi kurikulum berbasis industri., Program Teaching factory, program link and machth, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan Uji Sertifikasi Profesi pendidik.
- o. Peningkatan standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai pelatihan kompetensi, peningkatan jumlah guru yang bersertifikasi dan distribusi guru yang lebih merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah

satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Rata Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb :

Tabel 3.7
Analisa Efektivitas dan Efesiensi Sasaran Kinerja Rata Rata lama Sekolah
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

N o	Indikator Sasaran	Sa tuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Rata Rata lama Sekolah	Tah un	10,75	10,78	100,28	1. Pengelolaan Pendidikan 2. Pendidik dan Kependidikan 3. Pengembangan kurikulum 4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	365.506.727.766 187.656.000 114.475.500 42.439.000	302,664.866.698 153.676.514 70.519.443 26.028.317	82,85 81,89 61,60 61,33
						Jumlah	365.667.258.166	302.915.090.970	82,84
	Caoaian Kinerja				100,28	Capaian Kinerja Keuangan			82,84
	Efisiensi Sumber Daya								17,44
	Efektivitas Program								121,05

Pada Tabel 3.7 menjelaskan hubungan antara anggaran, efektivitas dan efesiensi kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Kinerja Rata Rata Lama Sekolah Tahun 2025 sebesar Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 atau setara dengan 82,84% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 100,28% dengan penilaian kinerja **sangat baik** yang didukung dengan realisasi keuangan 82,84%, dengan demikian terdapat efesiensi sumber daya sebesar 17,44% dan efektivitas program sebesar 121.05%

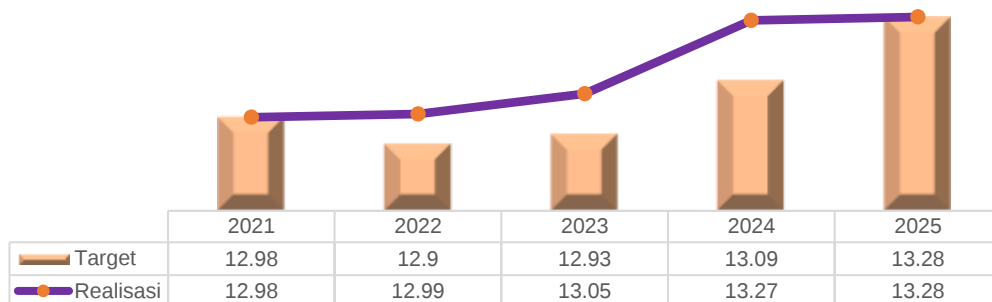
2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diukur dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan.

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Capaian kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau, Pada tahun **2025** ditargetkan HLS di Provinsi Riau pada angka **13,14** dengan capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai **13,28** atau setara dengan **101,07%** dengan predikat kinerja **Sangat Baik**. Berikut capaian HLS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 sbb :

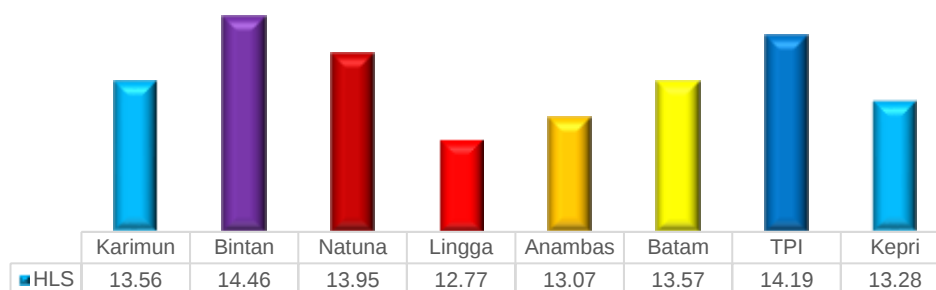
Gambar 3.6
Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2025



Sumber : BPS RI 2024

Realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 mengalami perbaikan dari pada pencapaian tahun 2024 sebesar 13,27 Tahun. Gambar 3.7 bahwa menjelaskan capaian kinerja harapan lama Sekolah berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.

Gambar 3.7
Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)
Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : BPS RI 2025

Kota Tanjungpinang merupakan penyumbang Realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) terbesar di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025, selanjutnya Kabupaten Bintan menyumbang HLS pada posisi 13,46 Tahun, disusul Kota Batam di urutan ketiga dengan realisasi HLS di tahun 2025 pada angka 13,57 Tahun serta Realisasi kinerja HLS terkecil berada di Kabupaten Lingga dengan angka 12,77 Tahun.

Harapan Lama Sekolah (HLS) secara nasional terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan tren positif di mana penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan bisa menempuh pendidikan lebih lama, misalnya dari sekitar 12,95 tahun (2019) menjadi 13,30 tahun (2025), setara jenjang D1/kuliah tahun pertama, meski ada kesenjangan dengan antar wilayah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25+ tahun yang masih setara SMP, menandakan kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Berikut HLS secara nasional berdasarkan pencapaian tingkat provinsi sbb :

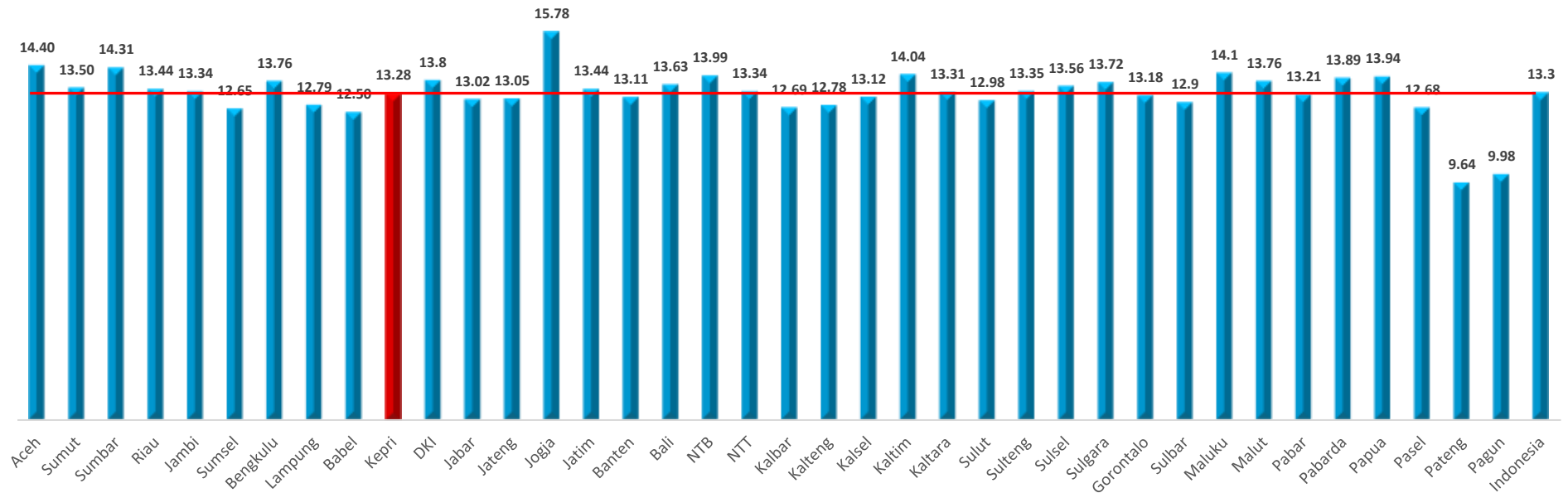
Tabel 3.8
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)			Target Nasional		
	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)
Harapan Lama sekolah	12,90	12,99	100,69	12,93	13,05	100,92	13,09	13,27	101,37	13,14	13,27	100,28	13,19	13,27	100,68	na	na	na

Pertumbuhan capaian kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2022 s/d 2025 mengalami pola kenaikan dengan trend positif, pada tahun 2022 realisasi kinerja mencapai 100,69% dan terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2024 mengalami peningkatan Kembali sehingga capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Kembali meningkat menjadi 101,37%.

Capaian Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 terus bergerak positif dan mencapai level 100,28% dari target. Capaian Harapan lama Sekolah terhadap target akhir RENSTRA 2021-2026 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai target dengan realisasi 13,27 Tahun atau setara dengan 100,68% dari target di akhir Renstra 2021-2026..

Gambar 3.8
Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)
Secara Nasional Tahun 2025



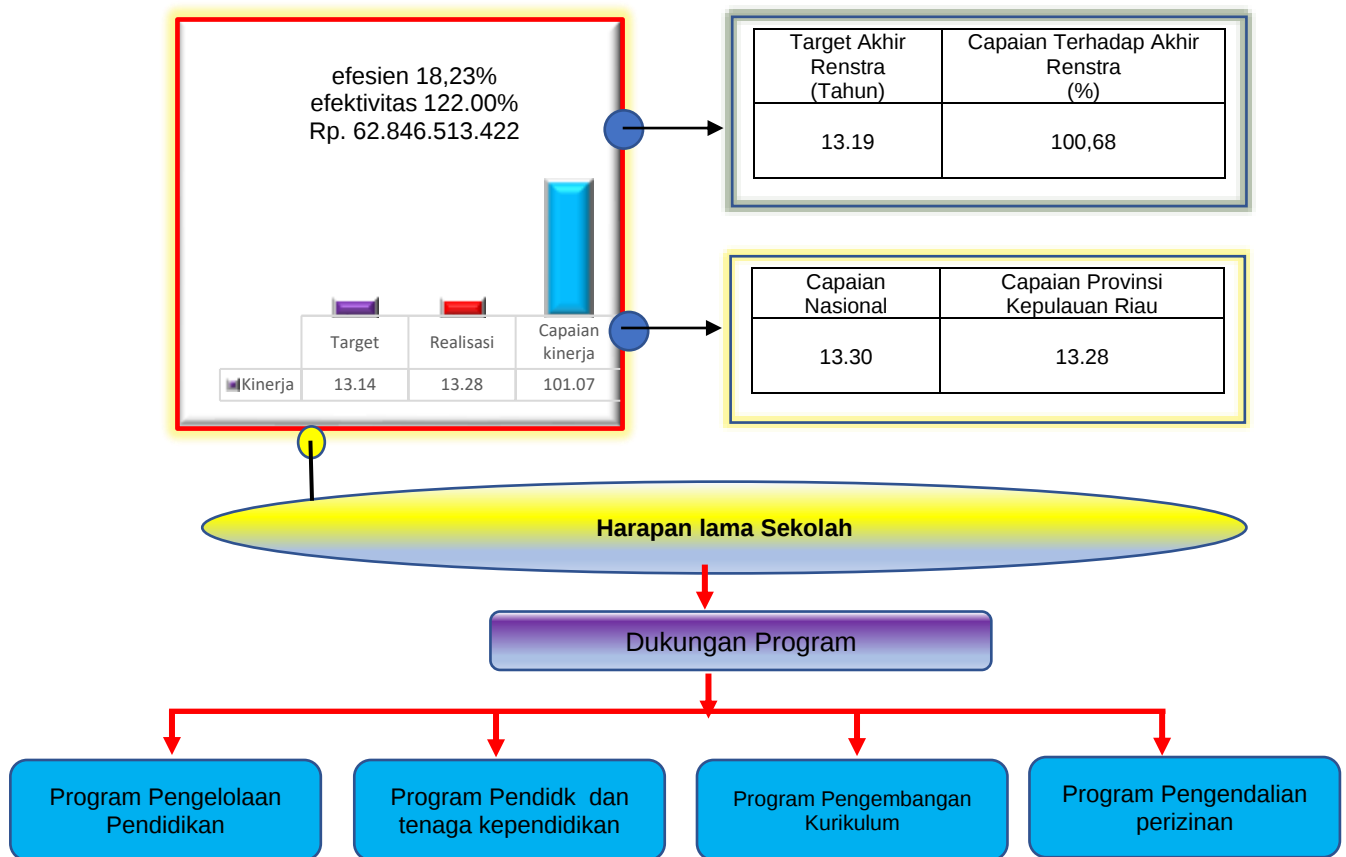
Sumber : BPS RI 2025

Secara Nasional Harapan Lama Sekolah tercatat pada angka 13.30 Tahun, Provinsi dengan angka tertinggi pencapaian Harapan lama sekolah adalah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dengan realisasi 15.78 Tahun. Provinsi Kepulauan Riau pencapaian Harapan lama sekolah tercatat pada 13,28 Tahun.



Pada Grafik disamping ini menjelaskan bahwa capaian Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 secara nasional sudah mencapai 99,88%

Grafik 3.9
Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Di Provinsi Kepri
Tahun 2025



Keberhasilan pencapaian kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Secara keseluruhan, kombinasi antara kebijakan yang mendukung, akses pendidikan yang semakin baik, serta kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci meningkatnya Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau, beberapa factor pendukung keberhasilan diantaranya sbb :

- Komitmen pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan, melalui alokasi anggaran, program wajib belajar, dan kebijakan afirmatif bagi wilayah kepulauan.
- Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, termasuk pembangunan/rehabilitasi sekolah, sekolah satu atap, dan layanan pendidikan di pulau-pulau

- c. Dukungan program bantuan pendidikan, seperti BOS, PIP/KIP, serta beasiswa daerah yang membantu mengurangi hambatan ekonomi keluarga
 - d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, terutama sebagai modal meningkatkan daya saing kerja di wilayah strategis dan perbatasan
 - e. Kondisi sosial ekonomi yang relatif berkembang, khususnya di kawasan perkotaan dan industri, sehingga mendorong orang tua menyekolahkan anak lebih lama
 - f. Penguatan pendidikan nonformal dan kesetaraan, sebagai alternatif bagi anak yang tidak dapat mengikuti jalur formal
 - g. Sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat, dalam mendukung keberlanjutan pendidikan
- Upaya lain yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja

Harapan Lama Sekolahh diantaranya :

- a. Perluasan akses pendidikan sejak usia dini, melalui peningkatan layanan PAUD hingga pendidikan menengah
- b. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah terpencil, pesisir, dan pulau-pulau
- c. Penguatan program wajib belajar 12 tahun, termasuk dukungan pembiayaan dan regulasi daerah
- d. Optimalisasi bantuan pendidikan (BOS, PIP/KIP, dan beasiswa daerah) agar tepat sasaran dan berkelanjutan
- e. Peningkatan kualitas dan distribusi pendidik, khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan
- f. Pengembangan pendidikan nonformal dan kesetaraan, sebagai jalur alternatif bagi masyarakat
- g. Pemanfaatan teknologi pembelajaran, untuk menjangkau peserta didik di wilayah sulit akses
- h. Peningkatan peran orang tua dan masyarakat, melalui kampanye kesadaran pentingnya pendidikan jangka Panjang

- i. Penguatan kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.9
Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Harapan Lama Sekolah
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Harapan Lama Sekolah	%	13.14	13,28	101,07	1. Pengelolaan Pendidikan	365.322.687.666	302,664.866.695	82,85
						2. Pendidik dan Kependidikan	187.656.000	153.676.514	81,89
						3. Pengembangan kurikulum	114.475.500	70.519.443	61,60
						4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000	26.028.317	61,33
						Jumlah	365.667.258.166	302.915.090.970	82,84
	Caoaian Kinerja					101,07	Capaian Kinerja Keuangan		
Efisiensi sumber daya									18,23
Efektivitas program									122,00

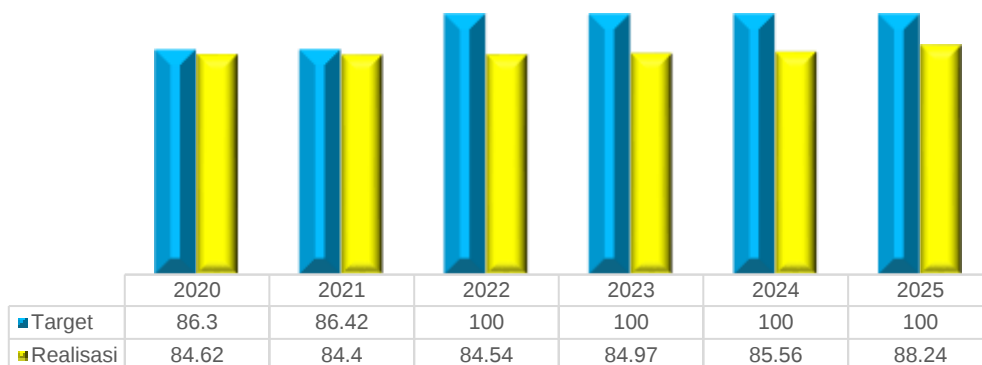
Pada Tabel 3.9 menjelaskan hubungan antara anggaran, efektivitas dan efisiensi kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 sebesar Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 atau setara dengan 82,84% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 101,07% dengan penilaian kinerja **sangat baik** yang didukung dengan realisasi keuangan 82,84%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya sebesar **18,23%** dan efektivitas program sebesar **122,00%**

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah peserta didik kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 ditargetkan sebesar **100%**, dimana realisasi capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2025 di Provinsi Kepulauan berada pada angka **88,24%** atau setara dengan capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 88,24% dengan predikat kinerja **Baik**. Berikut capaian HLS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 sbb

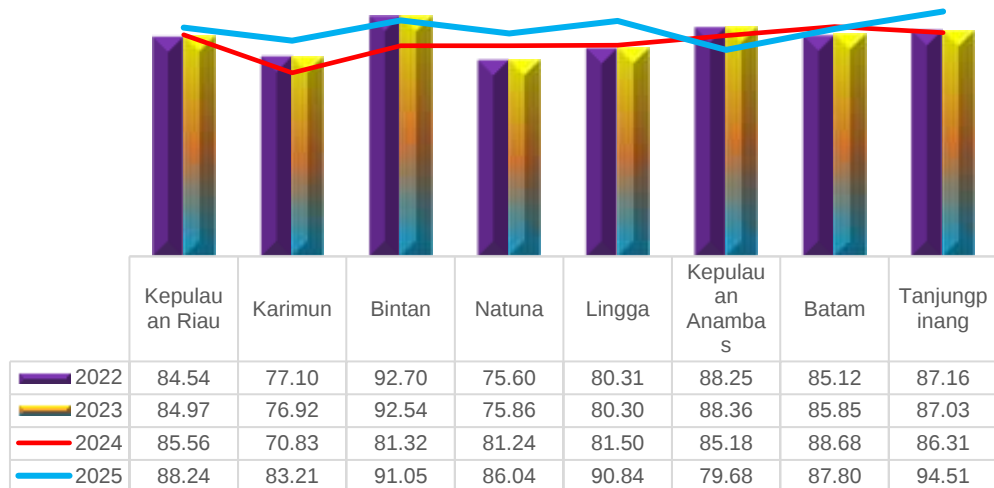
Gambar 3.10
Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2025



Sumber : BPS RI 2024

Realisasi kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 peningkatan dari pencapaian tahun 2024, hal ini diuraikan dalam Gambar 3.11 bahwa di tahun 2025 terdapat peningkatan realisasi kinerja menjadi 88,24 atau setara dengan 88,24% berbanding 85,56% di tahun 2024.

Gambar 3.11
Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025



Sumber : BPS RI 2025

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2025 menunjukkan tren positif, mendekati 100% untuk kelompok usia sekolah dasar (7-12 tahun) dan terus meningkat di jenjang lebih tinggi, meskipun datanya bervariasi berdasarkan provinsi dan kelompok usia, dengan DIY menjadi salah satu provinsi tertinggi untuk APS pemuda. Data terbaru dari BPS tahun 2025 mengindikasikan APS 7-12 tahun mencapai 97.94%, 13-15 tahun sekitar 89.61%, dan 16-18 tahun sekitar 61.30%, menunjukkan akses pendidikan semakin merata seiring usia. Berikut pencapaian Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun secara nasional berdasarkan pencapaian provinsi di Indonesia tahun 2025.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) nasional secara umum **menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun**, terutama pada kelompok usia sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP/SMA), meskipun ada sedikit perbedaan berdasarkan kelompok umur dan gender, dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan partisipasi tinggi di usia 7-12 tahun (mendekati 100%) dan peningkatan signifikan di usia remaja (13-18 tahun) dari waktu ke waktu.

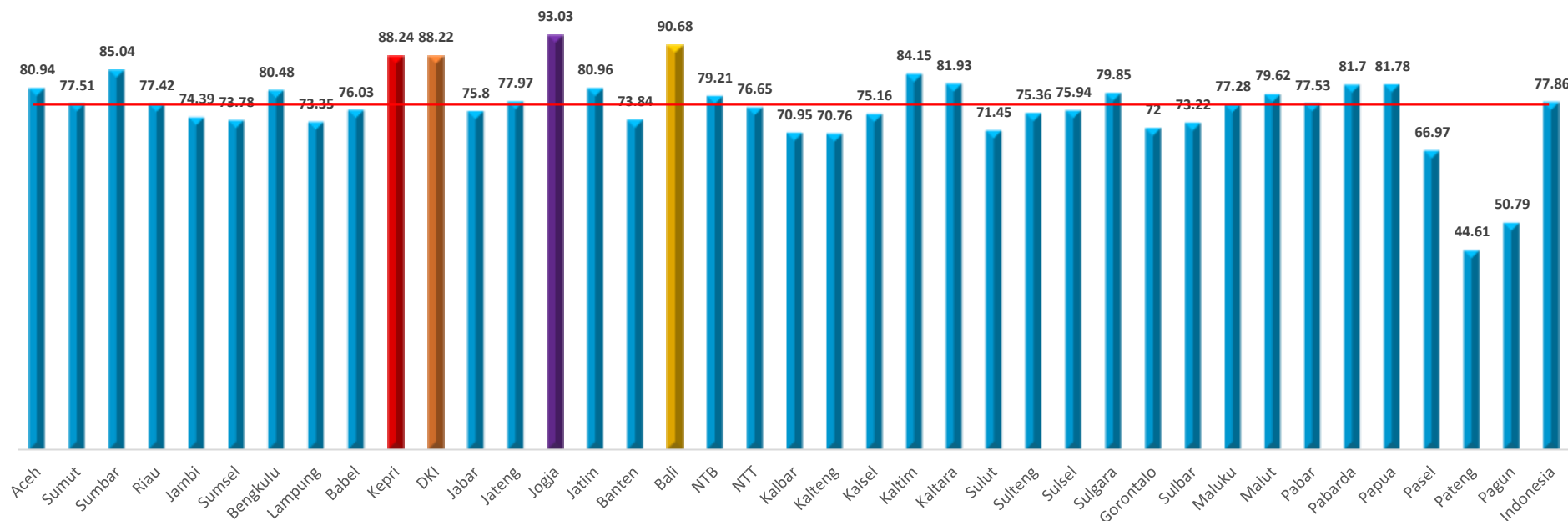
Tabel 3.10
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Harapan Lama sekolah	100	84,54	84,54	100	84,97	84,97	100	85,56	85,59	100	88,24	88,24	100	84,24	84,24	100	84,24	88,24

Pertumbuhan capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2022 s/d 2025 mengalami pertumbuhan trend positif, pada tahun 2022 realisasi kinerja mencapai 84,54% dan terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali sehingga capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah meningkat menjadi 85,59%.

Capaian Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2025 terus bergerak positif dan mencapai pada level 88,24% dari target. Capaian Angka Partisipasi Sekolah terhadap target akhir RENSTRA 2021-2026 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau belum tercapai dengan realisasi 88,24%.

Gambar 3.12
Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun
Secara Nasional Tahun 2025

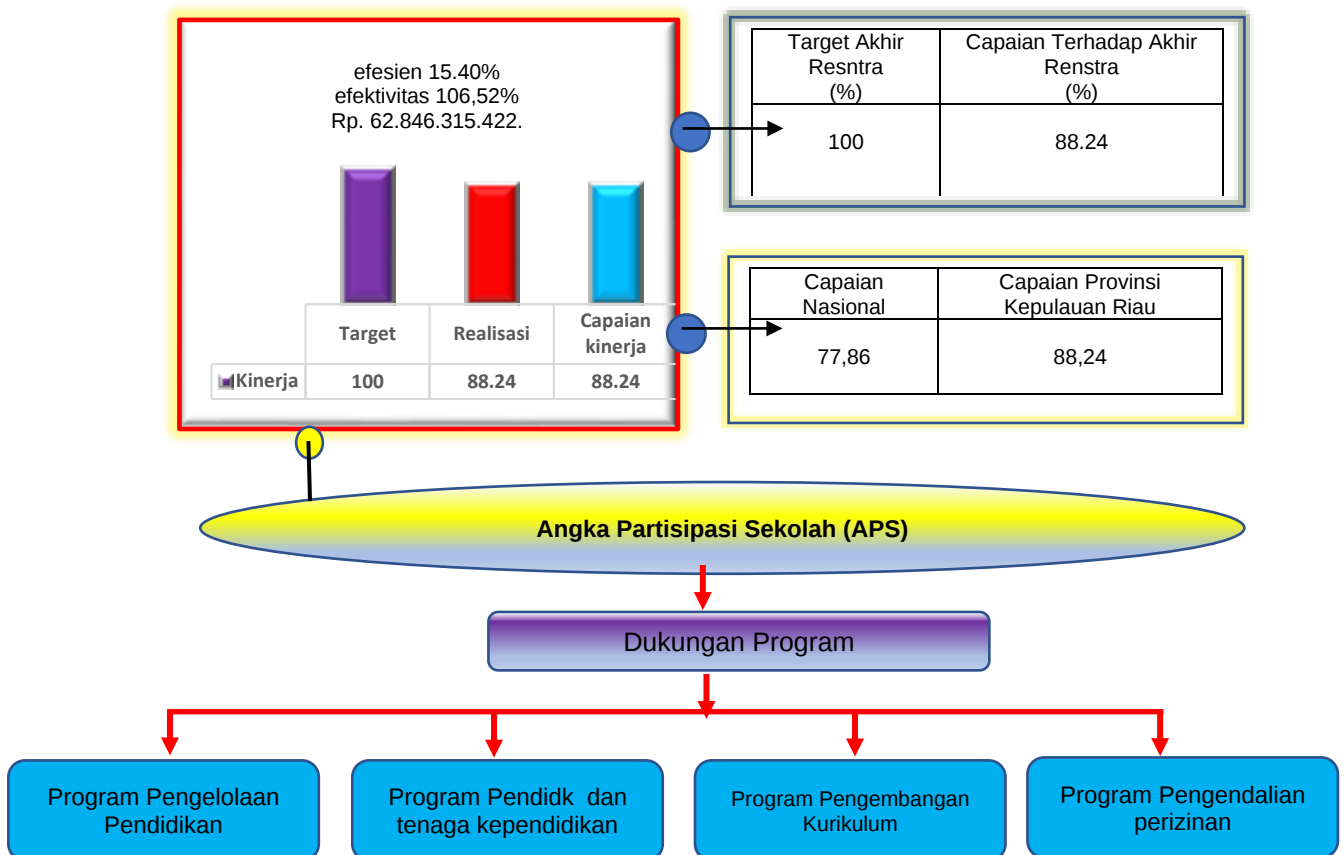


Sumber : BPS RI 2025

Secara Nasional Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 Tahun sudah membaik dari tahun 2024, Provinsi dengan pencapaian tertinggi Angka Partisipasi Sekolah di Indoensia adalah Provinsi Jogjakarta yang berada pada angka 93,03, selanjutnya disusul Provinsi Bali dengan pencapai APS pada angka 90,68 disusul Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan ketiga nasional dengan pencapai

APS di tahun 2025 berada pada angka 88,24 dan diikuti Provinsi DKI Jakarta di urutan ke 4 nasional dengan pencapaian APS 88,22. Untuk provinsi yang pencapaian terkecil berada di Pulau Papua seperti Provinsi Papua Tengah pada angka 44,61, selanjutnya Provinsi Papua Pungan dengan pencapaian APS pada tahun 2025 pada angka 50.79 dan Provinsi Papua Selatan dengan pencapaian APS pada tahun 2025 pada angka 66.79

Grafik 3.13
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Provinsi Kepri
Tahun 2025



Keberhasilan pencapaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Kepulauan Riau didorong meningkatnya akses dan layanan pendidikan, dukungan kebijakan pemerintah, bantuan pendidikan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, sehingga mendorong lebih banyak anak usia sekolah untuk bersekolah dan tetap melanjutkan pendidikan. Secara keseluruhan, kombinasi antara kebijakan yang mendukung, akses pendidikan yang semakin baik, serta kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci beberapa factor pendukung keberhasilan diantaranya sbb :

- Akses pendidikan yang semakin luas dan merata serta di dukung dengan pemenuhan PTK secara bertahap, ketersediaan sekolah,

jarak tempuh yang lebih dekat, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan secara massif dan merata antar wilayah.

- b. Penguatan dan perluasan program bantuan pendidikan, program ini penguatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bersumber dana APBD, beasiswa, dan bantuan lainnya yang mengurangi beban biaya sekolah bagi keluarga.
- c. Kebijakan wajib belajar dan regulasi pemerintah, kebijakan ini penguatan dan penerapan wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun serta dukungan kebijakan daerah yang mendukung partisipasi sekolah.
- d. Kesadaran dan motivasi masyarakat yang meningkat, peran orang tua dan peserta didik semakin menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan.
- e. Perbaikan kualitas layanan pendidikan, dukungan ini meliputi peningkatan kualitas guru, kurikulum, serta lingkungan belajar yang lebih kondusif.
- f. Dukungan lintas sektor dan pemerintah daerah, dukungan ini berbentuk kolaborasi antara dinas pendidikan, sekolah, dan pemangku kepentingan lain dalam menjangkau anak usia sekolah serta penguatan dan perluasan kerja sama dengan DUDI dalam peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan penyerapan tenaga kerja SMK pada DUDI
- g. Program penjangkauan anak tidak sekolah (ATS), program ini berupa pendataan dan mencari solusi terhadap anak putus sekolah melalui pendampingan melalui guru BK, penguatan kerjasama dengan perangkat daerah lain serta dukungan pembiayaan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu serta pendataan, sosialisasi, dan program kembali bersekolah bagi anak putus sekolah.
- h. Komitmen pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan, melalui alokasi anggaran, program wajib belajar, dan kebijakan afirmatif bagi wilayah kepulauan.

- i. Penguatan pendidikan nonformal dan kesetaraan, sebagai alternatif bagi anak yang tidak dapat mengikuti jalur formal

Upaya lain yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah Sekolahh diantaranya :

- a. Perluasan akses pendidikan sejak usia dini, melalui peningkatan layanan PAUD hingga pendidikan menengah dan Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah terpencil, pesisir, dan pulau-pulau
- b. Pendataan dan penelusuran anak tidak sekolah serta anak berisiko putus sekolah.
- c. Program kembali bersekolah bagi anak putus sekolah melalui jalur formal maupun nonformal.
- d. Penguatan peran orang tua dan masyarakat melalui sosialisasi pentingnya pendidikan.
- e. Penyediaan pendidikan alternatif seperti PKBM, sekolah terbuka, dan pendidikan kesetaraan melalui Pengembangan pendidikan nonformal dan kesetaraan, sebagai jalur alternatif bagi masyarakat
- f. Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik.
- g. Kerja sama lintas sektor dengan perangkat desa, kecamatan, dan lembaga sosial dalam pendataan dan penelusuran anak putus sekolah dan alternatif solusi.
- h. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang ramah dan inklusi
- i. Penguatan program wajib belajar 12 tahun, termasuk dukungan pembiayaan dan regulasi daerah
- j. Pemanfaatan teknologi pembelajaran dalam menumbuhkan inovasi, ketertarikan dan kemudahan informasi untuk menjangkau peserta didik di wilayah sulit akses
- k. Peningkatan peran orang tua dan masyarakat, melalui kampanye kesadaran pentingnya pendidikan jangka Panjang

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program

berhasil mencapai target yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.11
Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Angka Partisipasi Sekolah
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

N o	Indikator Sasaran	Sa tuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Angka Partisipasi Sekolah	%	100	88,24	88,24	1. Pengelolaan Pendidikan 2. Pendidik dan Kependidikan 3. Pengembangan kurikulum 4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	365.322.687.666 187.656.000 114.475.500 42.439.000	302,664.866.695 153.676.514 70.519.443 26.028.317	82,85 81,89 61,60 61,33
							365.667.258.166	302.915.090.970	82,84
	Caoaian Kinerja				88,24	Capaian Kinerja Keuangan			82.84
	Efisiensi sumber daya								.5,40
	Efektivitas program								106,52

Pada Tabel 3.11 menjelaskan hubungan antara anggaran, efektivitas dan efisiensi kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2025 sebesar Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 atau setara dengan 82,84% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 88,24% dengan penilaian **kinerja baik** dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya sebesar **5,40%** dan efektivitas program sebesar **106,52%**.

3.3.2 Capaian Kinerja Indikator Utama Perangkat Daerah

3.3.2.1. Meningkatnya Mutu Pendidikan

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan terdiri atas 5 indikator sasaran, indikator sasaran pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sbb :

1. SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi Minimal B
2. SMK negeri yang terevitalisasi
3. Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/kedinasan
4. Tingkat penyerapan lulusan SMK yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA)
5. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) mengikuti Diklat.

Berikut pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan pada tahun 2024 beserta eviden pendukung dan penjelasannya sbb :

1. SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B

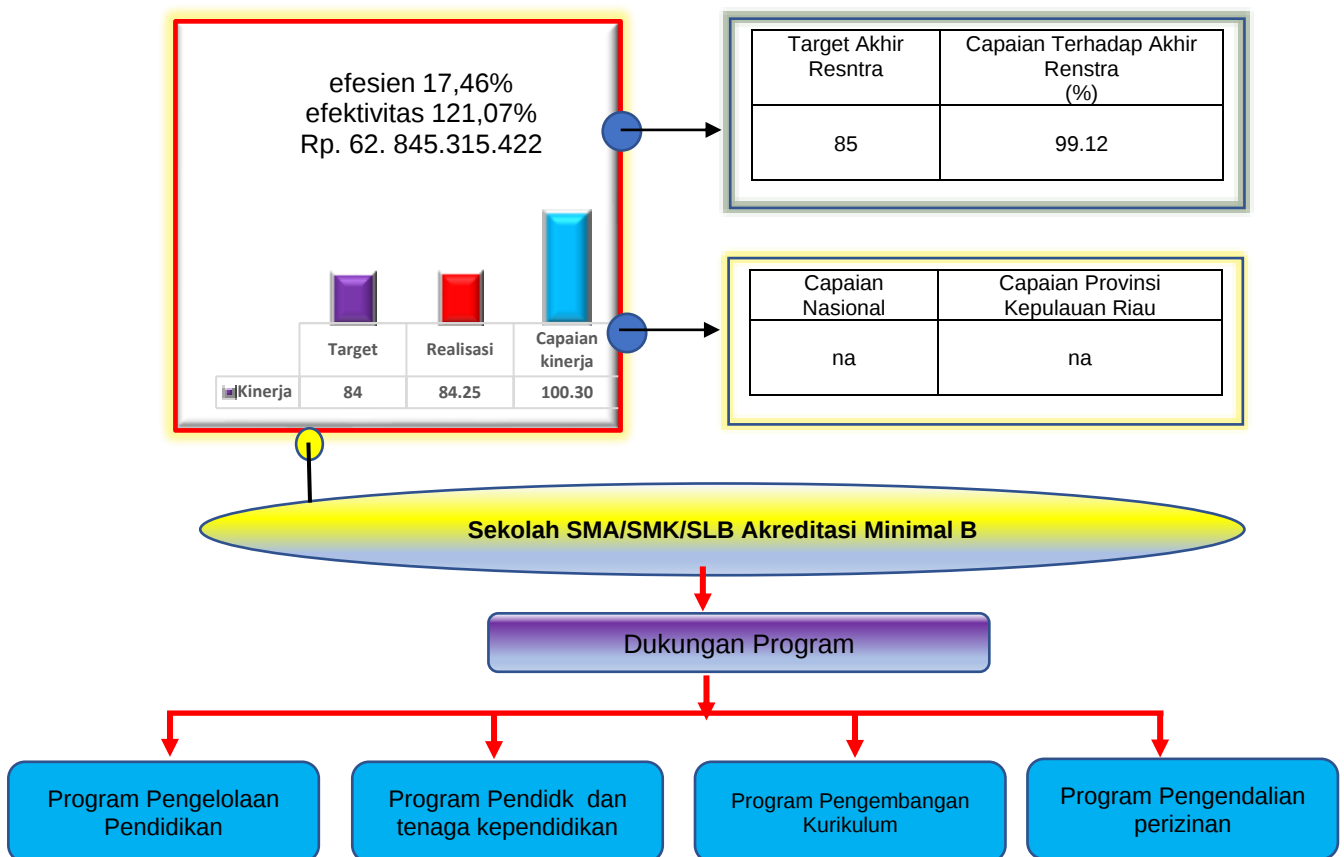
Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (*assesmen*) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi sekolah bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan juga bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah. Di samping itu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan Akreditasi sekolah yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada dan 8 Standar lainnya yang harus di miliki oleh satuan pendidikan. Akreditasi bukan hanya sekedar pemberian label atau sertifikat, tetapi juga merupakan suatu proses evaluasi yang komprehensif terhadap Lembaga Pendidikan, Akreditasi membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga tersebut, serta memberikan panduan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Berikut capaian kinerja SMAN/SMKN/SLBN terakreditasi minimal B di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Kinerja SMA/MA/SMK Negeri Yang Terakreditasi Minimal B
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
I	Meningkatnya mutu pendidikan	SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B	84	84.25	100,30	Sangat Baik

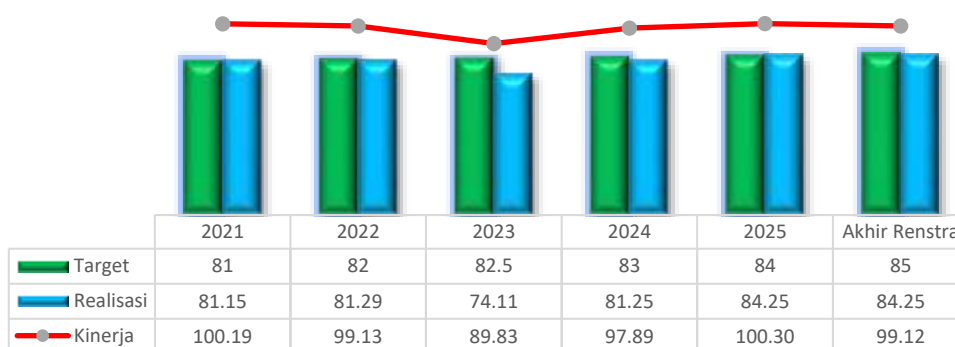
Berdasarkan hasil pencapaian kinerja yang ditampilkan pada Tabel 3.12 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada indikator sasaran **SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B** pencapaian kinerja pada tahun 2025 terealisasi **84,25%** dari target **84%** atau setara dengan pencapaian kinerja **100.30%** dengan peringkat kinerja **Sangat Baik**

Grafik 3.14
Capaian Kinerja Akreditasi Minimal B Pada Sekolah Negeri Di Provinsi Kepri
Tahun 2025



Perkembangan capaian kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B di Provinsi Kepulauan Riau mengalami perkembangan yang fluktuatif, kondisi ini disebabkan diantaranya telah berakhirnya waktu akreditasi sekolah yang sudah kadaluarsa serta terdapat penambahan sekolah baru seperti 1 SMKN di Batam serta beberapa SMAN baru di beberapa Kabupaten/Kota. Beberapa masih pada tahapan proses akreditasi dan beberapa sekolah baru belum dapat dilakukan penilaian akreditasi karena belum memenuhi syarat secara regulasi. Gambar 3.15 Berikut menjelaskan Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025

Gambar 3.15
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2025



Pada Gambar 3.16 menjelaskan bahwa capaian kinerja Akreditasi sekolah SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 meningkatkan dari tahun 2024, dimana pada tahun 2024 capaian kinerja 97,89% meningkat di tahun 2025 menjadi 100,30%.

Tabel 3.13
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B	82,00	81,29	99,13	82,00	74,10	90,36	83,00	81,25	97,89	84,00	84,25	100,30	85,00	84,25	99,12	na	na	na

Pertumbuhan capaian kinerja Akreditasi SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2022 s/d 2025 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2022 realisasi kinerja mencapai 99,13% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan pencapaian kinerja 90,36%. Pada tahun 2024 realisasi pencapaian kinerja akreditasi sekolah SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari tahun 2023 dan berada pada posisi 97,89%.

Pada tahun 2025 pencapaian kinerja Akreditasi SMAN/SMKN/SLBN terus mengalami peningkatan, pada tahun 2025 realisasi kinerja mencapai 100,30% dan merupakan pencapaian tertinggi dalam indikator kinerja Akreditasi SMAN/SMKN/SLBN. Target Akhir Renstra untuk indikator Akreditasi SMAN/SMKN/SLBN masih belum tercapai sesuai target, dimana di akhir Renstra ditargetkan 85,00 sampai akhir 2025 baru tercapai 99,12%

Keberhasilan pencapaian kinerja SMAN/SMKN/SLBN yang terakreditasi minimal B disebabkan beberapa factor sbb :

- g. Peningkatan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui kompetensi pendidik, kompetensi lulusan, melengkapi secara bertahap fasilitas, sarana dan prasarana satuan Pendidikan.
- h. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dalam hal ini Guru dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi yang sesuai, mengikuti pelatihan berkelanjutan, serta mampu menerapkan pembelajaran yang efektif dan inovatif.
- i. Manajemen dan tata kelola sekolah yang baik, kegiatan ini meliputi Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program.
- j. Dukungan pembiayaan yang memadai, disamping pendanaan yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dukungan untuk Pemanfaatan dana pendidikan (BOS, BOP, dan sumber pendanaan lainnya) secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
- k. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Sekolah secara rutin melakukan evaluasi diri dan tindak lanjut perbaikan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan.
- l. Peran aktif pemangku kepentingan, kegiatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara dukungan dari pemerintah daerah, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan.

Upaya lain yang dilakukan dalam mendukung pencapaian Akreditasi Satuan pendidikan SMANN/SMKN/SLBN diantaranya :

- b. Pengembangan dan adaptasi kurikulum berbasis industri., Program Teaching factory, program link and macth, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan Uji Sertifikasi Profesi pendidik.
- c. Peningkatan standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai pelatihan kompetensi, peningkatan jumlah guru yang bersertifikasi dan distribusi guru yang lebih merata antar satuan

pendidikan dan antar wilayah.

- d. Peningkatan berbagai aktivitas peserta didik melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, menjalin kemitraan satuan Pendidikan dengan dunia industri dalam rangka peningkatan ketrampilan peserta didik melalui praktek kerja industri dan pembinaan bagi peserta didik berprestasi di berbagai ajang lomba, manajemen pengelolaan keuangan berbasis akrual.
- e. Perbaikan sistem perencanaan satuan Pendidikan yang terukur, pengembangan dan pengayaan kurikulum pendidikan berbasis teknologi informasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar serta peningkatan 8 kriteria penilaian akreditasi
- f. Melakukan evaluasi secara berkala dan komprehensif terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, adaptif terhadap perubahan, respon cepat terhadap permasalahan dan percepatan terhadap peningkatan sumber daya pendidik dan kependidikan.

Beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya kinerja SMAN/SMKN/SLBN yang terakreditasi minimal B disebabkan beberapa faktor sbb :

- a. Pada tahun 2025 terdapat penambahan satuan pendidikan menengah kejuruan (SMKN) dan Sekolah Menengah Atas (SMAN), secara regulasi satuan pendidikan dimaksud belum dapat dilakukan penilaian akreditasi karena belum memenuhi 8 kriteria penilaian terutama pada kriteria standar sarana prasarana, standar kompetensi, standar proses dan standar pengelolaan.
- b. Pada beberapa satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana serta kekurangan beberapa standar penilaian lain belum dapat dipenuhi sebagai persyaratan untuk proses akreditasi.
- c. Akreditasi pada beberapa satuan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang telah terakreditasi masa berlakunya sudah kadaluarsa dan saat ini masih proses akreditasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran sesuai target serta berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka rencana tindak lanjut dan perbaikan kinerja pada masa mendatang perlu dilakukan berbagai strategi untuk mengatasi masalah dan meningkatkan capaian kinerja akreditasi sekolah sebagai berikut :

- a. Mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dengan dukungan pembiayaan baik dari pemerintah maupun peran masyarakat.
- b. Mempercepat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (NSP) dan pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap satuan pendidikan secara berkala dan berkelanjutan.
- c. Peningkatan kualitas tenaga pendidik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang di dukung dengan penguasaan teknologi informasi dan mempercepat pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional antar satuan pendidikan dan antar wilayah.
- d. Mempercepat proses akreditasi bagi satuan Pendidikan yang masa akreditasinya yang sudah berakhir dan satuan pendidikan yang masih berkreditasi C melalui pendampingan dan penguatan anggaran dalam proses pengusulan, penilaian dan kelengkapan administrasi nilai akhir akreditasi.
- e. Melakukan pengawasan secara berkala dan komprehensif terhadap kualitas sumber daya manusia, penunjang kurikulum dan jenjang karir tenaga pendidik dan kependidikan.
- f. Peningkatan kualitas pendidik melalui berbagai instrument pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industry.
- g. Meningkatkan Pendidikan inklusi secara merata pada satuan Pendidikan dan merata pada setiap wilayah.
- h. Menyesuaikan dan memperbaiki kualitas peserta didik dengan berbagai instrumen seperti pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran, praktek kerja peserta didik sesuai dengan

bidangnya, pengembangan kurikulum yang berorientasi pasar dan perkembangan zaman

- i. Menjadikan satuan Pendidikan sebagai basis utama untuk menanamkan nilai-nilai peradaban dalam sikap, tingkah laku, etika, moral dan budi pekerti dalam bermasyarakat .
- j. Memperkuat tata kelola satuan pendidikan.
- k. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan melalui penguatan dan partisipasi aktif komite sekolah dan masyarakat yang peduli dengan pendidikan.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Akreditasi Minimal B pada satuan pendidikan SMAN/SMKN/SLB di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb :

Tabel 3.14
Analisa Efektivitas dan Efesiensi Sasaran Kinerja SMA/SMK/SLB Negeri
yang terakreditasi minimal B di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B	%	84	84,25	100,30	1. Pengelolaan Pendidikan 2. Pengembangan kurikulum 3. Pendidik dan Kependidikan 4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	365.506.727.766 187.656.000 114.475.500 42.439.000	302,819.547.956 153.676.514 70.519.443 26.028.317	82,85 81,89 61,60 61,33
							365.851.298.266	303.069.772.230	82,84
	Capaian Kinerja				100,30		Capaian Kinerja Keuangan		82,84
							Efisiensi sumber daya		17,46
							Efektivitas program		121,07

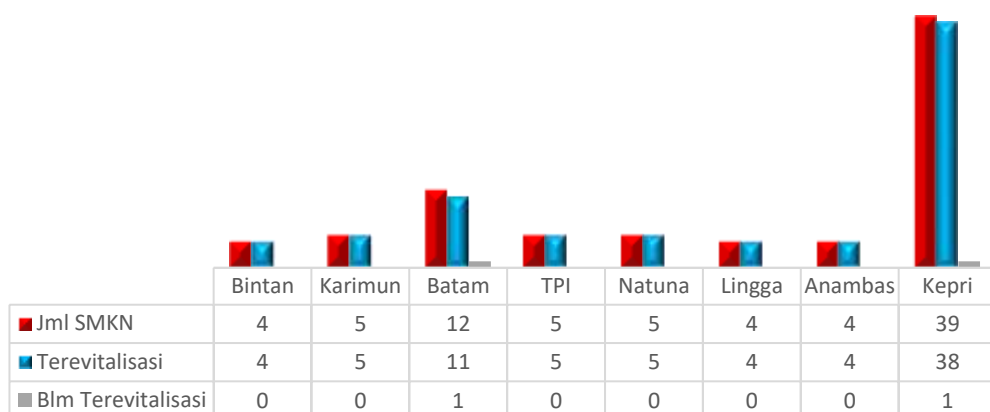
Pada Tabel 3.14 menjelaskan hubungan antara anggaran, realisasi, efektivitas dan efesiensi capaian kinerja dan efektivitas kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Kinerja SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B pada tahun 2025 sebesar Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 atau setara dengan 82,84% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 100,03% dengan penilaian kinerja **sangat baik** yang didukung dengan realisasi keuangan 100,03%, dengan demikian efesiensi sumber daya **17,46%** dan pencapaian tingkat efektivitas capaian program sebesar **121,07%**

2. SMK Negeri Terevitalisasi

Revitalisasi SMK adalah upaya terencana, terukur, dan terorganisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan kejuruan. Revitalisasi SMK dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. SMK merupakan salah satu institusi sekolah yang mempersiapkan peserta didiknya untuk terjun langsung di dunia kerja setelah lulus

Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satu di antaranya dilahirkan dari pendidikan dan pelatihan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia usaha dan industri (DUDI) yang terus menerus berkembang Program Revitalisasi yang dilaksanakan oleh SMK meliputi pengembangan dan penyelarasan kurikulum dengan DUDI, inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan, pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, standarisasi sarana dan prasarana utama, pemutakhiran program kerja sama industry, pengelolaan dan penataan lembaga, serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi. Serta perbaikan dan penyelerasan kurikulum SMK akan memantapkan model kesesuaian dan keterkaitan (link and match) dengan DUDI. Berikut Capaian SMKN yang terevitalisasi Tahun 2025 sbb :

Gambar 3.16
Penyebaran SMK Negeri Terevitalisasi Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2025



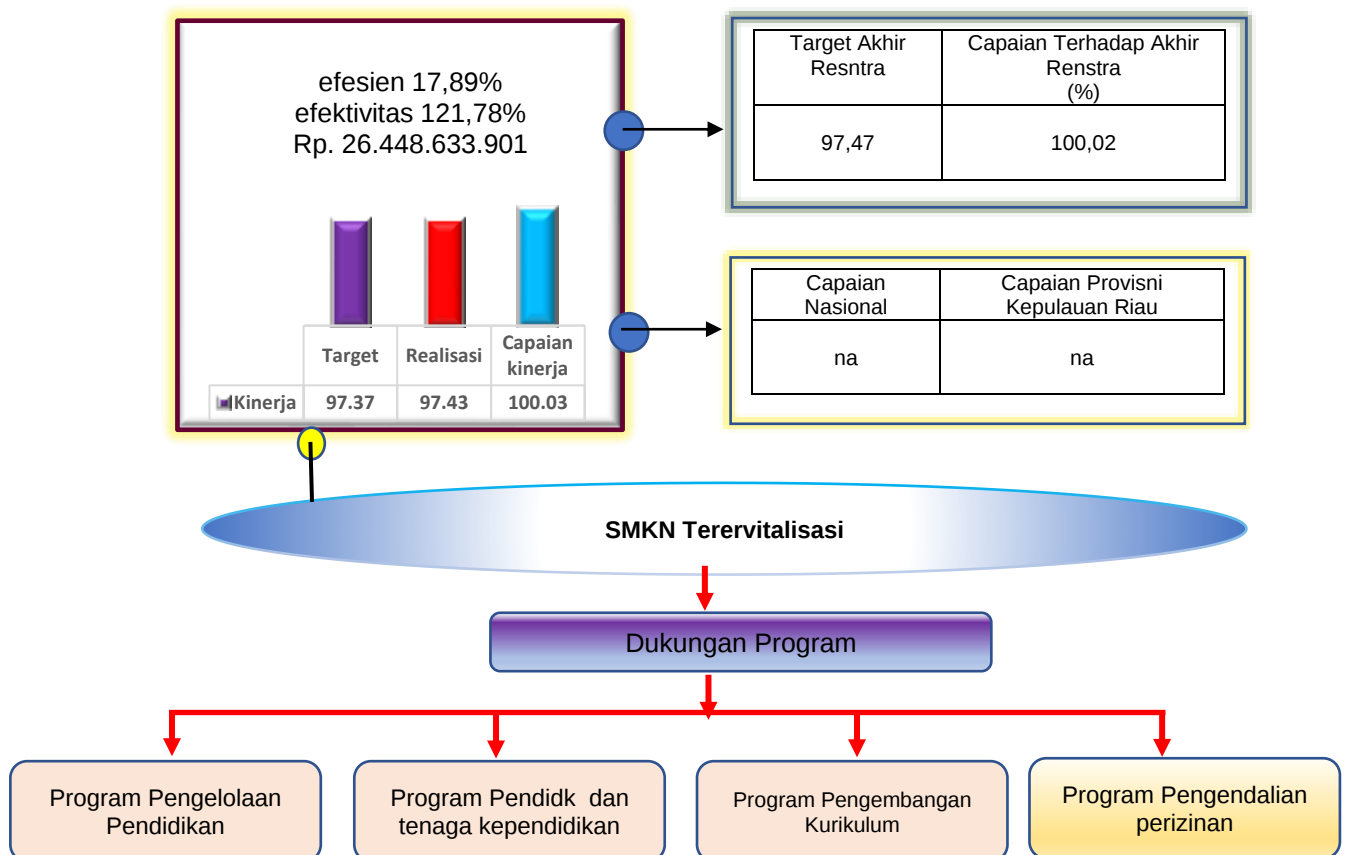
Sumber : Disdik Kepri 2025

Berdasarkan Tabel 3.16 dibawah ini, menjelaskan bahwa capaian kinerja SMKN yang terevitalisasi pada tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau terealisasi **97,43%** diatas target kinerja **97,30 %** dengan tingkat capaian kinerja **100,03%** serta predikat kinerja **Sangat baik**.

Tabel 3.15
Analisa Capaian Kinerja
SMKN yang Terevitalisasi Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
I	Meningkatnya mutu Pendidikan	SMKN terevitalisasi yg	97,37	97,43	100,03	Sangat Baik

Gambar 3.17
Capaian Kinerja SMKN Terevitalisasi Di Provinsi Kepri
Tahun 2025



Tabel 3.16
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja SMK Negeri Terevitalisasi
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
SMKN yang terevitalisasi	24,32	97,22	379,1	27,03	97,22	359,6	97,22	97,36	100,14	97,30	97,43	100,03	97,37	97,43	100,02	na	na	na

Pada Tabel 3.16 menjelaskan capaian kinerja SMK Negeri yang terevitalisasi dalam kurun waktu 2022 sd 2025 serta pencapaian target kinerja pada akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan data pada Tabel... dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja SMK Negeri yang terevitalisasi pada tahun 2025 telah memenuhi target dengan capaian kinerja 100,03% dan capaian target kinerja akhir Renstra juga sudah terlampaui, dimana target SMK Negeri yang terevitalisasi pada akhir Renstra 97,37% dengan realisasi kinerja 97.43% sehingga capaian kinerja di akhir Renstra 100,03%.

Keberhasilan pencapaian Indikator sasaran Persentase SMKN yang terevitalisasi disebabkan beberapa factor sbb :

- a. Tersedianya peluang pasar kerja yang semakin tumbuh di Provinsi Kepulauan Riau, seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19. Hal ini didukung semakin meningkatnya nilai investasi, konsumsi dan nilai ekspor dari Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Secara berkesinambungan adanya peningkatan sarana dan prasarana, ketersediaan alat praktek dan modernisasi peralatan praktik sesuai standar industri sehingga proses pembelajaran lebih relevan dan aplikatif serta adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja.
- c. Evaluasi yang dilakukan secara berkala dan komprehensif terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, adaptif terhadap perubahan, respon cepat terhadap permasalahan dan percepatan terhadap peningkatan sumber daya pendidik dan kependidikan.

Peningkatan kinerja SMKN terevitalisasi memerlukan **pendekatan menyeluruh**, mulai dari perencanaan berbasis data, penguatan SDM, kemitraan industri, hingga tata kelola dan pendanaan yang efektif. Berbagai upaya lain yang dilakukan dalam meningkatkan pencapaian kinerja agar SMKN terevitalisasi diantaranya :

- a. Penguatan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Penguatan ini dengan memperkuat kerja sama aktif dengan DUDI dalam penyusunan kurikulum, praktik kerja industri (Prakerin/PKL), magang guru, dan penyerapan lulusan
- b. Penerapan teaching factory dan pembelajaran berbasis proyek, Sekolah menerapkan model pembelajaran yang mendekati kondisi kerja nyata sehingga meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja peserta didik.
- c. Dukungan kebijakan dan pendanaan pemerintah, upaya ini dengan penguatan anggaran terutama bagi peserta didik yang kurang mampu melalui berbagai skema serta dukungan regulasi, pendampingan, serta alokasi anggaran khusus revitalisasi SMK dari

pemerintah pusat dan daerah.

- d. Meningkatkan peran serta dan peningkatan kepercayaan public terhadap kualitas lulusan dan tingkat serapan kerja lulusan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap SMK Negeri Terevitalisasi.
- e. Penguatan sinergi antara kebijakan pemerintah, sekolah, industri, dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan vokasi.
- f. Menata dan mengelola kelembagaan satuan Pendidikan dengan memperkuat program Link and match dengan industri.
- g. Pengembangan dan adaptasi kurikulum berbasis industri., Program Teaching factory, Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan Uji Sertifikasi Profesi pendidik serta secara bertahap pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan berbagai strategi untuk mengatasi masalah dan meningkatkan SMKN yang terevitalisasi sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan terus meningkatkan standarisasi kelulusan, sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, memperkuat penggunaan teknologi informasi sebagai bahan pembelajaran, Kerjasama yang lebih luas dan saling menguntungkan dengan DUDI, perluasan program link and macth dan responsive terhadap perubahan kebutuhan pasar
- b. Memperkuat program teknologi informasi serta penguatan peran dan fungsi Lembaga/Balai Teknologi Informasi dan Komunkasi sebagai Lembaga yang mengembangkan media pembelajaran berbaasis teknologi informasi.

Tabel 3.10 dibawah ini merupakan Analisis Perbandingan Capaian Kinerja SMK yang terevitalisasi Tahun 2025 serta Tingkat Efektivitas dan Efesiensi Sasaran Kinerja SMK yang terveitalisasi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024

Tabel 3.17
Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja SMKN Terevitalisasi
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

N o	Indikator Sasaran	Sa tuan	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B	%	97,30	97,43	100,03	1. Pengelolaan Pendidikan SMK	147.715.209.122	121.360.921.447	89,15
						2. Pengembangan kurikulum	187.656.000	153.676.514	81,89
						3. Pendidik dan Kependidikan	114.475.500	70.519.443	61,60
						4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000	26.028.317	61,33
						Jumlah	148.059.779.622	121.611.145.721	82,14
	Caoaian Kinerja					100,03	Capaian Kinerja Keuangan		
Tingkat Efisiensi sumber daya									17,89
Tingkat Efektivitas program									121,78

Pada Pada Tabel 3.17 menjelaskan hubungan antara anggaran, realisasi, efektivitas dan efisiensi capaian kinerja dan efektivitas kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator SMK Terevitalisasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 148.059.779.622 dan direalisasikan sebesar Rp. 121.611.145.721 atau setara dengan 82,14% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 100,03% dengan penilaian **kinerja sangat baik** yang didukung dengan realisasi keuangan 82,14%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya 17,89% dan pencapaian tingkat efektivitas capaian program sebesar 121,78%

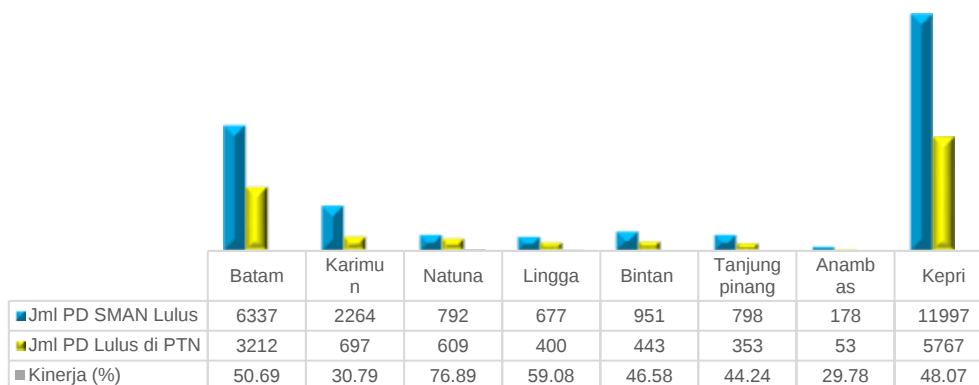
3. Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Kedinasan

Semakin tinggi lulusan peserta didik dari sekolah menengah atas yang melanjutkan Pendidikan pada perguruan tinggi negeri/sekolah kedinasan, mengindikasikan bahwa mutu Pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Ada beberapa jalur yang dapat digunakan untuk lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), calon mahasiswa bisa mengikuti salah satu jalur seleksi berikut:

- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi): Jalur ini berbasis prestasi akademik dan non-akademik. Siswa akan diseleksi berdasarkan nilai rapor, prestasi, dan portofolio tanpa harus mengikuti tes tertulis.
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) jalur ini Seleksi Nasional Berbasis Tes adalah jalur masuk perguruan tinggi yang menggunakan tes tertulis sebagai penentu kelulusan.
- Jalur Mandiri, Setiap PTN memiliki jalur mandiri yang bisa dibuka setelah SNBP atau SNBT. Sistem seleksi beragam, termasuk melalui jalur prestasi dan tes ujian masuk PTN.

Berikut indicator Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan tinggi/sekolah kedinasan tahun 2025.

Gambar 3.18
Jumlah Lulusan Peserta Didik SMAN
dan Lulusan Peserta Didik Lulus di PT/Sekolah Kedinasan
Tahun 2025

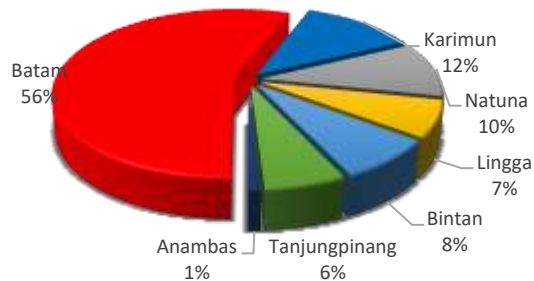


Sumber : Disdik Prov Kepri 2025

Tabel 3.18
Jumlah Lulusan Siswa SMAN Pada PTN
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumlah Siswa Lulus SMA	Jumlah Siswa Lulus di PT/sekolah kedinasan	Jumlah Siswa Lulus di PTN (%)
1.	Batam	6377	3212	50,37
2.	Karimun	2264	2262	30,79
3	Natuna	792	609	76,89
4.	Lingga	677	400	59,08
5.	Bintan	951	443	46,58
6.	Tanjungpinang	798	353	45,49
7.	Anambas	178	53	29,78
		11997	5767	48,07

Gambar 3.19
Sumber Lulusan Siswa SMAN Pada PTN /Sekolah Kedinasan
Tahun 2025



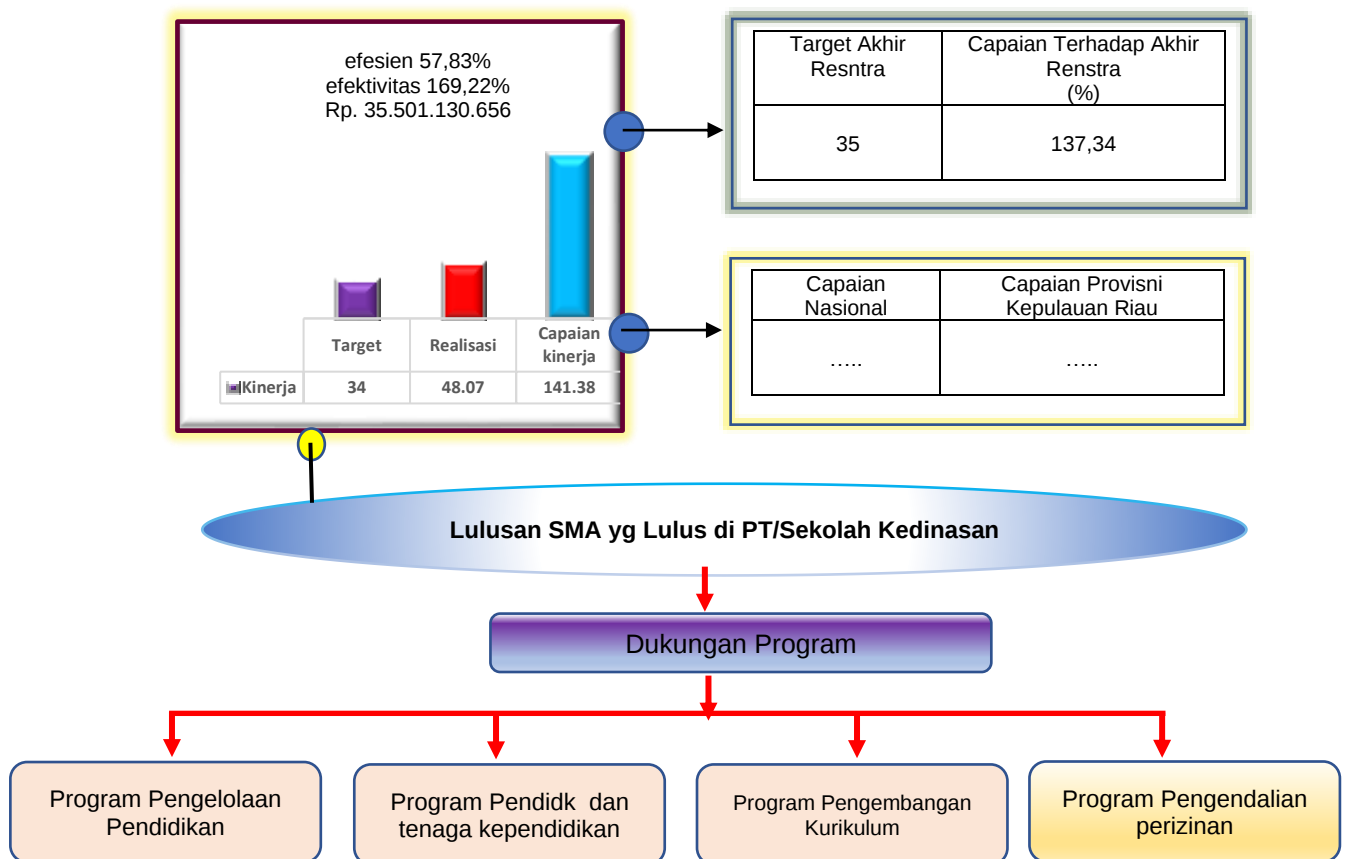
Tabel 3.19
Analisa Pencapaian Kinerja
Lulusan SMA Yang Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi/Kedinasan
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
1.	Meningkatnya mutu pendidikan	Lulusan SMA yg Ke melanjutkan Pendidikan tinggi/kedinasan	34	48,07	141,38	Sangat Baik

Sumber : Disdik Prov Kepri 2025

Berdasarkan Tabel 3.19 menjelaskan bahwa capaian kinerja Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan sekolah kedinasan pada tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau terealisasi **48,07%** diatas target kinerja **34%** dengan tingkat capaian kinerja **141,38%** serta predikat kinerja **Sangat baik**.

Gambar 3.20
Capaian Kinerja Lulusan SMA yang Melanjutkan ke PTN/Sekolah kedinasan
Di Provinsi Kepri
Tahun 2025



Keberhasilan pencapaian Indikator Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/sekolah Kedinasan dipengaruhi oleh beberapa factor sbb :

- Pemerataan fasilitas dann kwalitasnpendidikan yang semakin membaik antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
- Membaiknya pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan antar wilayah dan antar

- c. Pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan yang semakin membaik antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
- d. Membaiknya pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
- e. Prestasi akademik dan nonakademik siswa yang meningkat
Prestasi siswa menjadi modal utama dalam mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dan sekolah kedinasan.
- f. Meningkatnya Pengayaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis teknologi informasi yang belum maksimal, hal ini belum di dukung dengan ketersediaan fasilitas teknologi informasi yang merata di semua wilayah.
- g. Meningkatnya motivasi dan kesadaran serta pemahaman peserta didik tentang pentingnya pendidikan tinggi sebagai bekal masa depan dan peningkatan daya saing.
- h. Kualitas pembelajaran yang semakin baik yang diawali dengan Peningkatan mutu proses pembelajaran, pendampingan akademik, serta program pengayaan dan bimbingan belajar di sekolah.
- i. Iklim sekolah yang mendukung budaya akademik
Lingkungan sekolah yang kondusif, kompetitif, dan berorientasi pada pencapaian akademik.
- j. Ketersediaan dan pilihan perguruan tinggi yang di dukung program dan jurusan yang semakin berkembang sehingga meningkatkan minat peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
- k. Membaiknya factor ekonomi keluarga sehingga tekanan terhadap pengeluaran biaya pendidikan semakin membaik.
- l. Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kab/kota yang ada dalam mendukung pembiayaan pendidikan melalui berbagai skema.

Berbagai upaya lain yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja Jumlah Lulusan Siswa SMAN Pada PTN/sekolah kedinasan di Provinsi Kepulauan Riau diantaranya :

- a. Penguatan layanan bimbingan dan konseling (BK), hal ini dilakukan untuk optimalisasi layanan BK dalam memberikan informasi, pendampingan pemilihan jurusan, dan persiapan masuk perguruan tinggi/kedinasan.
- b. Akses informasi dan sosialisasi perguruan tinggi yang lebih luas, Kemudahan akses informasi jalur masuk (SNBP, SNBT, seleksi mandiri, sekolah kedinasan) melalui kegiatan sosialisasi dan pemanfaatan teknologi.
- c. Dukungan orang tua dan keluarga, berupa penguatan peran orang tua dan keluarga dalam memotivasi, mendorong dan memfasilitasi anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- d. Tersedianya program bantuan dan beasiswa pendidikan, dukungan program beasiswa (KIP Kuliah, beasiswa daerah, dan lainnya) yang membuka akses pendidikan tinggi bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
- e. Kerja sama sekolah dengan perguruan tinggi dan lembaga kedinasan, upaya ini melalui penguatan dan kesempatan yang lebih luas melalui skema MoU, kunjungan kampus, dan program pembinaan yang mendorong minat melanjutkan studi.

Beber

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan lulusan SMA melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi/Sekolah kedinasan di tahun yang akan datang sbb :

- a. Peningkatan informasi dan sosialisasi kelanjutan pendidikan paska lulus SMA seperti pendidikan expo yang dilakukan perguruan tinggi/sekolah kedinasan di sekolah, penyebaran informasi tentang kampus/sekolah kedinasan melalui media sosial sekolah, WAG sekolah dan orang tua siswa dan website sekolah.
- b. Penguatan bimbingan dan konseling, melalui program bimbingan karir dari awal masuk SMA dengan memberikan pertimbangan ke kampus mana menjadi pilihan sesuai dengan bakat dan minat, melakukan tes minat dan bakat secara dini untuk memilih jurusan

yang sesuai dan pendampingan bagi siswa khusus yang memiliki potensi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi/sekolah kedinasan

- c. Pembinaan akademik dan non akademik, melalui kelas tambahan persiapan SNBT dan seleksi kedinasan, pembinaan prestasi akademik, olahraga, seni dan organisasi sebagai nilai tambah portofolio siswa dan pembentukan kelas unggulan atau persiapan ke perguruan tinggi.
- d. Dukungan Finansial dan Informasi Beasiswa, melalui program sosialisasi beasiswa seperti KIP Kuliah, beasiswa daerah, dan beasiswa swasta, Pendampingan pengurusan administrasi beasiswa dan Kerja sama dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk beasiswa lokal.
- e. Pelibatan Orang Tua, pelibatan secara aktif kegiatan eminar orang tua tentang pentingnya pendidikan tinggi dan peluang karier, Konsultasi bersama orang tua untuk perencanaan pendidikan anak dan Penyamaan persepsi antara sekolah dan orang tua terkait masa depan siswa.
- f. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Kedinasan, berupa kegiatan MoU dengan perguruan tinggi dan sekolah kedinasan, Program kunjungan kampus (campus visit) dan kuliah tamu dan Alumni sharing yang telah sukses di perguruan tinggi/sekolah kedinasan.
- g. Penguatan Motivasi dan Mental Siswa berupa Seminar motivasi dan pengembangan diri, Pendampingan psikologis untuk mengatasi rasa takut gagal atau minder dan Menumbuhkan budaya sekolah yang berorientasi pada pendidikan lanjut.
- h. Pendataan dan Evaluasi Lulusan, upaya untuk melakukan tracer study lulusan setiap tahun, evaluasi hambatan lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan dan menyusun program perbaikan berdasarkan data.

Tabel 3.20
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Lulusan SMA ke PTN/Sekolah Kedinasan
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Lulusan SMA Yg Melanjutkan Ke PTN/Sekolah Kedinasan	na	na	na	na	na	na	33	35,59	107,84	34	48,78	141,78	35	48,78	131,34	na	na	na

Pada Tabel 3.20 menjelaskan capaian kinerja Lulusan SMA yang melanjutkan ke PTN/Pendidikan Kedinasan, dari tabel tersebut terdapat peningkatan capaian kinerja dari tahun 2024 dan tahun 2025, Pada Tahun 2024 capaian kinerja Lulusan SMA yang melanjutkan ke PTN/Pendidikan Kedinasan mencapai 107,84% dari target dan meningkat Kembali pada tahun 2025 menjadi 141,78. Hingga akhir tahun 2025 capaian kinerja Lulusan SMA yang melanjutkan ke PTN/Pendidikan Kedinasan telah mencapai 131,34 dari target akhir renstra.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Akreditasi Minimal B pada satuan pendidikan SMAN/SMKN/SLB di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb :

Berikut Tabel... dan Tabel... yang berkaitan dengan dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dalam mendukung pelaksanaan Capaian Kinerja Lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi/sekolah kedinasan Tahun 2025 dan capaian Efektivitas dan Efisiensi Sasaran pada Kinerja Lulusan SMA Yg Melanjutkan Ke PTN/Sekolah Kedinasan Di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sbb :

Tabel 3.21
Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Lulusan SMA Yg Melanjutkan Ke PTN/Sekolah Kedinasan
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

N o	Indikator Sasaran	Sa tuan	Kinerja			Program	Anggaran			
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Lulusan SMA Yg Melanjutkan PTN/Sekolah Kedinasan	%	34	48,07	141,78	1. Pengelolaan Pendidikan SMA	197.192.262.277	164.785.477.847	83,57	
						2. Pengembangan kurikulum	114.475.500	70.519.443	61.60	
						3. Pendidik dan Kependidikan	187.656.000	153.675.514	81.89	
						4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000	26.028.317	61.33	
						Jumlah	197.192.262.277	164.785.477.847	83,55	
	Caoaian Kinerja					141,78	Capaian Kinerja Keuangan			83,55
	Tingkat Efisiensi								57,83	
Tingkat Efektivitas								169,22		

Pada Tabel 3.21 menjelaskan hubungan antara anggaran, realisasi, efektivitas dan efisiensi capaian kinerja dan efektivitas kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/sekolah kedinasan pada tahun 2025 sebesar Rp. 197.192.262.277 dan direalisasikan sebesar Rp. 164.192.477.847 atau setara dengan 83,55% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka **141,78%** dengan penilaian kinerja sangat baik yang didukung dengan realisasi keuangan 83,55%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya 57,83% dan pencapaian tingkat efektivitas capaian program sebesar 169,22%

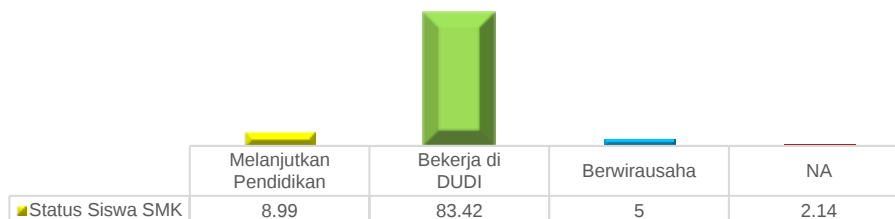
4. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK yg Bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA)

Transformasi pendidikan vokasi melalui program SMK dijadikan sebagai Pusat Keunggulan yang berhasil melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Transformasi itu juga berhasil meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap lulusan pendidikan vokasi. Peningkatan kepercayaan DUDI terhadap pendidikan vokasi setidaknya dibuktikan dari antusiasme DUDI terhadap lulusan SMK

Penilaian lulusan SMK di Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA) semakin tinggi menunjukkan bahwa kualitas lulusan SMK semakin baik, adanya **peningkatan dipengaruhi oleh keselarasan kurikulum (link and match)**, penguatan **soft skills** (kedisiplinan, komunikasi, kepemimpinan), penguasaan **teknologi digital**, pengembangan **jiwa kewirausahaan**, dan adanya **sertifikasi kompetensi**, yang membuat mereka lebih siap dengan kebutuhan industri yang dinamis, tidak hanya dalam keahlian teknis tetapi juga sikap kerja yang profesional. Hubungan lulusan SMK dengan DUDI adalah **hubungan kerja sama yang saling menguntungkan**, di mana SMK menyiapkan tenaga kerja terampil dan DUDI menyerap serta membina lulusan SMK sesuai kebutuhan industri.

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki daya serap tinggi terhadap dunia usaha dan dunia industry memiliki keunggulan diantaranya kompetensi lulusan SMK sesuai kebutuhan, kualitas lulusan memiliki standar, Kerjasama yang saling menguntungkan antara SMK dengan DUDI, lulusan SMK memiliki daya saing tinggi karena kualitas yang baik serta beberapa kriteria lainnya. Alumni SMK dapat bekerja pada DUDI, melanjutkan pendidikan, mendirikan usaha/berusaha. Berikut lulusan siswa SMK dengan berbagai pilihan sbb :

Gambar 3.21
Persentase Status Siswa SMK Setelah Lulus Sekolah
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Rapor Pendidikan 2024

Berdasarkan Grafik 3.21 menjelaskan bahwa tidak semua Lulusan SMK yang bekerja di DUDI, sebanyak 8.99% lulusan SMK melanjutkan pada Pendidikan yang lebih tinggi, sebanyak 5% lulusan SMK berwirausaha dengan berbagai kerja yang sesuai dengan kemampuan yg di dapat pada Pendidikan dan sisanya sekitar 2.14% lulusan SMK tidak/belum diketahui aktivitas setelah lulus.

Pada tahun 2025 sebanyak 83.42% lulusan SMK terserap pada dunia industry dan dunia usaha (IDUKA), capaian kinerja ini diatas target pada tahun 2025 yaitu 83.42%, capaian kinerja ini setara dengan **208.55** diatas target dengan predikat kinerja **sangat baik**.

Tabel 3.22
Analisa Pencapaian Kinerja
Penyerapan Lulusan SMK yang Bekerja di IDUKA
Tahun 2025

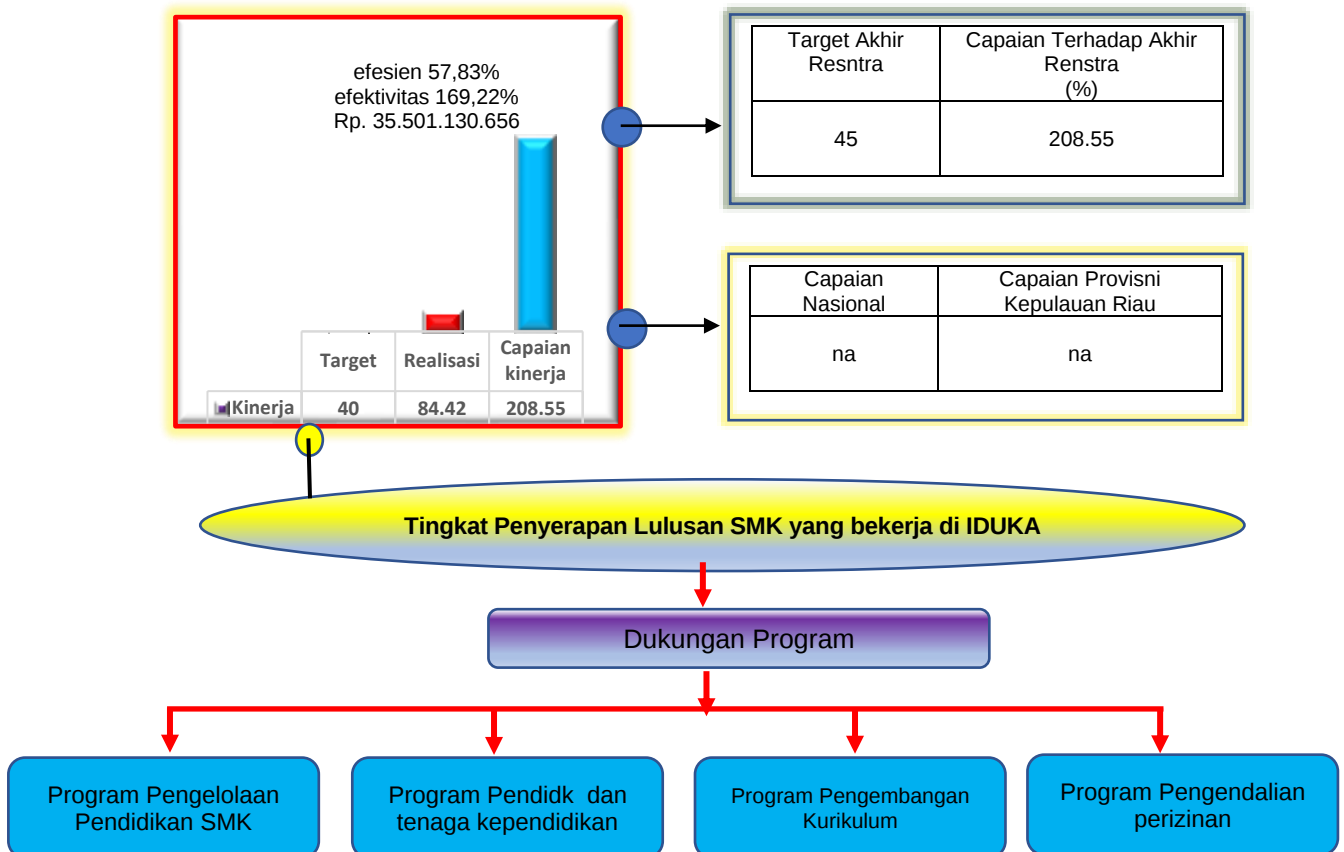
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
I	Meningkatnya mutu pendidikan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK yang bekerja di IDUKA	40	83.42	208.88	Sangat Baik

Sumber : Rapor Pendidik 2025

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja yang ditampilkan pada Tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada indicator sasaran **Penyerapan Lulusan SMK yang**

bekerja di IDUKA pada tahun 2025 terealisasi **83.42%** dari target **40%** atau setara dengan pencapaian kinerja **208.55%** dengan peringkat kinerja **Sangat Baik**

Grafik 3.22
Capaian Kinerja Tingkat Penyerapan Lulusan SMK yang bekerja di IDUKA
Tahun 2025



Keberhasilan pencapaian Indikator kinerja Tingkat Penyerapan Lulusan SMK yang bekerja di IDUKA disebabkan diantaranya Keberhasilan tingkat penyerapan kerja juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi daerah, sektor industri yang berkembang di wilayah tertentu, serta dukungan pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja (misalnya penyediaan lowongan kerja lokal atau promosi kompetensi). beberapa factor lain sbb :

a. Kesesuaian Kompetensi dengan Kebutuhan Industri, kurikulum di SMK sangat mempengaruhi daya serap lulusan SMK terhadap pasar, kurikulum

disusun agar sesuai dengan standar industri dan kebutuhan pasar kerja, lulusan memiliki keterampilan yang tepat sehingga lebih mudah diterima bekerja di IDUKA.

- a. Kerja Sama yang Erat antara SMK dan IDUKA, kerja sama formal seperti magang (PKL/PRAKERIN), penyusunan materi ajar dengan pihak industri, serta keterlibatan industri dalam pembelajaran membuat lulusan lebih siap kerja.
- b. Penguatan Kurikulum dan Fasilitas Pendidikan SMK dengan fasilitas praktik yang lengkap, instruktur yang kompeten, dan pendidikan berbasis produksi/teknik lebih relevan dengan kebutuhan tempat kerja.
- c. Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah yang Proaktif, Peran kepala sekolah dan pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, motivasi, dan profesionalisme siswa juga mendorong lulusan mudah terserap oleh industri.
- d. Penguasaan Soft Skills, bagi peserta didik selama masa pendidikan serta meningkatkan dan membangun disiplin, manajemen waktu, kerja tim, adaptasi, komunikasi, dan adaptasi menjadi nilai tambah penting selain hardskills teknis.
- e. Implementasi Program Link and Match, Program sinergi antara sekolah dan dunia usaha/industri yang secara kontinu menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan riil industri (link and match) meningkatkan peluang kerja lulusan.
- f. Penguasaan Soft Skills, Kemampuan seperti disiplin, manajemen waktu, kerja tim, komunikasi, dan adaptasi menjadi nilai tambah penting selain hardskills teknis.
- g. Keahlian Digital & Teknologi, Kemahiran menggunakan teknologi terbaru dan digitalisasi menjadi syarat mutlak di era sekarang.
- h. Jiwa Kewirausahaan, Banyak program SMK membekali lulusan untuk tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja (wirausaha).

- i. Sertifikasi Kompetensi, Sertifikasi nasional maupun internasional meningkatkan daya saing dan kredibilitas lulusan di mata perusahaan.
- j. Kesiapan Mental & Fisik, Lulusan dipersiapkan secara mental untuk menghadapi tekanan kerja dan memiliki stamina prima.

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan serapan lulusan SMK pada DUDI diantaranya :

- a. Penguatan kemitraan strategis dengan IDUKA lokal dan internasional, penguatan dan perluasan kemitraan ini terutama pada sektor unggulan Kepri seperti manufaktur, galangan kapal, pariwisata, logistik, dan industri jasa.
- b. Penyelarasan kurikulum berbasis kebutuhan industri (link and match), untuk penyelarasan kebutuhan eperlu melibatkan IDUKA dalam penyusunan kurikulum, penyelarasan kompetensi, dan penilaian hasil belajar.
- c. Optimalisasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan magang industry, waktu yang lebih Panjang dalam PKL sehingga dapat memberikan pengalaman kerja nyata sehingga lulusan siap kerja dan memiliki rekam jejak di industri.
- d. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi lulusan Melalui LSP/sertifikasi industri untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan IDUKA terhadap lulusan SMK.
- e. Penguatan peran Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, peluang akan lebih besar jika BKK dijadikan sebagai penghubung langsung antara lulusan dan kebutuhan tenaga kerja di IDUKA.
- f. Peningkatan kompetensi guru produktif, pengutana ini melibatkan guru secara aktif melakukan magang industri, pelatihan, dan sertifikasi agar pembelajaran selaras dengan teknologi dan standar kerja terkini.
- g. Pengembangan soft skills dan budaya kerja industry, meliputi disiplin, etos kerja, komunikasi, dan keselamatan kerja (K3).

- h. Keahlian Digital & Teknologi, Kemahiran menggunakan teknologi terbaru dan digitalisasi menjadi syarat mutlak bagi peserta didik SMKN
- i. Penguatan dan perluasan dukungan pemerintah daerah, melalui berbagai program dan dukungan kebijakan vokasi, fasilitasi kerja sama SMK–IDUKA, dan promosi lulusan SMK kepada dunia usaha dan industri.
- j. Pemanfaatan keunggulan wilayah Kepri, sebagai kawasan industri dan perdagangan bebas yang membuka peluang kerja luas bagi lulusan SMK serta pengembangan keunggulan wilayah Kepulauan Riau sebagai kawasan ekonomi hijau dan pariwisata serta pengembangan dan pengembangan budaya sebagai nilai tambah ekonomi.

Capaian kinerja lulusan SMK yang bekerja di Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA) menunjukkan tren yang relatif **lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya** hal ini menandakan meningkatnya relevansi kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja. Persentase lulusan SMK yang terserap di IDUKA mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh penguatan kerja sama SMK dengan dunia industri, optimalisasi program Praktik Kerja Lapangan (PKL), serta implementasi kebijakan *link and match*. Selain itu, keterlibatan industri dalam penyelarasan kurikulum dan sertifikasi kompetensi turut mempercepat proses transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Secara keseluruhan, capaian kinerja ini menunjukkan bahwa program peningkatan kualitas SMK berjalan efektif. Namun demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperluas kemitraan IDUKA, menyesuaikan kompetensi dengan perkembangan teknologi, serta meningkatkan kualitas lulusan agar capaian kinerja tetap berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

Tabel 3.23
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Lulusan SMK Yang Bekerja di IDUKA
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Lulusan SMK yg Diterima di IDUKA	63	32.23	51.16	65	38.4	59.08	35	39,86	113,88	40	83.42	208.55	45	83.42	195.55	na	na	na

Pada Tabel 3.23 menjelaskan perbandingan capaian kinerja lulusan SMK yang diterima di DUDI dari tahun 2022 sd 2025, pada tahun 2025 lulusan SMK yang diterima di DUDI mencapai 83.42% dari target dengan predikat kinerja sangat baik dan pada tahun 2025 lulusan SMK yang diterima di DUDI mencapai 208.55% dari target.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Hubungan antara anggaran dan Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Lulusan SMK yang bekerja di DUDI di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb :

Berikut Tabel... dan Tabel... yang berkaitan dengan dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dalam mendukung pelaksanaan Capaian Kinerja Lulusan SMK yang bekerja di DUD Tahun 2025 serta capaian Efektivitas dan Efisiensi Sasaran pada Kinerja Lulusan SMK yang bekerja di DUDI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sbb

Tabel 3.24
Analisa Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Capaian Kinerja
Lulusan SMK Yang Bekerja di IDUKA Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

N o	Indikator Sasaran	Sa tuan	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Lulusan SMK yg bekerja di IDUKA	%	40	83.42	208.55	1. Pengelolaan Pendidikan SMK	147.715.209.122	121.360.921.447	89,15
						2. Pengembangan kurikulum	187.656.000	153.676.514	81,89
						3. Pendidik dan Kependidikan	114.475.500	70.519.443	61,60
						4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000	26.028.317	61,33
						Jumlah	148.059.779.622	121.611.145.721	82,14
	Caoaian Kinerja					Capaian Kinerja Keuangan			
Tingkat Efisiensi									126,41
Tingkat Efektivitas									253,90

Pada Tabel 3.24 menjelaskan hubungan antara anggaran, realisasi, efektivitas dan efisiensi capaian kinerja dan efektivitas kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Lulusan SMK yang Bekerja di IDUKA pada tahun 2025 sebesar Rp. 148.059.779.622 dan direalisasikan sebesar Rp. 121.611.145.721 atau setara dengan 82.14% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 208.55% dengan penilaian kinerja sangat baik yang didukung dengan realisasi keuangan 82.14%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya 126.41% dan pencapaian tingkat efektivitas capaian program sebesar 253.90%

5. Persentase PTK mengikuti Diklat

Diklat guru berhubungan positif dengan pengetahuan guru. Diklat yang terencana, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan akan meningkatkan pengetahuan pedagogik, profesional, dan kontekstual guru, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pembelajaran.

Program Pendidikan dan pelatihan guru merupakan program yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki akreditasi dengan tujuan menjadi PTK lebih profesional, sehingga dapat memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Program latihan yang dilakukan biasanya mencakup teknik perencanaan pembelajaran dan cara melakukan pembelajaran yang efektif. Kegiatan ini masuk ke dalam bagian internal manajemen di sekolah yang diadakan dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru. Pihak manajemen berharap agar guru bisa mendapatkan keunggulan kompetitif serta dapat memberikan pelayanan terbaik. Program pelatihan guru diharapkan dapat bekerja dengan lebih produktif dan mengalami peningkatan kualitas kerja. Diklat yang terencana akan memberikan dampak bagi diantaranya :

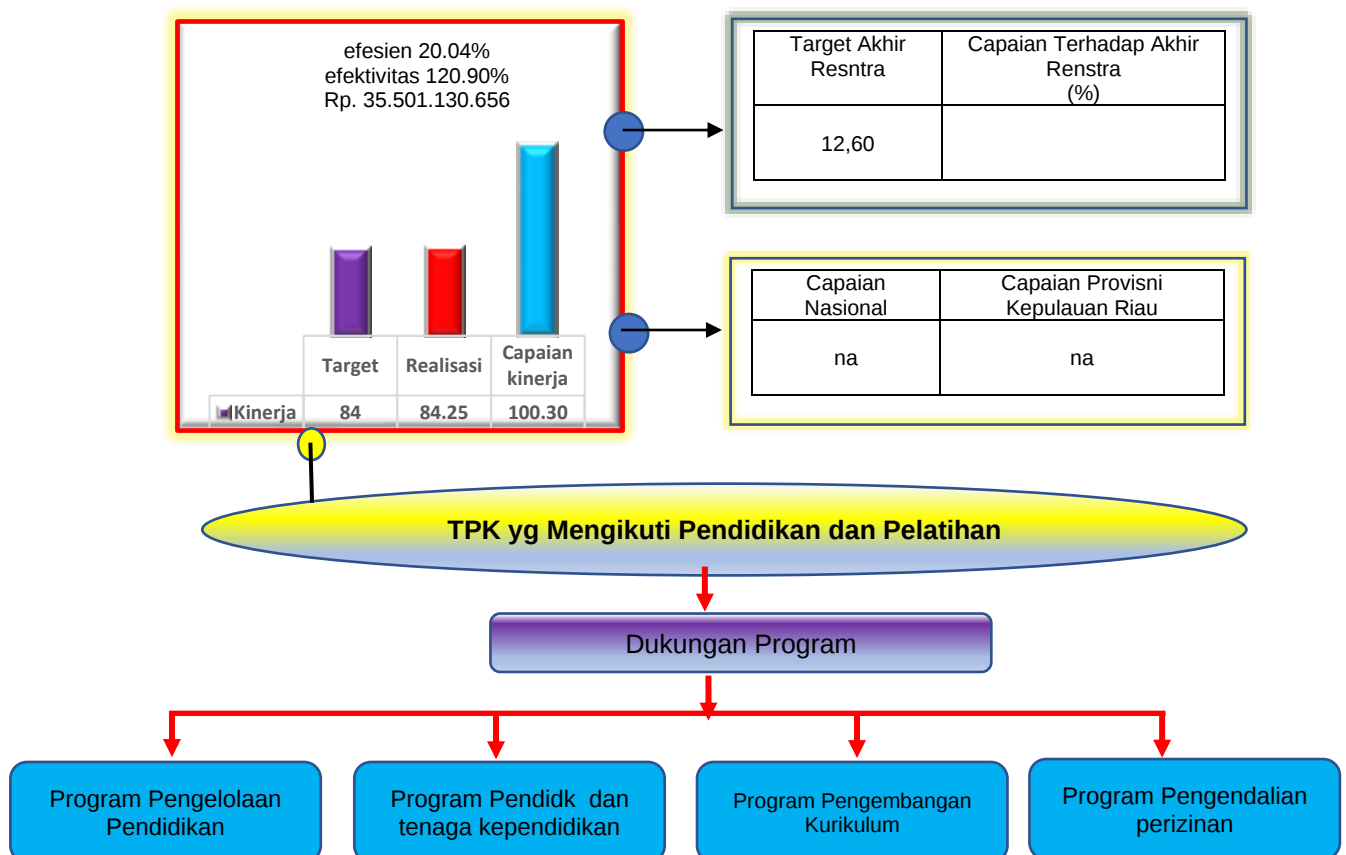
- a. Peningkatan pengetahuan pedagogic, diklat membantu guru memahami strategi pembelajaran, metode mengajar, asesmen, dan pengelolaan kelas yang lebih efektif.
- b. Penguatan pengetahuan profesional (bidang studi), Melalui diklat, guru memperoleh pembaruan materi ajar sesuai perkembangan kurikulum, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- c. Pemutakhiran kebijakan dan kurikulum, diklat berperan penting dalam menyosialisasikan perubahan kurikulum, kebijakan pendidikan, serta standar nasional pendidikan, sehingga pengetahuan guru tetap relevan.
- d. Pengembangan pengetahuan berbasis praktik Banyak diklat berbasis studi kasus dan praktik langsung, yang membantu guru mengaitkan teori dengan situasi nyata di kelas.
- e. Meningkatkan literasi teknologi dan inovasi.

Tabel 3.25
Analisa Pencapaian Kinerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yg Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
I	Meningkatnya mutu pendidikan	PTK yang mengikuti Diklat	12,60	14.61	116.14	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.25 menjelaskan bahwa realisasi capaian kinerja pendidik dan tenaga Pendidikan (PTK) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terealisasi 14,61 dengan realisasi kinerja 116,14% dengan predikat kinerja **sangat baik**.

Grafik 3.23
Capaian Kinerja TPK yg Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2025



Keberhasilan realisasi pencapaian kinerja Pendidik dan PTK yang mengikuti diklat dipengaruhi oleh hal sbb :

- a. Faktor regulasi yang mewajibkan PTK memiliki nilai akreditasi minimal untuk mengikuti diklat dalam sasaran kinerja pengawai individu.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana yang memudahkan untuk mengikuti diklat bagi PTK.
- c. Dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah, program dan pendanaan khusus yang mendorong peningkatan kompetensi PTK secara berkelanjutan.
- d. Ketersediaan program diklat yang relevan dan berkualitas, materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan tugas, perkembangan kurikulum, dan tuntutan profesionalisme.
- e. Motivasi dan kesadaran PTK yang tinggi, kesadaran akan pentingnya peningkatan kompetensi untuk pengembangan karier dan mutu layanan pendidikan.
- f. Akses informasi dan kemudahan mengikuti pelatihan, Pemanfaatan platform daring serta jadwal yang fleksibel memudahkan PTK untuk berpartisipasi.
- g. Dukungan pimpinan satuan pendidikan, Kepala sekolah dan pimpinan unit kerja memberikan izin, fasilitasi, dan dorongan kepada PTK untuk mengikuti diklat.
- h. Sistem pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), Keterkaitan pelatihan dengan kenaikan pangkat, sertifikasi, dan penilaian kinerja.
- i. Kolaborasi dengan lembaga penyelenggara pelatihan, Kerja sama dengan balai diklat, perguruan tinggi, dan lembaga profesional.
- j. Pemanfaatan hasil pelatihan dalam praktik kerja, PTK dapat langsung menerapkan hasil diklat sehingga memberi dampak nyata pada kinerja.

Upaya lain dilakukan untuk peningkatan PTK mengikuti pendidikan dan pelatihan diantaranya sbb :

- a. Peningkatan sosialisasi program diklat, memperkaya informasi pelatihan secara rutin, jelas, dan terintegrasi melalui berbagai kanal komunikasi.
- b. Penyediaan pelatihan berbasis kebutuhan (needs-based training), pelatihan sesuai kebutuhan dan menyesuaikan jenis dan materi diklat dengan kebutuhan riil PTK dan satuan pendidikan.
- c. Pemberian insentif dan penghargaan, mengaitkan keikutsertaan diklat dengan penilaian kinerja, pengembangan karier, dan penghargaan.
- d. Fleksibilitas waktu dan metode pelatihan, mengembangkan diklat daring, blended learning, dan pelatihan modular agar mudah diikuti.
- e. Penguatan peran pimpinan satuan pendidikan, mendorong kepala sekolah dan pimpinan unit untuk memfasilitasi serta memberi dukungan aktif.
- f. Pemetaan dan perencanaan pengembangan kompetensi PTK, menyusun rencana pelatihan tahunan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan kompetensi.
- g. Perluasan kerja sama dengan lembaga pelatihan, **melibatkan** balai diklat, perguruan tinggi, dunia industri, dan lembaga profesional.
- h. Monitoring dan evaluasi pascapelatihan, Memastikan hasil diklat diterapkan dalam tugas dan berdampak pada peningkatan kinerja.
- i. Penyediaan dukungan anggaran dan fasilitas, menjamin ketersediaan biaya, sarana, dan prasarana pelatihan.
- j. Memperkuat regulasi dan standar kemampuan PTK
- k. Adanya kebijakan reward and punishment bagi PTK yang berprestasi dan penyegaran wilayah kerja dengan skema tour of duty.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Hubungan antara anggaran

dan Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Lulusan SMK yang bekerja di DUDI di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb :

Berikut Tabel 3.26 yang berkaitan dengan dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dalam mendukung pelaksanaan Capaian Kinerja Pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Tahun 2025 serta capaian Efektivitas dan Efisiensi Sasaran pada Kinerja Lulusan SMK yang bekerja di DUDI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sbb

Tabel 3.26
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mengikuti Diklat
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
PTK yang mengikuti Diklat	na	na	na	na	na	na	12,58	14,61	116,14	12,60	14.61	115.95	12,63	39,86	116.68	na	na	na

Pada Tabel 3.26 menunjukkan bahwa capaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti Pendidikan dan Latihan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan ketrampilan yang bertujuan meningkatnya kualitas proses belajar antara pendidik dan peserta didik.

Indikator Sasaran pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang mengikuti Pendidikan dan Latihan yang merupakan sasaran yang baru ditambahkan pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan 2021-2026, sehingga capaian kinerja tahun sebelumnya belum dapat diuraikan dan dianalisa.

Tabel 3.27
Analisa Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Capaian Kinerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Kegiatan	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi	Capaian Kinerja		Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	PTK yang mengikuti Diklat	%	12,60	14.61	115.95	1. Pengembangan PTK SMA Karir	382.771.000	367.602.791	96.04
						2. Pengembangan PTK SMK Karir	401.195.000	378.712.000	94.40
						3. Pengembangan PTK SLB Karir	104.704.000	99.615.989	97.28
	Caoaian Kinerja					116,12	Capaian Kinerja Keuangan		
						Tingkat Efisiensi			20.04
						Tingkat Efektivitas			120.90

Pada Tabel 3.27 menjelaskan hubungan antara efektivitas dan efisiensi capaian kinerja dan efektivitas kinerja, persentase realisasi kinerja tercatat pada angka 116,12% dengan penilaian kinerja sangat baik dan terdapat efisiensi sumber daya 20.04%, dengan demikian capaian efektivitas program 120.90%

3.3.2.2. Meningkatnya Akses Pendidikan

Akses pendidikan adalah kemudahan yang diberikan negara kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan dan kemudahan mengikuti program pendidikan. Akses pendidikan yang baik penting karena pendidikan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang penting untuk pengembangan diri dan masa depannya

Capaian indikator meningkatnya akses pendidikan terdiri atas 4 indikator sasaran, indikator sasaran pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sbb :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB
4. Rasio siswa perkelas SMA/MA/SMK/MAK

Berikut capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan dengan 4 indikator sasaran sebagaimana pada grafik berikut

Tabel 3.28
Analisa Pencapaian Kinerja Meningkatnya Akses Pendidikan
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
	Meningkatnya Akses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	99,50	91,61	92,07	Baik
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	81	76,12	93,98	Baik
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	88	126,29	143,51	Sangat Baik
		Rasio Siswa Perkelas SMA/MA/SMK/MAK	1:36	1:32	112,5	Sangat Baik

Berikut pencapaian sasaran meningkatnya akses pendidikan pada tahun 2025 beserta eviden pendukung dan penjelasannya sbb :

1. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur (SMA/MA/SMK Usia 16-18 Tahun) yang sesuai dengan jenjang pendidikan, semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

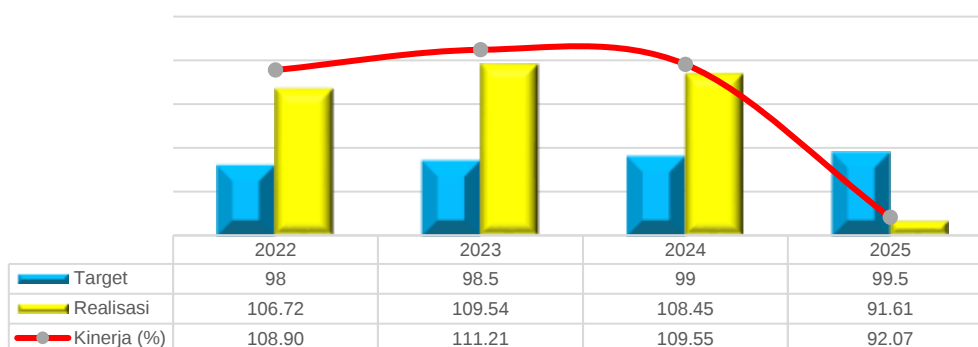
Pada tahun **2025 jumlah penduduk usia 16-18 tahun tercatat sebanyak 117.225 jiwa**, posisi peserta didik pada tingkat SMA/MA/SMK pada tahun 2025 berjumlah 106.871 siswa. Berikut capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb :

Tabel 3.29
Analisa Capaian Kinerja Indikator Sasaran
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
	Meningkatnya Akses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	99,50	91,61	92,07	Baik

Berdasarkan Tabel 3.29 menjelaskan bahwa realisasi capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (**APK**) SMA/MA/SMK belum sesuai target, pada tahun 2025 realisasi kinerja sebesar **91,61%** dengan persentase capaian kinerja **92,07%** dengan penilaian peringkat kinerja pada level **Baik**. Tabel berikut capaian kinerja tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau

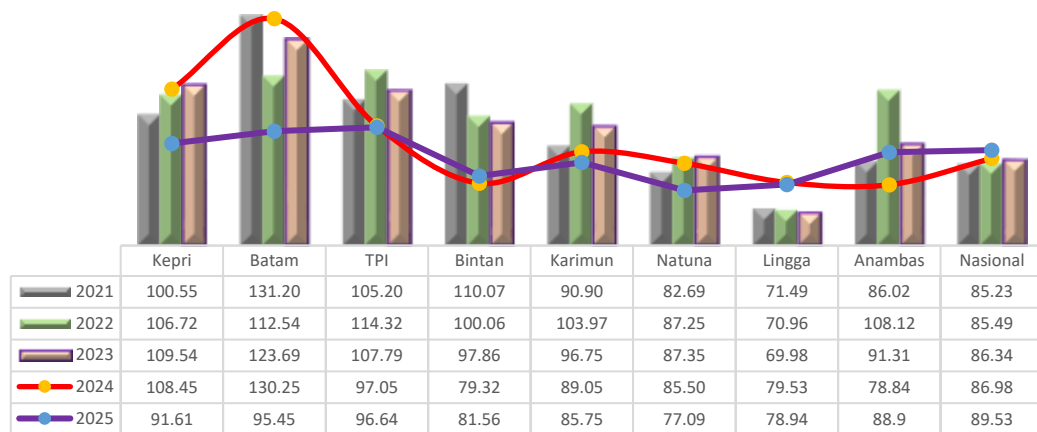
Gambar 3.24
Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025



Sumber : Disdik Prov Kepri 2025

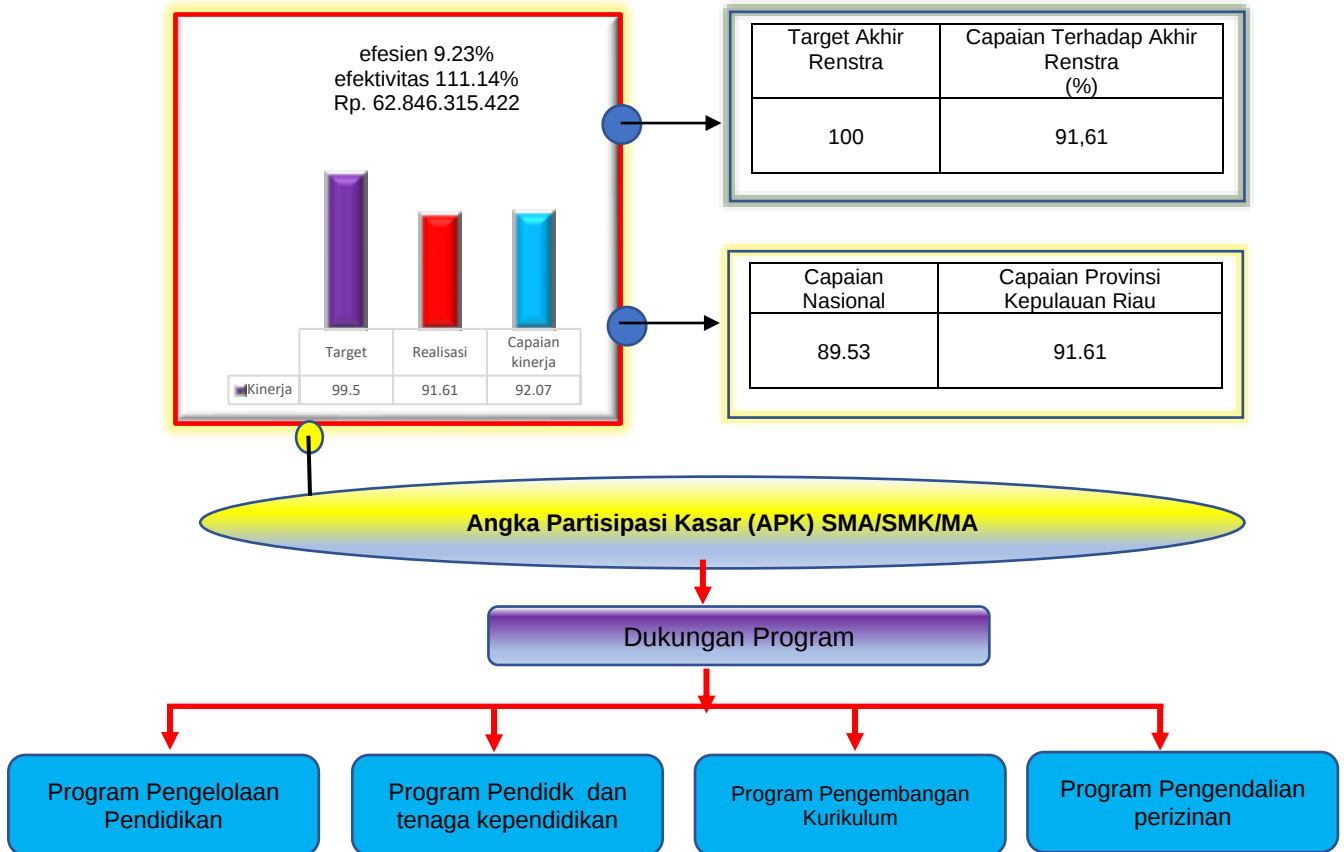
Berdasarkan Gambar 3.24 menjelaskan bahwa realisasi capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (**APK**) SMA/MA/SMK kurun waktu 2021 sd 2025 mengalami fluktuatif, pada tahun 2022 capaian kinerja APK SMA/SMK/MA 108,90%, terus meningkat pada tahun 2023 capaian kinerja ke angka 111,21% . Pada Tahun 2025 capaian kinerja mengalami penurunan yang cukup tajam, dimana capaian APK SAM/SMK/MA berada pada titik terendah pada level 92.07%.

Gambar 3.25
Realisasi Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021- 2025



Dari Gambar 3.25 dapat disimpulkan bahwa pencapaian APK tertinggi di raih Kota Tanjungpinang dengan pencapaian APK di tahun 2025 pada angka 96,64% disusul Kota Batam pada angka 95,45% . ini menjelaskan bahwa penduduk Kota Batam berusia antara 16-18 tahun sudah melebihi 100% yang sudah bersekolah dan APK terendah yaitu Kabupaten Anambas dengan capaian kinerja 78,84 persen penduduk usia sekolah yang bersekolah di tingkat Sekolah Menengah. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Anambas di sebabkan oleh penduduk usia sekolah yang terdaftar di Kabupaten Anambas namun mereka bersekolah di luar Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut Perbandingan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dibawah ini

Gambar 3.26
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Belum tercapainya realisasi pencapaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA dipengaruhi oleh hal sbb :

- Regulasi yang mengatur Narasi indicator kinerja yang hanya membatasi Angka Partisipasi Kasar hanya menghitung peserta didik yang ada di SMA/SMK/MA, tanpa mempertimbangkan keberadaan peserta didik pada satuan pendidikan lainnya seperti di Pondok pesantren maupun peserta didik pada PKBM Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). Kondisi mengakibatkan adanya data peserta didik yang tidak terhitung, sementara di satu sisi pembagiannya tetap sama yaitu jumlah penduduk uisa 16-18 tahun.
- Kondisi geografis, sebagai provinsi kepulauan, menjadi hambatan bagi peserta didik yang tinggal di pulau terluar, pesisir, atau daerah

terpencil sehingga akses ke layanan pendidikan lebih sulit dibanding daerah perkotaan.

- g. Masalah ekonomi keluarga, Kondisi ekonomi yang terbatas membuat sebagian keluarga kesulitan membiayai pendidikan menengah sehingga anak cenderung berhenti sekolah atau memilih bekerja.
- h. Jarak dan biaya transportasi, Jarak tempat tinggal ke sekolah yang jauh serta biaya transportasi yang tidak terjangkau menjadi kendala bagi calon peserta didik dari luar kota/kabupaten.
- i. Keterbatasan daya tampung sekolah, Kapasitas daya tampung SMA/SMK/MA yang belum memenuhi kebutuhan semua calon siswa menyebabkan beberapa peserta didik belum dapat tertampung di sekolah pilihan hal ini diperkuat tinggi angka pertumbuhan anak usia 16-18 tahun baik pertumbuhan alami maupun akibat arus migrasi dari daerah lain.
- j. Minimnya pemanfaatan jalur pendidikan alternatif, Partisipasi dalam jalur pendidikan kesetaraan atau nonformal belum optimal sehingga tidak mampu mengakomodasi semua anak usia sekolah menengah yang tidak dapat masuk sekolah formal.
- k. Kesenjangan antar wilayah, Terdapat perbedaan capaian partisipasi pendidikan antara kabupaten/kota di Kepri, khususnya area pesisir dan daerah hinterland yang masih tertinggal dibanding pusat kota seperti Batam atau Tanjungpinang.
- l. Persepsi terhadap kelanjutan pendidikan, Tingkat motivasi masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan menengah atas masih dipengaruhi oleh persepsi mengenai manfaat pendidikan, terutama di daerah dengan peluang kerja nonformal yang mudah.
- m. Perpindahan penduduk dan mobilitas tinggi, Peserta didik tidak tercatat atau berpindah wilayah sehingga tidak terakomodasi dalam data pendidikan.

- n. Kurangnya pemanfaatan jalur pendidikan nonformal, Pendidikan kesetaraan (Paket C) belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
- o. Permasalahan pendataan dan validitas data, Perbedaan data kependudukan dan data pendidikan memengaruhi perhitungan APK.

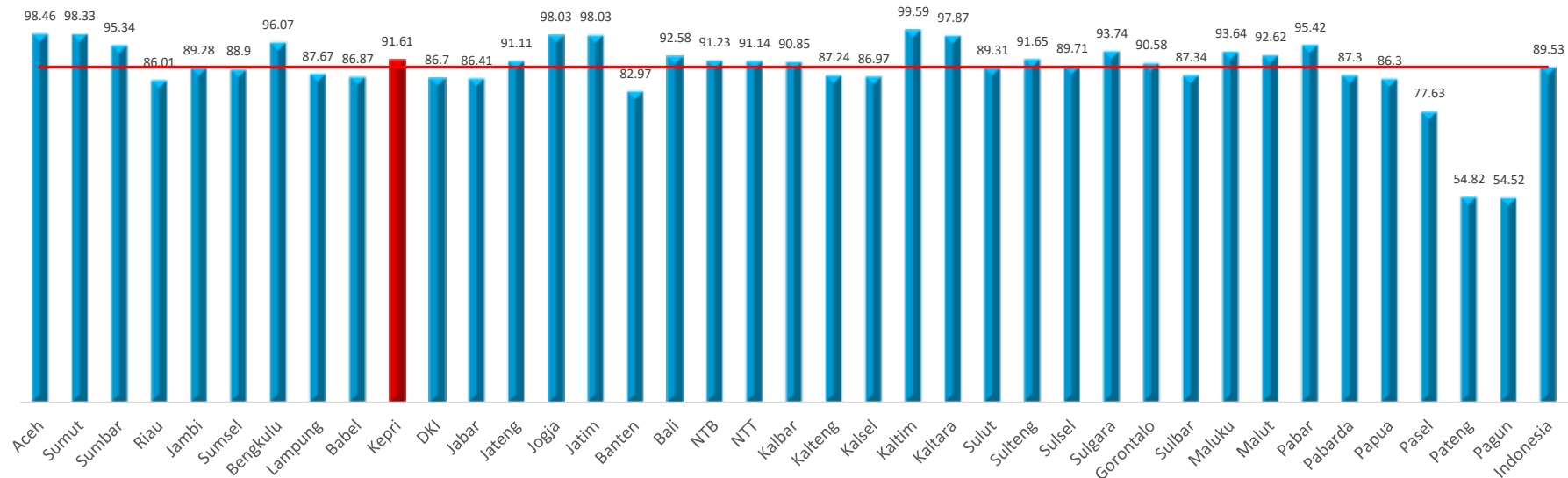
Upaya untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APSK) diantaranya :

- a. Perbaikan regulasi definisi operasional dalam perhitungan Angka Partisipasi Kasar yang mengakomodir semua peserta didik sebagai alat ukur.
- b. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, upaya ini dengan meningkatkan penyebaran dan pemerataan satuan pendidikan pada semua wilayah serta pemenuhan sarana transportasi dan fasilitas penunjang agar siswa lebih mudah mencapai sekolah.
- c. Program bantuan pendidikan, upaya ini memperkuat, meningkatkan dan memperluas beasiswa, KIP, BOS, atau bantuan biaya transportasi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu serta insentif khusus untuk daerah terpencil agar siswa tetap bersekolah.
- d. Penguatan jalur pendidikan alternatif, upaya ini dengan mengoptimalkan pendidikan kesetaraan (Paket C) dan jalur nonformal bagi anak usia sekolah yang tidak dapat masuk sekolah formal dan meningkatkan kualitas lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan pendidikan jarak jauh.
- e. Meningkatkan kualitas sekolah dan guru, upaya ini dengan melengkapi kebutuhan tenaga pendidik yang kompeten, terutama di daerah tertinggal, memperbaiki sarana-prasarana dan fasilitas belajar agar lebih menarik dan kondusif dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan dunia kerja.
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat, masyarakat terutama orang tua dan keluarga berperan strategis dalam menumbuhkan minat sekolah, melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan menengah

bagi orang tua dan komunitas serta mengajak tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendorong anak tetap bersekolah.

- g. Program pencegahan putus sekolah, perlu keseriusan dan ketepatan data anak tidak sekolah atau berisiko putus sekolah sebagai bahan dasar untuk menentukan kebijakan program
- h. Memberikan pendampingan, konseling, dan program kembali bersekolah bagi siswa putus sekolah.
- i. Kolaborasi lintas sektor, upaya ini mengintegrasikan upaya Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta untuk mendorong partisipasi sekolah serta Membuka kemitraan dengan industri dan perguruan tinggi untuk memberikan motivasi dan peluang karier.

Gambar 3.27
Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
Secara Nasional Tahun 2025



Sumber : BPS RI 2025

Secara Nasional Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA pada Tahun 2025 berada di posisi 89.53%, Provinsi dengan pencapaian tertinggi Angka Partisipasi Kasar di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Timur 99.59%, disusul Provinsi Aceh pada posisi 98.46%, posisi ketiga Provinsi Sumatera Utara pada angka 98.33% dan Provinsi terendah capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2025 adalah Papua Pegunungan dengan mencapai 54.52%

Provinsi Kepulauan Riau capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA pada tahun 2025 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2025 capaian kinerja APK SMA/SMK/MA berada pada posisi 91,61%, Pencapaian ini masih diatas rata-rata nasional yaitu pada posisi 89,53%.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Hubungan antara anggaran dan Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Lulusan SMK yang bekerja di DUDI di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb :

Berikut Tabel... dan Tabel... yang berkaitan dengan dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dalam mendukung pelaksanaan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 serta capaian Efektivitas dan Efisiensi Sasaran pada Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.30
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Patisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)			Target Nasional		
	Target (%)	Realis asi (%)	Capai an Kinerj a (%)	Target (%)	Realis asi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realis asi (%)	Capai an Kinerj a (%)	Target (%)	Realis asi (%)	Capai an Kinerj a (%)	Target (%)	Realis asi (%)	Capai an Kinerj a (%)	Target (%)	Realis asi (%)	Capai an Kinerj a (%)
APK SMA/MA/SMK	98	106,72	108,89	98,5	109,54	111,20	99	108.45	109.55	99,50	91.61	92,07	100	91,61	91,61	na	na	na

Capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah Luar Biasa (APS SLBI) di Provinsi Kepulauan Riau kurun waktu 2022-2025 menunjukan trend yang positif, trend pertumbuhan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 kinerja APK SLB tercatat 108,89% dan terus meningkat di tahun berikutnya, tahun 2023 tercatat pertumbuhan APS SLB 111,20%

Puncaknya capaian kinerja APS SLB terjadi di tahun 2025, dimana kinerjanya tercatat Capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah Luar Biasa (APS SLBI)di Provinsi Kepulauan Riau kurun waktu 2022-2025 menunjukan trend yang positif.

Tabel 3.31
Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja APK SMA/MA/SMK
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

N o	Indikator Sasaran	Sa tuan	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	%	99,50	91.61	92,07	1. Pengelolaan Pendidikan	365.506.727.766	302,819.547.956	82,85
						2. Pengembangan kurikulum	187.656.000	153.676.514	81,89
						3. Pendidik dan Kependidikan	114.475.500	70.519.443	61,60
						4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000	26.028.317	61,33
						Jumlah	365.851.298.266	302.915.090.970	82,84
	Caoaian Kinerja					92,07	Capaian Kinerja Keuangan		
Efisiensi sumber daya									9.23
Efektivitas program									111.14

Pada Tabel 3.31 menjelaskan hubungan antara anggaran, realisasi, efektivitas dan efisiensi capaian kinerja dan efektivitas kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2025 sebesar Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 setara dengan 82.82% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 92,07% dengan penilaian kinerja baik dengan realisasi keuangan 82.84%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya 9.23% dan pencapaian efektivitas program sebesar 111.14%.

2. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu SMA sederajat. Nilai APM maksimal adalah 100 persen. APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100%, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

APM SMA/MA/SMK ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 80% dan terealisasi sebesar 78.71% Dengan demikian persentase capaian kinerja sebesar 98.39%. Untuk meningkatkan APK, APM dapat dilakukan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah-sekolah yang membutuhkan, dan juga Kota yang sudah tidak bisa menampung tamatan SMP/MTs seperti kota Batam dan kota Tanjung Pinang..

Tabel 3.32
Analisa Pencapaian Kinerja Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

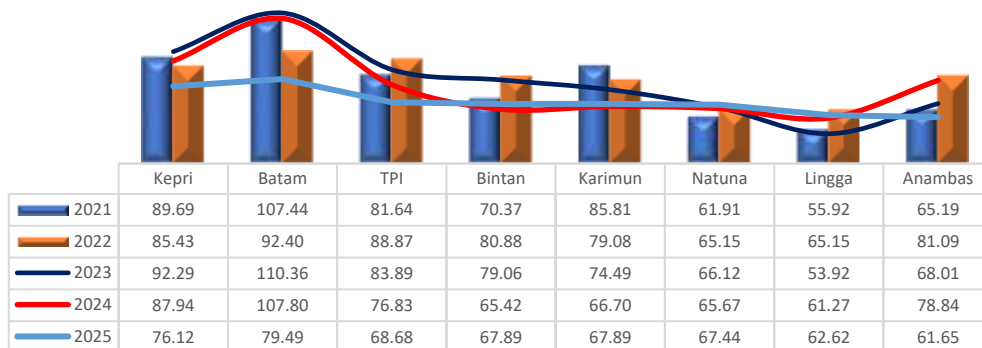
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	81	76,12	93,98	Baik

Berdasarkan Tabel 3.28 menjelaskan bahwa realisasi capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK belum mencapai target, pada tahun 2025 realisasi capaian kinerja tercatat sebesar 76,12 dengan persentase capaian kinerja 93,89% dengan peringkat kinerja **baik**.

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

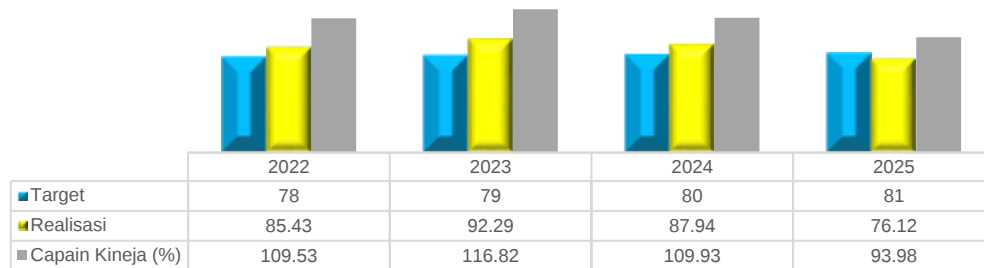
No	Kab/Kota	Jumlah Siswa SMA/SMK (16-18 Thn)	Jumlah Siswa MA (16-18 Thn)	Jumlah Siswa (16-18 Thn)	Jumlah Pendudk (16-18 Thn)	APM (%)
1.	Batam	51751	2518	54269	67357	80,57
2.	Tanjungpinang	9908	421	10329	12994	79,49
3.	Bintan	6278	530	6808	9913	68,68
4.	Karimun	8985	463	9448	13917	67,89
5.	Natuna	2916	398	3314	4914	67,44
6.	Lingga	3184	114	3298	5267	62,62
7.	Anambas	1633	132	1765	2863	61,65
	Kepulauan Riau	84655	4576	89231	117225	76,12

Gambar 3.28
Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021- 2025



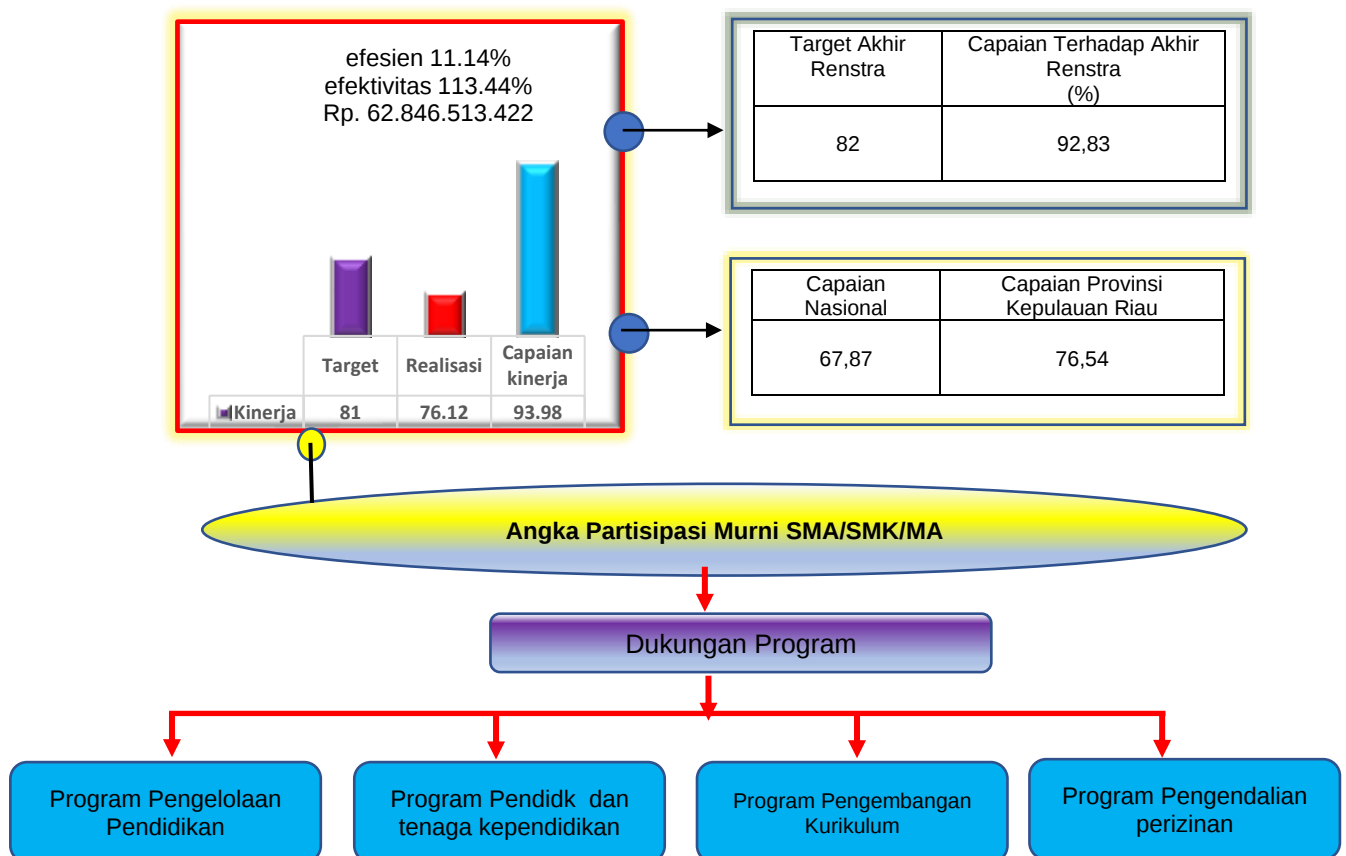
Berdasarkan Gambar 3.28 menjelaskan pertumbuhan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA di Provinsi Kepulauan Riau kurun waktu 2021 sd 2024 mengalami fluktuatif Tabel 3.30 menjelaskan bahwa realisasi capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK belum mencapai target, pada tahun 2025 realisasi capaian kinerja tercatat sebesar 76,12 dengan persentase capaian kinerja 93,98% dengan peringkat kinerja **baik**

Gambar 3.29
Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2025

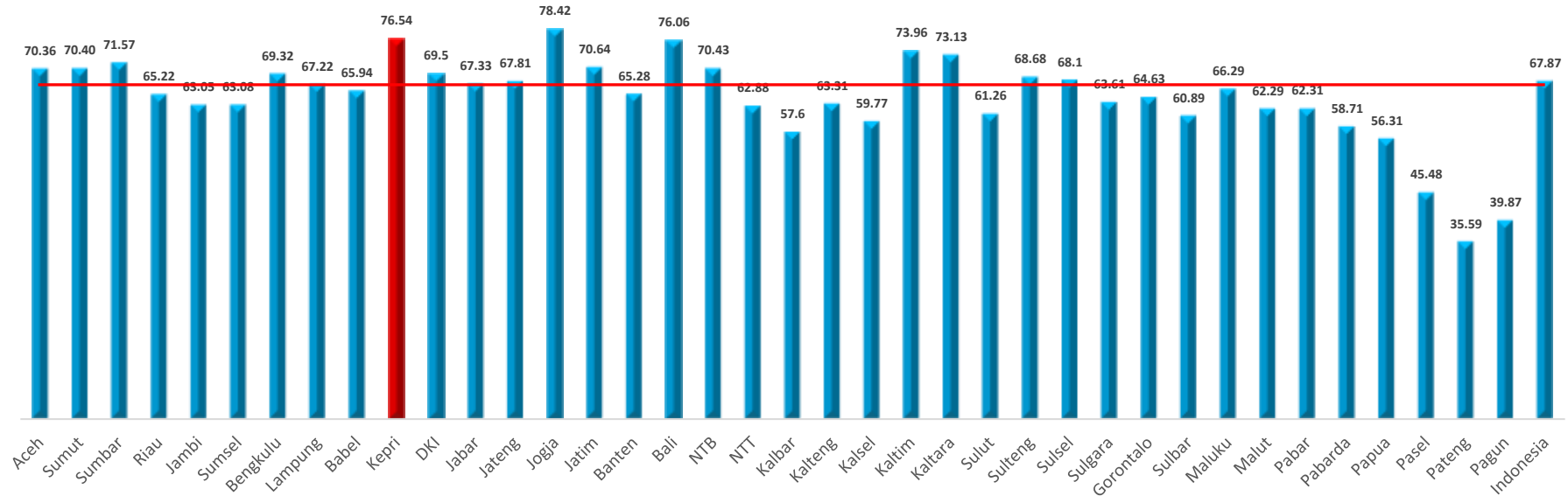


Sumber : BPS RI 2

Grafik 3.30
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



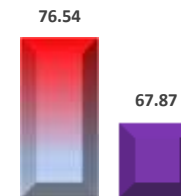
Gambar 3.31
Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA
Secara Nasional Tahun 2025



Sumber : BPS RI 2025

Secara Nasional Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA pada Tahun 2025 berada di posisi 76,54, Provinsi dengan pencapaian tertinggi Angka Partisipasi Murni di Indoensia adalah Provinsi Jogjakarta dengan capaian kinerja 78.42%, disusul Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi terbaik ke.2 capaian kinerja APM SMA/SMK/MA pada posisi 76,54%, posisi ketiga Privinsi Bali pada angka 76,04% dan terendah adalah Papua Tengah denpan pencapai 35,59%

■ Nasional ■ Kepri



Gambar disamping ini menjelaskan perbandingan capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, secara nasional capaian kinerja APM pada level 67,87 berbanding dengan 76,54% pencapaian kinerja Provinsi Kepulauan Riau.

Belum tercapainya realisasi pencapaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APK) SMA/SMK/MA dipengaruhi oleh hal sbb :

- a. Regulasi yang mengatur definisi operasional indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA yang hanya membatasi Angka Partisipasi Murni hanya menghitung peserta didik yang ada di SMA/SMK/MA, tanpa mempertimbangkan keberadaan peserta didik pada satuan pendidikan lainnya seperti Pondok Pesantren dan PKBM. Kondisi mengakibatkan adanya data peserta didik yang tidak terhitung, sementara di satu sisi pembagiannya tetap sama yaitu jumlah penduduk usia 16-18 tahun.
- b. Pertumbuhan jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2025 mengalami peningkatan 34%...(Hitung pertumbuhan penduduk)
- c. Masih terdapat cukup besar peserta didik pada satuan pendidikan di SMA/SMK/MA berusia di bawah 16 tahun dan di atas 18 tahun, hal ini berdampak terhadap perhitungan angka partisipasi murni yang hanya menghitung jumlah peserta didik berusia 16-18 tahun di bagi dengan penduduk berusia 16-18 tahun.
- d. Kondisi geografis wilayah kepulauan, kondisi ditandai dengan sebaran pulau yang luas menyebabkan akses ke sekolah menengah tidak merata, sehingga peserta didik usia sekolah (16–18 tahun) kesulitan mengakses SMA/SMK/MA.
- e. Faktor sosial dan ekonomi keluarga, peserta didik usia sekolah menengah memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga atau tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya.
- f. Angka putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan, Masih terdapat lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA tepat waktu atau peserta didik sekolah menengah yang putus sekolah karena berbagai alasan dan tidak ditemukan keberadaan peserta didik dimaksud.
- g. Perpindahan penduduk dan mobilitas tinggi, sebagai daerah tujuan Provinsi Kepri memiliki mobilitas penduduk yang tinggi baik antar pulau dan antar provinsi yang berakibat sebagian peserta didik usia

sekolah tidak tercatat atau tidak bersekolah di wilayah domisili.

- h. Pernikahan usia dini, hal ini terjadi terutama di wilayah tertentu, pernikahan dini menyebabkan peserta didik usia SMA tidak lagi melanjutkan pendidikan.
- i. Keterbatasan daya tampung dan pilihan sekolah, ketersediaan sekolah dan daya tampung sekolah menengah belum sepenuhnya mampu menampung seluruh lulusan SMP/MTs usia murni.
- j. Minat dan motivasi melanjutkan sekolah yang rendah, sebagian peserta didik menilai pendidikan menengah kurang mendesak dibandingkan langsung bekerja.
- k. Belum optimalnya pendidikan nonformal dan kesetaraan, pendidikan kesetaraan atau Jalur Paket C belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh peserta didik usia murni yang tidak tertampung di sekolah formal.

Upaya untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APSK) diantaranya :

- a. Perbaikan regulasi definisi operasional dalam perhitungan Angka Partisipasi Kasar yang mengakomodir semua peserta didik sebagai alat ukur.
- b. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, upaya ini dengan meningkatkan penyebaran dan pemerataan satuan pendidikan pada semua wilayah serta pemenuhan sarana transportasi dan fasilitas penunjang agar siswa lebih mudah mencapai sekolah.
- c. Program bantuan pendidikan, upaya ini memperkuat, meningkatkan dan memperluas beasiswa, KIP, BOS, atau bantuan biaya transportasi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu serta insentif khusus untuk daerah terpencil agar siswa tetap bersekolah.
- d. Penguatan jalur pendidikan alternatif, upaya ini dengan mengoptimalkan pendidikan kesetaraan (Paket C) dan jalur nonformal bagi anak usia sekolah yang tidak dapat masuk sekolah formal dan meningkatkan kualitas lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan pendidikan jarak jauh.

- e. Meningkatkan kualitas sekolah dan guru, upaya ini dengan melengkapi kebutuhan tenaga pendidik yang kompeten, terutama di daerah tertinggal, memperbaiki sarana-prasarana dan fasilitas belajar agar lebih menarik dan kondusif dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan dunia kerja.
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat, masyarakat terutama orang tua dan keluarga berperan strategis dalam menumbuhkan minat sekolah, melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan menengah bagi orang tua dan komunitas serta mengajak tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendorong anak tetap bersekolah.
- g. Program pencegahan putus sekolah, perlu keseriusan dan ketepatan data anak tidak sekolah atau berisiko putus sekolah sebagai bahan dasar untuk menentukan kebijakan program
- h. Memberikan pendampingan, konseling, dan program kembali bersekolah bagi siswa putus sekolah.
- i. Kolaborasi lintas sektor, upaya ini mengintegrasikan upaya Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta untuk mendorong partisipasi sekolah serta Membuka kemitraan dengan industri dan perguruan tinggi untuk memberikan motivasi dan peluang karier.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Hubungan antara anggaran dan Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Lulusan SMK yang bekerja di DUDI di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb :

Berikut Tabel... dan Tabel... yang berkaitan dengan dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dalam mendukung pelaksanaan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 serta capaian Efektivitas dan Efisiensi Sasaran pada Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.34
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
APM SMA/MA/SMK	78	85,43	109,53	79	92,29	116,82	80	87,94	109,93	81	76,12	93,98	82	91,61	92,83	na	na	na

Capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah Luar Biasa (APS SLBI) di Provinsi Kepulauan Riau kurun waktu 2022-2025 menunjukan trend yang positif, trend pertumbuhan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 kinerja APK SLB tercatat 108,89% dan terus meningkat di tahun berikutnya, tahun 2023 tercatat pertumbuhan APS SLB 111,20%

Puncaknya capaian kinerja APS SLB terjadi di tahun 2025, dimana kinerjanya tercatat Capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah Luar Biasa (APS SLBI) di Provinsi Kepulauan Riau kurun waktu 2022-2025 menunjukan trend yang positif.

Tabel 3.35
Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja APM SMA/MA/SMK
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

N o	Indikator Sasaran	Sa tuan	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	APM SMA/SMK/MA	%	81	76,12	93,98	1. Pengelolaan Pendidikan	365.506.727.766	302,819.547.956	82,85
						2. Pengembangan kurikulum	187.656.000	153.676.514	81,89
						3. Pendidik dan Kependidikan	114.475.500	70.519.443	61,60
						4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000	26.028.317	61,33
						Jumlah	365.851.298.266	302.915.090.970	82,84
	Caoaian Kinerja					93,98	Capaian Kinerja Keuangan		
Tingkat Efisiensi									11.14
Tingkat Efektivitas									113.44

Pada Tabel 3.35 menjelaskan hubungan antara anggaran, realisasi, efektivitas dan efisiensi capaian kinerja dan efektivitas kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2025 sebesar Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 setara dengan 82.82% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 93,98% dengan penilaian kinerja baik yang didukung dengan realisasi keuangan 82.84%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya 11.14% dan pencapaian tingkat efektivitas capaian program sebesar 113.44%.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB

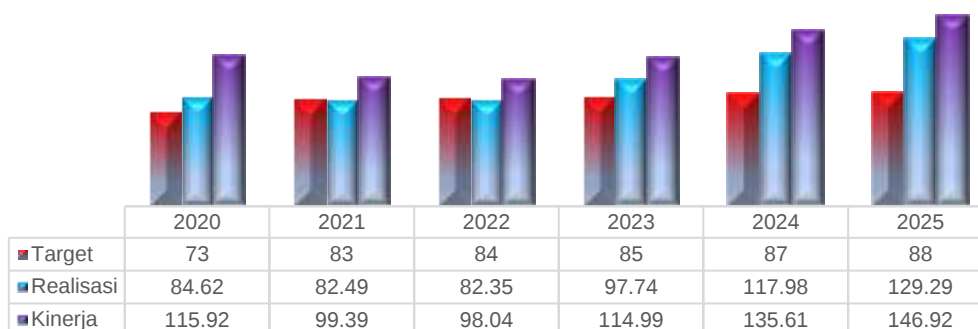
APK SLB merupakan indikator yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk berkebutuhan khusus di suatu jenjang pendidikan. APK SLB dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berkebutuhan khusus yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu/khusus dengan jumlah penduduk berkebutuhan khusus yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. SLB adalah lembaga pendidikan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus.

Tabel 3.36
Analisa Pencapaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar SLB (APK SLB)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
	Meningkatnya Akses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SLB (APK SLB)	88	129,29	146.92	Sangat Baik

Tabel 3.36 menyimpulkan bahwa capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB, pada tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024, pada tahun 2025 capaian kinerja 129.29 atau setara dengan 146,92%.

Gambar 3.32
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022 - 2025



Sumber : Disdik Kepri 20

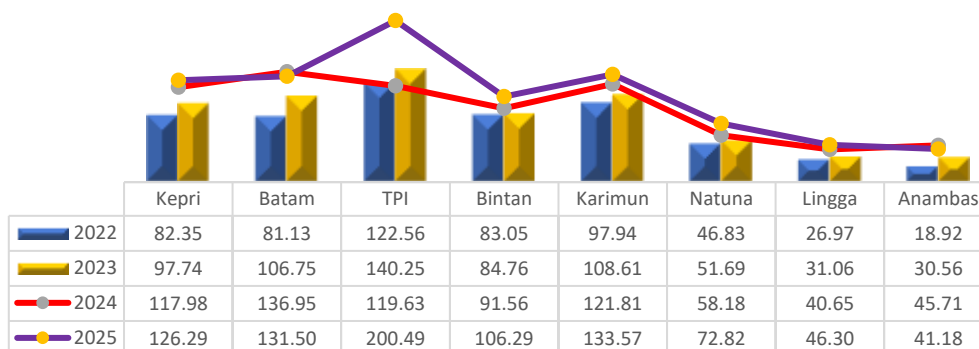
Gambar 3.32 menyimpulkan bahwa capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar Sekolah Luar Biasa (APK SLB) kurun waktu 2021 sd 2025 mengalami peningkatan, pada tahun 2022 capaian kinerja tercatat pada angka 98,04 dan mencapai puncak tertinggi pada capaian kinerja di tahun 2025 pada angka capaian kinerja 146,92%.

Kota Tanjungpinang merupakan wilayah yang capaian kinerja APK SLB tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dan yang terendah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan capaian kinerja 41,18%

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar SLB (APK) SLB
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

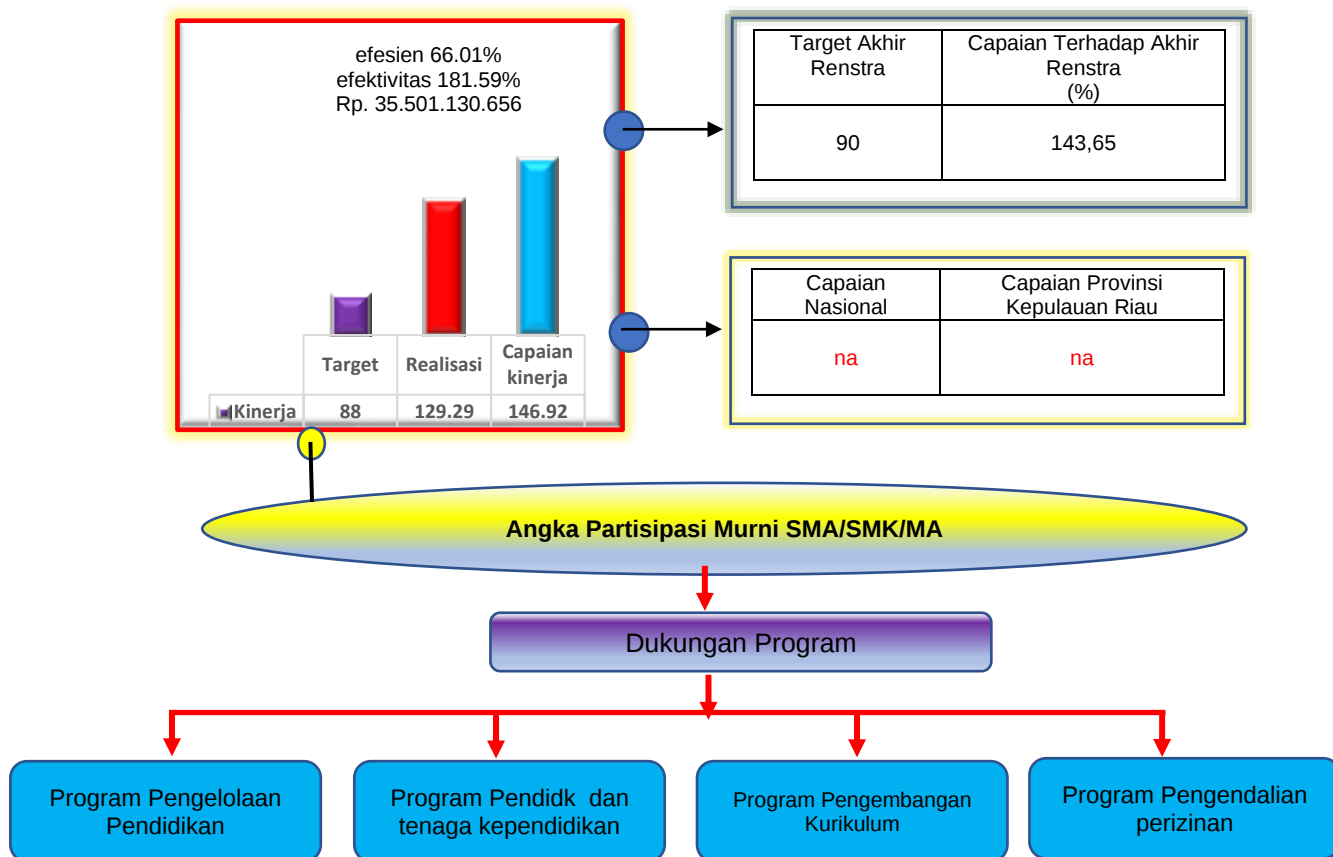
No	Kab/Kota	Jumlah Siswa SLB	Jml Pendudk Disabilitas (4-18 Thn)	APK (%)
1.	Batam	668	508	131,50
2.	Tanjungpinang	411	205	200,49
3.	Bintan	152	143	106,29
4.	Karimun	374	280	133,57
5.	Natuna	75	103	72,80
6.	Lingga	50	108	46,82
7.	Anambas	14	34	41,18
	Kepulauan Riau	1744	1381	126,29

Gambar 3.33
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022 - 2024



Sumber : Disdik Kepri 202

Gambar 3.34
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar SLB
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Keberhasilan realisasi pencapaian kinerja Angka Partisipasi Kasar Sekolah Luar Biasa (APK SLB) dipengaruhi oleh hal sbb :

- a. Meningkatnya sebaran dan pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan khusus yang semakin membaik di setiap kab/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau serta di dukungan anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta strategi pendekatan layanan pendidikan yang lebih mendekatkan fasilitas pendidikan di tengah masyarakat bertempat tinggal.
- b. Pembebasan biaya Pendidikan bagi seluruh peserta didik pada satuan Pendidikan sehingga berdampak terhadap menurunkan pengeluaran masyarakat pada sector pendidikan.
- c. Komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan inklusif, dukungan kebijakan dan program daerah dalam pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- d. Ketersediaan dan pemerataan satuan pendidikan SLB, Keberadaan SLB negeri dan swasta yang melayani berbagai ragam kebutuhan khusus di kabupaten/kota.
- e. Penguatan layanan pendidikan inklusif, Penerapan sekolah inklusif di satuan pendidikan umum yang membantu menjangkau ABK yang belum terlayani SLB.
- f. Peningkatan pendataan dan identifikasi ABK, Pendataan yang lebih akurat memungkinkan ABK usia sekolah terjangkau dan terlayani dalam sistem pendidikan.
- g. Dukungan bantuan pendidikan, Bantuan operasional sekolah, alat bantu belajar, dan dukungan pembiayaan bagi peserta didik SLB.
- h. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SLB, Pelatihan dan diklat khusus bagi guru pendidikan khusus untuk meningkatkan mutu layanan.
- i. Peran serta orang tua dan masyarakat, Meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
- j. Kolaborasi lintas sektor, Sinergi antara dinas pendidikan, dinas

sosial, dan instansi terkait dalam pelayanan ABK serta dukungan para professional di bidang pendidikan khusus.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Hubungan antara anggaran dan Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar Sekolah Luar Biasa (APK SLB) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Berikut Tabel... dan Tabel... yang berkaitan dengan dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dalam mendukung pelaksanaan Capaian Kinerja kinerja Angka Partisipasi Kasar Sekolah Luar Biasa (APK SLB) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 serta capaian Efektivitas dan Efisiensi Sasaran pada Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.38
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
APK SLB	84	82,35	96.88	85	97,74	114.98	87	117,98	135,61	88	129,29	146,92	90	129,92	143,65	na	na	na

Capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah Luar Biasa (APS SLBI) di Provinsi Kepulauan Riau kurun waktu 2022-2025 menunjukkan trend yang positif, trend pertumbuhan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 kinerja APK SLB tercatat 98,88% dan terus meningkat di tahun berikutnya, tahun 2023 tercatat pertumbuhan APS SLB 114,90%

Puncak capaian kinerja APS SLB terjadi di tahun 2025, dimana kinerja APS SLB di Provinsi Kepulauan tercatat 146,92%. Pencapaian ini merupakan bukti bahwa program dan strategi dalam meningkatkan APS SLB tepat sasaran dan berhasil guna.

Tabel 3.39
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja APK SLB
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	88	126,29	143.51	1. Pengelolaan Pendidikan SLB	20.415.216.267	15.518.467.402	80.91
						2. Pengembangan kurikulum	187.656.000	153.676.514	81,89
						3. Pendidik dan Kependidikan	114.475.500	70.519.443	61,60
						4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000	26.028.317	61,33
					Jumlah	20.759.786.767	15.768.691.676	71.43	
Caoaian Kinerja					143,51	Capaian Kinerja Keuangan			71.43
Tingkat Efisiensi									75.49
Tingkat Efektivitas									205.68

Pada Tabel 3.39 menjelaskan hubungan antara anggaran, realisasi, efektivitas dan efisiensi capaian kinerja dan efektivitas kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2025 sebesar Rp. 20.759.786.767 dan direalisasikan sebesar Rp. 15.768.691.676 atau setara dengan 71.43% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 143,51% dengan penilaian kinerja sangat baik yang didukung dengan realisasi keuangan 71.43%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya 75.49% dan pencapaian tingkat efektivitas capaian program sebesar 205.68%

1. Rasio Siswa Perkelas SMA/SMK/MA

Rasio siswa per kelas adalah perbandingan antara jumlah peserta didik dengan jumlah kelas belajar pada satuan pendidikan tertentu dalam satu periode waktu, Rasio siswa per kelas merupakan indikator kinerja pendidikan **yang** digunakan untuk mengukur tingkat kepadatan siswa dalam satu ruang kelas, yang berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar mengajar. Tujuan penggunaan rasio perkelas diantaranya untuk menilai kelayakan dan efektivitas pembelajaran, menjadi dasar perencanaan kebutuhan ruang kelas, menentukan kebutuhan guru dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Rasio siswa per kelas adalah indikator penting dalam dunia pendidikan yang menggambarkan jumlah siswa dalam satu kelas, dan semakin ideal rasionya maka semakin efektif proses pembelajaran dapat berlangsung. Rasio siswa dengan kelas yang lebih rendah dapat memberikan manfaat bagi prestasi siswa, baik secara akademik, sosial, dan emosional. Rasio siswa-ruang kelas adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan ruang kelas di suatu jenjang pendidikan. Berikut adalah beberapa standar terkait rasio siswa-ruang kelas, luas minimum ruang kelas adalah 2 meter persegi per peserta didik. Berdasarkan pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, ditentukan aturan mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombel. Untuk SD, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 28 peserta didik. Untuk SMP, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik. Untuk SMA, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk SMK, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dalam satu kelas berjumlah paling banyak lima peserta didik. Sementara untuk Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dalam satu kelas berjumlah paling banyak delapan peserta didik. Untuk menghitung rasio dimaksud, berikut data pendukung sbb :

Tabel 3.40
Jumlah Siswa dan Ruang Kelas Belajar
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumlah Siswa SMA/SMK	Jml RKB	Rasio (%)
1.	Batam	61437	1694	36,29
2.	Tanjungpinang	12087	359	33,67
3.	Bintan	7491	244	30,70
4.	Karimun	11399	391	29,15
5.	Natuna	3685	208	17,72
6.	Lingga	4028	201	20,04
7.	Anambas	2042	99	20,63
	Kepulauan Riau	102206	3196	31,98

Sumber : Dapodik 2024

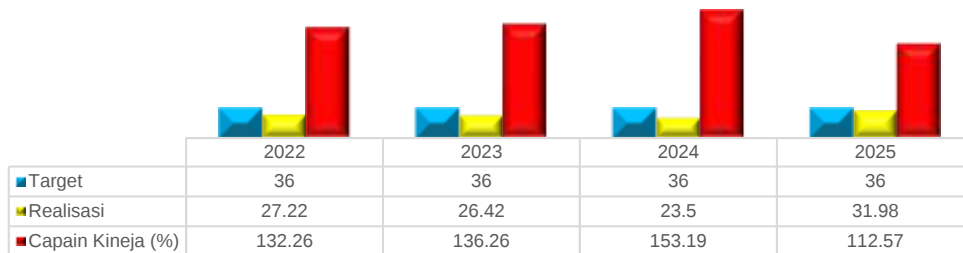
Tabel 3.41 dibawah Menyimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja realisasi kinerja Rasio Siswa Perkelas pada tahun 2025 melebihi dari target yaitu pada ralisasi 1 : 32 dengan persentase capaian kinerja 12,50% dengan kriteria penilaian kinerja **Sangat Baik**.

Tabel 3.41
Analisa Capaian Kinerja Rasio Siswa Perkelas
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
1.	Meningkatnya Akses pendidikan	Rasio siswa perkelas	1:36	1:32	112,50	Sangat Baik

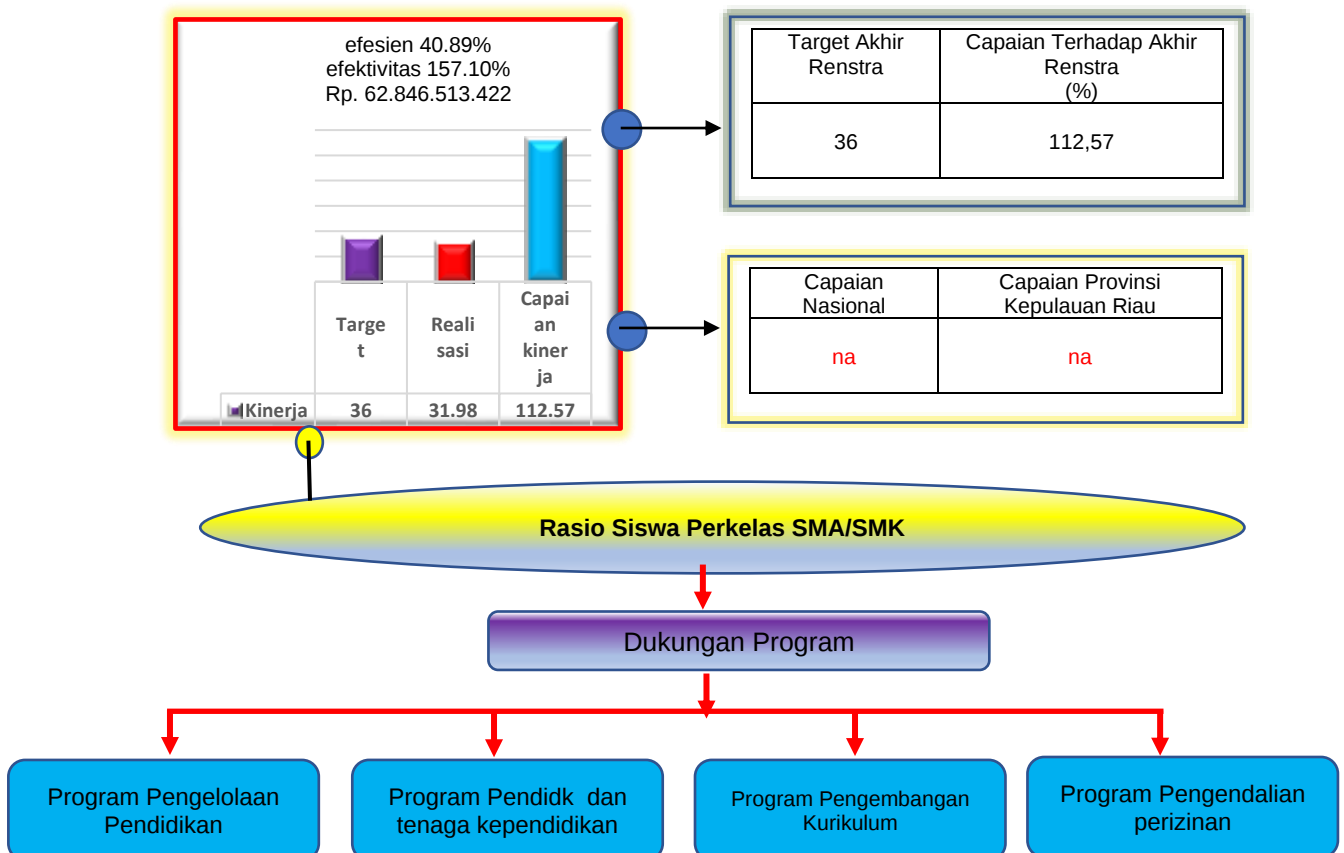
Gambar 3.35 dibawah menuraikan capaian kinerja rasio perkelas SMA/SMK kurun waktu 2022-2025 DI Provinsi Kepulauan Riau sbb;

Gambar 3.35
Capaian Kinerja Rasio Siswa SMA/SMK Perkelas
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022 - 2025



Sumber : Disdik Kepri 20

Grafik 3.36
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Keberhasilan capaian kinerja rasio siswa perkelas dipengaruhi oleh hal sbb :

- a. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan antar wilayah sehingga terjadi penurunan tingkat kesenjangan fasilitas pendidikan dan semakin membaiknya ketersediaan dan penyebaran fasilitas pendidikan di setiap kab/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan dukungan anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta strategi pendekatan layanan Pendidikan yang lebih mendekatkan pada masyarakat.
- b. Kebijakan pemerintah, kebijakan ini mengatur tentang standar rasio ideal siswa per kelas ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah, perencanaan kuantitas guru, ruang kelas, dan anggaran mengikuti kebijakan tersebut, implementasi kebijakan lokal di Kepri (mis. zonasi sekolah, perluasan sekolah baru, rekrutmen guru) ikut memengaruhi rasio.
- c. Ketersediaan guru berkualitas, jumlah guru proporsional terhadap siswa sangat menentukan efektivitas rasio, selain jumlah kompetensi guru mempengaruhi interaksi siswa di kelas.
- d. Ketersediaan dan kapasitas ruangan kelas, jumlah ruang kelas yang mencukupi memungkinkan pembagian siswa secara seimbang sehingga proses belajar mengajar berjalan baik dan kondisivitas ruangan tetap terjaga.
- e. Pertumbuhan populasi, kenaikan jumlah siswa tanpa diimbangi penambahan ruang kelas/guru akan meningkatkan ,rasio serta perbedaan demografis antar wilayah di Kepri (urban vs rural) memengaruhi rasio per sekolah.
- f. Manajemen sekolah, keberhasilan manajemen sekolah sangat dipengaruhi kepala sekolah sebagai orchestra yang mengendalikan serta inovasi yang terus bertumbuh, Kemampuan kepala sekolah dan tim dalam mengatur jadwal, pembagian kelas, dan alokasi guru berpengaruh besar dam sekolah dengan manajemen baik cenderung bisa mengoptimalkan rasio siswa per kelas.

- g. Fasilitas pembelajaran dan penggunaan teknologi, Ketersediaan alat bantu, metode pembelajaran efektif, serta teknologi memengaruhi bagaimana rasio besar pun dapat dikelola isalnya, kelas besar tapi dilengkapi teknologi pembelajaran interaktif tetap bisa efektif.
- h. Pendanaan dan anggaran pendidikan, anggaran memengaruhi perekrutan guru, pembangunan ruang kelas, penyediaan fasilitas serta anggaran daerah yang kuat mendukung rasio yang lebih ideal.
- i. Dukungan dari pihak swasta dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan.
- j. Regulasi penerimaan siswa yang disebar secara merata antar wilayah melalui sistim penerimaan peserta didik yang lebih transparans dan berkeadilan.
- k. Meningkatnya mutu, jumlah dan distribusi PTK yang lebih merata pada satuan Pendidikan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja rasio siswa perkelas. dimasa yang akan datang perlu dilakukan berbagai strategi untuk mempertahankan keberhailan dan meningkatkan rasio siswa perkelas dengan strategi sbb :

- a. Menyediakan fasilitas dukungan anggaran, pembinaan PTK dan pengawasan proses belajar mengajar pada semua fasilitas pendidikan swasta yang disesuaikan dengan standar dan mutu pendidikan.
- b. Memperbanyak dan penyebaran ruang kelas yang merata, serta distribusi pada satuan pendidikan yang jumlah siswanya kelebihan.
- c. Penempatan dan distribusi guru yang lebih merata pada satuan pendidikan maupun antar wilayah
- d. Optimalisasi sekolah swasta dan alternatif pendidikan. Hal ini memperkuat peran swasta untuk terus didorong peran sekolah swasta atau sekolah alternatif (misalnya SMP/SMK pilihan) agar dapat menampung siswa lebih banyak dengan kualitas setara, sehingga tidak berkontribusi terhadap kelas yang terlalu penuh di sekolah negeri.

- e. Pengaturan siswa dengan kuota maksimal perkelas, kebijakan ini memberlakukan batas maksimum siswa per kelas, misalnya 30–40 siswa tergantung jenjangnya, untuk mencegah kelas terlalu penuh. Di beberapa daerah, pembatasan seperti ini sudah dilakukan untuk mengurangi overkapasitas kelas.
- f. Pemanfaatan data dengan perencanaan yang baik, perangkat daerah dan sekolah perlu memiliki data jumlah siswa yang akurat dan real-time, untuk perencanaan dan pengambilan keputusan (misalnya penambahan kelas/guru di tahun ajaran baru).
- g. Kampanya pemerataan pendidikan, upaya ini berupa program untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan di wilayah luar kota atau pulau terpencil dengan, transportasi siswa, fasilitas belajar jarak jauh, kelas tambahan jika diperlukan. Program ini diharapkan membantu menyeimbangkan jumlah siswa antar wilayah.
- h. Perbaikan mutu pendidikan, meski bukan langsung menurunkan rasio, peningkatan kualitas pembelajaran (pelatihan guru, kurikulum efektif, pembelajaran berbasis teknologi) membuat konflik di kelas besar dapat dikelola lebih baik sehingga kelas tetap produktif meski jumlahnya masih tinggi

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Hubungan antara anggaran dan Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian

anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar Sekolah Luar Biasa (APK SLB) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Berikut Tabel... dan Tabel... yang berkaitan dengan dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dalam mendukung pelaksanaan Capaian Kinerja kinerja Angka Partisipasi Kasar Sekolah Luar Biasa (APK SLB) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 serta capaian Efektivitas dan Efisiensi Sasaran pada Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.42
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Siswa Perkelas SMA/SMK
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Rasio Siswa Perkelas	1:36	1:27,22	133	1:36	1:26,42	128	1:36	1:23,5	153,1	1:36	31,98	112,57	1:36	31,98	112,57	na	na	na

Pada Tabel 3.42 menjelaskan analisis perbandingan capaian kinerja rasio siswa perkelas dari tahun 2022 sd 2025, pada tahun 2022 rasio siswa perkelas 1: 27,5, selanjutnya di tahun 2023 menjadi 1:26,42 dan ditahun 2024 terus bergerak pada posisi 1:23,5 serta pada tahun 2025 rasio siswa perkelas menjadi 1: 31.98.

Tabel 3.43
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Rasio Siswa Perkelas SMA/SMK
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	Rasio Siswa Perkelas	%	36	31,98	112,57	1. Pembangunan USB dan RKB	21.534.763.270	15.420.104.921	71.61
	Caoaian Kinerja				112,57	Capaian Kinerja Keuangan			71,61
	Tingkat Efisiensi								40.89
	Tingkat Efektivitas								157.10

Pada Tabel 3.43 menjelaskan hubungan antara anggaran, realisasi, efektivitas dan efisiensi capaian kinerja dan efektivitas kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Rasio Siswa Perkelas SMA/SMK tahun 2025 sebesar Rp. 21.534.763.270 dan direalisasikan sebesar Rp. 15.420.104.921 atau setara dengan 71.61% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 112,57% dengan penilaian kinerja baik yang didukung dengan realisasi keuangan 71.61%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya 40.89% dan pencapaian tingkat efektivitas capaian program sebesar 157.10%

3.4. Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD 2025-2029

Penilaian capaian kinerja merupakan evaluasi bertujuan untuk diketahui pencapaian realisasi dari target kinerja, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis permasalahan dan alternative solusi dari berbagai capaian kinerja yang belum terealisasi.

Capaian kinerja tahun 2025 merupakan masa transisi dari RPJMD 2021-2026 dan 2025-2029, berikut diuraikan capaian kinerja pada masa transisi 2025-2029 pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau triwulan IV tahun 2025.

Tabel 3.44
Capaian Kinerja Daerah Urusan pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
(RPJMD 2025-2029)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,28 (Tahun)	13,28	100	Sangat Baik
		Rata-rata Lama Sekolah	10,90 (Tahun)	10.78	98.90	Sangat Baik

Berdasarkan data dari Tabel 3.45 disimpulkan bahwa capaian kinerja daerah untuk urusan pendidikan pada tahun **2025** secara umum memiliki peringkat kinerja **sangat baik**. Capaian kinerja untuk Rata rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 98.90% dan capaian kinerja untuk Harapan lama Sekolah (HLS) di tahun 2025 mencapai 100%.

Berikut capaian kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Renstra 2025-2029 sbb :

Tabel 3.45
Perjanjian Kinerja Transisi Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
(Rentra 2025-2029)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Peringkat
I	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Harapan lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,28	13.28	100	Baik
		2. Rata-Rata Lama Sekolah >15 Tahun	Tahun	10.90	10.78	98.89	Baik
	Meningkatnya Pemerataan akses dan Kualitas layanan pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (APS)	%	100	88.24	88.24	Baik
		2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	100	117.38	117.38	Sangat Baik
		3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca)	%	47.50	50.36	106.02	Sangat Baik
		4. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)	%	28.57	37.14	126.50	Sangat Baik
		5. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) (%)	%	60.17	58.70	97.56	Baik
		6. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)	%	28.77	48.56	168.79	Sangat Baik
		7. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))	%	13.81	14.65	106.08	Sangat Baik

		8. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi		73.94	62.73	84.84	Baik
--	--	--	--	-------	-------	-------	------

Berdasarkan penjelasan dari Tabel 3.45 disimpulkan bahwa beberapa capaian kinerja indicator utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang melampaui target dan beberapa target perlu ditingkatkan realisasinya di tahun berikutnya. Beberapa indicator kinerja utama yang masih perlu ditingkatkan Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (APS) dan Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) (%).

Tabel. 3.46
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Jumlah	Capaian
1	Melebihi/Melampaui Target	5	6
2	Sesuai Target	1	1
3	Tidak Mencapai Target	2	3

Gambar 3.37
Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja transisi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 terdiri 1 (Satu) sasaran dan 8 Indikator. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada masa transisi di triwulan IV tahun 2025.

3.5. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

3.5.1. Capaian Kinerja Indikator Daerah 2025-2029

Indikator kinerja kinerja Kepala Provinsi Kepulauan Riau terkait Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 beserta target kinerja meliputi :

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)
2. Rata- Rata Lama Sekolah (RLS)

Berikut capaian kinerja kepala daerah, berdasarkan tujuan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2029 sbb :

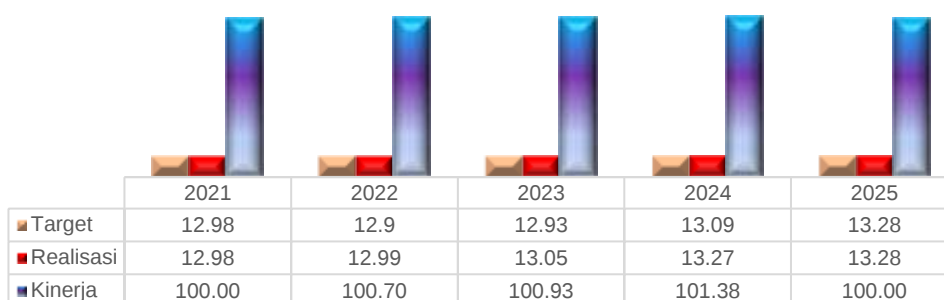
1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diukur dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan.

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Capaian kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau, Pada tahun **2025** pada masa transisi ditargetkan HLS di Provinsi Riau pada angka **13,28** dengan capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai **13,28** atau setara dengan **100,00%** dengan predikat kinerja **Sangat Baik**. Berikut capaian HLS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 sbb :

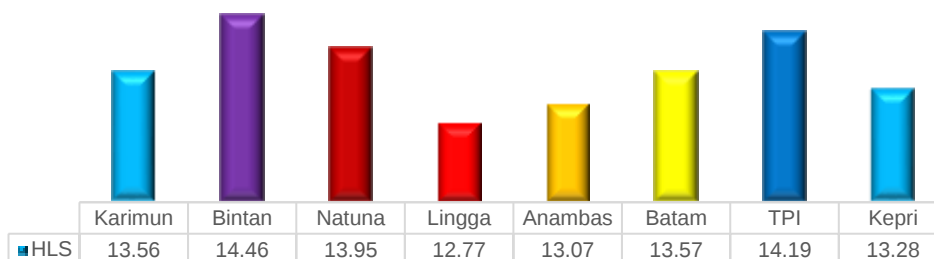
Gambar 3.38
Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2025



Sumber : BPS RI 2024

Realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 mengalami perbaikan dari pada pencapaian tahun 2024 sebesar 13,27 Tahun. Gambar 3.38 bahwa menjelaskan capaian kinerja harapan lama Sekolah berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.

Gambar 3.39
Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)
Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : BPS RI 2025

Kota Tanjungpinang merupakan penyumbang Realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) terbesar di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025, selanjutnya Kabupaten Bintan menyumbang HLS pada posisi 13,46 Tahun, disusul Kota Batam di urutan ketiga dengan realisasi HLS di tahun 2025 pada angka 13,57 Tahun serta Realisasi kinerja HLS terkecil berada di Kabupaten Lingga dengan angka 12,77 Tahun.

Harapan Lama Sekolah (HLS) secara nasional terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan tren positif di mana penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan bisa menempuh pendidikan lebih lama, misalnya dari sekitar 12,95 tahun (2019) menjadi 13,30 tahun (2025), setara jenjang D1/kuliah tahun pertama, meski ada kesenjangan dengan antar wilayah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25+ tahun yang masih setara SMP, menandakan kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Berikut HLS secara nasional berdasarkan pencapaian tingkat provinsi sbb :

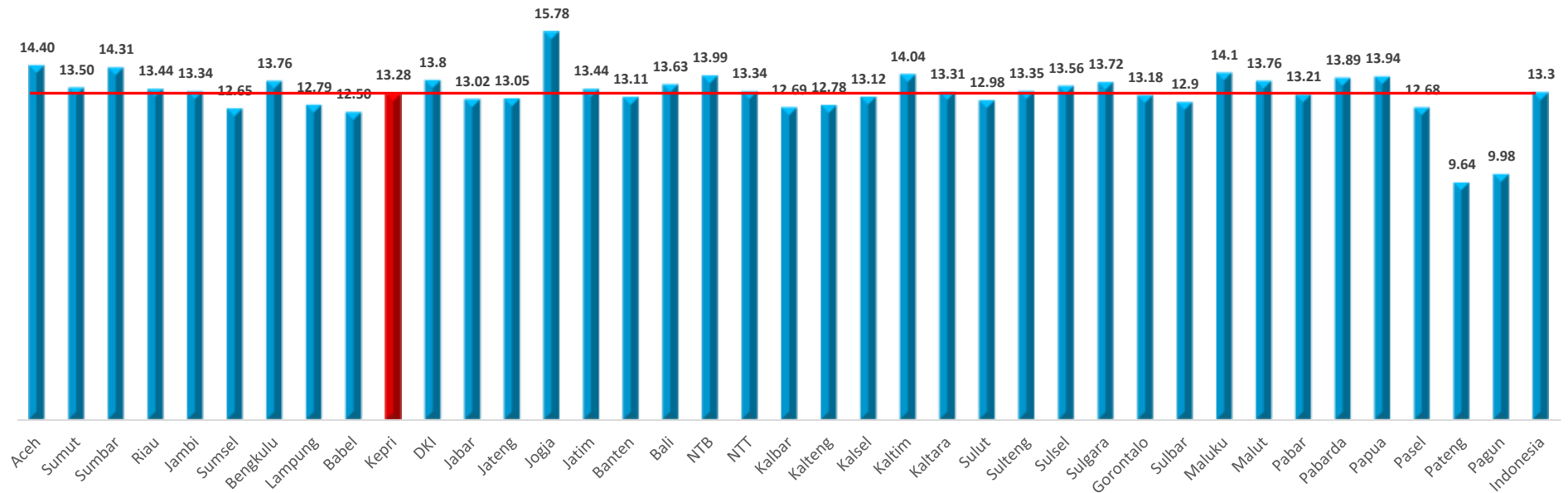
Tabel 3.47
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025
(RPJMD 2025-2029)

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)			Target Nasional		
	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)	Target (Thn)	Realisasi (Thn)	Capaian Kinerja (%)
Harapan Lama sekolah	12,90	12,99	100,69	12,93	13,05	100,92	13,09	13,27	101,37	13,28	13,28	100	13,50	13,27	98,37	na	na	na

Pertumbuhan capaian kinerja Harapan Lama Sekolah masa transisi di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2022 s/d 2025 mengalami pola kenaikan dengan trend positif, pada tahun 2022 realisasi kinerja mencapai 100,69% dan terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali sehingga capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Kembali meningkat menjadi 101,37%.

Capaian Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 pada masa transisi terus bergerak positif dan mencapai level 100,00% dari target. Capaian Harapan lama Sekolah terhadap target akhir RENSTRA 2025-2029 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terus bergerak dengan realisasi 13,27 Tahun atau setara dengan 98,37% dari target di akhir Renstra 2025-2029.

Gambar 3.40
Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)
Secara Nasional Tahun 2025



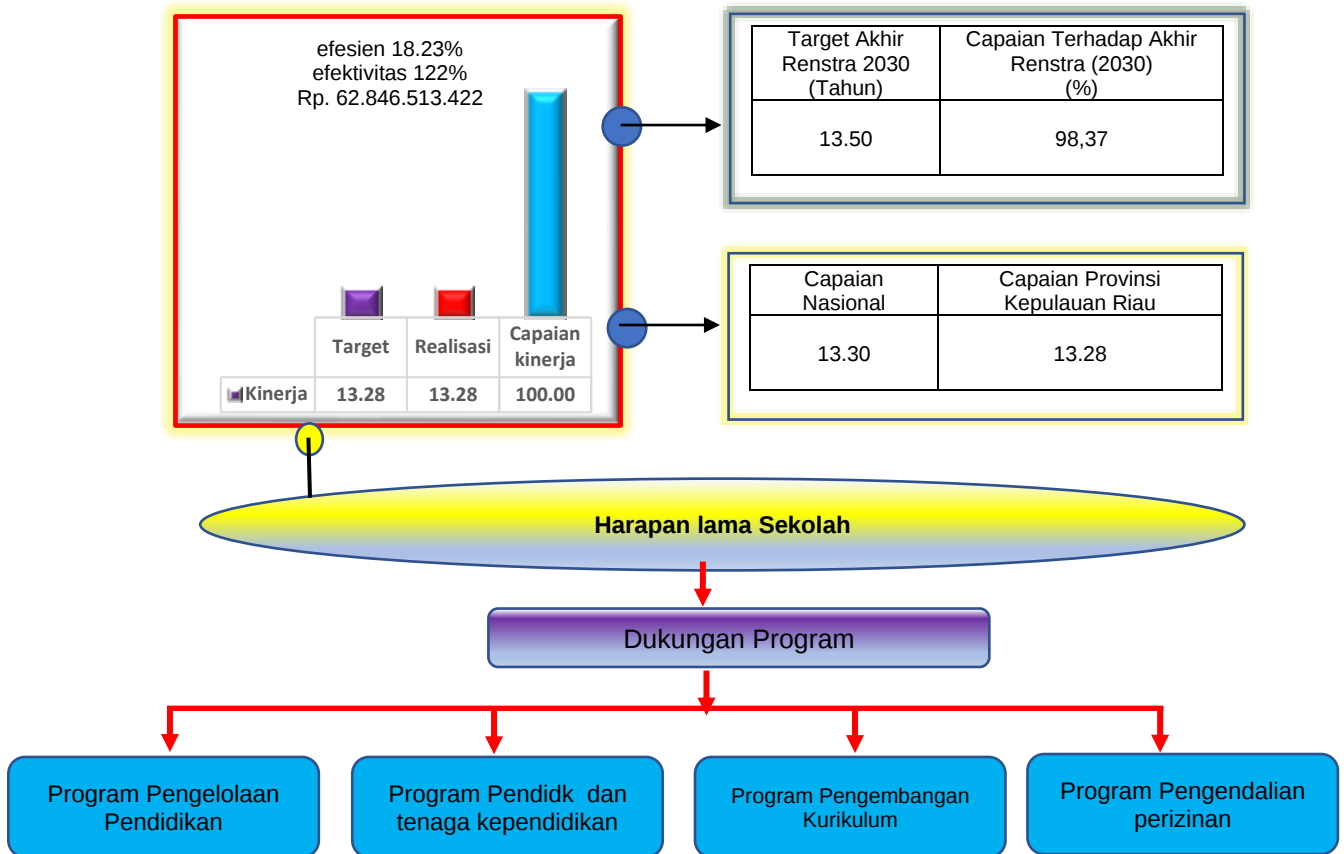
Sumber : BPS RI 2025

Secara Nasional Harapan Lama Sekolah tercatat pada angka 13.30 Tahun, Provinsi dengan angka tertinggi pencapaian Harapan lama sekolah adalah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dengan realisasi 15.78 Tahun. Provinsi Kepulauan Riau pencapaian Harapan lama sekolah tercatat pada 13,28 Tahun.



Pada Grafik disamping ini menjelaskan bahwa capaian Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 secara nasional sudah mencapai 99,88%

Grafik 3.41
Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah
Di Provinsi Kepri
Tahun 2025
(RPJMD 2025-2029)



Keberhasilan pencapaian kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Secara keseluruhan, kombinasi antara kebijakan yang mendukung, akses pendidikan yang semakin baik, serta kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci meningkatnya Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau, beberapa factor pendukung keberhasilan diantaranya sbb :

- Komitmen pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan, melalui alokasi anggaran, program wajib belajar, dan kebijakan afirmatif bagi wilayah kepulauan.
- Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, termasuk pembangunan/rehabilitasi sekolah, sekolah satu atap, dan layanan pendidikan di pulau-pulau

- c. Dukungan program bantuan pendidikan, seperti BOS, PIP/KIP, serta beasiswa daerah yang membantu mengurangi hambatan ekonomi keluarga
 - d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, terutama sebagai modal meningkatkan daya saing kerja di wilayah strategis dan perbatasan
 - e. Kondisi sosial ekonomi yang relatif berkembang, khususnya di kawasan perkotaan dan industri, sehingga mendorong orang tua menyekolahkan anak lebih lama
 - f. Penguatan pendidikan nonformal dan kesetaraan, sebagai alternatif bagi anak yang tidak dapat mengikuti jalur formal
 - h. Sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat, dalam mendukung keberlanjutan pendidikan
- Upaya lain yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja

Harapan Lama Sekolahh diantaranya :

- a. Perluasan akses pendidikan sejak usia dini, melalui peningkatan layanan PAUD hingga pendidikan menengah
- b. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah terpencil, pesisir, dan pulau-pulau
- c. Penguatan program wajib belajar 12 tahun, termasuk dukungan pembiayaan dan regulasi daerah
- d. Optimalisasi bantuan pendidikan (BOS, PIP/KIP, dan beasiswa daerah) agar tepat sasaran dan berkelanjutan
- e. Peningkatan kualitas dan distribusi pendidik, khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan
- f. Pengembangan pendidikan nonformal dan kesetaraan, sebagai jalur alternatif bagi masyarakat
- g. Pemanfaatan teknologi pembelajaran, untuk menjangkau peserta didik di wilayah sulit akses
- h. Peningkatan peran orang tua dan masyarakat, melalui kampanye kesadaran pentingnya pendidikan jangka Panjang

- j. Penguatan kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.48
Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Harapan Lama Sekolah
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Harapan Lama Sekolah	%	13.28	13,28	100.00	1. Pengelolaan Pendidikan 2. Pengembangan kurikulum 3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	365.667.258.166 114.475.500 187.656.000 42.439.000	302.915.090.970 70.519.443 153.676.514 26.028.317	82,85 61,60 81,89 61.33
	Caoaian Kinerja				100,00	Capaian Kinerja Keuangan			82.84
	Tingkat Efisiensi								18.23
	Tingkat Efektivitas								122

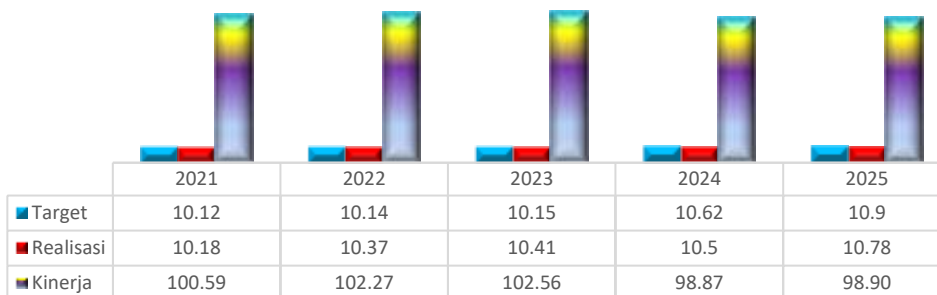
Pada Tabel 3.48 menjelaskan hubungan antara anggaran, efektivitas dan efisiensi kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 sebesar Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 atau setara dengan 82.84% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 100,00% dengan penilaian kinerja sangat baik yang didukung dengan realisasi keuangan 91.26%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya sebesar 18,23% dan capaian tefektivitas capaian program sebesar 122%

2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. RLS dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut proses pendidikan sudah selesai. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk di wilayah tersebut. RLS merupakan salah satu unsur dalam menghitung Indeks Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Capaian kinerja Rata-Rata Lama sekolah pada masa transisi di Provinsi Kepulauan Riau tahun **2025** ditargetkan pada angka **10,90** dan realisasi kinerja pada tahun 2025 tercatat pada angka **10,78** atau setara dengan **98.89%** dengan predikat kinerja **Sangat Baik**. Berikut capaian RLS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 sbb

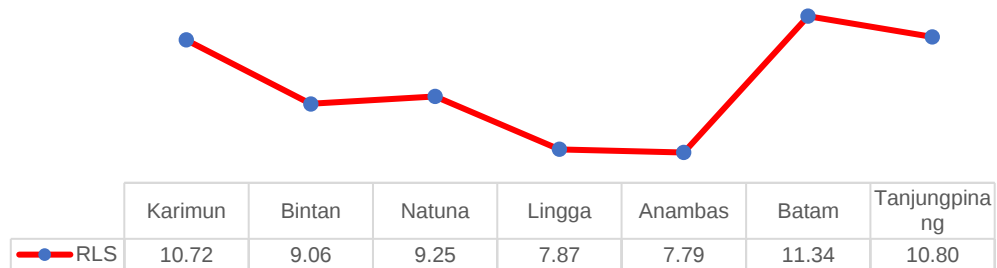
Gambar 3.42
Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2025
(RPJMD 2025-2029)



Sumber : BPS RI 2025

Realisasi kinerja Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau pada masa transisi tahun 2025 mengalami peningkatan dari pada pencapaian tahun 2024, hal ini diuraikan dalam Gambar 3.42 bahwa di tahun 2025 terdapat peningkatan realisasi kinerja menjadi 10,78 atau setara dengan 98,90% berbanding 10,50 atau setara dengan 98.87% di tahun 2024

Gambar 3.43
Realisasi Kinerja Rata Rata Lama Sekolah (RLS)
Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : BPS RI 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan penduduk semakin lama mengenyam pendidikan; angkanya bergerak dari sekitar 7,95 tahun pada 2016 (setara kelas II SMP) menjadi 9,22 tahun pada 2024 (setara lulus SMP), menunjukkan peningkatan signifikan seiring program Wajib Belajar 9 Tahun, dengan tren positif ini diharapkan berlanjut lebih tinggi ke jenjang SMA dan Perguruan Tinggi, mencerminkan peningkatan kualitas SDM Indonesia secara keseluruhan. Berikut capaian kinerja RLS 2022 sd 2025 dan secara nasional diuraikan pada grafik di bawah ini

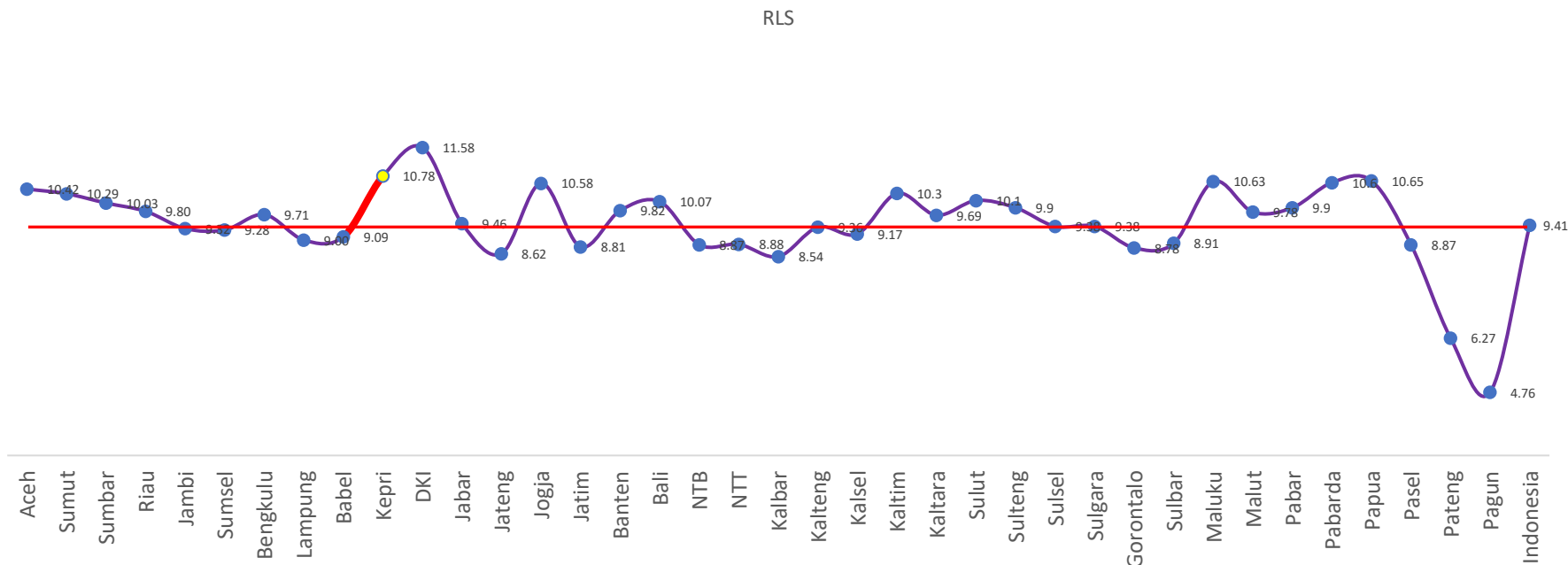
Tabel 3.49
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025
(RPJMD 2025-2029)

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)			Target Nasional		
	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian Kinerja (%)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian Kinerja (%)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian Kinerja (%)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian Kinerja (%)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian Kinerja (%)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian Kinerja (%)
Rata-Rata Lama Sekolah	10,14	10,18	100,39	10,15	10,41	100,56	10,62	10,50	98,87	10,90	10,78	98,90	11,48	10,78	93,90	na	na	na

Pertumbuhan capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah masa transisi di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2022 s/d 2025 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2022 realisasi kinerja mencapai 100,39% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan pencapaian kinerja 98,87%. Pada tahun 2024 realisasi pencapaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Kembali meningkat menjadi 100,28%.

Capaian Rata-Rata Lama Sekolah terhadap target akhir RENSTRA 2025-2029 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau belum tercapai, dimana pada target akhir 2025 ditetapkan target 10.78 Tahun pada akhir tahun 2025 baru tercapai 10,78 tahun atau setara dengan 98,90%. Serta capaian kinerja di akhir RENSTRA 2025-2029 baru terealisasi 10,78 Tahun atau setara dengan 93.90%

Gambar 3.44
Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Secara Nasional Tahun 2025

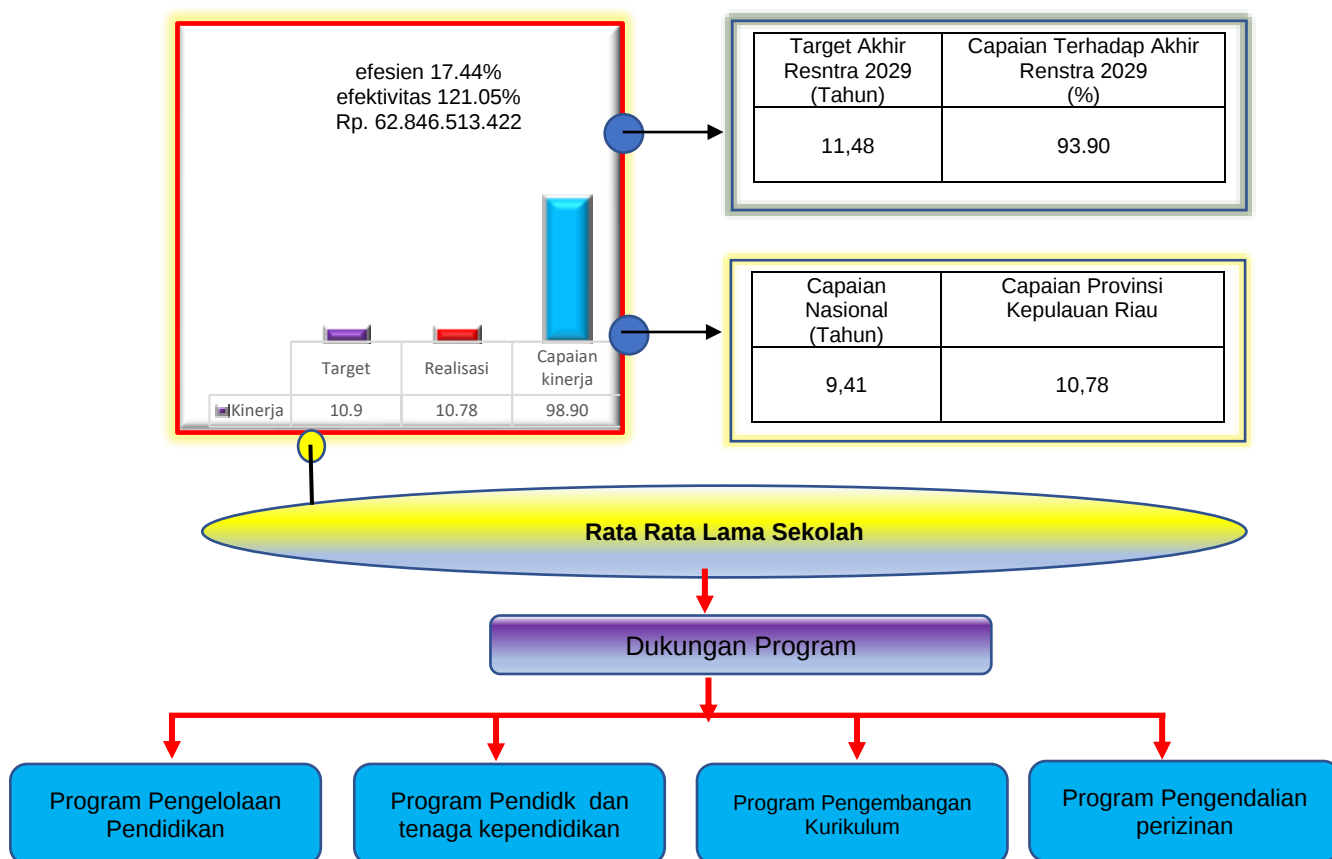


Sumber : BPS RI 202

Secara Nasional Rata Rata Lama Sekolah tercatat pada angka 9,41 Tahun, Provinsi dengan angka tertinggi pencapaian rata-rata lama sekolah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan realisasi 11.58 Tahun. Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan kedua nasional dengan pencapai angka rata-rata lama sekolah tercatat pada 10,78 Tahun.

Selanjutnya di urutan ketiga Provinsi Papua dengan pencapaian rata-rata lama sekolah pada angka 10,64 Tahun, Provinsi Maluku berada di urutan ketiga dengan pencapaian rata-rata lama sekolah pada angka 10,63 Tahun, Provinsi DIY dengan pencapaian 10,58 Tahun sedangkan pencapaian rata-rata lama sekolah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan pencapaian 4.76 Tahun

Grafik 3.45
Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah
Di Provinsi Kepri Tahun 2025
(RPJMD 2025-2029)



Keberhasilan pencapaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan beberapa factor sbb :

- Membaiknya regulasi dan dukungan program pemerintah yang semakin meningkat diantaranya melalui program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun, penguatan dan perluasan bantuan pendidikan seperti BOS/PIP/KIP/Beasiswa, pengurangan biaya pendidikan melalui program sekolah gratis dan pembiayaan pengeluaran lainnya sehingga berdampak pada penurunan hambatan biaya dan dukungan program kegiatan belajar mengajar melalui program paket A, B dan C.
- Peningkatan akses, kualitas, kurikulum dan Ketersediaan Sekolah, hal ini ditandainya semakin masifnya pembangunan dan pemerataan akses pendidikan serta di dukung dengan peningkatan jumlah dan

kualitas serta distribusi guru yang lebih merata. Peningkatan akses ini memudahkan peserta didik untuk menjangkau sekolah.

- c. Membaiknya kondisi social ekonomi masyarakat, hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan rata-rata masyarakat serta membaiknya nilai Indek Pembangunan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Meningkatnya kesadaran dan perubahan budaya masyarakat, dimana setiap keluarga akan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya.
- e. Kualitas dan relevansi pendidikan terutama adanya kesesuaian pendidikan terutama pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan DUDI, sehingga memicu peserta didik untuk terus meningkatnya pendidikannya
- f. Dungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta penguatan pendidikan inklusi dan Kerjasama dengan para pihak serta dukungan orang tua/masyarakat yang semakin peduli.

Upaya lain yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja Rata-Rata lama sekolah diantaranya :

- a. Peningkatan kesejahteraan PTK melalui skema berbagai insentif dan perbaikan karir PTK.
- b. Penguatan pencegahan putus sekolah, melalui pendataan anak berisiko putus sekolah dan pendampingan intensif
- c. Optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP/KIP) agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
- d. Perluasan pendidikan nonformal dan kesetaraan (Paket A, B, C) bagi anak putus sekolah dan usia dewasa
- e. Peningkatan layanan pendidikan inklusif, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan
- f. Kerja sama lintas sektor (pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, desa) dalam penanganan anak tidak sekolah

- g. Penyediaan sekolah terbuka dan kelas jauh, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan
- h. Pemanfaatan teknologi pembelajaran (kelas daring, blended learning) untuk fleksibilitas belajar
- i. Penguatan peran pemerintah daerah, termasuk beasiswa daerah dan kebijakan afirmatif
- j. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat, melalui kampanye kesadaran pentingnya pendidikan
- k. Penurunan angka perkawinan anak, melalui edukasi dan regulasi perlindungan anak
- l. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, agar peserta didik termotivasi menyelesaikan jenjang sekolah
- m. Penguatan sistem data pendidikan, untuk pemantauan partisipasi sekolah secara akurat dan berkelanjutan.
- n. Pengembangan dan adaptasi kurikulum berbasis industri., Program Teaching factory, program link and machth, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan Uji Sertifikasi Profesi pendidik.
- o. Peningkatan standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai pelatihan kompetensi, peningkatan jumlah guru yang bersertifikasi dan distribusi guru yang lebih merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah

satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Rata Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb :

Tabel 3.50
Analisa Efektivitas dan Efesiensi Sasaran Kinerja Rata Rata lama Sekolah
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
(RPJMD 2025-2029)

No	Indikator Sasaran	Sa tuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Rata Rata lama Sekolah	Tah un	10,90	10,78	98,89	1. Pengelolaan Pendidikan	365.667.258.166	302.915.090.970	82,85
						2. Pengembangan kurikulum	114.475.500	70.519.443	61,60
						3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	187.656.000	153.676.514	81,89
						4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000	26.028.317	61,33
	Capaian Kinerja				98,89	Capaian Kinerja Keuangan			82,84
								Tingkat Efisiensi	17,44
								Tingkat Efektivitas	121,05

Pada Tabel 3.50 menjelaskan hubungan antara anggaran, efektivitas dan efesiensi kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indicator Kinerja Rata Rata Lama Sekolah Tahun 2025 sebesar Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 atau setara dengan 84,24% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 98,89% dengan penilaian kinerja sangat baik yang didukung dengan realisasi keuangan 91.26%, dengan demikian terdapat efesiensi sumber daya sebesar 17,44% dan capaian tefektivitas capaian program sebesar 121.05%

3.5.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Indikator Utama Perangkat Daerah dalam **Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029** memiliki indikator sasaran sbb :

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (APS)
2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)
3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca)
4. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)
5. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) (%)
6. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)
7. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
8. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

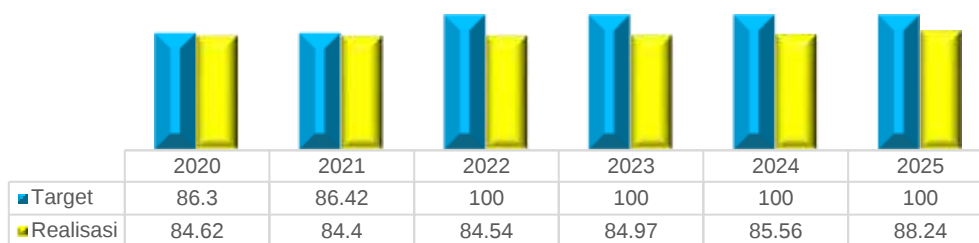
Berikut pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan provinsi Kepulauan Riau 2025-2029, selanjutnya capaian kinerja pada masa transisi 2025 diuraikan sbb :

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah peserta didik kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah

Capaian kinerja Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun (APS SMA/SMK/MA) pada masa transisi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 ditargetkan sebesar **100%**, dimana realisasi capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2025 di Provinsi Kepulauan berada pada angka **88,24%** atau setara dengan capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 88,24% dengan predikat kinerja **Baik**. Berikut capaian HLS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 sbb

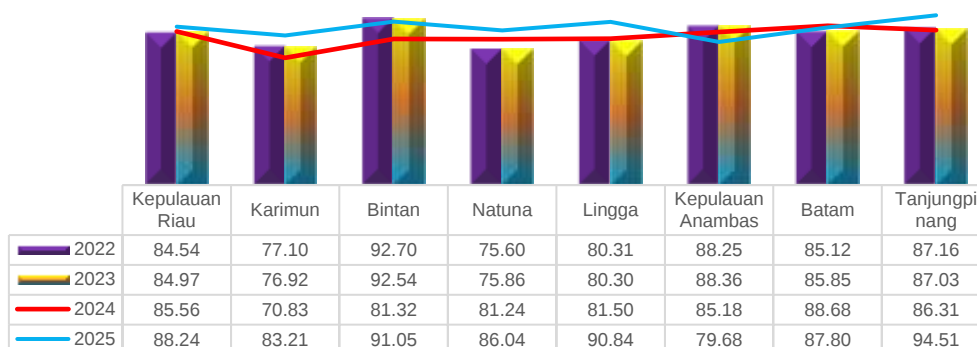
Gambar 3.46
Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2025
(RPJMD 2025-2029)



Sumber : BPS RI 2025

Realisasi kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 peningkatan dari pencapaian tahun 2024, hal ini diuraikan dalam Gambar 3.47 bahwa di tahun 2025 terdapat peningkatan realisasi kinerja menjadi 88,24 atau setara dengan 88,24% berbanding 85,56% di tahun 2024.

Gambar 3.47
Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025



Sumber : BPS RI 2025

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2025 menunjukkan tren positif, mendekati 100% untuk kelompok usia sekolah dasar (7-12 tahun) dan terus meningkat di jenjang lebih tinggi, meskipun datanya bervariasi berdasarkan provinsi dan kelompok usia, dengan DIY menjadi salah satu provinsi tertinggi untuk APS pemuda. Data terbaru dari BPS tahun 2025 mengindikasikan APS 7-12 tahun mencapai 97.94%, 13-15 tahun sekitar 89.61%, dan 16-18 tahun sekitar 61.30%, menunjukkan akses pendidikan semakin merata seiring usia. Berikut pencapaian Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun secara nasional berdasarkan pencapaian provinsi di Indonesia tahun 2025.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) nasional secara umum **menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun**, terutama pada kelompok usia sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP/SMA), meskipun ada sedikit perbedaan berdasarkan kelompok umur dan gender, dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan partisipasi tinggi di usia 7-12 tahun (mendekati 100%) dan peningkatan signifikan di usia remaja (13-18 tahun) dari waktu ke waktu.

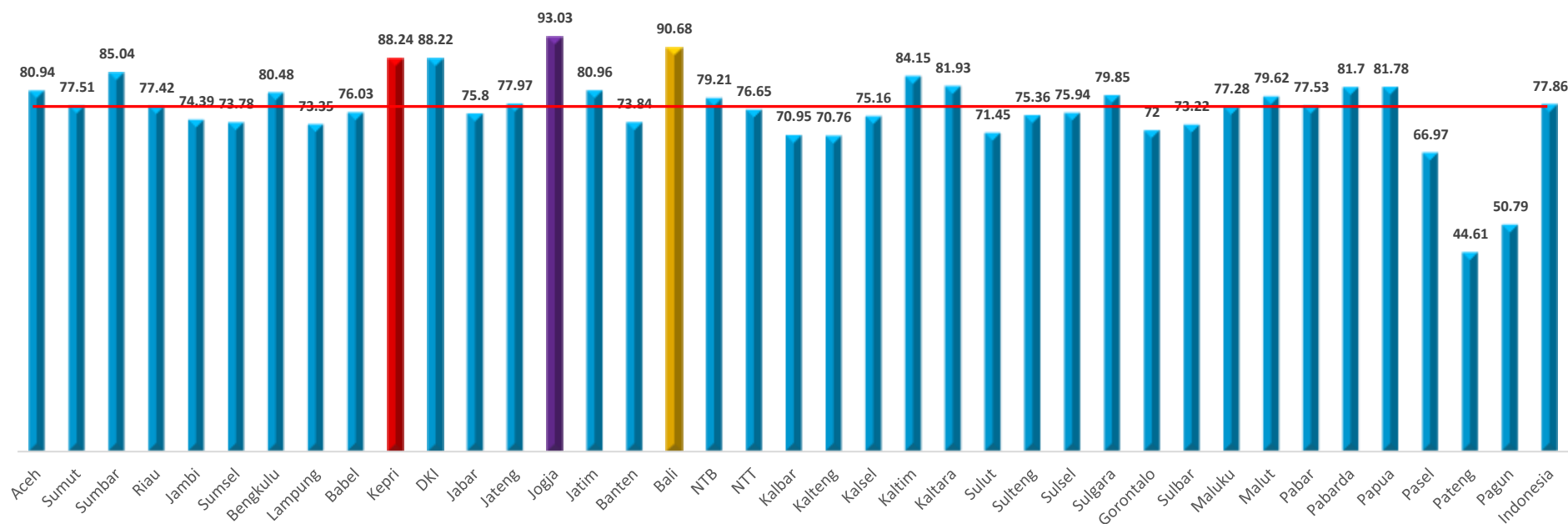
Tabel 3.51
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025
(Renstra Disdik Kepri 2025-2029)

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Harapan Lama sekolah	100	84,54	84,54	100	84,97	84,97	100	85,56	85,59	100	88,24	88,24	100	88,24	88,24	100	88,24	88,24

Pertumbuhan capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2022 s/d 2025 mengalami pertumbuhan trend positif, pada tahun 2022 realisasi kinerja mencapai 84,54% dan terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali sehingga capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah meningkat menjadi 85,59%.

Capaian Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2025 terus bergerak positif dan mencapai pada level 88,24% dari target. Capaian Angka Partisipasi Sekolah terhadap target akhir RENSTRA 2025-2029 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau belum tercapai dengan realisasi 88,24%.

Gambar 3.48
Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun
Secara Nasional Tahun 2025

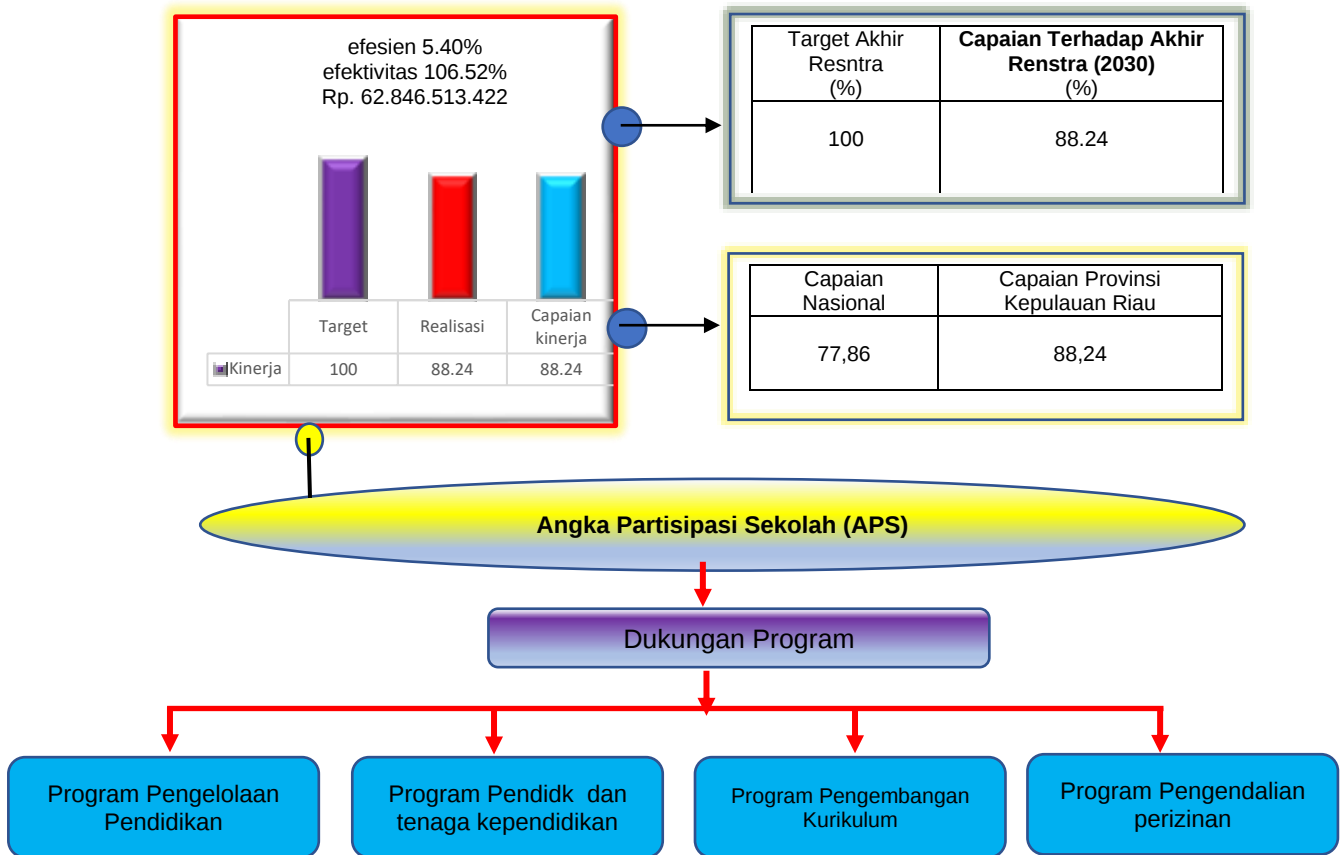


Sumber : BPS RI 2025

Secara Nasional Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 Tahun sudah membaik dari tahun 2024, Provinsi dengan pencapaian tertinggi Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia adalah Provinsi Jogjakarta yang berada pada angka 93,03, selanjutnya disusul Provinsi Bali dengan pencapaian APS pada angka 90,68 disusul Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan ketiga nasional dengan pencapaian

APS di tahun 2025 berada pada angka 88,24 dan diikuti Provinsi DKI Jakarta di urutan ke 4 nasional dengan pencapaian APS 88,22. Untuk provinsi yang pencapaian terkecil berada di Pulau Papua seperti Provinsi Papua Tengah pada angka 44,61, selanjutnya Provinsi Papua Pegunungan dengan pencapaian APS pada tahun 2025 pada angka 50,79 dan Provinsi Papua Selatan dengan pencapaian APS pada tahun 2025 pada angka 66,97.

Grafik 3.49
 Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun
 Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
 (Renstra Disdik Kepri 2025-2029)



Keberhasilan pencapaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 Tahun di Provinsi Kepulauan Riau didorong meningkatnya akses dan layanan pendidikan, dukungan kebijakan pemerintah, bantuan pendidikan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, sehingga mendorong lebih banyak anak usia sekolah untuk bersekolah dan tetap melanjutkan pendidikan. Secara keseluruhan, kombinasi antara kebijakan yang mendukung, akses pendidikan yang semakin baik, serta kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci beberapa faktor pendukung keberhasilan diantaranya sbb :

- Akses pendidikan yang semakin luas dan merata serta di dukung dengan pemenuhan PTK secara bertahap, ketersediaan sekolah,

jarak tempuh yang lebih dekat, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan secara massif dan merata antar wilayah.

- b. Penguatan dan perluasan program bantuan pendidikan, program ini penguatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bersumber dana APBD, beasiswa, dan bantuan lainnya yang mengurangi beban biaya sekolah bagi keluarga.
- c. Kebijakan wajib belajar dan regulasi pemerintah, kebijakan ini penguatan dan penerapan wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun serta dukungan kebijakan daerah yang mendukung partisipasi sekolah.
- d. Kesadaran dan motivasi masyarakat yang meningkat, peran orang tua dan peserta didik semakin menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan.
- e. Perbaikan kualitas layanan pendidikan, dukungan ini meliputi peningkatan kualitas guru, kurikulum, serta lingkungan belajar yang lebih kondusif.
- f. Dukungan lintas sektor dan pemerintah daerah, dukungan ini berbentuk kolaborasi antara dinas pendidikan, sekolah, dan pemangku kepentingan lain dalam menjangkau anak usia sekolah serta penguatan dan perluasan kerja sama dengan DUDI dalam peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan penyerapan tenaga kerja SMK pada DUDI
- g. Program penjangkauan anak tidak sekolah (ATS), program ini berupa pendataan dan mencari solusi terhadap anak putus sekolah melalui pendampingan melalui guru BK, penguatan kerjasama dengan perangkat daerah lain serta dukungan pembiayaan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu serta pendataan, sosialisasi, dan program kembali bersekolah bagi anak putus sekolah.
- h. Komitmen pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan, melalui alokasi anggaran, program wajib belajar, dan kebijakan afirmatif bagi wilayah kepulauan.

- i. Penguatan pendidikan nonformal dan kesetaraan, sebagai alternatif bagi anak yang tidak dapat mengikuti jalur formal

Upaya lain yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah Sekolahh diantaranya :

- a. Perluasan akses pendidikan sejak usia dini, melalui peningkatan layanan PAUD hingga pendidikan menengah dan Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah terpencil, pesisir, dan pulau-pulau
- b. Pendataan dan penelusuran anak tidak sekolah serta anak berisiko putus sekolah.
- c. Program kembali bersekolah bagi anak putus sekolah melalui jalur formal maupun nonformal.
- d. Penguatan peran orang tua dan masyarakat melalui sosialisasi pentingnya pendidikan.
- e. Penyediaan pendidikan alternatif seperti PKBM, sekolah terbuka, dan pendidikan kesetaraan melalui Pengembangan pendidikan nonformal dan kesetaraan, sebagai jalur alternatif bagi masyarakat
- f. Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik.
- g. Kerja sama lintas sektor dengan perangkat desa, kecamatan, dan lembaga sosial dalam pendataan dan penelusuran anak putus sekolah dan alternatif solusi.
- h. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang ramah dan inklusi.
- i. Penguatan program wajib belajar 12 tahun, termasuk dukungan pembiayaan dan regulasi daerah
- j. Pemanfaatan teknologi pembelajaran dalam menumbuhkan inovasi, ketertarikan dan kemudahan informasi untuk menjangkau peserta didik di wilayah sulit akses
- k. Peningkatan peran orang tua dan masyarakat, melalui kampanye kesadaran pentingnya pendidikan jangka Panjang

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program

berhasil mencapai target yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.52
Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
(Renstra Disdik Prov Kepri 2025-2029)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Angka Partisipasi Sekolah	%	100	88,24	88,24	1. Pengelolaan Pendidikan 2. Pengembangan kurikulum 3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	365.667.258.166 114.475.500 187.656.000 42.439.000	302.915.090.970 70.519.443 153.676.514 26.028.317	82,85 61,60 81,89 61,33
	Caoaian Kinerja				88,24	Capaian Kinerja Keuangan			82.84
	Tingkat Efisiensi								5.40
	Tingkat Efektivitas								106.52

Pada Tabel 3.52 menjelaskan hubungan antara anggaran, efektivitas dan efisiensi kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2025 sebesar Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 atau setara dengan 82.84% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 88,24% dengan penilaian kinerja sangat baik yang didukung dengan realisasi keuangan 82.84%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya sebesar 5.40% dan capaian efektivitas capaian program sebesar 106.52%

2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus adalah perbandingan antara jumlah peserta didik disabilitas kelompok usia sekolah (4-18 Tahun) yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Berikut jumlah penduduk dan peserta didik disabilitas di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Gambar 3.53
Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas (4-18 Tahun)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas 4-18 Tahun			Ket
		L	P	Jumlah	
1	Bintan	94	49	143	
2	Karimun	170	110	280	
3	Natuna	56	47	103	
4	Lingga	70	38	108	
5	Anambas	21	13	34	
6	Batam	321	187	508	
7	Tanjungpinang	134	71	205	
		866	515	1381	

Sumber : Dinas PMDDukcapil Kepri 2025

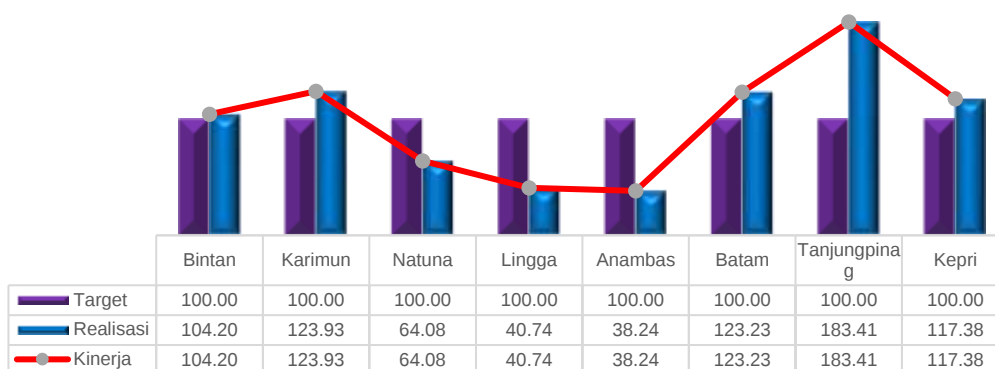
Gambar 3.54
Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (4-18 Tahun)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas 4-18 Tahun			Ket
		L	P	Jumlah	
1	Bintan	97	52	149	
2	Karimun	209	138	347	
3	Natuna	41	25	66	
4	Lingga	30	14	44	
5	Anambas	9	4	13	
6	Batam	402	224	626	
7	Tanjungpinang	250	126	376	
		1031	583	1621	

Sumber : Dapodik 2025

Realisasi kinerja anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS SLB) tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 diraikan sebagaimana Gambar Dibawah ini.

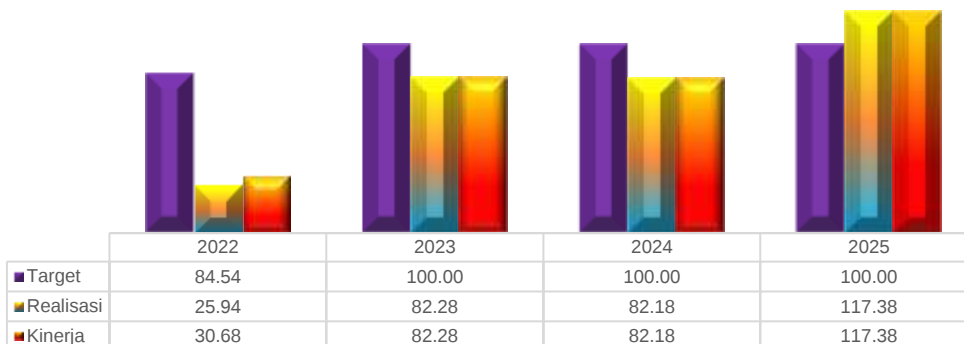
Gambar 3.50
Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025
(RPJMD 2025-2029)



Sumber : Rapor Pendidikan 2025

Pada Gambar 3.50 Menjelaskan Realisasi kinerja APS SLB masa transisi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 ditargetkan sebesar **100%**, dimana realisasi capaian kinerja APS SLB pada tahun 2025 di Provinsi Kepulauan berada pada angka **117,38** atau setara dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar **117,38%** dengan predikat kinerja **Sangat Baik**.

Gambar 3.51
Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025



Sumber : Rapor Pendidikan 2025

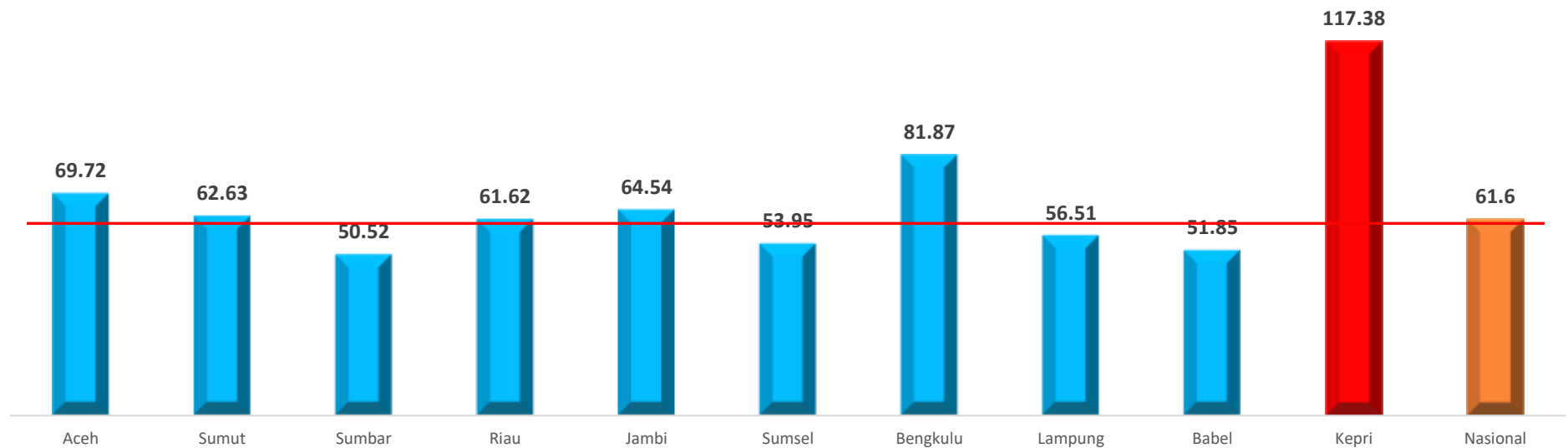
Tabel 3.55
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah 4-18 Tahun
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2025
(Renstra Disdik Kepri 2025-2029)

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2030)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
APS Usia 4-18 Tahun	100	25,94	30,68	100	82,28	82,28	100	82,18	82,18	100	117,38	117,38	100	117,38	117,38	100	117,38	117,38

Pertumbuhan capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah SLB di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2022 s/d 2025 mengalami pertumbuhan trend positif, pada tahun 2022 realisasi kinerja mencapai 30,68% dan terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali sehingga capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah meningkat menjadi 82,18%.

Capaian Angka Partisipasi SekolahSLB pada tahun 2025 terus bergerak positif dan kinerja mencapai pada level 117,28% dari target. Capaian Angka Partisipasi Sekolah SLB terhadap target akhir RENSTRA 2025-2029 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau belum tercapai dengan realisasi 117,38%.

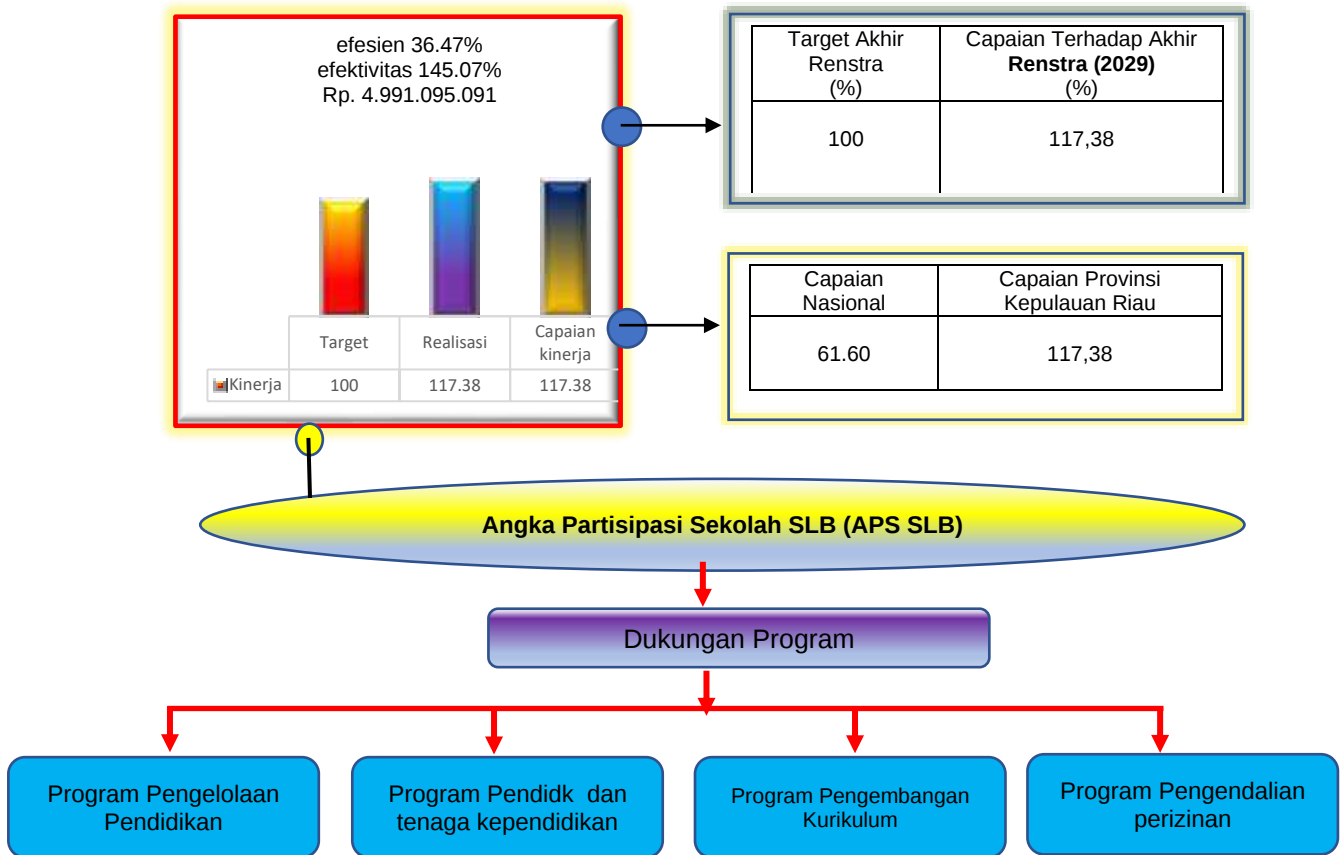
Gambar 3.52
Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun
Regional Sumatera Tahun 2025



Sumber :Rapor Pendidikan 2025

Secara Nasional Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 4-18 Tahun sudah membaik dari tahun 2024, Provinsi dengan pencapaian tertinggi Angka Partisipasi Sekolah di Regional Sumatera adalah Provinsi Kepri yang berada pada angka 117,38% selanjutnya disusul Provinsi Bengkulu 81.87%.

Grafik 3.53
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
(Renstra Disdik Kepri 2025-2029)



Keberhasilan pencapaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah SLB (APS SLB) usia 4-18 Tahun di Provinsi Kepulauan Riau didorong dengan meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan khusus, yang didukung oleh ketersediaan satuan pendidikan SLB, peningkatan pendataan anak berkebutuhan khusus, serta dukungan pembiayaan pendidikan. Selain itu, meningkatnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, serta perbaikan kualitas layanan dan kompetensi pendidik SLB, beberapa factor pendukung keberhasilan diantaranya sbb :

- Akses pendidikan inklusi yang semakin luas dan merata serta di dukung dengan pemenuhan PTK secara bertahap, ketersediaan

sekolah, jarak tempuh yang lebih dekat, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan secara massif dan merata antar wilayah.

- b. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah, seluruh tingkatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan komitmen dalam pengembangan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus melalui kebijakan, program, serta penganggaran yang mendukung layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- c. Ketersediaan dan peningkatan akses SLB, pemenuhan jumlah satuan pendidikan khusus/SLB negeri maupun swasta yang tersebar di wilayah strategis, serta kemudahan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus, turut meningkatkan angka partisipasi sekolah.
- d. Program pendataan dan penjangkaran ABK yang lebih baik, kebijakan ini dengan meningkatnya dan penguatan kualitas pendataan anak usia sekolah berkebutuhan khusus melalui kerja sama sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat membantu memastikan anak-anak tersebut terlayani oleh satuan pendidikan yang sesuai.
- e. Dukungan pembiayaan pendidikan, dukungan ini diperkuat dan diperluas melalui pendanaan daerah serta dukungan pemerintah seperti BOS, bantuan operasional SLB, serta program bantuan sosial pendidikan meringankan beban orang tua dan mendorong keberlanjutan sekolah anak berkebutuhan khusus.
- f. Peran aktif orang tua dan masyarakat, orang tua dan masyarakat berperan sangat strategis guna mendukung meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, serta berkurangnya stigma sosial, berkontribusi pada meningkatnya partisipasi sekolah.
- g. Peningkatan kualitas pendidik dan layanan pendidikan khusus, Ketersediaan guru SLB yang lebih kompeten, pelatihan pendidik, serta perbaikan sarana prasarana pendukung pembelajaran menjadikan SLB lebih diminati dan efektif.

Upaya lain yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus (APS SLB) diantaranya :

- a. Penguatan koordinasi lintas sektor, Melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pendataan, pendampingan, dan rujukan anak berkebutuhan khusus.
- b. Sosialisasi dan advokasi pendidikan khusus, Peningkatan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai hak pendidikan anak berkebutuhan khusus serta layanan pendidikan SLB dan inklusif.
- c. Pengembangan pendidikan inklusif, Mendorong sekolah reguler tertentu untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagai alternatif layanan bagi ABK yang belum terjangkau SLB.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana SLB, Penyediaan dan rehabilitasi ruang kelas, alat bantu pembelajaran, serta fasilitas pendukung sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
- e. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, Pelatihan dan pendampingan guru SLB serta guru pembimbing khusus untuk meningkatkan mutu layanan pembelajaran.
- f. Pemberian dukungan transportasi dan bantuan sosial pendidikan, Fasilitasi bantuan transportasi, alat bantu, dan dukungan biaya pendidikan untuk mengurangi hambatan akses sekolah bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- g. Monitoring dan evaluasi partisipasi sekolah ABK, Pelaksanaan pemantauan secara berkala terhadap keberadaan dan keberlanjutan sekolah anak berkebutuhan khusus agar tidak terjadi putus sekolah

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena

itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.56
Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Angka Partisipasi Sekolah SLB (APS SLB)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
(Renstra Disdik Prov Kepri 2025-2029)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Angka Partisipasi Sekolah SLB	%	100	117,38	117,38	1. Pengelolaan Pendidikan 2. Pengembangan kurikulum 3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	20.715.216.267 114.475.500 187.656.000 42.439.000	15.158.467.402 70.519.443 153.676.514 26.028.317	80.91 61,60 81,89 61.33
						Jumlah	20.759.786.767	15.768.691.676	80.91
	Caoaian Kinerja				117,38	Capaian Kinerja Keuangan			80.91
	Tingkat Efisiensi								36.47
	Tingkat Efektivitas								145.07

Pada Tabel 3.56 menjelaskan hubungan antara anggaran, efektivitas dan efisiensi kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2025 sebesar Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 atau setara dengan 80.91% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 117,38 dengan penilaian kinerja **sangat baik** yang didukung dengan realisasi keuangan 91.26%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya sebesar 36.47% dan capaian efektivitas capaian program sebesar 145.07%

3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca)

Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) merupakan Jumlah kabupaten/kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi X.

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”

Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) adalah Rasio yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah (kabupaten/kota) telah berhasil membina satuan pendidikan di wilayahnya sehingga peserta didik mencapai standar minimal kemampuan literasi.

Literasi adalah kemampuan fundamental untuk membaca, menulis, dan memahami informasi, yang kini berkembang menjadi serangkaian keterampilan komprehensif seperti mengakses, menafsirkan, menciptakan, dan berkomunikasi menggunakan berbagai simbol (teks, visual, digital) untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, mencakup literasi dasar hingga literasi digital, sains, finansial, dan budaya.

Literasi dijadikan standar penilaian pendidikan utama, terutama dalam kebijakan arah pendidikan 2026, karena dianggap sebagai fondasi kompetensi yang jauh lebih relevan dibandingkan sekadar hafalan materi. Berikut adalah alasan utama mengapa literasi menjadi standar penilaian pendidikan:

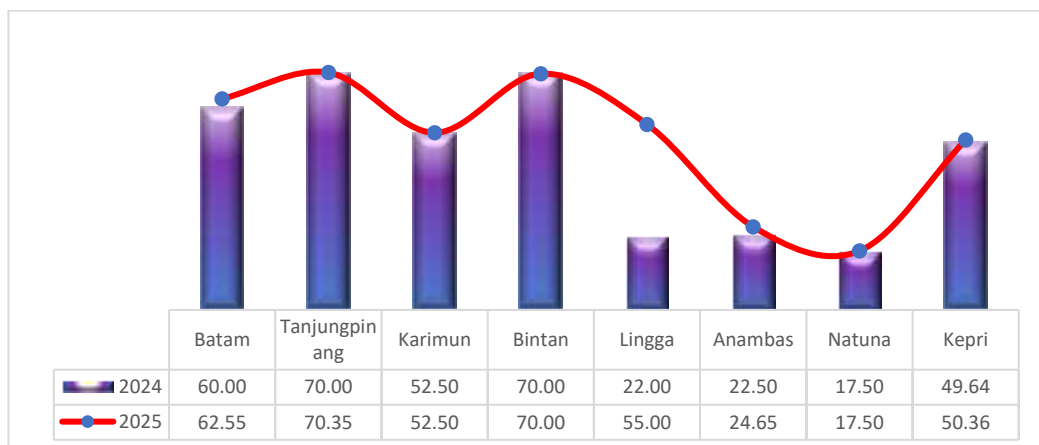
- a. Kemampuan Berpikir Kritis, Literasi bukan sekadar membaca, melainkan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata.
- b. Fondasi Belajar Sepanjang Hayat, Literasi merupakan hak dasar dan instrumen utama yang memungkinkan seseorang terus belajar secara mandiri (life-long learning) guna menghadapi tantangan global yang terus berubah.
- c. Navigasi Informasi Digital, Di era kecerdasan artifisial (AI) dan kelimpahan informasi, standar literasi membantu siswa menyaring (memilah) informasi yang akurat dan etis dari berbagai sumber digital.
- d. Diagnosis Kebutuhan Siswa: Sebagai alat penilaian, literasi membantu pendidik mendiagnosis kemampuan unik setiap peserta didik, memantau kemajuan mereka, dan menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif.
- e. Peningkatan Mutu dan Daya Saing: Capaian literasi menjadi indikator keberhasilan pendidikan nasional (seperti pada hasil PISA) yang menunjukkan kesiapan generasi muda untuk memimpin dan berpartisipasi dalam ekonomi global.

Realisasi kinerja Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) di Provinsi Kepulauan Riau pada merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang baru diukur pada tahun 2025. Literasi membaca berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Daerah yang mencapai SKM cenderung lebih siap menghadapi tantangan pendidikan lanjutan dan dunia kerja di masa depan.

Target Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ditetapkan pada angka 47.50% dan target pada akhir RENSTRA 2029 ditetapkan 50,35%.

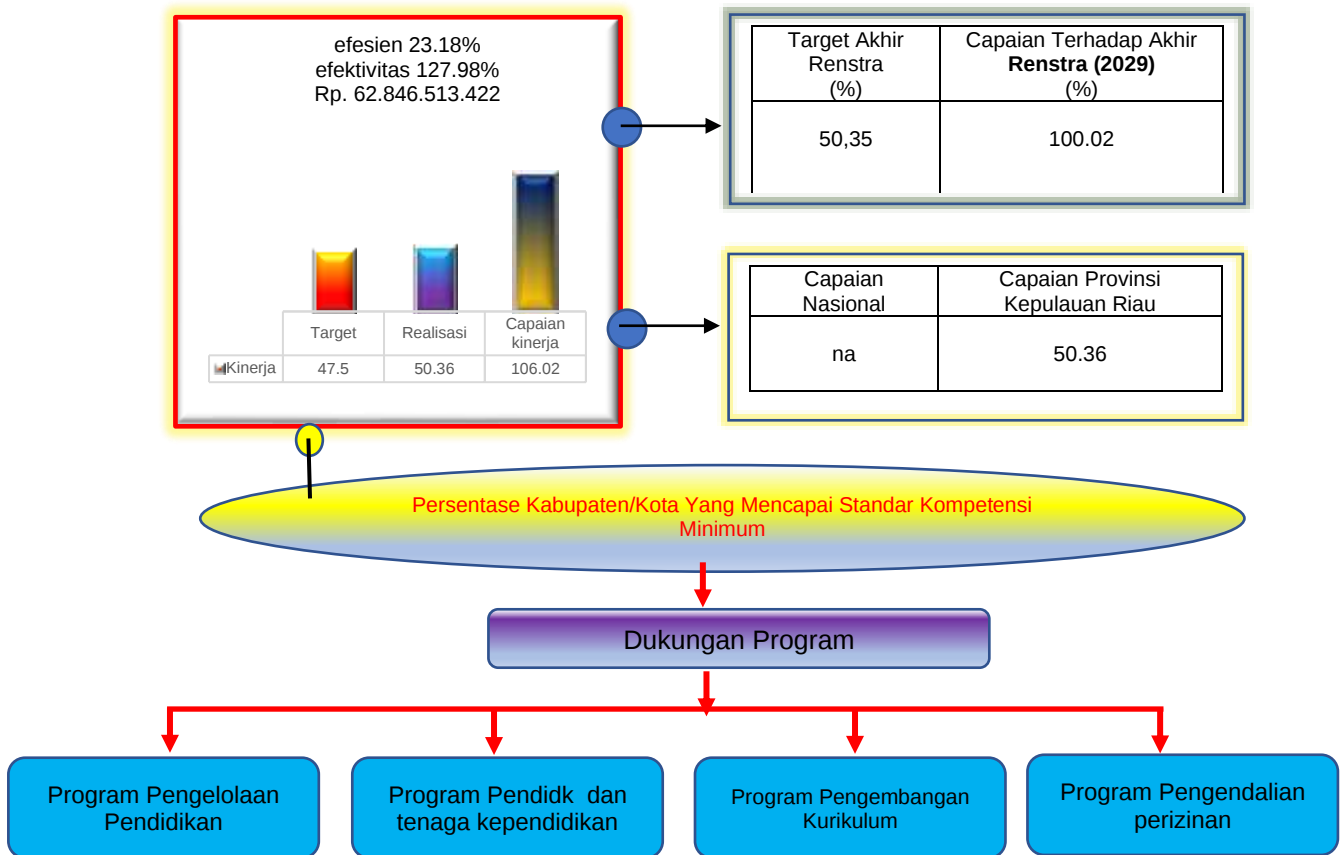
Pertumbuhan realisasi Target Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) di Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan mengalami fluktuatif. Berdasarkan Gambar 3.54 Pada tahun 2025 realisasi kinerja Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) tercatat pada angka 50.36 atau pencapaian tersebut setara dengan 106.02% dari pencapaian dari target kinerja.

Gambar 3.54
Realisasi Kinerja
Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum
Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Rapor Pendidikan 2025

Grafik 3.56
 Capaian Kinerja Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum
 Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca)
 Di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2025



Keberhasilan pencapaian kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan dasar telah berjalan secara efektif. Capaian ini mencerminkan semakin banyaknya kabupaten/kota yang mampu memenuhi standar kompetensi minimum literasi membaca sesuai dengan ketentuan nasional.

Peningkatan tersebut didukung oleh berbagai kebijakan dan program strategis, antara lain penguatan pembelajaran berbasis literasi, peningkatan kompetensi pendidik, penyediaan sumber belajar yang relevan, serta pemanfaatan hasil Asesmen Nasional sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah turut berperan dalam mendorong pemerataan mutu pendidikan di berbagai wilayah.

Keberhasilan ini tidak hanya menggambarkan peningkatan kemampuan dasar peserta didik dalam memahami, mengevaluasi, dan merefleksikan teks, tetapi juga menjadi indikator membaiknya kinerja sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, capaian kompetensi minimum literasi membaca diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan., **Keberhasilan** Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) Di Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh beberapa factor pendukung keberhasilan diantaranya sbb :

- a. Penguatan kebijakan pembelajaran berbasis literasi, Implementasi kebijakan yang menekankan penguatan literasi membaca dalam proses pembelajaran mendorong sekolah untuk lebih fokus pada pengembangan kemampuan memahami, menganalisis, dan merefleksikan teks.
- b. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan komunitas belajar guru meningkatkan kapasitas pendidik dalam menerapkan strategi pembelajaran literasi yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik.
- c. Pemanfaatan hasil Asesmen Nasional sebagai dasar perbaikan, Sekolah dan pemerintah daerah memanfaatkan rapor pendidikan dan hasil Asesmen Nasional untuk mengidentifikasi kelemahan pembelajaran literasi dan merancang tindak lanjut yang tepat sasaran.
- d. Ketersediaan dan pemanfaatan sumber belajar yang memadai, Dukungan penyediaan bahan bacaan bermutu, perpustakaan sekolah, serta sumber belajar digital berkontribusi pada peningkatan minat dan kemampuan membaca peserta didik.
- e. Sinergi dan dukungan pemerintah daerah, Komitmen pemerintah daerah dalam bentuk regulasi, pendanaan, serta program

pendukung literasi mempercepat pencapaian standar kompetensi minimum di tingkat kabupaten/kota.

- f. Peningkatan budaya literasi di satuan pendidikan, Pembiasaan kegiatan literasi, seperti membaca sebelum pembelajaran dan penguatan ekosistem literasi sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peningkatan kemampuan membaca.
- g. Monitoring dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala memungkinkan perbaikan kebijakan dan program dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data.

Selain program dan kebijakan utama yang telah dilaksanakan, berbagai upaya pendukung lainnya turut dilakukan untuk memperkuat pencapaian kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca). Upaya tersebut antara lain melalui penguatan pendampingan satuan pendidikan yang hasil asesmennya masih berada di bawah standar, dengan memberikan intervensi pembelajaran yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong optimalisasi peran komunitas belajar guru dan kepala sekolah sebagai wadah berbagi praktik baik dalam pengembangan pembelajaran literasi. Melalui forum tersebut, pendidik dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kemampuan membaca pemahaman peserta didik.

Selain itu, dilakukan penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan masyarakat, untuk menumbuhkan budaya literasi di luar lingkungan sekolah. Pemanfaatan teknologi dan platform pembelajaran digital juga terus ditingkatkan guna memperluas akses peserta didik terhadap bahan bacaan yang bervariasi dan berkualitas.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program literasi. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai dasar

penyempurnaan kebijakan dan program, sehingga peningkatan kompetensi minimum literasi membaca dapat dicapai secara berkelanjutan dan merata di seluruh kabupaten/kota, berikut uUpaya lain yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) diantaranya :

- a. Intervensi khusus pada satuan pendidikan berisiko rendah capaian, Pemberian pendampingan intensif, bimbingan teknis, dan supervisi akademik pada sekolah dengan hasil literasi membaca di bawah standar.
- b. Penguatan pembelajaran diferensiasi, Penerapan strategi pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan membaca peserta didik agar siswa dengan kemampuan dasar rendah tetap mendapatkan dukungan optimal.
- c. Pengembangan program literasi berbasis konteks local, Penyediaan bahan bacaan yang relevan dengan budaya dan lingkungan setempat untuk meningkatkan pemahaman dan minat membaca peserta didik.
- d. Optimalisasi peran perpustakaan sekolah dan daerah, Revitalisasi perpustakaan, pojok baca, dan layanan perpustakaan keliling sebagai sarana pendukung pembelajaran literasi.
- e. Pemanfaatan teknologi dan media digital, Penggunaan platform pembelajaran digital, buku elektronik, dan aplikasi literasi untuk memperluas akses bacaan serta meningkatkan keterlibatan peserta didik.
- f. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, Penguatan peran keluarga melalui program membaca di rumah dan keterlibatan komunitas dalam kegiatan literasi.
- g. Penguatan kepemimpinan kepala sekolah, Mendorong kepala sekolah sebagai penggerak literasi untuk memastikan program literasi terintegrasi dalam perencanaan dan budaya sekolah.

- h. Pemberian apresiasi dan diseminasi praktik baik, Penghargaan kepada sekolah/daerah berprestasi dan penyebarluasan praktik baik sebagai motivasi peningkatan kinerja.
- i. Integrasi literasi dalam semua mata pelajaran, Menanamkan aktivitas membaca dan pemahaman teks di seluruh mata pelajaran, tidak hanya pada pelajaran Bahasa Indonesia.
- j. Monitoring berbasis data dan tindak lanjut berkelanjutan, Penguatan pemantauan capaian literasi secara periodik serta penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi.
- k. Penguatan koordinasi lintas sektor, Melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pendataan, pendampingan, dan rujukan anak berkebutuhan khusus.

Tabel 3.57
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum
Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca)
Di Provinsi Kepulauan Riau
2022 sd 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)			Target Nasional		
	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca)	na	na	na	na	na	na	na	na	na	47.50	50.36	106.02	50,35	50.36	100.12	na	na	na

Pertumbuhan capaian kinerja Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 mencapai 50.36 atau setara dengan 106.02% dari target 2025

Capaian Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) terhadap target akhir RENSTRA 2025-2029 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau belum tercapai dengan realisasi 100.12%.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.58
Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum
Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

N o	Indikator Sasaran	Sa tuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca)	Ang ka	47.50	50.36	106.02	1. Pengelolaan Pendidikan	365.667.258.166	302.915.090.970	82,85
						2. Pengembangan kurikulum	114.475.500	70.519.443	61,60
						3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	187.656.000	153.676.514	81,89
						4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000	26.028.317	61,33
	Caoaian Kinerja					106.02	Capaian Kinerja Keuangan		
Tingkat Efisiensi									47.16
Tingkat Efektivitas									156.92

Pada Tabel 3.58 menjelaskan hubungan antara anggaran, efektivitas dan efisiensi kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Kinerja Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) tahun 2025 sebesar Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 atau setara dengan 82.84% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 88,24% dengan penilaian kinerja sangat baik yang didukung dengan realisasi keuangan 82.84%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya sebesar 47.15% dan capaian efektivitas capaian program sebesar 156.92%.

4. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi)

Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (numerasia) merupakan Jumlah kabupaten/kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi X.

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”

Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) adalah Rasio yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah (kabupaten/kota) telah berhasil membina satuan pendidikan di wilayahnya sehingga peserta didik mencapai standar minimal kemampuan Numerasi.

Numerasi kemampuan memahami dan menerapkan konsep bilangan serta matematika dasar untuk menganalisis informasi kuantitatif (angka, data, grafik, tabel) dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah praktis serta mengambil keputusan logis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, menjadikannya lebih dari sekadar berhitung biasa.

Manfaat penting dari penelitan diantaranya penerapan Konsep bilangan dan symbol matematika dalam situasi nyata, Interpretasi Data sehingga mampu membaca, menganalisis, dan memahami data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau bagan, Pemecahan Masalah yang Menggunakan logika dan penalaran untuk memecahkan masalah praktis sehari-hari, Pengambilan Keputusan berdasarkan yang tepat berdasarkan analisis informasi kuantitatif, kemampuan yang lebih luas dari Berhitung: Melampaui keterampilan dasar menjumlah, mengurangi, mengali, dan membagi, mencakup pemahaman pola dan hubungan antar data.

Literasi dijadikan standar penilaian pendidikan utama, terutama dalam kebijakan arah pendidikan 2026, karena dianggap sebagai fondasi kompetensi yang jauh lebih relevan dibandingkan sekadar hafalan materi. Berikut adalah alasan utama mengapa literasi menjadi standar penilaian pendidikan:

- a. Mendukung kemampuan berpikir logis dan kritis, kompetensi numerasi membantu individu memahami pola, hubungan, dan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengambil keputusan secara rasional.
- b. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dengan numerasi yang baik, seseorang dapat menganalisis data, memperkirakan risiko, serta memilih solusi yang paling tepat berdasarkan informasi kuantitatif.
- c. Mendukung pembelajaran lintas mata pelajaran, Numerasi tidak hanya penting dalam matematika, tetapi juga menunjang pemahaman pada mata pelajaran lain seperti sains, ekonomi, dan teknologi.
- d. Membekali keterampilan hidup sehari-hari, Kemampuan numerasi diperlukan dalam mengelola keuangan, membaca grafik, memahami ukuran, waktu, dan perhitungan sederhana yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

- e. Meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja, Banyak bidang pekerjaan membutuhkan kemampuan memahami data, statistik, dan perhitungan dasar sebagai bagian dari pengambilan keputusan dan penyelesaian tugas.
- f. Mendukung pembangunan sumber daya manusia, Numerasi yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM yang produktif, adaptif, dan mampu bersaing di era berbasis data dan teknologi.
- g. Mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, Pada tingkat institusi dan pemerintahan, kompetensi numerasi membantu dalam memahami dan memanfaatkan data secara tepat untuk perencanaan dan evaluasi program.

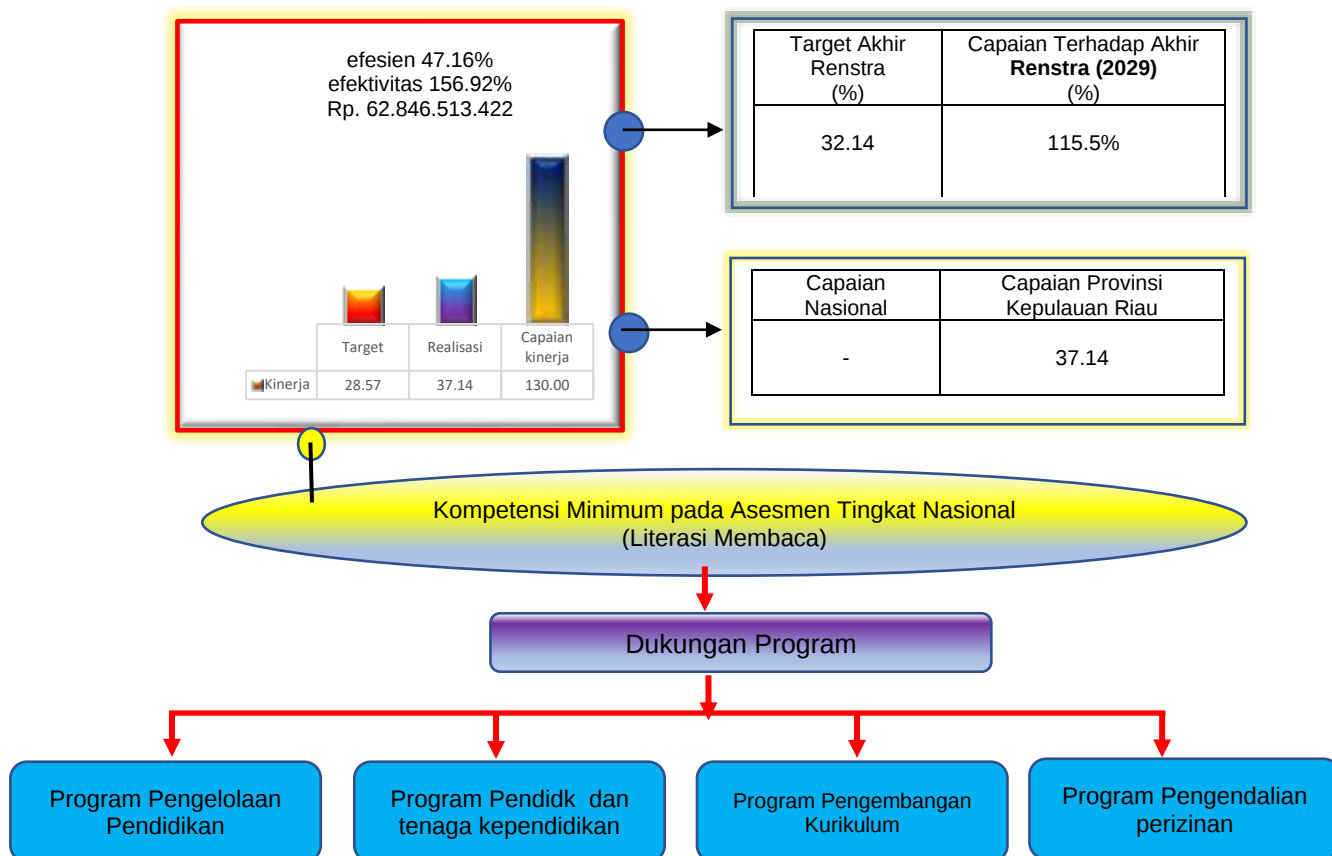
Berdasarkan Grafik.... Dibawah ini, realisasi kinerja Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) tercatat pada angka....., pencapaian tersebut setara dengan ...% dari pencapaian ... t=dari target kinerja.

Gambar 3.57
Realisasi Kinerja
Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum
Pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024 dan 2025



Sumber : Rapor Pendidikan 2025

Grafik 3.58
Capaian Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang Menncapai Standar Kompetensi Minimum
pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi)
Di Provinsi Kepulauan Riau



Keberhasilan pencapaian kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi) menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah telah berjalan secara efektif. Capaian ini mencerminkan semakin banyaknya kabupaten/kota yang mampu memenuhi standar kompetensi minimum literasi membaca sesuai dengan ketentuan nasional.

Peningkatan tersebut didukung oleh berbagai kebijakan dan program strategis, antara lain penguatan pembelajaran berbasis literasi, peningkatan kompetensi pendidik, penyediaan sumber belajar yang relevan, serta pemanfaatan hasil Asesmen Nasional sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah turut berperan dalam mendorong pemerataan mutu pendidikan di berbagai wilayah.

Keberhasilan ini tidak hanya menggambarkan peningkatan kemampuan dasar peserta didik dalam memahami, mengevaluasi, dan merefleksikan teks, tetapi juga menjadi indikator membaiknya kinerja sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, capaian kompetensi minimum literasi membaca diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan., **Keberhasilan** pencapaian kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) dipengaruhi oleh beberapa factor pendukung keberhasilan diantaranya sbb :

- a. Penguatan pembelajaran numerasi dalam proses belajar mengajar, Satuan pendidikan di Kepri semakin menerapkan pembelajaran numerasi yang menekankan pemahaman konsep, penalaran, dan pemecahan masalah kontekstual, tidak hanya hafalan rumus.
- b. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan, Guru memperoleh penguatan kapasitas melalui pelatihan, komunitas belajar, dan pendampingan pembelajaran, sehingga mampu mengimplementasikan strategi pembelajaran numerasi yang lebih efektif.
- c. Pemanfaatan hasil Asesmen Nasional sebagai dasar perbaikan, Pemerintah daerah dan sekolah memanfaatkan Rapor Pendidikan untuk mengidentifikasi kelemahan capaian numerasi dan menyusun tindak lanjut yang terarah dan berbasis data.
- d. Dukungan kebijakan dan program pemerintah daerah, Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, termasuk alokasi anggaran dan program pendukung numerasi, berkontribusi terhadap pencapaian kompetensi minimum.
- e. Penguatan peran kepala sekolah dan manajemen satuan pendidikan Kepemimpinan, kepala sekolah dalam mengarahkan program

pembelajaran, supervisi akademik, dan penguatan budaya numerasi menciptakan iklim belajar yang kondusif.

- f. Ketersediaan dan pemanfaatan sarana pendukung pembelajaran, Pemanfaatan buku ajar, alat peraga, serta sumber belajar digital membantu peserta didik memahami konsep numerasi secara lebih konkret dan aplikatif.
- g. Budaya belajar dan motivasi peserta didik yang semakin baik, Pembiasaan aktivitas numerasi dalam berbagai mata pelajaran serta dukungan lingkungan sekolah dan keluarga meningkatkan keterlibatan
- h. Monitoring dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala memungkinkan perbaikan kebijakan dan program dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data.

Selain program dan kebijakan utama yang telah dilaksanakan, berbagai upaya pendukung lainnya turut dilakukan untuk memperkuat pencapaian kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (numerasi). Upaya tersebut antara lain melalui penguatan pendampingan satuan pendidikan yang hasil asesmennya masih berada di bawah standar, dengan memberikan intervensi pembelajaran yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong optimalisasi peran komunitas belajar guru dan kepala sekolah sebagai wadah berbagi praktik baik dalam pengembangan pembelajaran literasi. Melalui forum tersebut, pendidik dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kemampuan membaca pemahaman peserta didik.

Selain itu, dilakukan penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan masyarakat, untuk menumbuhkan budaya literasi di luar lingkungan sekolah. Pemanfaatan teknologi dan platform pembelajaran digital juga terus ditingkatkan guna memperluas

akses peserta didik terhadap bahan bacaan yang bervariasi dan berkualitas.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program literasi. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan program, sehingga peningkatan kompetensi minimum literasi membaca dapat dicapai secara berkelanjutan dan merata di seluruh kabupaten/kota, berikut uUpaya lain yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) diantaranya :

- A. Intervensi khusus pada satuan pendidikan berisiko rendah capaian, Pemberian pendampingan intensif, bimbingan teknis, dan supervisi akademik pada sekolah dengan hasil literasi membaca di bawah standar.
 - a. Program Intervensi Numerasi Berbasis Data Sekolah, Mengembangkan intervensi khusus bagi satuan pendidikan dengan capaian numerasi rendah berdasarkan Rapor Pendidikan, melalui pendampingan intensif dan rencana tindak lanjut yang terukur.
 - b. Penguatan Numerasi Kontekstual Kepulauan dan Maritim, Mengintegrasikan konteks lokal Kepri (kemaritiman, perdagangan, transportasi laut, pariwisata) dalam pembelajaran numerasi agar lebih relevan dan mudah dipahami peserta didik.
 - c. Pengembangan Pusat Belajar Guru Numerasi (Numeracy Hub), Membentuk pusat pengembangan profesional guru numerasi tingkat provinsi/kabupaten sebagai wadah berbagi praktik baik, pengembangan modul, dan inovasi pembelajaran.
 - d. Integrasi Numerasi di Semua Mata Pelajaran, Mendorong penerapan numerasi lintas mata pelajaran (IPA, IPS, Prakarya, Ekonomi) agar siswa terbiasa menggunakan data, grafik, dan perhitungan dalam berbagai konteks.
 - e. Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran Adaptif, Mengembangkan atau memanfaatkan platform digital yang menyediakan latihan

numerasi adaptif sesuai tingkat kemampuan peserta didik, termasuk untuk wilayah kepulauan terpencil.

- f. Penguatan Literasi Data dan Statistik Dasar
Memperkenalkan pemahaman data sederhana, grafik, dan peluang sejak jenjang dasar sebagai bekal menghadapi asesmen dan kebutuhan masa depan berbasis data.
- g. Program Numerasi Keluarga dan Komunitas, Melibatkan orang tua dan masyarakat melalui program numerasi di rumah dan kegiatan berbasis komunitas agar pembelajaran numerasi berlanjut di luar sekolah.
- h. Penguatan Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Kinerja Numerasi, Mengaitkan perencanaan sekolah dan supervisi akademik dengan target peningkatan numerasi sebagai indikator kinerja satuan pendidikan.
- i. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan Tingkat Daerah, Melakukan pemantauan capaian numerasi secara berkala di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas program.
- j. Pemberian Insentif dan Apresiasi Kinerja Numerasi, Memberikan penghargaan kepada sekolah dan daerah yang menunjukkan peningkatan signifikan sebagai motivasi dan contoh praktik baik.
- k. Penguatan pembelajaran diferensiasi, Penerapan strategi pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan membaca peserta didik agar siswa dengan kemampuan dasar rendah tetap mendapatkan dukungan optimal.
- l. Pengembangan program numerasi berbasis konteks lokal, Penyediaan bahan bacaan yang relevan dengan budaya dan lingkungan setempat untuk meningkatkan pemahaman dan minat membaca peserta didik.
- m. Monitoring berbasis data dan tindak lanjut berkelanjutan, Penguatan pemantauan capaian numerasi secara periodik serta penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi.

Tabel 3.59
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kabupaten/kota
Yang Mencapai Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)			Target Nasional		
	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi)	na	na	na	na	na	na	na	na	na	28.57	37.14	115.5	32.14	37.14	115.5	-	-	-

Pertumbuhan capaian kinerja Persentase Kabupaten/kota Yang Mencapai Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Mengalami pertumbuhan positif, realisasi kinerja mencapai 37.14 atau setara dengan 115.5% dari target kinerja tahun 2025.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.60
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kabupaten/kota
Yang Mencapai Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi)	%	27,85	37.14	115.5	1. Pengelolaan Pendidikan	365.667.258.166	302.915.090.970	82,85
						2. Pengembangan kurikulum	114.475.500	70.519.443	61,60
						3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	187.656.000	153.676.514	81,89
						4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000	26.028.317	61.33
	Caoaian Kinerja					115.5	Capaian Kinerja Keuangan		
Tingkat Efisiensi									47.16
Tingkat Efektivitas									156.92

Pada Tabel 3.60 menjelaskan hubungan antara anggaran, efektivitas dan efesiensi kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indicator Kinerja kinerja kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (numerasi) Tahun 2025 Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 atau setara dengan 82.84% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 115.5% dengan penilaian kinerja **sangat baik** yang didukung dengan realisasi keuangan 82.84%, dengan demikian terdapat efesiensi sumber daya sebesar 47.16% dan capaian efektivitas capaian program sebesar 156.92%

5. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) (%)

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) (%) adalah Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X.

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik 58 secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Literasi adalah kemampuan fundamental untuk membaca, menulis, dan memahami informasi, yang kini berkembang menjadi serangkaian keterampilan komprehensif seperti mengakses, menafsirkan, menciptakan, dan berkomunikasi menggunakan berbagai simbol (teks, visual, digital) untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, mencakup literasi dasar hingga literasi digital, sains, finansial, dan budaya.

Literasi dijadikan standar penilaian pendidikan utama, terutama dalam kebijakan arah pendidikan 2026, karena dianggap sebagai fondasi kompetensi yang jauh lebih relevan dibandingkan sekadar hafalan materi. Berikut adalah alasan utama mengapa literasi menjadi standar penilaian pendidikan:

- a. Kemampuan Berpikir Kritis, Literasi bukan sekadar membaca, melainkan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata.
- b. Fondasi Belajar Sepanjang Hayat, Literasi merupakan hak dasar dan instrumen utama yang memungkinkan seseorang terus belajar secara mandiri (life-long learning) guna menghadapi tantangan global yang terus berubah.
- c. Navigasi Informasi Digital, Di era kecerdasan artifisial (AI) dan kelimpahan informasi, standar literasi membantu siswa menyaring (memilah) informasi yang akurat dan etis dari berbagai sumber digital.
- d. Diagnosis Kebutuhan Siswa: Sebagai alat penilaian, literasi membantu pendidik mendiagnosis kemampuan unik setiap peserta didik, memantau kemajuan mereka, dan menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif.
- e. Peningkatan Mutu dan Daya Saing: Capaian literasi menjadi indikator keberhasilan pendidikan nasional (seperti pada hasil PISA) yang menunjukkan kesiapan generasi muda untuk memimpin dan berpartisipasi dalam ekonomi global.

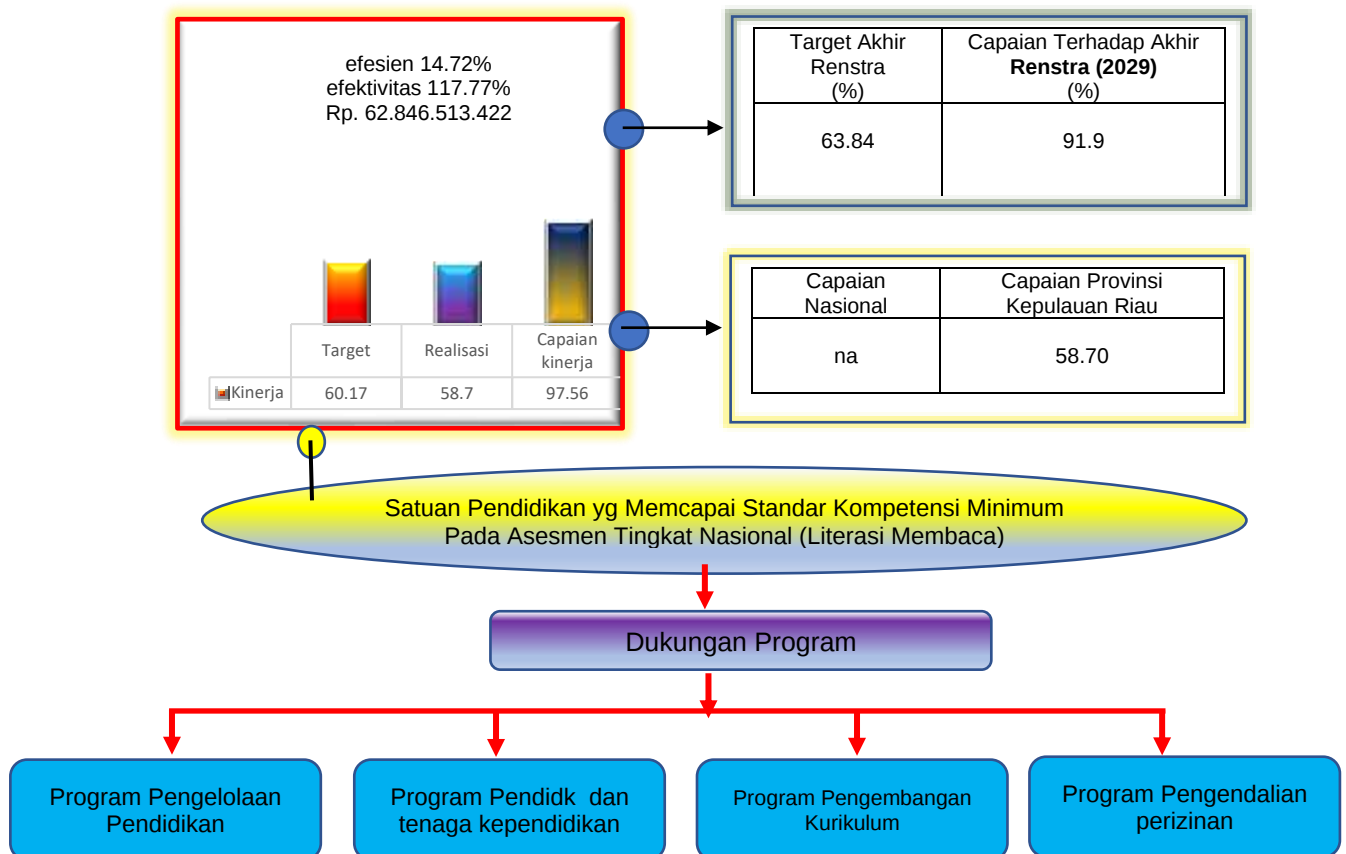
Gambar 3.59
Realisasi Kinerja
Persentase Satuan Pendidikan yg Memcapai Standar Kompetensi Minimum
Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024-2025



Sumber : Rapor Pendidikan 2025

Berdasarkan Gambar 3.59 realisasi kinerja Persentase Satuan Pendidikan yg Memcapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau tercatat pada angka 58.72 atau setara dengan 97.56% dari target kinerja 2025 dengan predikat kinerja Baik.

Grafik 3.60
Capaian Kinerja
Persentase Satuan Pendidikan yg Memcapai Standar Kompetensi Minimum
Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca). Peningkatan tersebut didukung oleh berbagai kebijakan dan program strategis, antara lain penguatan pembelajaran berbasis literasi, peningkatan kompetensi pendidik,

penyediaan sumber belajar yang relevan, serta pemanfaatan hasil Asesmen Nasional sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah turut berperan dalam mendorong pemerataan mutu pendidikan di berbagai wilayah.

Keberhasilan ini tidak hanya menggambarkan peningkatan kemampuan dasar peserta didik dalam memahami, mengevaluasi, dan merefleksikan teks, tetapi juga menjadi indikator membaiknya kinerja sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, capaian kompetensi minimum literasi membaca diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan., **Keberhasilan** pencapaian kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) dipengaruhi oleh beberapa factor pendukung keberhasilan diantaranya sbb :

- a. Penguatan kebijakan pembelajaran berbasis literasi, Implementasi kebijakan yang menekankan penguatan literasi membaca dalam proses pembelajaran mendorong sekolah untuk lebih fokus pada pengembangan kemampuan memahami, menganalisis, dan merefleksikan teks.
- b. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan komunitas belajar guru meningkatkan kapasitas pendidik dalam menerapkan strategi pembelajaran literasi yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik.
- c. Pemanfaatan hasil Asesmen Nasional sebagai dasar perbaikan, Sekolah dan pemerintah daerah memanfaatkan rapor pendidikan dan hasil Asesmen Nasional untuk mengidentifikasi kelemahan pembelajaran literasi dan merancang tindak lanjut yang tepat sasaran.
- d. Ketersediaan dan pemanfaatan sumber belajar yang memadai, Dukungan penyediaan bahan bacaan bermutu, perpustakaan

sekolah, serta sumber belajar digital berkontribusi pada peningkatan minat dan kemampuan membaca peserta didik.

- e. Sinergi dan dukungan pemerintah daerah, Komitmen pemerintah daerah dalam bentuk regulasi, pendanaan, serta program pendukung literasi mempercepat pencapaian standar kompetensi minimum di tingkat kabupaten/kota.
- f. Peningkatan budaya literasi di satuan pendidikan, Pembiasaan kegiatan literasi, seperti membaca sebelum pembelajaran dan penguatan ekosistem literasi sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peningkatan kemampuan membaca.
- g. Monitoring dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala memungkinkan perbaikan kebijakan dan program dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data.

Selain program dan kebijakan utama yang telah dilaksanakan, berbagai upaya pendukung lainnya turut dilakukan untuk memperkuat pencapaian kinerja Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca). Upaya tersebut antara lain melalui penguatan pendampingan satuan pendidikan yang hasil asesmennya masih berada di bawah standar, dengan memberikan intervensi pembelajaran yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong optimalisasi peran komunitas belajar guru dan kepala sekolah sebagai wadah berbagi praktik baik dalam pengembangan pembelajaran literasi. Melalui forum tersebut, pendidik dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kemampuan membaca pemahaman peserta didik.

Selain itu, dilakukan penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan masyarakat, untuk menumbuhkan budaya literasi di luar lingkungan sekolah. Pemanfaatan teknologi dan platform pembelajaran digital juga terus ditingkatkan guna memperluas

akses peserta didik terhadap bahan bacaan yang bervariasi dan berkualitas.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program literasi. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan program, sehingga peningkatan kompetensi minimum literasi membaca dapat dicapai secara berkelanjutan dan merata di seluruh kabupaten/kota, berikut uUpaya lain yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) diantaranya :

- a. Intervensi khusus pada satuan pendidikan berisiko rendah capaian, Pemberian pendampingan intensif, bimbingan teknis, dan supervisi akademik pada sekolah dengan hasil literasi membaca di bawah standar.
- b. Penguatan pembelajaran diferensiasi, Penerapan strategi pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan membaca peserta didik agar siswa dengan kemampuan dasar rendah tetap mendapatkan dukungan optimal.
- c. Pengembangan program literasi berbasis konteks local, Penyediaan bahan bacaan yang relevan dengan budaya dan lingkungan setempat untuk meningkatkan pemahaman dan minat membaca peserta didik.
- d. Optimalisasi peran perpustakaan sekolah dan daerah, Revitalisasi perpustakaan, pojok baca, dan layanan perpustakaan keliling sebagai sarana pendukung pembelajaran literasi.
- e. Pemanfaatan teknologi dan media digital, Penggunaan platform pembelajaran digital, buku elektronik, dan aplikasi literasi untuk memperluas akses bacaan serta meningkatkan keterlibatan peserta didik.
- f. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, Penguatan peran keluarga melalui program membaca di rumah dan keterlibatan komunitas dalam kegiatan literasi.

- g. Penguatan kepemimpinan kepala sekolah, Mendorong kepala sekolah sebagai penggerak literasi untuk memastikan program literasi terintegrasi dalam perencanaan dan budaya sekolah.
- h. Pemberian apresiasi dan diseminasi praktik baik, Penghargaan kepada sekolah/daerah berprestasi dan penyebarluasan praktik baik sebagai motivasi peningkatan kinerja.
- i. Integrasi literasi dalam semua mata pelajaran, Menanamkan aktivitas membaca dan pemahaman teks di seluruh mata pelajaran, tidak hanya pada pelajaran Bahasa Indonesia.
- j. Monitoring berbasis data dan tindak lanjut berkelanjutan, Penguatan pemantauan capaian literasi secara periodik serta penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi.
- k. Penguatan koordinasi lintas sektor, Melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pendataan, pendampingan, dan rujukan anak berkebutuhan khusus.

Tabel 3.61
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja
Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum
Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca).
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)			Target Nasional		
	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)
Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca).	na	na	na	na	na	na	na	na	na	60.17	58.70	97.56	63.84	58.70	91,9	-	-	-

Pertumbuhan capaian kinerja Persentase Satuan pendidikan Yang Mencapai Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Mengalami pertumbuhan positif, realisasi kinerja mencapai 58.70 atau setara dengan 91.9% dari target kinerja tahun 2025.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.62
Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum
Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca).
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

N o	Indikator Sasaran	Sa tuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca).	%	60.17	58.70	97.56	1. Pengelolaan Pendidikan	365.667.258.166	302.915.090.970	82,85
						2. Pengembangan kurikulum	114.475.500	70.519.443	61,60
						3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	187.656.000	153.676.514	81,89
						4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000	26.028.317	61.33
	Caoaian Kinerja					97.56	Capaian Kinerja Keuangan		
Tingkat Efisiensi									14.72
Tingkat Efektivitas									117.77

Pada Tabel 3.62 menjelaskan hubungan antara anggaran, efektivitas dan efisiensi kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Kinerja Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca). sebesar Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 atau setara dengan 82.84% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 97.56 dengan penilaian kinerja **baik** yang didukung dengan realisasi keuangan 82.84%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya sebesar 14.72% dan capaian efektivitas capaian program sebesar 117.77%.

6. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%) adalah Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X.

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik 58 secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Numerasi kemampuan memahami dan menerapkan konsep bilangan serta matematika dasar untuk menganalisis informasi kuantitatif (angka, data, grafik, tabel) dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah praktis serta mengambil keputusan logis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, menjadikannya lebih dari sekadar berhitung biasa.

Manfaat penting dari penelitan diantaranya penerapan Konsep bilangan dan symbol matematika dalam situasi nyata, Interpretasi Data sehingga mampu membaca, menganalisis, dan memahami data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau bagan, Pemecahan Masalah yang Menggunakan logika dan penalaran untuk memecahkan masalah praktis sehari-hari, Pengambilan Keputusan berdasarkan yang tepat berdasarkan analisis informasi kuantitatif, kemampuan yang lebih lebih

Luas dari Berhitung: Melampaui keterampilan dasar menjumlah, mengurangi, mengali, dan membagi, mencakup pemahaman pola dan hubungan antar data.

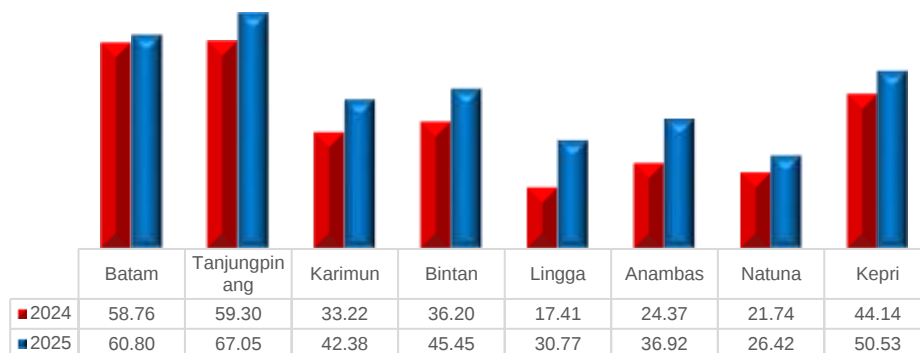
Literasi dijadikan standar penilaian pendidikan utama, terutama dalam kebijakan arah pendidikan 2026, karena dianggap sebagai fondasi kompetensi yang jauh lebih relevan dibandingkan sekadar hafalan materi. Berikut adalah alasan utama mengapa literasi menjadi standar penilaian pendidikan:

- a. Mendukung kemampuan berpikir logis dan kritis, kompetensi numerasi membantu individu memahami pola, hubungan, dan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengambil keputusan secara rasional.
- b. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dengan numerasi yang baik, seseorang dapat menganalisis data, memperkirakan risiko, serta memilih solusi yang paling tepat berdasarkan informasi kuantitatif.
- c. Mendukung pembelajaran lintas mata pelajaran, Numerasi tidak hanya penting dalam matematika, tetapi juga menunjang pemahaman pada mata pelajaran lain seperti sains, ekonomi, dan teknologi.
- d. Membekali keterampilan hidup sehari-hari, Kemampuan numerasi diperlukan dalam mengelola keuangan, membaca grafik, memahami ukuran, waktu, dan perhitungan sederhana yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja, Banyak bidang pekerjaan membutuhkan kemampuan memahami data, statistik, dan perhitungan dasar sebagai bagian dari pengambilan keputusan dan penyelesaian tugas.
- f. Mendukung pembangunan sumber daya manusia, Numerasi yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM yang produktif, adaptif, dan mampu bersaing di era berbasis data dan teknologi.

- g. Mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, Pada tingkat institusi dan pemerintahan, kompetensi numerasi membantu dalam memahami dan memanfaatkan data secara tepat untuk perencanaan dan evaluasi program.

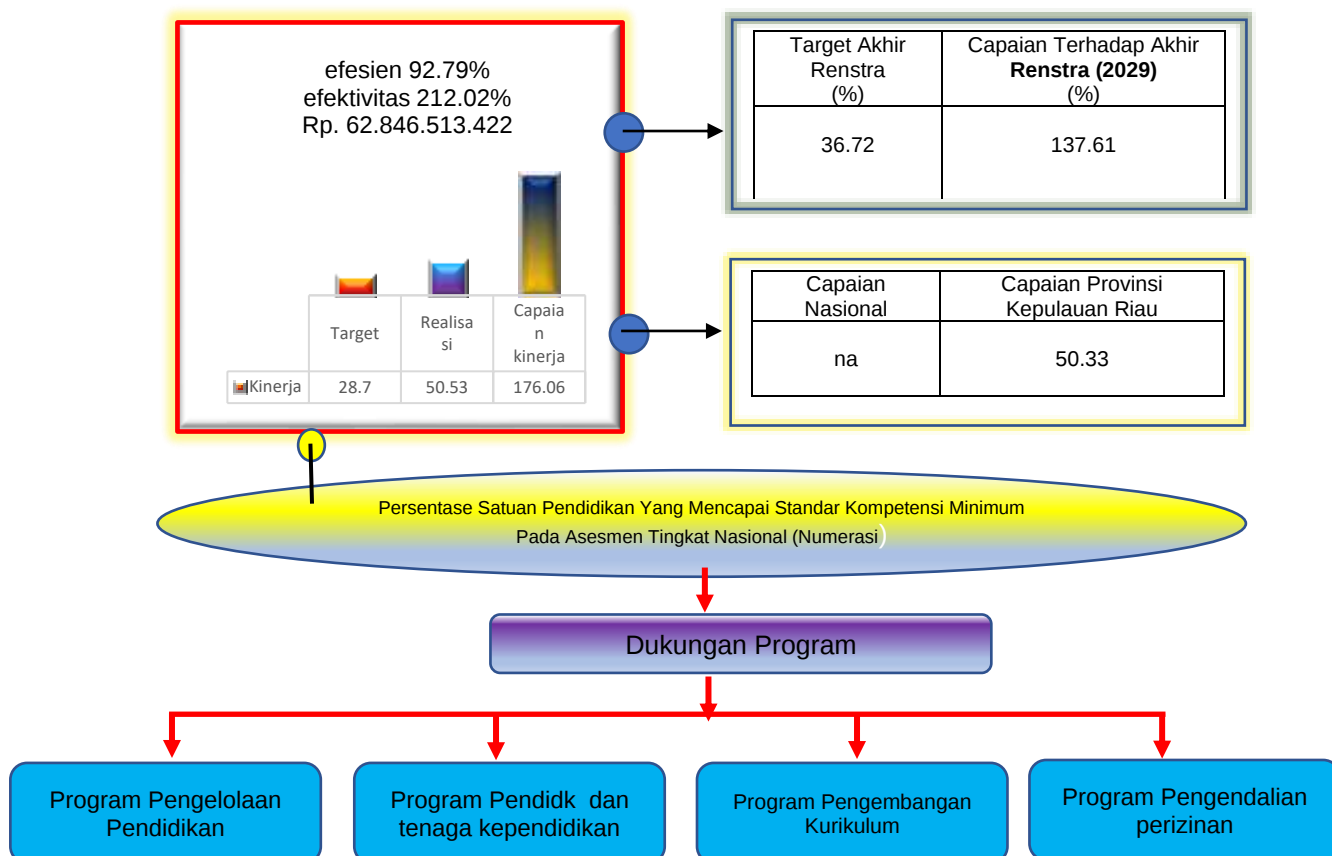
Berdasarkan Gambar 3.61 dibawah ini, Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar Persentase kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) tercatat pada angka 50.53 pencapaian tersebut setara dengan 176.06% dari target kinerja 2025 dan berada pada 137.61% dari target kinerja akhir RENSTRA Dinas Pendidikan tahun 2029.

Gambar 3.61
Capaian Kinerja
Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum
Pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023-2025



Sumber : Rapor Pendidikan 2025

Grafik 3.62
Capaian Kinerja
Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum
Pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%) menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah telah berjalan secara efektif. Capaian ini mencerminkan semakin banyaknya kabupaten/kota yang mampu memenuhi standar kompetensi minimum literasi membaca sesuai dengan ketentuan nasional.

Peningkatan tersebut didukung oleh berbagai kebijakan dan program strategis, antara lain penguatan pembelajaran berbasis literasi, peningkatan kompetensi pendidik, penyediaan sumber belajar yang

relevan, serta pemanfaatan hasil Asesmen Nasional sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah turut berperan dalam mendorong pemerataan mutu pendidikan di berbagai wilayah.

Keberhasilan ini tidak hanya menggambarkan peningkatan kemampuan dasar peserta didik dalam memahami, mengevaluasi, dan merefleksikan teks, tetapi juga menjadi indikator membaiknya kinerja sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, capaian kompetensi minimum literasi membaca diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan., **Keberhasilan** pencapaian kinerja Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%) dipengaruhi oleh beberapa factor pendukung keberhasilan diantaranya sbb :

- a. Penguatan pembelajaran numerasi dalam proses belajar mengajar, Satuan pendidikan di Kepri semakin menerapkan pembelajaran numerasi yang menekankan pemahaman konsep, penalaran, dan pemecahan masalah kontekstual, tidak hanya hafalan rumus.
- b. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan, Guru memperoleh penguatan kapasitas melalui pelatihan, komunitas belajar, dan pendampingan pembelajaran, sehingga mampu mengimplementasikan strategi pembelajaran numerasi yang lebih efektif.
- c. Pemanfaatan hasil Asesmen Nasional sebagai dasar perbaikan, Pemerintah daerah dan sekolah memanfaatkan Rapor Pendidikan untuk mengidentifikasi kelemahan capaian numerasi dan menyusun tindak lanjut yang terarah dan berbasis data.
- d. Dukungan kebijakan dan program pemerintah daerah, Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan,

termasuk alokasi anggaran dan program pendukung numerasi, berkontribusi terhadap pencapaian kompetensi minimum.

- e. Penguatan peran kepala sekolah dan manajemen satuan pendidikan
Kepemimpinan, kepala sekolah dalam mengarahkan program pembelajaran, supervisi akademik, dan penguatan budaya numerasi menciptakan iklim belajar yang kondusif.
- f. Ketersediaan dan pemanfaatan sarana pendukung pembelajaran,
Pemanfaatan buku ajar, alat peraga, serta sumber belajar digital membantu peserta didik memahami konsep numerasi secara lebih konkret dan aplikatif.
- g. Budaya belajar dan motivasi peserta didik yang semakin baik,
Pembiasaan aktivitas numerasi dalam berbagai mata pelajaran serta dukungan lingkungan sekolah dan keluarga meningkatkan keterlibatan
- h. Monitoring dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala memungkinkan perbaikan kebijakan dan program dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data.

Selain program dan kebijakan utama yang telah dilaksanakan, berbagai upaya pendukung lainnya turut dilakukan untuk memperkuat pencapaian kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (numerasi). Upaya tersebut antara lain melalui penguatan pendampingan satuan pendidikan yang hasil asesmennya masih berada di bawah standar, dengan memberikan intervensi pembelajaran yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong optimalisasi peran komunitas belajar guru dan kepala sekolah sebagai wadah berbagi praktik baik dalam pengembangan pembelajaran literasi. Melalui forum tersebut, pendidik dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kemampuan membaca pemahaman peserta didik.

Selain itu, dilakukan penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan masyarakat, untuk menumbuhkan budaya literasi di luar lingkungan sekolah. Pemanfaatan teknologi dan platform pembelajaran digital juga terus ditingkatkan guna memperluas akses peserta didik terhadap bahan bacaan yang bervariasi dan berkualitas.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program literasi. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan program, sehingga peningkatan kompetensi minimum literasi membaca dapat dicapai secara berkelanjutan dan merata di seluruh kabupaten/kota, berikut uUpaya lain yang dilakukan dalam mendukung pencapaian Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%) diantaranya :

- a. Intervensi khusus pada satuan pendidikan berisiko rendah capaian, Pemberian pendampingan intensif, bimbingan teknis, dan supervisi akademik pada sekolah dengan hasil literasi membaca di bawah standar.
- b. Program Intervensi Numerasi Berbasis Data Sekolah, Mengembangkan intervensi khusus bagi satuan pendidikan dengan capaian numerasi rendah berdasarkan Rapor Pendidikan, melalui pendampingan intensif dan rencana tindak lanjut yang terukur.
- c. Penguatan Numerasi Kontekstual Kepulauan dan Maritim, Mengintegrasikan konteks lokal Kepri (kemaritiman, perdagangan, transportasi laut, pariwisata) dalam pembelajaran numerasi agar lebih relevan dan mudah dipahami peserta didik.
- d. Pengembangan Pusat Belajar Guru Numerasi (Numeracy Hub), Membentuk pusat pengembangan profesional guru numerasi tingkat provinsi/kabupaten sebagai wadah berbagi praktik baik, pengembangan modul, dan inovasi pembelajaran.

- e. Integrasi Numerasi di Semua Mata Pelajaran, Mendorong penerapan numerasi lintas mata pelajaran (IPA, IPS, Prakarya, Ekonomi) agar siswa terbiasa menggunakan data, grafik, dan perhitungan dalam berbagai konteks.
- f. Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran Adaptif, Mengembangkan atau memanfaatkan platform digital yang menyediakan latihan numerasi adaptif sesuai tingkat kemampuan peserta didik, termasuk untuk wilayah kepulauan terpencil.
- g. Penguatan Literasi Data dan Statistik Dasar Memperkenalkan pemahaman data sederhana, grafik, dan peluang sejak jenjang dasar sebagai bekal menghadapi asesmen dan kebutuhan masa depan berbasis data.
- h. Program Numerasi Keluarga dan Komunitas, Melibatkan orang tua dan masyarakat melalui program numerasi di rumah dan kegiatan berbasis komunitas agar pembelajaran numerasi berlanjut di luar sekolah.
- i. Penguatan Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Kinerja Numerasi, Mengaitkan perencanaan sekolah dan supervisi akademik dengan target peningkatan numerasi sebagai indikator kinerja satuan pendidikan.
- j. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan Tingkat Daerah, Melakukan pemantauan capaian numerasi secara berkala di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas program.
- k. Pemberian Insentif dan Apresiasi Kinerja Numerasi, Memberikan penghargaan kepada sekolah dan daerah yang menunjukkan peningkatan signifikan sebagai motivasi dan contoh praktik baik.
- l. Penguatan pembelajaran diferensiasi, Penerapan strategi pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan membaca peserta didik agar siswa dengan kemampuan dasar rendah tetap mendapatkan dukungan optimal.

- m. Pengembangan program numerasi berbasis konteks local, Penyediaan bahan bacaan yang relevan dengan budaya dan lingkungan setempat untuk meningkatkan pemahaman dan minat membaca peserta didik.
- n. Monitoring berbasis data dan tindak lanjut berkelanjutan, Penguatan pemantauan capaian numerasi secara periodik serta penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi.

Tabel 3.63
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum
pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2030)			Target Nasional		
	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)
Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi)	na	na	na	na	na	na	na	na	na	28.77	50.53	176.06	36.71	50.53	137.61	-	-	-

Pertumbuhan capaian kinerja Persentase Satuan pendidikan Yang Mencapai Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Mengalami pertumbuhan positif, realisasi kinerja mencapai 50.53 atau setara dengan 176.06% dari target kinerja tahun 2025.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melakukan efisiensi, efisiensi yang berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.64
Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum
pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

N o	Indikator Sasaran	Sa tuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi)	%	28.77	50.53	176.63	5. Pengelolaan Pendidikan	365.506.727.766	302.819.547.956	82,85
						6. Pengembangan kurikulum	114.475.500	70.519.443	61,60
						7. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	187.656.000	153.676.514	81,89
						8. Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000	26.028.317	61.33
	Caoaian Kinerja					176.63	Capaian Kinerja Keuangan		
Tingkat Efisiensi									92.79
Tingkat Efektivitas									212.02

Pada Tabel 3.64 menjelaskan hubungan antara anggaran, efektivitas dan efisiensi kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Kinerja Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi) Tahun 2025 sebesar Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 atau setara dengan 82.84% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 92.79 dengan penilaian kinerja **sangat baik** yang didukung dengan realisasi keuangan 82.84%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya sebesar 92.79% dan capaian efektivitas capaian program sebesar 212.02%

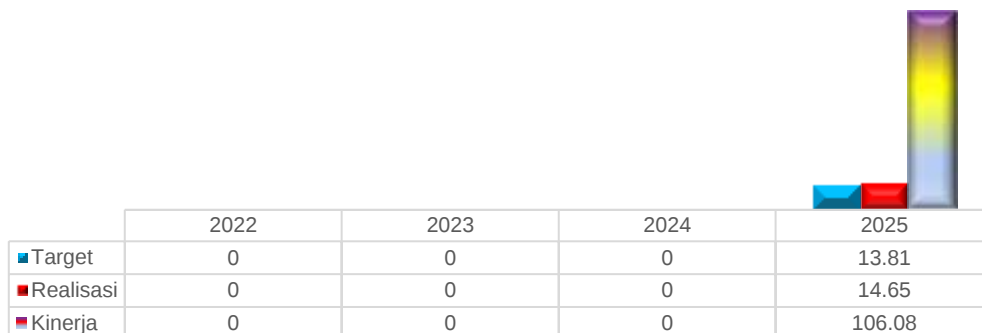
7. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan tinggi mencakup Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan dan S3.

Dampak positifnya dari tingginya nilai proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi ditandai dengan kualitas SDM, daya saing, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi, karena penduduk berkualifikasi tinggi lebih produktif dan adaptif terhadap teknologi, tetapi tantangannya adalah potensi pengangguran terdidik (mismatch skill & lowongan) jika tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja berkualitas, sehingga diperlukan sinergi antara dunia pendidikan dan industri untuk menyerap tenaga kerja terdidik .

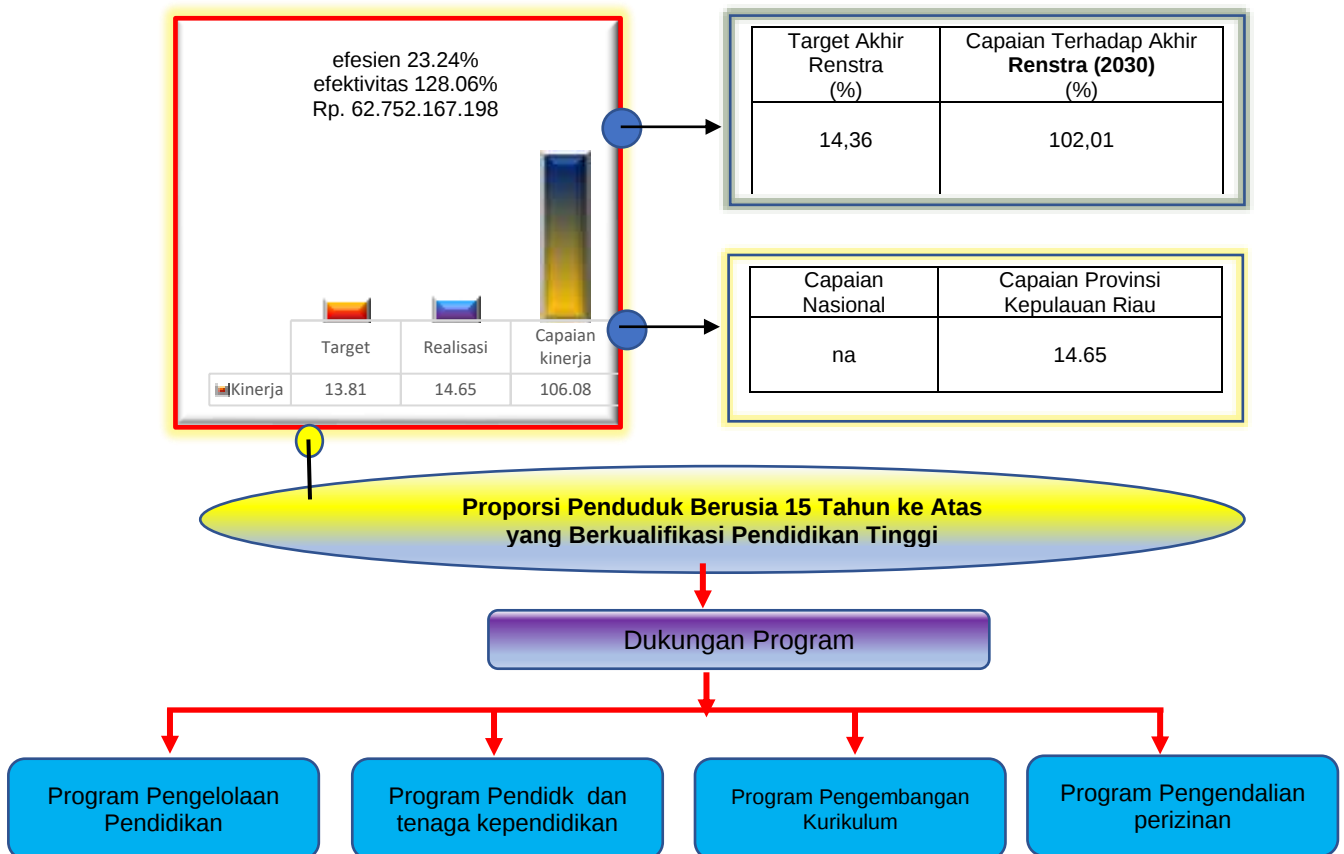
Berdasarkan Grafik 3.63 capaian kinerja Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) di Provinsi Kepulauan Riau tercatat pada angka 14,65 pencapaian tersebut setara dengan 106,08 dari capaian kinerja dengan penilaian kinerja **Sangat Baik**.

Gambar 3.63
Realisasi Kinerja
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas
yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : BPS Kepri 2025

Grafik 3.64
Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah telah berjalan secara efektif. Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator Persentase Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi menunjukkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Capaian ini mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan lanjutan dalam mendukung daya saing individu dan pembangunan daerah.

Peningkatan indikator tersebut didukung oleh berbagai faktor, antara lain tersedianya fasilitas pendidikan tinggi yang lebih merata, program bantuan pendidikan dan beasiswa, serta sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Selain itu, kebijakan afirmatif bagi kelompok kurang mampu turut berperan dalam memperluas partisipasi pendidikan tinggi.

Secara keseluruhan, keberhasilan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan pengangguran terdidik, serta penguatan kapasitas inovasi dan ekonomi daerah. Dengan capaian tersebut, diharapkan kontribusi penduduk berpendidikan tinggi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi dapat terus meningkat di masa mendatang. Beberapa factor yg mempengaruhi keberhasilan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi sbb :

- a. Jumlah dan mutu pendidikan Tinggi, akses dan sebaran pendidikan tinggi yang terus meningkat, baik negeri maupun swasta, serta tersedianya program pendidikan jarak jauh dan kelas daring, mempermudah masyarakat usia 15 tahun ke atas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Dukungan Kebijakan dan Program Pemerintah, Adanya program beasiswa, bantuan biaya pendidikan (KIP Kuliah, beasiswa daerah), serta kebijakan afirmatif bagi masyarakat kurang mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan partisipasi pendidikan tinggi.
- c. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga mendorong kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan tinggi, sehingga angka partisipasi pendidikan lanjutan meningkat.
- d. Kesadaran dan Motivasi Masyarakat terhadap Pendidikan, Semakin tingginya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan tinggi bagi peningkatan kualitas hidup dan peluang kerja turut mempengaruhi keputusan melanjutkan pendidikan.

- e. Ketersediaan Sarana Pendukung, Dukungan infrastruktur seperti teknologi informasi, jaringan internet, dan fasilitas pembelajaran yang memadai membantu proses pembelajaran, khususnya bagi penduduk usia kerja.
- f. Kebutuhan Pasar Kerja, Tuntutan dunia kerja terhadap tenaga kerja berpendidikan tinggi mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan agar lebih kompetitif.
- g. Peran Dunia Usaha dan Industri, Kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri, termasuk program magang dan penyerapan lulusan, meningkatkan minat masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi.

Selain program dan kebijakan utama yang telah dilaksanakan, berbagai upaya pendukung lainnya turut dilakukan untuk memperkuat pencapaian Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) dimasa datang sbb :

- a. Akses Pendidikan Tinggi yang Inklusif, mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi melalui pengembangan perguruan tinggi di daerah, kelas satelit, serta pemanfaatan sistem pembelajaran daring dan hybrid.
- b. Peningkatan Dukungan Pembiayaan Pendidikan, memperluas cakupan program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan, serta memperkuat kerja sama pendanaan dengan sektor swasta.
- c. Penguatan Program Pendidikan Nonreguler, mengembangkan program pendidikan tinggi nonreguler, kelas malam, dan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) untuk memberikan kesempatan bagi penduduk usia kerja melanjutkan pendidikan.
- d. Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Tinggi, mendorong peningkatan mutu perguruan tinggi dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan memiliki daya saing yang tinggi.

- e. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, **meningkatkan** sosialisasi mengenai manfaat pendidikan tinggi serta informasi jalur masuk dan bantuan pendidikan kepada masyarakat sejak usia sekolah menengah.
- f. Peningkatan Sinergi dengan Dunia Usaha dan Industri, memperluas kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha/industri dalam penyediaan program magang, beasiswa ikatan dinas, dan penyerapan lulusan.
- g. Pemanfaatan Data dan Teknologi Informasi, mengoptimalkan penggunaan data pendidikan untuk pemetaan sasaran serta pengembangan sistem informasi pendidikan guna mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Tabel 3.65
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)			Target Nasional		
	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	na	na	na	na	na	na	na	na	na	13,81	14,65	106,08	14,36	14,65	102,01	na	na	na

Capaian kinerja Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkwalifikasi tinggi di Kepulauan Riau tahun 2025 menunjukkan trend yang sangat baik, capaian kinerja tercatat pada angka 14,65 melebihi dari target 13,81 dengan demikian kinerja pada tahun 2025 sebesar 102,01%.

Capaian kinerja Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkwalifikasi tinggi di Kepulauan Riau pada akhir RENSTRA 2025-2029 tercatat sangat baik, hingga tahun 2025 capaian kinerja Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkwalifikasi tinggi hingga akhir RENSTRA tercatat 14,65

Efektivitas program dan efisiensi anggaran memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Efektivitas program menunjukkan sejauh mana program mampu mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi anggaran mencerminkan kemampuan memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal untuk menghasilkan output dan outcome yang maksimal.

Program yang efektif tidak hanya berfokus pada terserapnya anggaran, tetapi pada keberhasilan pencapaian hasil yang diharapkan. Sementara itu, efisiensi anggaran memastikan bahwa pencapaian tersebut diperoleh dengan biaya yang proporsional dan tidak berlebihan. Dengan demikian, semakin efektif suatu program, maka anggaran yang digunakan cenderung lebih efisien karena dialokasikan pada kegiatan yang tepat sasaran.

Sebaliknya, penggunaan anggaran yang efisien mendukung peningkatan efektivitas program, karena sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan kegiatan, meningkatkan kualitas pelaksanaan, dan meminimalkan pemborosan. Keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi indikator penting dalam menilai kinerja program secara menyeluruh. Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkwalifikasi tinggi Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkwalifikasi tinggi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.66
Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Sasaran Kinerja Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkwalifikasi Tinggi
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkwalifikasi tinggi	Angka	13,81	14,65	106,08	1. Pengelolaan Pendidikan	365.506.727.766	302.819.547.956	82,85
						2. Pengembangan kurikulum	114.475.500	70.519.443	61,60
						3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	187.656.000	153.676.514	81,89
						4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000	26.028.317	61,33
	Caoaian Kinerja					106,08	Capaian Kinerja Keuangan		
Tingkat Efisiensi									23.24
Tingkat Efektivitas									128.06

Pada Tabel 3.67 menjelaskan hubungan antara anggaran, efektivitas dan efisiensi kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Kinerja Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkwalifikasi Pendidikan Tinggi (%) Tahun 2025 sebesar Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 atau setara dengan 82.84% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 106.08% dengan penilaian kinerja **sangat baik** yang didukung dengan realisasi keuangan 82.84%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya sebesar 23.24% dan capaian efektivitas capaian program sebesar 128.06%

8. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) adalah Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.

Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi
- Tidak/Belum Tamat SD - SD/MI/SDLB/Paket A - SMP/MTS/SMPLB/Paket B	- SMA/MA/SMALB/Paket C - SMK - MAK	- Diploma I sd IV - S1 - S2 - S2 Terapan - S3

Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.

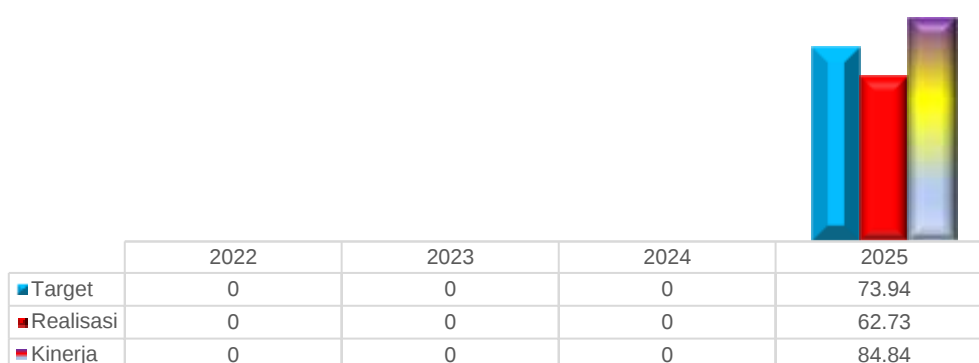
Indikator ini mengukur persentase pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja pada bidang

pekerjaan yang sesuai dengan tingkat keahlian menengah hingga tinggi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian (*link and match*) antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Tingginya capaian indikator ini menunjukkan bahwa lulusan pendidikan menengah dan tinggi mampu terserap di dunia kerja sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Hal ini menjadi tolok ukur keberhasilan sistem pendidikan dan pelatihan dalam menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Manfaat dari indikator ini menggambarkan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan menengah dan tinggi, Menjadi dasar evaluasi kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan, Mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah dan Menekan angka *underemployment* dan mismatch tenaga kerja

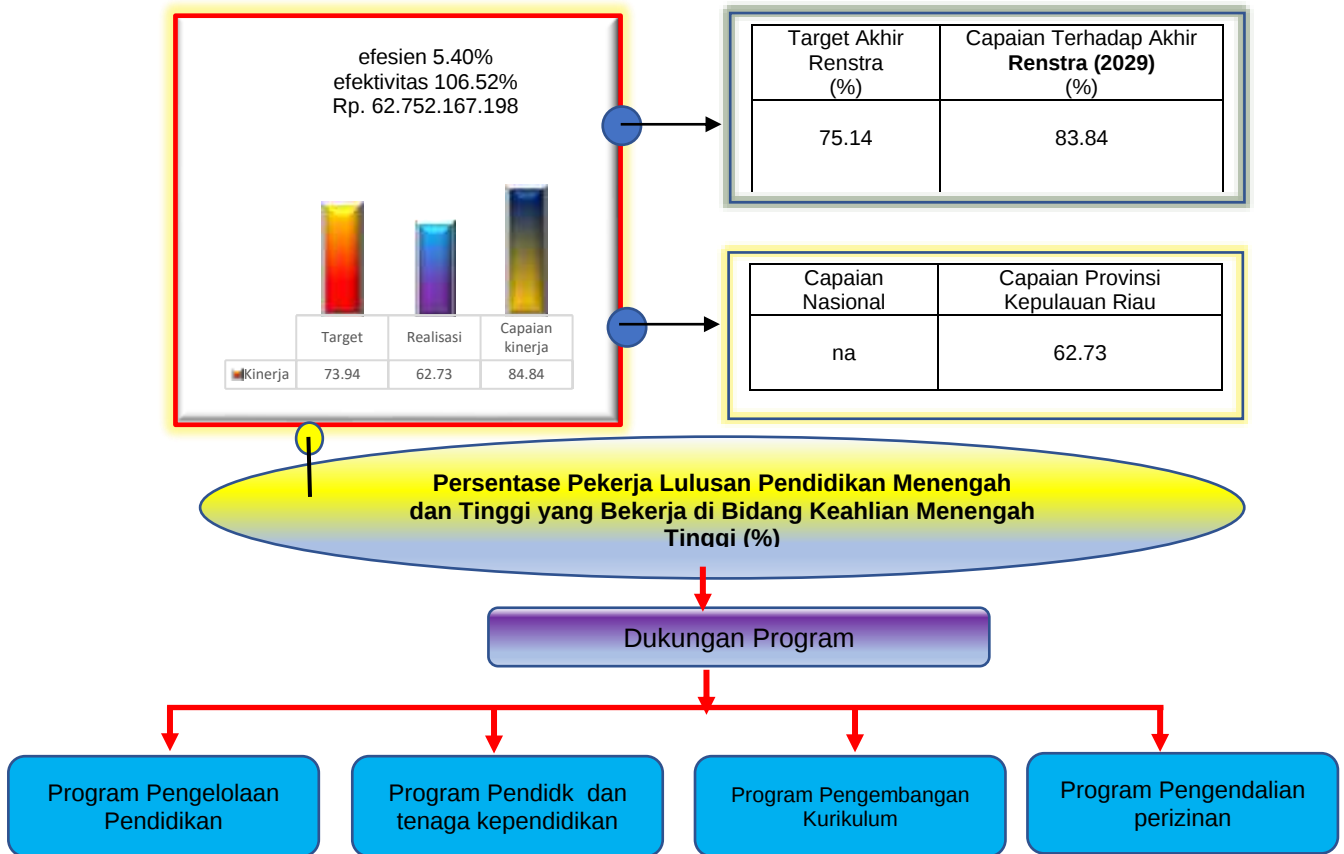
Berdasarkan Gambar 3.68 capaian kinerja Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi di Provinsi Kepulauan Riau tercatat pada angka 62.73 pencapaian tersebut setara dengan 84.84% dari target kinerja tahun 2025 dengan penilaian kinerja **Baik**.

Gambar 3.68
Realisasi Kinerja
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah
dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : BPS Kepri 2026

Gambar 3.66
Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah
dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan indikator ini menggambarkan proporsi tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan menengah dan tinggi terhadap total pekerja. Indikator ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia serta tingkat partisipasi lulusan pendidikan menengah dan tinggi dalam pasar kerja.

Semakin tinggi persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi menunjukkan meningkatnya daya saing tenaga kerja, kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta peluang peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Indikator ini juga

menjadi cerminan keberhasilan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten.

Persentase ini dipengaruhi oleh tingkat akses pendidikan, kebutuhan pasar kerja, kondisi ekonomi, serta efektivitas program pelatihan dan penempatan kerja. Oleh karena itu, peningkatan indikator ini memerlukan sinergi antara sektor pendidikan, pelatihan, dan dunia usaha.

Secara keseluruhan, keberhasilan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan pengangguran terdidik, serta penguatan kapasitas inovasi dan ekonomi daerah. Dengan capaian tersebut, diharapkan kontribusi penduduk berpendidikan tinggi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi dapat terus meningkat di masa mendatang. Beberapa factor yg mempengaruhi **keberhasilan/kegagalan** kinerja Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi sbb :

- a. Ketidaksesuaian (Mismatch) antara pendidikan dan pekerjaan. lulusan pendidikan menengah atau tinggi bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan keahliannya. Hal ini disebut **education-job mismatch**, yaitu ketika latar belakang pendidikan tidak selaras dengan jenis pekerjaan yang diperoleh. Fenomena ini cukup umum di Indonesia, terutama pada lulusan sekolah kejuruan yang banyak bekerja di bidang lain.
- b. Keterbatasan lapangan pekerjaan yang sesuai, ketersediaan lapangan pekerjaan yang membutuhkan **keahlian menengah-tinggi** seringkali tidak sebanding dengan jumlah lulusan. Akibatnya lulusan terpaksa bekerja pada pekerjaan dengan tingkat keahlian lebih rendah atau di sektor informal.
- c. Tingginya pengangguran lulusan tertentu, di Kepulauan Riau, tingkat pengangguran relatif tinggi pada lulusan tertentu yang menunjukkan bahwa tidak semua lulusan dapat langsung terserap di dunia kerja sesuai bidangnya.

- d. Kurangnya pelatihan dan peningkatan keterampilan, sebagian besar pekerja di Indonesia tidak mendapatkan pelatihan kerja setelah masuk ke dunia kerja. Hanya sebagian kecil tenaga kerja yang memperoleh pelatihan formal dari perusahaan, sehingga peningkatan keterampilan menjadi terbatas.
- e. Kualitas dan relevansi pendidikan, kesesuaian kurikulum pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi dan dukungan transformasi teknologi terbaru. Hal ini menyebabkan lulusan memiliki keterampilan yang kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- f. Struktur ekonomi daerah, struktur ekonomi Kepulauan Riau masih didominasi oleh sektor tertentu seperti industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Jika sektor tersebut tidak membutuhkan banyak tenaga kerja berkeahlian tinggi, maka lulusan pendidikan tinggi bisa bekerja pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya.
- g. Kurangnya informasi pasar kerja, minimnya informasi tentang kebutuhan tenaga kerja membuat lulusan sulit memilih bidang studi atau pekerjaan yang sesuai dengan permintaan pasar.

Untuk meningkatkan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja pada bidang keahlian menengah–tinggi di Kepulauan Riau, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industry, Pemerintah daerah perlu mendorong sekolah menengah dan perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Kerja sama dengan industri penting agar lulusan memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan.
- b. Memperkuat program link and match pendidikan–industry, Program magang, praktik kerja industri, dan teaching factory perlu diperluas. Dengan demikian, lulusan memiliki pengalaman kerja dan lebih mudah terserap pada pekerjaan yang sesuai bidang keahlian.

- c. Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, Pekerja perlu diberikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi profesi agar kompetensi mereka diakui dan sesuai dengan standar industri.
- d. Mengembangkan sektor ekonomi berbasis keahlian tinggi, Pemerintah daerah perlu mendorong investasi pada sektor yang membutuhkan **tenaga kerja terampil**, seperti industri manufaktur maju, teknologi, logistik, dan ekonomi digital.
- e. Penguatan informasi pasar kerja, Penyediaan **informasi pasar kerja yang akurat** dapat membantu lulusan mengetahui bidang pekerjaan yang banyak dibutuhkan sehingga mereka dapat memilih pendidikan atau pelatihan yang tepat.
- f. Penguatan peran lembaga pelatihan kerja, Balai latihan kerja dan lembaga pelatihan swasta perlu diperkuat agar mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan industri.
- g. Mendorong kewirausahaan berbasis keahlian, Lulusan pendidikan menengah dan tinggi juga perlu didorong untuk **menciptakan usaha sendiri sesuai bidang keahlian**, sehingga tidak hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tabel 3.67
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Dan Tinggi Yang Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)			Target Nasional		
	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian Kinerja (%)
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	na	na	na	na	na	na	na	na	na	73,94	62.73	84.84	75.14	62.73	83.84	na	na	na

Capaian kinerja **Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi** di Kepulauan Riau tahun 2025 menunjukkan tercatat pada angka 62.73% atau setara dengan 84.84% dari target kinerja tahun 2025

Capaian kinerja Proporsi penduduk **Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi** di Kepulauan Riau pada akhir RENSTRA 2026-2029 dengan capaian 83.84 dari target akhir renstra.

Efektivitas program dan efisiensi anggaran memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Efektivitas program menunjukkan sejauh mana program mampu mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi anggaran mencerminkan kemampuan memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal untuk menghasilkan output dan outcome yang maksimal.

Program yang efektif tidak hanya berfokus pada terserapnya anggaran, tetapi pada keberhasilan pencapaian hasil yang diharapkan. Sementara itu, efisiensi anggaran memastikan bahwa pencapaian tersebut diperoleh dengan biaya yang proporsional dan tidak berlebihan. Dengan demikian, semakin efektif suatu program, maka anggaran yang digunakan cenderung lebih efisien karena dialokasikan pada kegiatan yang tepat sasaran.

Sebaliknya, penggunaan anggaran yang efisien mendukung peningkatan efektivitas program, karena sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan kegiatan, meningkatkan kualitas pelaksanaan, dan meminimalkan pemborosan. Keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi indikator penting dalam menilai kinerja program secara menyeluruh. Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai target yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, dan sarana) untuk mencapai hasil tersebut dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efektivitas menekankan pada **hasil (output dan outcome)**, sedangkan efisiensi menekankan pada **proses dan penggunaan input**. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi harus memperhatikan **keduanya secara seimbang**.

Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas untuk indikator kinerja **Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi** di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.68
Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Sasaran Kinerja Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkwalifikasi Tinggi
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Angka	73.94	62.73	84.84	1. Pengelolaan Pendidikan	365.506.727.766	302.819.547.956	82,85
						2. Pengembangan kurikulum	114.475.500	70.519.443	61,60
						3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	187.656.000	153.676.514	81,89
						4. Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000	26.028.317	61.33
	Caoaian Kinerja					84.84	Capaian Kinerja Keuangan		
Tingkat Efisiensi									2.00
Tingkat Efektivitas									102.41

Pada Tabel 3.68 menjelaskan hubungan antara anggaran, efektivitas dan efisiensi kinerja. Pagu anggaran untuk mendukung indikator Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) Tahun 2025 sebesar Rp 366.011.828.666 dan direalisasikan sebesar Rp. 303.165.315.244 atau setara dengan 82.84% dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data-data dimaksud dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tercatat pada angka 84.84% dengan penilaian kinerja **baik** yang didukung dengan realisasi keuangan 91.26%, dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya sebesar 2.00% dan capaian tefektivitas capaian program sebesar 102.41.

3.5.3. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja dapat diwujudkan melalui pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dijabarkan dalam kegiatan LAKIP dan Kinerja Indikator Utama, kedua alat ukur tersebut mencerminkan pencapaian secara umum hasil kinerja yang diuraikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. IKU merupakan prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA. Penetapan IKU bertujuan untuk Mendapatkan informasi kinerja yang penting untuk menyelenggarakan manajemen kinerja dan memperoleh ukuran keberhasilan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut pencapaian Nilai SAKIP dan capaian kinerja indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sbb :

3.5.3.1. Kinerja IKU Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja kualitas dan efektivitas organisasi perangkat daerah merupakan capaian kinerja secara keseluruhan dengan penilaian akhir pada capaian kinerja akhir periode berjalan. Pengukuran ini membandingkan berapa banyak capaian kinerja program yang mencapai target dan menganalisa capaian kinerja dengan membandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan.

Pengukuran kinerja Indikator Utama menggambarkan seberapa besar capaian kinerja secara keseluruhan, hal ini menunjukkan nilai keberhasilan organisasi mencapai target kinerja yang didukung dengan personil yang tersedia, anggaran yang digunakan dan strategi yang tepat digunakan dalam pencapaian kinerja. Berikut capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb

Tabel 3.69
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
s/d Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
I	Meningkatnya mutu pendidikan	SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi min B	84	84,25	100,30	Sangat Baik
		Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	97,40	97,43	100,03	Sangat Baik
		Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/kedinasan	34	48,07	141,38	Sangat Baik
		Tingkat penyerapan lulusan SMK yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Kerjas (IDUKA)	40	83.42	208,55	Sangat Baik
		Persentase PTK mengikuti Diklat untuk peningkatan kompetensi	12,60	28.55	226,58	Sangat Baik
	Meningkatnya Akses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	99.50	91,01	92,47	Baik
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ma	81.00	76,12	93.98	Baik
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	88.00	126,29	145.35	Sangat Baik
		Rasio Siswa Perkelas SMA/MA/SMK/MAK	1:36	32	112,5	Sangat Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Persentase capaian IKU Dinas Pendidikan	92,5		138.78	Sangat Baik

Pada tahun 2025, merupakan masa transisi dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan provinsi Kepulauan Riau 2021-2026, pada tahun 2025 dilakukan perubahan indicator kinerja pada perangkat daerah sesuai dengan regulasi yang ada dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029. Perubahan indicator perangkat daerah disesuaikan sesuai dan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025. Indikator kinerja Dinas Pendidikan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2025-2029 sbb :

Tabel 3.70
Perjanjian Kinerja Transisi Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
(Rentra 2025-2029)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Predikat
I	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,28	13.28	100	Baik
		Rata-Rata Lama Sekolah >15 Tahun	Tahun	10.90	10.78	98.89	Baik
	Meningkatnya Pemerataan akses dan Kualitas layanan pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (APS)	%	100	88.24	88.24	Baik
		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	100	117.38	117.38	Sangat Baik
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca)	%	47.50	50.36	106.02	Sangat Baik
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)	%	28.57	37.14	130.00	Sangat Baik
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) (%)	%	60.17	57.70	97.56	Baik
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada	%	28.77	50.53	176.06	Sangat Baik

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Predikat
		asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)					
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))	%	13.81	14.65	106.08	Sangat Baik
		Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	%	73,94	62.73	84.84	Baik

3.5.3.2. Capaian Efisiensi Kinerja dan Capaian Program Dinas Pendidikan

Efisiensi sumber daya anggaran adalah kemampuan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin, efisiensi sumber daya anggaran bertujuan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu atau pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan tujuan organisasi. Efisiensi sumber daya anggaran penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara optimal. Efisiensi sumber daya anggaran dapat meningkatkan hasil penggunaan anggaran dan mendukung kesejahteraan masyarakat

Pencapaian kinerja atau pencapaian program merupakan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau pencapaian target yang telah disepakaiti sebelumnya, pencapaian kinerja mencerminkan kemampuan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Sumber daya berkaitan erat dengan target yang ditentukan, efesiensi sumber daya yang seminimal mungkin memerlukan strategi dalam pencapaian target kinerja.

Tabel 3.71
Analisa Tingkat Efisiensi Sumber Daya dan Efektivitas Program
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satua n	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realis asi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)	%	91,5	138.78	138.78	1. Program Penunjang Urusan pemerintah provinsi	695.616.579.023	663.443.797.702	95,37
						2. Pengelolaan Pendidikan	377.526,999,967	357.186.005.919	95,46
						3. Pengembangan kurikulum	405,402,792	331,001,647	81,65
						4. Pendidik dan Kependidikan	379.760,000	321.180,012	84,57
						5. Pengendalian Perizinan Pendidikan	63.630.400	61,758,400	97,06
Caoaian Kinerja					138.78	Capaian Kinerja Keuangan			92.65
Tingkat Efisiensi									46.12
Tingkat Efektivitas									149.79

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi sumber daya dan efektivitas program yang dijabarkan pada Tabel 3.71 dapat disimpulkan bahwa, capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang terdiri dari **9 indikator** mencapai 138.78% yang terdiri **5 indikator** dengan penilaian kinerja **BAIK** dan **5 Indikator** kinerja dengan penilaian **SANGAT BAIK**.

Capaian tingkat efisiensi sumber daya berada pada angka 24.86%, capaian ini menunjukan bahwa dilakukan penghematan sumber daya/anggaran sebesar 46.12% untuk mencapai capaian kinerja 138.78% dan pencapaian efektivitas program 149.79%

3.6. Kinerja Anggaran

Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas, fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola oleh satuan kerja bersangkutan. Fungsi ini untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan, penyusunan reviu angka dasar, penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan.

Pada tahun 2025, anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 1.031.118.270.120.30 dengan realisasi belanja 1.015.880.356.358.38 atau setara dengan 98.52% dari total anggaran. Berikut alokasi anggaran dan realisasi pada tahun 2025 sbb :

Tabel 3.72
Program dan Dukungan Anggaran
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2025

No	Program	Pagu Anggaran		
		APBDP	Realisasi	%
I	DINAS PENDIDIKAN	1.031.118.270.120.30	1.015.880.356.358.38	98,52
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	663.646.811.326.71	667.003.508.042.63	100,51
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	365.332.687.666.79	347.171.060.242.89	95,03
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	114.475.500.00	70.519.443.00	61.60
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	187.565.000.00	153.676.514.00	81.89
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	42.439.000.00	26.028.317.00	61.33

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pemenuhan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai terhadap pertanggungjawaban keuangan dan capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2025- 2029.

isu-isu strategis dalam peningkatan akses dan layanan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau diantaranya adanya Ketimpangan Akses dan Mutu Pendidikan antar wilayah dan antar satuan Pendidikan, keterbatasan anggaran sehingga belum semua fasilitas pendidikan dapat dipenuhi kebutuhannya, distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang belum merata, terutama pada daerah terluar dan perbatasan., transformasi digitalisasi Pendidikan yang belum optimal., rendahnya profesionalitas tenaga pendidik, hal ini dicerminkan masih rendahnya kepemilikan sertifikasi guru di satuan Pendidikan., pemenuhan standar lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri (IDUKI), masih terbatasnya jumlah guru produktif (guru kompetensi) dan kurangnya kuantitas, pemerataan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus., pengelolaan manajemen asset pada satuan Pendidikan (Tanah/Gedung) yang sebagian belum berkekuatan hukum (belum bersertifikat) dan terbatasnya

penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran berbasis konten serta berbagai isu lainnya.

Pada tahun 2025 anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 1.031.118.270.120.30 dengan realisasi belanja 1.015.880.356.358.38 atau setara dengan 98.52% dari total anggaran. Struktur belanja Dinas Pendidikan pada tahun 2025 terdiri atas belanja Gaji dan tunjangan 66%, Belanja modal 11%, Belanja barang dan jasa 19% dan belanja hibah 4%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan yang memuat informasi pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah mengenai hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran dalam satu periode tertentu. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada public sebagai bagian dari transparansi public dalam mengukur kinerja organisasi, evaluasi dan dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah Meningkatnya Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan dengan 8 indicator kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja sbb **1)** Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (APS) realisasi kinerja 88,24% dengan predikat kinerja baik **2)** Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) realisasi kinerja 117,38% dengan predikat kinerja sangat baik **3)** Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) realisasi kinerja 106,02% dengan predikat kinerja sangat baik **4)** Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) realisasi kinerja 130% dengan predikat kinerja sangat baik **5)** Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca) realisasi kinerja 97,56% dengan predikat kinerja baik **6)** Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen

tingkat nasional (Numerasi) realisasi kinerja 176,06% dengan predikat kinerja sangat baik **7)** Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi realisasi kinerja 106,08 dengan predikat kinerja ssangat baik dan **8)** Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%) dengan kinerja 84.84% dengan predikat kinerja baik..

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 tercatat 84.57 atau setara dengan 105,11%, selanjutnya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan Pupvinsi Kepulauan Riau mencapai 86.80 atau setara dengan 100.95% dari target 2025.

Beberapa Langkah strategis yang akan dilakukan pada masa mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja sbb :

1. Pemerataan fasilitas dan sarana pendidikan antar wilayah dan antar satuan Pendidikan.
2. Pemenuhuan dan pemerataan kualitas pendidik serta distribusi pendidik dan tenaga kependidikan antar wilayah dan antar satuan pendidikan.Peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi guru produktif antar
3. wilayah dan antar satuan pendidikan.
4. Penyelarasan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
5. Peningkatan dan pemerataan pembelajaran berbasis media plafon digital dengan Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.
6. Memperkuat dan memperluas kemitraan Kerjasama dan pendanaan dari Dunia Usaha untuk memberi ruang yang lebih fleksibel bagi peserta didik SMK untuk magang pada dunia usaha.
7. Meningkatkan program pembelajaran berbasis industri (teaching factory) untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan, menyelaraskan kompetensi, dan membentuk karakter kerja yang sesuai dengan kebutuhan DUDI.

8. Pengembangan dan penguatan program Link and Match dengan dunia usaha dengan mendatangkan tenaga kualifikasi dari dunia industry sebagai transfer ilmu dan pengalaman bagi peserta didik SMK.
9. Reward dan punishment bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kinerja baik.

Realisasi Rencana Aksi Tahun 2025
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.031.118.270.120,30	1.015.880.356.358,38	98,52			
Dinas Pendidikan							1.029.314.069.493,50	1.014.424.792.559,52	98,55			
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							663.646.811.326,71	667.003.508.042,63	100,51			
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	80,46	84,57	105,11	ST						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	86,8	100,93	ST						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100,00	ST						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							443.715.770,00	381.167.874,00	85,90			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100,00	ST	338.684.000,00	321.589.829,00	94,95			
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	27.116.770,00	5.921.245,00	21,84	Efisiensi belanja		
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	1	100,00	ST	72.915.000,00	53.656.800,00	73,59	Efisiensi belanja		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD											
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	5.000.000,00	0	0,00	Efisiensi belanja		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							639.352.586.087,78	630.364.320.206,00	98,59			
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	4206	4206	100,00	ST	635.400.465.377,78	626.966.334.306,00	98,67			
6. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00	ST	3.849.566.710,00	3.322.446.000,00	86,31			
7. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	89.054.000,00	75.539.900,00	84,82			
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	13.500.000,00		0,00	Efisiensi belanja		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							50.764.000,00	42.417.711,00	83,56			
9. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	25.315.000,00	18.277.433,00	72,20	Efisiensi belanja		
10. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	25.449.000,00	24.140.278,00	94,86			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							762.430.399,91	679.685.538,00	89,15			
11. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00	ST	465.670.699,91	420.511.538,00	90,30			
12. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	25	100,00	ST	296.759.700,00	259.174.000,00	87,33			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							2.195.623.723,72	1.658.738.837,00	75,55			
13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	50.475.600,00	50.090.600,00	99,24			
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100,00	ST	232.248.550,72	145.907.840,00	62,82	Tunda Bayar		
15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	29.999.000,00	29.386.473,00	97,96			
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	279.366.900,00	252.982.633,00	90,56			
17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	45.886.500,00	42.520.232,00	92,66			
18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100,00	ST	60.520.000,00	41.916.000,00	69,26			
19. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	100,00	ST	92.499.400,00	78.850.390,00	85,24			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100,00	ST	1.323.222.673,00	952.351.009,00	71,97	Efisiensi belanja		
21. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4	100,00	ST	81.405.100,00	64.733.660,00	79,52			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.636.377.896,00	1.140.441.156,00	69,69			
22. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	124.887.867,00	85.692.000,00	68,62	Tunda Bayar		
23. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	100,00	ST	1.006.821.779,00	597.867.230,00	59,38	Tunda Bayar		
24. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	SR	33.000.000,00	0,00	0,00	Efisiensi belanja		
25. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	100,00	ST	471.668.250,00	456.881.926,00	96,87	Tunda Bayar		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							9.332.313.943,30	8.734.738.215,00	93,60			
26. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	5.000.000,00	2.000.000,00	40,00			
27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	2.021.499.300,00	1.553.369.345,00	76,84	Tunda Bayar		
28. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	245.617.000,00	217.336.180,00	88,49	Tunda Bayar		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
29. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	7.060.197.643,30	6.962.032.690,00	98,61			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.600.123.400,00	2.216.071.611,00	85,23			
30. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	100,00	ST	735.910.530,00	598.480.816,00	81,33	Tunda Bayar		
31. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	538.250.000,00	535.251.957,00	99,44			
32. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	1.325.962.870,00	1.082.338.838,00	81,63	Tunda Bayar		
Peningkatan Pelayanan BLUD							7.272.876.106,00	21.727.588.094,63	298,75			
33. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	5	5	100,00	ST	7.272.876.106,00	21.727.588.094,63	298,75			
BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN (BTIKP)							1.486.232.818,80	1.300.289.250,86	87,49			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							1.302.192.718,80	1.145.607.990,86	87,98			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
DAERAH PROVINSI												
Administrasi Umum Perangkat Daerah							396.097.828,80	317.956.614,00	80,27			
34.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	5.000.000,00	4.271.058,00	85,42			
35.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	188.968.300,00	141.267.493,00	74,76	Efisiensi belanja		
36.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	10.000.000,00	6.062.043,00	60,62	Efisiensi belanja		
37.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100,00	ST	112.062.100,00	101.985.110,00	91,01			
38.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	19.193.000,00	19.052.373,00	99,27			
39.Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	5.416.500,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
40.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	55.457.928,80	45.318.537,00	81,72			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							842.075.040,00	763.631.527,00	90,68			
41.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	1.456.000,00	1.400.000,00	96,15			
42.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	1	1	100,00	ST	117.120.000,00	82.404.179,00	70,36	Efisiensi belanja		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Daya Air dan Listrik yang Disediakan											
43. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	50.000.000,00	44.977.200,00	89,95			
44. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	673.499.040,00	634.850.148,00	94,26			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							64.019.850,00	64.019.849,86	100,00			
45. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	64.019.850,00	64.019.849,86	100,00			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							184.040.100,00	154.681.260,00	84,05			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							184.040.100,00	154.681.260,00	84,05			
46. Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah di kembangkan	Konten	1	1	100,00	ST	58.608.100,00	44.719.310,00	76,30			
47. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	90	90	100,00	ST	125.432.000,00	109.961.950,00	87,67			
CABANG DINAS BATAM												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							70.658.108,00	63.868.551,00	90,39			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
DAERAH PROVINSI												
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							4.500.000,00	4.500.000,00	100,00			
48. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00	ST	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							42.300.608,00	41.169.960,00	97,33			
49. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	1.501.200,00	1.439.400,00	95,88			
50. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	ST	3.008.100,00	2.965.000,00	98,57			
51. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	11.815.608,00	11.625.200,00	98,39			
52. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	7.206.900,00	6.802.900,00	94,39			
53. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	4.658.800,00	4.576.460,00	98,23			
54. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	14.110.000,00	13.761.000,00	97,53			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							23.857.500,00	18.198.591,00	76,28			
55. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	18.607.500,00	12.958.591,00	69,64			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
56. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	5.250.000,00	5.240.000,00	99,81			
CABANG DINAS KARIMUN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							66.177.200,00	27.599.000,00	41,70			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							6.610.400,00	264.000,00	3,99			
57. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00	ST	6.610.400,00	264.000,00	3,99	Efisiensi belanja		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							45.976.800,00	19.576.000,00	42,58			
58. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	588.900,00	576.000,00	97,81			
59. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	501.100,00	463.000,00	92,40			
60. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	4	66,67	S	15.994.795,00	6.654.800,00	41,61	Efisiensi belanja		
61. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	SR	1.497.805,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
62. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	2.108.000,00	-	0,00	Efisiensi belanja		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
63. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	25.286.200,00	11.882.200,00	46,99	Efisiensi belanja		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							13.590.000,00	7.759.000,00	57,09			
64. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	11.400.000,00	7.759.000,00	68,06	Efisiensi belanja		
65. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	SR	2.190.000,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
CABANG DINAS LINGGA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							61.460.000,00	32.131.000,00	52,28			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							9.120.000,00	5.310.000,00	58,22			
66. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00	ST	9.120.000,00	5.310.000,00	58,22	Efisiensi belanja		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							37.160.000,00	26.521.400,00	71,37			
67. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	SR	949.200,00	-	0,00	Efisiensi belanja		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
68. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	0	0	SR	1.916.000,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
69. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	0	0	SR	2.673.100,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
70. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0	SR	1.779.300,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
71. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	2.822.400,00	2.288.000,00	81,07			
72. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	27.020.000,00	24.233.400,00	89,69			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							15.180.000,00	299.600,00	1,97			
73. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	12.990.000,00	299.600,00	2,31	Efisiensi belanja		
74. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	SR	2.190.000,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							61.798.500,00	21.797.597,00	35,27			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							14.400.000,00	8.720.000,00	60,56			
75. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00	ST	14.400.000,00	8.720.000,00	60,56	Efisiensi belanja		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							32.922.700,00	10.467.500,00	31,79			
76. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	SR	1.045.000,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
77. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	0	0	SR	1.295.800,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
78. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	0	SR	3.008.600,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
79. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0	SR	2.438.100,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
80. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	SR	2.314.200,00		0,00	Efisiensi belanja		
81. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	22.821.000,00	10.467.500,00	45,87	Efisiensi belanja		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							14.475.800,00	2.610.097,00	18,03			
82. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	12.285.800,00	2.610.097,00	21,24	Efisiensi belanja		
83. Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	1	0	0	SR	2.190.000,00	-	0,00	Efisiensi belanja		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan											
CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							57.874.000,00	9.878.400,00	17,07			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							15.000.000,00	0,00	0,00			
84. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0	0	SR	15.000.000,00	-	0,00	Efisiensi Anggaran		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							34.444.000,00	9.878.400,00	28,68			
85. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	SR	673.800,00	-	0,00	Efisiensi Anggaran		
86. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	0	0	SR	1.218.300,00	-	0,00	Efisiensi Anggaran		
87. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	0	SR	2.837.300,00	-	0,00	Efisiensi Anggaran		
88. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0	SR	2.252.200,00	-	0,00	Efisiensi Anggaran		
89. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	SR	686.400,00	-	0,00	Efisiensi Anggaran		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
90. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	26.776.000,00	9.878.400,00	36,89	Efisiensi Anggaran		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							8.430.000,00	0,00	0,00			
91. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	0	0	SR	6.240.000,00	-	0,00	Pengajuan TU tidak keluar		
92. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	SR	2.190.000,00	-	0,00	Efisiensi Anggaran		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							365.322.687.666,79	347.171.060.242,89	95,03			
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	100	91,61	91,61	ST						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	100	126,28	126,28	ST						
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	%	88,44	76,12	86,07	T						
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB	%	0,013	0,035	69,23	S						
	Rasio peserta didik per kelas (Rasio)	%	36	31	113,89	ST						
	Persentase Konten Pendidikan	%	20	20	100,00	ST						
	Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa	Nilai	65,23	63,6	97,50	ST						
	Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa	Nilai	60,84	56,38	92,67	ST						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							197.192.262.277,51	188.876.996.872,48	95,78			
93. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	1	100,00	ST	3.100.000.000,00	2.662.002.340,00	85,87	Tunda Bayar		
94. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	10	15	150,00	ST	3.285.673.380,00	2.633.469.700,00	80,15	Tunda Bayar		
95. Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	10	9	90,00	T	1.503.048.000,00	1.224.740.000,00	81,48	Tunda Bayar		
96. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Unit	1	1	100,00	ST	116.112.001,00	5.850.000,00	5,04	Tunda Bayar		
97. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	17190	16514	96,07	ST	5.935.494.986,20	5.021.283.883,00	84,60	Stel (berdasarkan usulan dari sekolah) adendum kontrak		
98. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Unit	4	4	100,00	ST	445.976.000,00	439.530.000,00	98,55			
99. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Orang	2231	3826	171,49	ST	7.007.451.100,00	6.812.574.085,00	97,22			
100. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Orang	84	84	100,00	ST	189.130.000,01	143.366.900,00	75,80	Tunda Bayar		
101. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	1298	1298	100,00	ST	50.078.859.872,30	49.652.091.437,48	99,15			
102. Pengembangan Karir Pendidik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Orang	100	100	100,00	ST	382.771.000,00	367.602.791,00	96,04			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi											
103. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	93	93	100,00	ST	199.424.300,00	126.612.400,00	63,49	Tunda Bayar		
104. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Unit	93	93	100,00	ST	115.202.195.150,00	112.116.262.654,00	97,32			
105. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	100,00	ST	81.836.000,00	8.062.000,00	9,85	Efisiensi Belanja		
106. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	kegiatan	1	1	100,00	ST	123.892.000,00	121.046.333,00	97,70			
107. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Sarana	1	2	200,00	ST	300.000.000,00	120.915.960,00	40,31	Tunda Bayar		
108. Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Unit	20	21	105,00	ST	8.954.742.588,00	7.152.482.449,00	79,87	Tunda Bayar		
109. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	Unit	93	93	100,00	ST	285.655.900,00	269.103.940,00	94,21			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							147.715.209.122,28	139.880.776.957,51	94,70			
110. Pembangunan Ruang	Jumlah Ruang Guru/Kepala	Unit	2	2	100,00	ST	335.585.000,00	116.036.126,60	34,58	Tunda Bayar		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Guru/Kepala Sekolah/TU	Sekolah/TU yang Telah Dibangun											
111. Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Unit	2	2	100,00	ST	751.648.867,00	741.590.869,77	98,66			
112. Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Unit	3	3	100,00	ST	549.214.106,25	540.493.504,98	98,41			
113. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	1	100,00	ST	23.163.426,00	22.696.354,54	97,98			
114. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		9	9	100,00	ST	3.935.399.009,00	3.340.656.470,31	84,89	Tunda Bayar		
115. Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	195.585.000,00	191.865.417,72	98,10			
116. Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	1	1	100,00	ST	883.585.000,00	607.719.980,00	68,78	Tunda Bayar		
117. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Unit	12500	13122	104,98	ST	4.915.787.000,00	4.601.402.659,00	93,60			
118. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	12	12	100,00	ST	12.303.466.000,00	10.779.788.286,00	87,62	Tunda Bayar		
119. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Orang	380	380	100,00	ST	2.555.015.500,00	2.228.175.500,00	87,21			
120. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Orang	100	100	100,00	ST	155.175.970,00	114.930.600,00	74,06			
121. Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada	Orang	833	833	100,00	ST	31.764.237.052,03	31.508.094.258,00	99,19			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan											
122. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	25	25	100,00	ST	401.195.000,00	378.712.028,00	94,40			
123. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	37	37	100,00	ST	37.740.600,00	36.993.398,00	98,02			
124. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Unit	36	36	100,00	ST	80.601.468.910,00	80.091.960.644,84	99,37			
125. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	100,00	ST	56.290.000,00	9.265.000,00	16,46	Efisiensi Belanja		
126. Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Unit	8	13	162,50	ST	8.080.020.682,00	4.411.854.659,75	54,60	Tunda Bayar		
127. Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Unit	36	36	100,00	ST	170.632.000,00	158.541.200,00	92,91			
Pengelolaan Pendidikan Khusus							20.415.216.267,00	18.413.286.412,90	90,19			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
128. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	1	100,00	ST	1.400.000.000,00	1.193.765.493,00	85,27	Tunda Bayar		
129. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	6	6	100,00	ST	799.688.340,00	582.451.715,90	72,83	Tunda Bayar		
130. Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	1	1	100,00	ST	200.000.000,00	-	0,00	Tunda Bayar		
131. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Unit	1	0	0	SR	40.196.671,00	-	0,00	Tidak sesuai jutnis SILPA DAK 2024		
132. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	298	298	100,00	ST	1.043.485.000,00	934.966.754,00	89,60			
133. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Orang	50	50	100,00	ST	474.557.320,00	338.993.353,00	71,43			
134. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang	137	137	100,00	ST	4.639.444.223,00	4.513.273.732,00	97,28			
135. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	136	136	100,00	ST	104.704.000,00	99.615.989,00	95,14			
136. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	10	10	100,00	ST	291.651.750,00	94.581.191,00	32,43			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
137. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Unit	10	10	100,00	ST	10.344.744.423,00	10.329.652.162,00	99,85			
138. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	100,00	ST	16.376.000,00	2.402.000,00	14,67			
139. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	1	100,00	ST	68.519.000,00	59.811.228,00	87,29			
140. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	6	6	100,00	ST	950.000.000,00	228.953.909,00	24,10	Tunda Bayar		
141. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Unit	10	10	100,00	ST	41.849.540,00	34.818.886,00	83,20			
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							114.475.500,00	70.519.443,00	61,60			
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	6,94	6,94	100,00	ST	114.475.500,00	70.519.443,00	61,60			
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah							52.734.500,00	11.250.000,00	21,33			
142. Pelatihan Penyusunan	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan	Orang	100	100	100,00	ST	52.734.500,00	11.250.000,00	21,33			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya											
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus							61.741.000,00	59.269.443,00	96,00			
143. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	50	50	100,00	ST	61.741.000,00	59.269.443,00	96,00			
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN												
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah (Rasio)	Rasio	627,99	603,49	96,10	ST	187.656.000,00	153.676.514,00	81,89			
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi							187.656.000,00	153.676.514,00	81,89			
144. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	4	4	100,00	ST	91.218.000,00	89.034.905,00	97,61			
145. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga	Laporan	4	4	100,00	ST	96.438.000,00	64.641.609,00	67,03	Tunda Bayar		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus											
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							42.439.000,00	26.028.317,00	61,33			
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%	100	100	100,00	ST	42.439.000,00	26.028.317,00	61,33			
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							27.055.000,00	14.970.000,00	55,33			
146. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	2	100,00	ST	27.055.000,00	14.970.000,00	55,33			
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							15.384.000,00	11.058.317,00	71,88			
147. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	1	100,00	ST	15.384.000,00	11.058.317,00	71,88			